

✓

SEJARAH PERLAWANAN **terhadap IMPERIALISME dan KOLONIALISME** **di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Direktorat
Kebudayaan

7

S

791

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1990

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PERLAWANAN terhadap IMPERIALISME dan KOLONIALISME di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

1990

100-443887-100

Nomor induk : 12/91
Tanggal terima : 15-7-91
Tanggal catat : 15-7-91
Beli/hadiah dari : Hadiah
Nomor buku : 959.8240224
Kopi ke : C,

Tim Penulis :
Suratmin
Suhartono
Suharyanto
Suhatno

Penyunting:
Drs. R.Z. Leirissa, M.A.
Koreksi Naskah:
Soejanto

Cetakan Pertama : Tahun 1982
Cetakan Kedua : Tahun 1990
Penerbit : Proyek IDSNI
Pencetak : CV. Tumaritis

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada di Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan, terbitnya buku-buku ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juli 1982

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tingkat 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan

memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juli 1982

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional**

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku ini merupakan hasil cetak ulang dari hasil cetakan pertama yang diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tahun 1982. Dalam cetakan ini telah diadakan perbaikan sistematika dan redaksional.

Buku Tentang Sejarah Perlawanan banyak diminati oleh masyarakat luas khususnya generasi muda. Atas dasar itu maka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional menganggap perlu menerbitkan kembali buku ini dalam rangka penyebaran informasi kesejahteraan pada masyarakat luas dengan tujuan memupuk kebanggaan nasional dan rasa cinta tanah air.

Sekalipun buku ini telah mengalami perbaikan, namun kami tidak menutup kemungkinan saran perbaikan dan penyempurnaan.

Jakarta, Nopember 1990
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN . . .	iii
PENGANTAR (Cetakan Pertama)	v
PENGANTAR (Cetakan Kedua)	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I Yogyakarta Selayang Pandang	 3
1.1 Letak Geografi dan Keadaan Alam	3
1.2 Sejarah Singkat	7
1.2.1 Zaman Pra Sejarah	7
1.2.2 Zaman Kuno	7
1.2.3 Zaman Kedatangan Islam	8
1.2.4 Zaman Kedatangan Bangsa Barat	8
1.2.5 Zaman Jepang	9
1.2.6 Masa Revolusi	9
 Bab II Sultan Agung Menyerang Batavia Tahun 1628	
dan Tahun 1629	11
2.1 Latar Belakang	11
2.2 Masyarakat Agraris dan Birokrasi Mataram	16
2.2.1 Sistem Sosial	16
2.2.2 Sistem Ekonomi	19
2.2.3 Sistem Politik	22
2.3 Jalannya Penyerangan	24
2.3.1 Persiapan	24

2.3.2	Penyerangan	34
2.3.2.1	Serangan Pertama	34
2.3.2.2	Serangan Kedua	40
2.4	Akibat-akibat Penyerangan	41
Bab III	Hamengkubuwono II melawan Belanda dan Inggris	47
3.1	Latar Belakang	47
3.2	Situasi Sosial Politik	49
3.2.1	Palihaan Nagari	49
3.2.2	Sistem Pemerintahan	54
3.3	Konsolidasi Politik	57
3.4	Melawan Kompeni Belanda dan Inggris ...	64
3.4.1	Konflik dengan Daendels	65
3.4.2	Melawan Kekuasaan Inggris	70
3.4.2.1	Persiapan Perang	72
3.4.2.2	Perang Spehi	74
3.4.2.3	Akibat Perang	77
3.5.	Akibat-akibat Perlawanan	81
Bab IV	Perang Diponegoro	86
4.1	Latar Belakang	86
4.2	Jalannya Perang	93
4.3	Akhir Perjuangan Diponegoro	107
Bab V	Pemogokan Buruh	118
5.1	Latar Belakang	118
5.2	Jalannya Pemogokan	126
5.2.1	Pemogokan Buruh Tani 1882	126
5.2.1.1	Gelombang Pertama	127
5.2.1.2	Gelombang Kedua	129
5.2.1.3	Gelombang Ketiga	131
5.2.1.4	Sebab-sebab Pemogokan	132
5.2.1.5	Reaksi terhadap Pemogokan	134
5.2.1.5.1	Reaksi Pemerintah	134
5.2.1.5.2	Reaksi Pemilik Pabrik/Perkebunan	136
5.2.1.5.3	Reaksi Pers	137
5.2.1.5.4	Akibat Pemogokan	139
5.2.2	Pemogokan Buruh Setelah 1900	141

Bab VI	Perjuangan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Kemerdekaan Republik Indonesia	153
6.1	Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah	153
6.1.1	Pendidikan Bersistem Pondok Pesantren	158
6.1.2	Pendidikan Bersistem Sekolah	158
6.2	MaKsud dan Tujuan Muhammadiyah	166
6.3	Pengabdian Muhammadiyah	172
6.3.1	Bidang Pendidikan dan Pengajaran	175
6.3.2	Bidang Sosial	177
6.3.3	Bidang Keagamaan	179
6.3.4	Bidang Kewanitaan	183
6.3.5	Bidang Kepemudaan	185
6.3.6	Bidang Politik	187
Bab VII	Perjuangan Taman Siswa pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang	199
7.1	Latar Belakang Berdirinya Taman Siswa	199
7.2	Perkembangan Taman Siswa	214
7.3	Pengabdian Taman Siswa bagi Masyarakat	226
Bab VIII	Pertempuran Kotabaru Melawan Fasis Jepang	240
8.1	Latar Belakang	240
8.2	Jalannya Pertempuran	248
8.3	Akhir Pertempuran	259
Bab IX	Penutup	266
9.1	Kesimpulan	266
9.2	Saran-saran	270
DAFTAR PUSTAKA		272
DAFTAR INFORMAN		278
LAMPIRAN		279

PENDAHULUAN

Dewasa ini negara dan bangsa Indonesia tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan yang kita tangani ini bukan hanya sekedar mencapai kemakmuran dalam segi materi saja, melainkan juga guna mewujudkan kemakmuran spiritual; atau dengan kata lain pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut semua aspek mendapat perhatian dalam pembangunan ini.

Apa yang ingin kita capai dewasa ini pada hakekatnya merupakan perwujudan dari cita-cita para pahlawan dan pejuang yang telah mendahului kita. Mereka bekerja keras, berjuang dan berkorban tanpa pamrih, kecuali demi kemerdekaan dan kesejahteraan hari depan bangsa dan negaranya.

Di dalam melaksanakan kiprahnya pembangunan ini kita perlu memiliki kemauan dan semangat serta jiwa berkorban sebagaimana yang dimiliki oleh para pahlawan kita itu. Untuk itu maka penulisan menginventarisasi dan mendokumentasikan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme ini mempunyai arti penting. Dengan mengungkap dan kemudian menghayati perjuangan mereka diharapkan kita dapat mengamalkannya di dalam pembangunan ini.

Mutiara-mutiara kepahlawanan ini tersebar di seluruh pelosok tanah air kita; namun pada penulisan ini akan membatasi diri dalam lingkup yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah diadakan penelitian ternyata di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi yang penting sebagai sumber sejarah. Hal ini dibuktikan dengan tampilnya Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Ahmad. Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, RM Suryopranoto dan lain-lain sebagai pahlawan-pahlawan bangsa kita yang gigih berjuang, pantang menyerah dalam menghadapi segala bentuk penjajahan dari imperialisme dan kolonialisme; bahkan dalam mengusir Fasis Jepang dan saat-saat revolusi mempertahankan kemerdekaan Yogyakarta merupakan daerah yang berarti. Secara luas bagaimana pentingnya daerah ini dapat diikuti dalam uraian pada bab-bab berikut, yang secara garis besar pengisi materi penulisan ini antara lain: latar belakang, jalan atau bentuk perlawanan dan akibat dari perlawanan tersebut.

Dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka cara mengumpulkan data dan prosedur penelitian dilakukan sebagai berikut.

Pada tahap pertama diadakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi dari sumber yang ada berupa buku, dokumen, laporan dan lain-lain yang ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah studi kepustakaan dan perluasan seperlunya, maka diadakan pengumpulan data melalui wawancara kepada orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung mengetahui permasalahan yang diperlukan.

Setelah data terkumpul, diadakan klasifikasi, dianalisis dan dikaitkan antara data yang relevan satu dengan lainnya, kemudian sampailah pada tahap penulisan.

BAB I YOGYAKARTA SELAYANG PANDANG

1.1 Letak Geografi dan Keadaan Alam

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada kurang lebih 114 meter di atas permukaan air laut. Daerahnya yang kurang lebih berbentuk segitiga itu terletak antara 110° BT – $110^{\circ}51'$ BT dan $7^{\circ}32'$ LS – $8^{\circ}12'$ LS¹⁾

Secara administratif Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai status sebagai Daerah Tingkat I, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batasnya: sebelah utara Keresidenan Semarang, sebelah timur Keresidenan Surakarta, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat Karesidenan Kedu.

Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas 1 kotamadya dan 4 kabupaten, yaitu: (1) Kotamadya Yogyakarta seluas $32,5 \text{ km}^2$ terdiri atas 14 kecamatan, 163 rukun kampung (2) Kabupaten Sleman $574,82 \text{ km}^2$ terdiri atas 17 kecamatan 86 kelurahan (3) Kabupaten Bantul $506,85 \text{ km}^2$, terdiri atas 17 kecamatan, 75 kelurahan (4) Kabupaten Kulon Progo $586,28 \text{ km}^2$, terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan dan (5) Kabupaten Gunung Kidul $1.485,36 \text{ km}^2$, terdiri atas 13 kecamatan, 144 kelurahan.

Berdasarkan topografinya, Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 3 zone, yaitu : zone timur, zone tengah, zone barat.

Zone timur pada umumnya berupa daerah pegunungan kapur selatan, di mana air sangat sulit diperoleh, sebab terdapat di bawah tanah. Daerah-daerah yang termasuk zone timur itu adalah daerah-daerah yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, sebagian daerah Kabupaten Sleman sebelah timur yaitu sekitar Pegunungan Bongkeh (Prambanan) dan sebagian daerah Bantul yaitu daerah sekitar Piyungan.

Zone tengah meliputi daerah-daerah di Kabupaten Sleman. Kotamadya Yogyakarta dan sebagian daerah Bantul. Daerah-daerah ini pada umumnya merupakan daerah pertanian sawah yang subur. Kesuburan daerah ini disebabkan adanya pengaruh abu vulkanis dari Gunung Merapi. Di samping itu karena daerah zone tengah ini dikelilingi oleh pegunungan, maka merupakan tanah ledok atau "kom" yang amat baik sekali untuk penyimpanan dan penampungan air yang berasal dari sungai-sungai maupun hujan.

Zone barat pada hakekatnya sama dengan daerah zone timur, dan terdiri atas pegunungan kapur, yaitu patahan dari Pegunungan Menoreh. Dengan demikian air yang ada, juga terdapat di bawah tanah, sehingga penduduknya melakukan cocok tanam di ladang. Termasuk zone barat ini adalah wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Apabila dilihat dari geologinya, maka Daerah Istimewa Yogyakarta ini terletak pada daerah geologi Jawa Tengah yaitu daerah gunung berapi Merapi. Dataran rendah di selatannya dan daerah Kulon Progo. Adapun daerah pegunungan selatan termasuk daerah geologi Jawa Timur.

Menurut unit makronya morfologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dibagi atas; (1) Daerah unit Gunung Mera-

pi. (2) Daerah dataran endapan (*alluvial plain*) Yogyakarta Bantul dan sekitarnya. (3). Daerah plateau selatan. (4) Daerah pegunungan kompleks Kulon Progo dan pegunungan kapur Sentolo dan (5) Daerah *alluvial* pantai selatan.

(1) Daerah Unit Morfologi Gunung Merapi

Gunung berapi Merapi merupakan gunung yang masih aktif. Gunung berapi ini pada periode tertentu masih menunjukkan aktivitas erupsinya. Pada saat erupsi keluarlah lava liat pijar, disertai hembusan bahan padat, piroklastika seperti bom, lapili, kerikil, abu vulkanis dan lain-lain. Daerah ini juga merupakan daerah hijau yang kaya mata air, dan karena abu vulkanis dari Gunung Merapi tanahnya subur.

(2) Daerah Dataran Endapan (*alluvial plain*)

Daerah endapan ini sebagian terbesar berupa *fluvulcanic foot plain* dan *fluvio vulcanic plain* dari Gunung Merapi dan merupakan kantong air yang baik. Dataran ini membentang dari ketinggian lebih kurang 20 meter di atas permukaan laut sampai di daerah Bantul menjelang pantai selatan. Yang lebih penting lagi sebagai kantong air adalah dataran-dataran banjir dari sungai-sungai yang besar seperti Sungai Opak dan Sungai Progo. Dataran banjir ini di waktu musim kemarau sering dijadikan persawahan karena mudah memperoleh pengairan dari sungai yang membentuknya. Pada musim penghujan biasanya dataran ini tergenang.

Dataran *fluvio vulcanic* di daerah Bantul meluas ke selatan menjadi dataran *alluvial* pantai, berkisar dari 10 sampai 25 km.

(3) Daerah Pegunungan Plateau Selatan

Pegunungan ini meluas dari selatan Prambanan sampai ke pantai selatan sebelah timur Parangtritis. Plateau ini berupa pegunungan kapur, tanahnya kering dan tandus, miskin mata

air. Wilayah ini membentang di bagian timur, dari utara ke selatan membentuk "Pegunungan Seribu" berakhir di selatan berupa pantai curam. Akibat dari tanah kapur dan pengaruh angin laut dan pasat tenggara yang kering, menyebabkan daerah Rongkop, Tepus dan sekitarnya menjadi daerah-daerah yang serupa dengan daerah beriklim kering.

(4) Pegunungan Kompleks Kulon Progo dan Pegunungan Kapur Sentolo

Pegunungan ini merupakan pegunungan-pegunungan kompleks. Pegunungan kompleks ini adalah kelanjutan dari jalur Pegunungan Serayu Selatan. Barisan pegunungan ini bagian barat merupakan puncak-puncak yang relatif tinggi, berhawa dingin, cocok untuk tanaman panili, cengkih, kapulogo, dan kopi. Daerah ini banyak mata air. Bagian timur lereng pegunungan tepatnya di sebelah barat Sungai Progo merupakan tanah kering yang makin, ke selatan berupa kapur, namun saat ini telah mendapat pengairan dari selokan Sungai Progo yang berhulu di Sungai Bawang.

(5) Dataran Alluvial Pantai Selatan

Dengan terjadinya beberapa kali gerakan tektonik maka terdapat pengangkatan yang berbentuk Pegunungan Kulon Progo, sedangkan di sebelah kanan dan kirinya tetap tenggelam berupa tanah ngarai.

Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 1976, jumlah penduduk di lima daerah tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 2.642.158 jiwa, terdiri atas 1.290.784 orang laki-laki dan 1.351.374 orang perempuan.²⁾

Kotamadya Yogyakarta yang wilayahnya lebih sempit dibanding dengan kabupaten lainnya, angka kepadatan penduduknya paling tinggi, baru kemudian Bantul, Kulon Progo dan yang paling kecil Kabupaten Gunung Kidul.

1.2 *Sejarah Singkat*

1.2.1 *Zaman Pra Sejarah*

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dijumpai peninggalan-peninggalan sejarah yang diperkirakan lebih-kurang 2.000 tahun sebelum Masehi; jadi kira-kira pada permulaan *neoliticum*³⁾. Peninggalan-peninggalan itu ditemukan di Gunung Wingko, Pantai Samas di pantai selatan Yogyakarta, berupa pecahan benda tembikar dan sisa kerangka manusia. Pecahan tembikar ini berhiaskan goresan-goresan benda tajam berupa garis-garis dan gambar anyaman kasar dan halus atau berupa tenunan, sedangkan kerangka manusia diperkirakan kerangka manusia Asutroneisia sebagai pendukung budaya neolitikum. Orang-orang ini telah hidup menetap, telah mengenal cocok tanam, beternak, mencari ikan dan juga telah bermasyarakat.

Dengan datangnya pengaruh budaya Dongson, Indonesia mengenal zaman perunggu. Peninggalan ini terdapat pula di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa *candrasa*, yakni semacam kapak cerong yang mempunyai bentuk tertentu, khusus untuk keperluan upacara⁴⁾

Kubur batu yang berisi kerangka manusia dan benda-benda dari bahan besi di Gunung Kidul. Apabila di Kedu — Magelang, suatu daerah yang berdekatan dengan Yogyakarta, terdapat peninggalan tulisan tertua pada piagam Canggal berangka tahun 732 M, maka di Daerah Yogyakarta juga terdapat Piagam Kalasan yang berangka tahun 778 M. Piagam Canggal didirikan oleh Sanjayawangsa, sedangkan Piagam Kalasan oleh Saelendrawangsa.

1.2.2 *Zaman Kuno*

Pada masa pemerintahan keluarga Sanjaya yang dimulai sejak tahun 732 M dan berakhir dengan pindahnya keturunan —keluarga Sanjaya dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Jawa

Timur, sehingga di daerah ini banyak terdapat peninggalannya, yaitu percandian Roro Jonggrang. Di sekitar candi inilah diperkirakan menjadi pusat pemerintahan keluarga raja-raja tersebut.

Saat pemerintahan keluarga Syailendra yang memeluk Agama Budha Mahayana ternyata di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat peninggalan bersejarah berupa Candi Kalasan, Sewu, Plaosan dan lain-lain. Dengan berpindahnya kerajaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Jawa Timur, maka orang kurang mengetahui tentang peninggalan yang ada, dan baru sejak berkembangnya Agama Islam, maka Yogyakarta pun memainkan peranannya dalam percaturan sejarah.

1.2.3 Zaman Kedatangan Islam

Setelah Agama Islam masuk ke Indonesia dan kemudian muncul Kerajaan Demak sebagai pengganti Kerajaan Majapahit yang bercorak Hinduistik itu, maka berkat kegiatan penyebaran Agama Islam oleh para wali, di Daerah Istimewa Yogyakarta pun merupakan basis pemerintahan Islam, yaitu Mataram.

1.2.4 Zaman Kedatangan Bangsa Barat

Kerajaan Mataram berdiri dan kemudian berkembang dengan pesatnya pada waktu Mataram diperintah oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahannya inilah Mataram menghadapi masuknya orang-orang Barat yang hendak menjajah Nusantara. Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 – 1830 pun meletus dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta juga menjadi pusat pemerintahan kesultanan dan Pakualaman yang masing-masing menjalankan roda pemerintahan sendiri-sendiri.

1.2.5 Zaman Jepang

Setelah Jepang masuk ke Indonesia, maka tak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sasaran Jepang. Berkat persatuan dan kesatuan pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat Yogyakarta, maka Jepang pun bertekuk lutut dan dapat diusir. Pertempuran di Kotabaru – Yogyakarta menjadi klimaks perlawanan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi Jepang.

1.2.6 Masa Revolusi

Dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, Yogyakarta merupakan suatu daerah penting dalam sejarah. Dari daerah ini pula penjajah Belanda diusir dari bumi Indonesia untuk selama-lamanya.

Dengan mengikuti sekilas uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta dari masa ke masa mempunyai arti penting dalam sejarah perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme.

CATATAN

- 1) B. Sularso, *Monografi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal. 17.
- 2) Biro Pengembangan Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama Pelita II (1974/1975 s/d 1978/1979)*, Yogyakarta, 1979, hal. 2.
- 3) B. Sularto, Op. cit., hal. 9.
- 4) Ibid.

BAB II SULTAN AGUNG MENYERANG BATAVIA TAHUN 1928 DAN TAHUN 1929

2.1 Latar Belakang

Sejak berdirinya Kerajaan Pajang yang kemudian disusul oleh Mataram, pusat kerajaan terletak makin jauh di pedalaman Jawa Tengah. Kerajaan Mataram mula-mula berpusat di Kota Gede, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Agung dipindahkan ke Kerta. Pusat kerajaan ini berada di sebelah timur Sungai Gajahwong dan di sebelah utara pertemuan Sungai Gajahwong dan Sungai Opak. Daerah dua aliran sungai ini adalah daerah pertanian yang subur dan banyak menghasilkan beras. Di sekelilingnya masih banyak tumbuh hutan. Di sebelah timur Sungai Opak ke selatan terdapat rangkaian pegunungan sampai di Samudra Hindia.

Pendiri dinasti Mataram adalah Penembahan Senapati yang memerintah tahun 1575 – 1601, kemudian digantikan oleh putranya R.M. Jolang yang bergelar Panembahan Krapyak memerintah tahun 1601 – 1613. Pemerintahannya tidak lama dan digantikan oleh R.M. Rangsang yang setelah dinobatkan menjadi raja kemudian bergelar Sultan Agung. Pemerintahannya

berlangsung tahun 1613 – 1645, pemerintahan kerajaan mutlak digunakan untuk mempersatukan Jawa di bawah kekuasaannya.

Guna merealisasikan cita-citanya sebagai raja besar yang berdaulat atas Jawa, penguasa-penguasa pantai Jawa Timur ditaklukkannya, karena penguasa-penguasa ini dianggap merongrong hegemoni dan sebagai saingan Mataram. Penguasa-penguasa itu masih mempunyai kebebasan sosial politik, oleh karena itu terjadi pertentangan antara penguasa pedalaman dan pantai yang kemudian dimenangkan oleh pedalaman yang mempunyai basis kerajaan pertanian.

Dalam usaha mempersatukan Jawa di satu pihak dan menyerang Batavia di lain pihak, Sultan Agung melakukan diplomasi dengan cara membujuk Banten agar mau diajak bersama-sama menyerang Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Kompeni Belanda. Rupanya Banten tetap mempertahankan kebebasannya walaupun Batavia dianggap sebagai saingan yang telah merebut Jayakarta dari wilayah Banten.

Kerajaan-kerajaan di Jawa Barat lainnya seperti Sumedang, Ukur dan Cirebon tidak mengalami kesulitan untuk ikut membantu menyerang Batavia. Kerajaan-kerajaan ini cukup potensial dan memiliki perbekalan yang berguna bagi penyerangan terhadap Kompeni serta menjadi kekuatan pemukul di front selatan dan timur.

Armada laut yang diharapkan dapat menyerang dari lambung atau sisi adalah Banten, Palembang, Cirebon dan Sampang. Armada laut ini ternyata tidak mampu menghadapi pelaut Kompeni yang sudah lebih maju peralatannya dan persenjataannya. Seandainya armada Mataram belum dilumpuhkan sendiri oleh Sultan Agung, kemungkinan besar akan mampu menghadapi Kompeni, karena jumlahnya jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kekuatan yang digunakan pada waktu menyerang Batavia.

Hilangnya armada Mataram karena pindahnya pusat kerajaan ke pedalaman, berarti sudah tidak mementingkan perniagaan strategi kelautan lagi. Daerah pertanian di pedalaman banyak menghasilkan beras, tetapi perdagangan beras dilakukan dan menjadi monopoli kerajaan. Perdagangan beras oleh penguasa-penguasa pantai dilarang dan dikontrol keras. Singkatnya, pindahnya pusat Kerajaan Mataram berarti menyingkir dari jalur internasional pada waktu itu. Perdagangan mundur karena pusat kerajaan jauh dari tempat-tempat kegiatan ekonomi yang strategis. Mataram makin terisolasi karena pusat kerajaan sukar dicapai dengan komunikasi internasional.

Kebesaran Sultan Agung ditunjukkan oleh kekuasaan bukan saja dalam bidang politik dan pemerintahan tetapi juga bidang sosial dan kultural. Sistem pemerintah feodal menempatkan raja sebagai pemilik seluruh kerajaan dan isinya, oleh karena itu raja adalah pemegang kekuasaan mutlak. Kesetiaan terhadap raja dijalin dalam hubungan *kawula-gusti*, yang keduanya saling memperoleh keuntungan dari hubungan ini, terutama untuk memperkuat kedudukan sosial politiknya. Mitos raja-dewa sudah sangat populer di kalangan *kawula* Mataram.

Dalam hal keagamaan, Sultan Agung adalah seorang yang sangat taat menjalani ibadah agama. Dalam *Babad Tanah Jawi* disebutkan ketaatan dan kesaktiannya dalam beribadah. Babad itu menceritakan bahwa Sultan Agung setiap hari Jum'at bersembahyang di Mekah. Sebutan sebagai *penta-raja* ada padanya dan juga karena kesaktiannya itu ia mendapat sebutan Nyakra Kusuma.

Untuk memperkuat cita-citanya sebagai *chalifatullah*, Sultan Agung mengirimkan wakilnya ke Mekah agar mendapat pengakuan sebagai *chalifatullah*. Juga beberapa buku disalin untuk memperkuat kekuasaan dan keagamaannya seperti yang termuat dalam buku *Nitisruti*, *Nitisastra*, *Nitipraja*, *Surya*

Ngalam dan Sastra Gending. Buku terakhir ini banyak mengandung ajaran yang bersifat mistik.

Pada tahun 1633 Sultan Agung membuat perhitungan tarikh baru yaitu dengan menggabungkan tarikh Arab dan Jawa. Sebelum adanya perubahan tarikh itu, orang-orang menghitung waktu dengan perhitungan menurut tahun matahari seperti yang dilakukan oleh tarikh Hindu. Sultan Agung memperkenalkan tarikh Islam dengan berdasarkan perhitungan tahun bulan.

Gelar kebesaran Sultan Agung adalah Penembahan Senopati Ingalaga Abdul Rachman Mohamad Jiwil Kubra Saidin Panatagama. Gelar ini adalah gabungan dari kebesarannya yaitu sebagai keturunan pendiri dinasti Mataram yang gagah berani dan pimpinan perang dan abdi Tuhan yang setia yang tinggal di dunia serta sebagai pengatur dan pimpinan agama. Gelar kebesaran itu disingkat dengan sebutan Sultan Agung Anyakra Kusuma.

Setelah Sultan Agung menguasai Madura pada tahun 1624, ia mendapat gelar "susuhunan"; gelar ini juga merupakan gelar yang dipakai oleh para wali. Pada tahun 1641 Sultan Agung mengumumkan gelar baru dengan mencontoh Banten yang dikatakannya bahwa gelar *Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarahi* berasal dari Mekah.

Perpindahan kerajaan berarti turut berpindah pula pusaka-pusaka istana. Sultan Agung juga mewarisi pusaka-pusaka dari Kerajaan Pajang. Pusaka-pusaka itu antara lain Kiai Plered, sebuah tombak, Kiai Becak sebuah *bende*, dan sejumlah keris. Meriam pemberian Portugis dijadikan benda pusaka keramat dan diberi nama Nyai Setomi.

Seperti halnya seorang wali, Sultan Agung ingin dimakamkan di puncak sebuah bukit tidak jauh dari Istana Kerta yaitu Bukit Merak di Imogiri. Sultan Agung dimakamkan di tempat itu pada 1645 dan pemakaman itu pula hingga kini digunakan

sebagai tempat pemakaman raja-raja Yogyakarta dan Surakarta beserta keluarganya.

Pokok persoalan yang akan mendapat pembahasan dalam tulisan ini adalah mengapa Sultan Agung menjadi raja-besar. Sehubungan dengan kedudukan Kompeni Belanda di Batavia, apa sebab Mataram menyerang Batavia sampai dua kali. Apa sebab penyerangan yang sudah mengerahkan kekuatan darat dan laut ternyata mengalami kegagalan. Terakhir akibat-akibat yang timbul setelah Sultan Agung digantikan oleh para penggantinya.

Uraian selanjutnya akan mengetengahkan kebesaran Mataram dengan menampilkan gambaran masyarakat agraris dan strukturnya, dikaitkan dengan sistem ekonomi dan sistem politik sebagai pelengkap¹⁾. Pada bagian lain akan dijelaskan khusus mengenai penyerangannya ke Batavia yang diawali dengan persiapan diplomatik, militer dan perbekalannya. Selanjutnya sampai pada pelaksanaan penyerangan pertama dan kedua. Bagian terakhir akan disinggung akibat-akibat yang terjadi setelah Sultan Agung digantikan oleh raja-raja penggantinya.

2.2 *Masyarakat Agraris dan Birokrasi Mataram*

2.2.1 *Sistem Sosial*

Mataram mewarisi Kerajaan Pajang yang berpusat di pedalaman yang agraris. Kehidupan ekonomi kerajaan berdasarkan pada pertanian, oleh karena itu tanah menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup penguasa maupun petani.

Secara tradisional pemilik tanah seluruh kerajaan beserta isinya adalah raja. Untuk kelangsungan pemerintahan kerajaan, raja dibantu oleh seperangkat pegawai dan keluarga istana. Sebagai upahnya, mereka mendapat gaji berupa tanah *lungguh* atau *aparage*. Para pemegang *lungguh* disebut *patuh* yang berhak

atas tanah *gaduhan* atau pinjaman sementara yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh raja.

Raja maupun *patuh* tidak mengerjakan tanah *narawita* maupun tanah *lungguh*, tetapi pengolahannya diserahkan kepada orang-orang kepercayaan yang tinggal di desa yang disebut *bekel* atau kepala desa. Di atas *bekel* masih terdapat banyak kepala-kepala rendahan, dari pangkat di bawah bupati, wedana, kliwon, panewu, demang, ngabehi sampai rangga.

Para pejabat kerajaan ini mendapat tanah yang luasnya ditentukan oleh tinggi-rendahnya pangkat seseorang, sedangkan petani hanya mempunyai hak *nggarap* atau mengerjakan dengan ketentuan *maro* (dibagi dua) atau *mertelu* (dibagi tiga, yang dua bagian menjadi milik petani). Namun demikian masih terdapat bagian hasil yang secara rinci tercatat sebagai berikut. Petani 40%, *bekel* 20%, *demang dan ngabehi* 8%, bupati 8% dan kraton 24%. Walaupun tampaknya bagian yang diterima oleh kraton dan kepala-kepala rendahan itu jumlahnya sedikit, namun karena mereka membawahi banyak *patuh* yang tanah *lungguhnya* ada di wilayahnya, maka mereka pun mendapat bagian hasil tanah. Setelah dikumpulkan ternyata jumlahnya menjadi banyak. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dari kepala-kepala rendahan sampai raja menjadi kaya karena pajak tanah itu²⁾.

Selain kepala-kepala itu mendapat pajak berupa hasil bumi, mereka masih mendapat pajak berupa tenaga kerja dari petani. Tenaga kerja dari petani ini adalah sebagai imbalan jasa karena petani *kenceng* telah mengerjakan tanah milik *patuh* dan mendapatkan separuh hasil bumi dari sawah itu. Jenis-jenis kerja dari petani secara garis besar dibedakan menjadi tiga, yakni *krigan*, kerja untuk raja atau *patuhnya* seperti perbaikan jalan, saluran air dan lain-lain, ronda malam juga untuk para *patuh* dan *gugur gunung* (kerja bersama) apabila terjadi malapetaka seperti banjir, topan dan lain-lain.

Petani juga dikenai penyerahan hasil bumi dan barang-barang lain yang diminta secara insidental yakni pada waktu-waktu raja atau patuh mempunyai kerja seperti perkawinan, khitanan, kematian dan lain-lain. Penyerahan barang-barang itu lazim disebut *pasumbang* atau *pundut*.

Hubungan antara raja dan petani ini dijalin dalam ikatan *kawula-gusti*, yakni hubungan hamba-tuan yang saling melindungi kepentingan masing-masing. Hal ini terjadi karena adanya hubungan feodal yang berdasarkan atas kepemilikan tanah. Hubungan terjadi setelah tanah diserahkan pada petani dari *patuh* dan petani mengerjakan tanah itu dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah dan tenaga kerja.

Raja Mataram mempunyai kekuasaan besar sekali, tak seorang pun dapat mengubah atau mengurangnya. Kekuasaan duniawi didasarkan atas hubungan feodal, sedangkan kekuasaan surgawi karena adanya kultus dewa-raja artinya pemujaan raja sebagai titisan dewa yang ada di dunia, petani harus setia kepada raja karena raja sama dengan dewa di dunia. Ketenteraman batin petani juga sangat bergantung pada rajanya; jadi raja betul-betul menjadi pelindung petani dalam arti lahiriah maupun batiniah.

Khusus berhubungan dengan gelar *chalifatullah* yang menjadi gelar kebesaran, Sultan Agung mengirimkan utusan ke Mekah untuk mendapatkan pengesahan, tetapi utusan itu tidak sampai ke tempat tujuan karena patroli armada Kompeni Belanda menghadangnya. Karya-karya sastra istana diperluas dan diperbanyak guna mendukung kebebasan raja dengan menyalin buku-buku *Nitisastra*, *Nitisruti*, *Nitipraja*, dan *Surya Ngalam*. Unsur-unsur mistik berkembang pada masa pemerintahan Sultan Agung, yang dalam hal ini sebenarnya adalah perpaduan antara unsur-unsur Hindu dan Islam. Buku *Sastra Gending* kurang lebih berisi ajaran-ajaran tentang mistik.

Perpaduan unsur Hindu dan Islam menjadi ciri khas Kerajaan Mataram yang berpusat di pedalaman yang agraris itu. Perpaduan dua unsur ini bukan hanya pada aspek keagamaan, tetapi juga aspek budaya. Sultan Agung berusaha membuat perhitungan tarih baru yang disebutnya *Tarih Jawa*. Perhitungan *Tarih Jawa* ini berasal dari penggabungan *Tarih Caka* dan *Tarih Hijriah*. *Tarih Caka* menggunakan dasar perhitungan tahun matahari, sedangkan *Tarih Jawa* menggunakan dasar perhitungan tahun-bulan, yang jumlah hari dalam satu bulan ada 30 hari. Perhitungan waktu ini mempunyai pengaruh luas sekali di kalangan petani, karena petani menggunakan perhitungan ini untuk kepentingan yang berhubungan dengan kehidupannya, yakni sebagai pedoman kapan mulai dan berakhirnya musim baru, kapan petani menabur benih, menanam padi, menunai dan lain-lain.

Untuk memperkuat kedudukan raja, ditarik garis keturunan langsung dari awal mula dari Nabi Adam, bahkan dalam *Babad Tanah Jawi* disebutkan raja Mataram adalah keturunan tokoh-tokoh legendaris, dan cerita *Mahabarata*, para wali dan akhirnya tokoh-tokoh historis. Tokoh-tokoh historis yang ditampilkan tentu saja sezaman atau sekurang-kurangnya masih dalam ingatan penulis babad; namun untuk memperbesar kemurnian dan kebesaran keturunan Sultan Agung dibuat garis keturunan langsung dari manusia pertama.³⁾

2.2.2 Sistem ekonomi

Sudah disebut di muka bahwa Kerajaan Mataram adalah kerajaan pedalaman yang agraris. Ciri-ciri masyarakat lain adalah bahwa kehidupan ekonomi kerajaan didukung oleh adanya persawahan yang menggunakan pengairan teratur. Semua kebutuhan hidup diproduksi sendiri, kecuali barang-barang yang

tidak dapat diproduksi sendiri seperti garam, jenis-jenis kain, barang-barang pecah-belah yang didatangkan dari luar. Produksi beras yang melebihi kebutuhan sendiri diekspor oleh kerajaan. Kerajaan Mataram memonopoli ekspor dan perdagangan beras sehingga penguasa-penguasa lain praktis tidak mempunyai kegiatan dalam dunia perdagangan.

Untuk mencukupi kebutuhan istana, tempat-tempat di sekeliling istana yang didiami oleh pegawai kerajaan (*abdi dalem*) bertugas menyediakan barang-barang kebutuhan tertentu. Tempat-tempat ini merupakan kompleks pertukangan, mirip dengan gilde yang ada di Eropa, mempunyai tugas membuat barang yang khas yang dikerjakan *abdi dalem* beserta keluarganya secara turun-temurun.

Tempat atau desa yang memproduksi barang tertentu sampai sekarang masih ada peninggalan nama-namanya di sekeliling Kraton Yogyakarta dan Kota Gede, tetapi di sekitar Kerta tidak ditemukan nama-nama itu. Contoh-contoh desa produsen di sekeliling istana dapat disebutkan antara lain *pandean* untuk barang-barang dari besi, *kemasan* untuk barang-barang dari emas, *sayangan* untuk barang-barang dari tembaga; *gemblakan* untuk barang-barang dari kuningan; *jlagran* untuk barang-barang dari batu, *dagen* untuk barang-barang ukir-ukiran, *gowongan* untuk barang-barang dari kayu; *gerjen* tempat tukang jahit, dan lain-lain.

Ada juga *abdi dalem* yang memberikan pelayanan atau *caos* pada istana antara lain *kemitbumen* untuk tugas jaga; *siliran* untuk tugas menyiapkan lampu, *gamelan* untuk tugas memelihara kuda, *pesindenan* untuk petugas menyanyi; *sekul langgen* untuk tugas membuat nasi langgi, dan lain-lain.

Penarikan pajak hasil bumi memegang peranan penting bagi Kerajaan Mataram, karena itu terdapat petugas yang mengurus

pajak seperti *pemaosan* yang mengurus pajak tanah, *melandang*, yang mengurus hasil bumi, dan *ketandan* yang mengurus pajak uang.

Nama-nama ragam jabatan *abdi dalem* dengan berbagai tugas yang beraneka ragam berkembang dari tingkat yang sederhana sampai yang kompleks. Hal ini berhubungan dengan perkembangan kebutuhan istana.

Kepala-kepala rendahan seperti *demang*, dan bupati juga mempunyai tempat pertukangan yang memberikan pelayanan kepada kepala-kepala itu. Mereka juga mempunyai *pengiring*, atau pengawal yang jumlahnya ditentukan oleh tinggi-rendahnya pangkat; jadi kepala-kepala rendahan itu merupakan bentuk kecil dari raja, sehingga perlengkapan dan keperluannya juga hampir sama.

Pendukung bawah dari sistem ekonomi agraris adalah petani. Mereka memiliki unsur produksi yakni tenaga kerja. Melalui para *bekel*, mereka dikerahkan untuk mengerjakan tanah *patuh*, yang dihitung dalam bentuk *cacah*. Cacah di sini adalah satuan tenaga kerja yang terdiri atas orang laki-laki yang kuat dan binatang yang dapat membantu seperti sapi dan kerbau. Dengan demikian berhasil dan tidaknya tanah yang dikerjakan itu sangat tergantung dari petani. Apabila petani tidak sanggup bekerja, mereka meninggalkan desa, atau dapat juga *bekelnya* yang dipecat.

Kekayaan istana selain diperoleh dari pengumpulan pajak, juga dari berbagai *pasumbang* yang masuk secara insidental pada waktu istana mempunyai keperluan seperti perkawinan, khitanan ataupun kematian. Jenis-jenis *ubarampe* diperoleh dari sumbangan bupati atau bupati *mancanegara* yang jumlah dan jenisnya tergantung dari hasil daerah setempat.

Penyerahan pajak ke istana yang paling banyak adalah upeti dari bupati-bupati *negara agung* maupun *mancanegara*. Upeti ini diserahkan ke istana dua kali setahun yakni pada waktu Grebeg Puasa dan Maulud. Pada waktu grebeg itu sekaligus para bupati menghadap raja. Cara ini sebenarnya digunakan oleh raja untuk mengontrol para bupati, apakah mereka tetap setia pada raja atau tidak. Apabila seorang bupati tidak menghadap, dapat dipastikan bupati itu akan melakukan *kraman* atau berontak; oleh karena itu bupati ini harus segera ditindak. Selain itu sistem ekspansi terus dilakukan untuk tetap memegang kekuasaan tunggal.

Kontrol ekonomi dilakukan bersama-sama dengan kontrol politik, sebab dengan pengakuan tunduk pada Kerajaan Mataram berarti upeti akan masuk ke Mataram. Sejalan dengan kemantapan ekonomi politik Mataram serta stabilitas, maka kontrol itu harus diperkeras agar bupati-bupati *mancanegara* tidak melepaskan diri sehingga mengurangi kesejahteraan Kerajaan Mataram.

2.2.3 *Sistem politik*

Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram bersifat sentralistik. Pengendalian pemerintahan ditempatkan di pusat kerajaan sehingga setiap kebijaksanaan ditentukan dari pusat. Daerah-daerah tidak mempunyai otonomi dan tinggal melaksanakan. Sudah barang tentu pelaksanaan di daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahan pusat. Dengan demikian daerah kehilangan kebebasan sama sekali dan semuanya tergantung dari pusat.

Secara konsentris, pemerintahan pusat ada di tempat tertinggi. Pusat pemerintahan ini ada di *negara* atau *kutagara*, sedangkan para bupati ada di daerah-daerah baik yang ada di

negara agung maupun di *mancanegara*, semuanya mengakui kekuasaan dan kedaulatan pusat. *Negara* adalah kota atau istana tempat kediaman raja, tempat tinggal para *abdi dalem* dan pusat administrasi pemerintahan. Daerah di luar *negara* adalah *negara agung*, daerah di luar kota sebagai tempat tinggal para bupati yang harus menyerahkan upeti pada raja, dan *mancanegara* adalah daerah-daerah yang jauh dari *negara*, terdiri atas *mancanegara kulon* dan *wetan*.

Kontrol politik terhadap kegiatan penguasa setempat yakni dengan menyelenggarakan pembayaran *upeti* dan *seba* (menghadap raja) pada saat-saat tertentu sebagai tanda setia. Selain itu mereka harus menyediakan tenaga untuk keperluan *pancen*; tenaga yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan perang apabila pemerintah pusat memerlukannya.⁴)

Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus diikuti segala perintahnya, misalnya perintah untuk melakukan penyerangan, penyerahan hasil bumi, menghadapi raja, dan lain-lain. Ada juga semacam dewan penasihat raja, tetapi dewan semacam ini hanya merupakan tempat memberikan saran pada raja, yang pada umumnya hanya didengar saja. Di antara para penasihat adalah para *nayaka* dan bupati. Jabatan *patih* adalah jabatan tertinggi yang menjadi pusat seluruh administrasi kerajaan. *Patih* menjadi penghubung dengan pihak luar dan yang tidak kalah penting adalah penghubung kepada raja dan petani. Segala urusan keluar-masuk harus melalui kantor kepatihan. *Patih* dibantu oleh pembantu-pembantu administrasi; ada yang memegang urusan luar dikepalai oleh *bupati jaba* dan ada yang urusan dalam istana dikepalai oleh *bupati jero*.

Kekuasaan raja besar sekali, namun secara langsung hanya dapat menjangkau sampai *negara agung*, sedangkan di *mancanegara*, segala urusan yang sama seperti yang dilakukan oleh

pemerintah pusat, dikerjakan oleh penguasa setempat; akan tetapi pengawasan politik tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dengan "menanam orang-orangnya", sistem perkawinan maupun penaklukan sama sekali.

Tidak kalah penting adalah kedudukan kepala-kepala rendahan seperti *demang*, *ngabehi*, *rangga* dan yang paling dekat dengan petani adalah *bekel*. Ia menjadi wakil *patuh* yang ada di desa. Kewajiban penting baginya adalah menyediakan segala kepentingan *patuhnya*. Ringkasnya, ia adalah pembantu raja atau *patuh* yang ada di desa khususnya pendukung kelangsungan ekonomi kerajaan. Kepala-kepala rendahan ini bertanggung jawab pada *patih*, kepala yang di bawah bertanggung jawab pada kepala yang di atasnya.

2.3 Jalannya Penyerangan

2.3.1 Persiapan

Koordinasi pasukan Mataram dilakukan sendiri oleh Sultan Agung. Ia berbudi luhur, sangat jujur dan bijaksana, sesuai dengan namanya dengan sebutan *agung*, artinya bukan hanya besar tetapi terdapat ciri-ciri kemanusiaan yang sangat tebal melekat pada dirinya. Menurut utusan Belanda yang berkunjung ke Istana Kerta pada tahun 1614, Sultan Agung digambarkan dengan roman muka yang mirip orang Turki, matanya bersinar menunjukkan kebesarannya yang memerintah dengan keras. Sumber lain mengatakan bahwa Sultan Agung berwajah tentang seperti seekor singa yang memandang dengan tajam mengamati keadaan sekelilingnya dan kelihatannya cerdas sekali ⁵).

Apa yang dilaporkan oleh Bath Van Eijndhoven dan van Surch, yang pernah ke Mataram jumlah seluruh pasukan Mataram adalah 200.000 orang prajurit ⁶), namun jumlah ini terla-

lu besar karena tentu saja termasuk pasukan *pancen*. Pasukan yang siap digunakan hanya berjumlah 10.000 orang saja, sedangkan yang menjadi pasukan resmi adalah pengiring atau pengawal raja; namun demikian dalam waktu singkat, raja dapat memanggil petani menjadi prajurit. Mereka harus setia membela kerajaan, karena hubungan kawula-gusti terjalin kuat. Pernah pengumpulan prajurit *pancen* dilakukan hanya dengan memukul gong di berbagai tempat dalam waktu yang sama, di berbagai penjuru istana dan desa dan dalam waktu setengah hari, raja berhasil mengumpulkan 200.000 orang prajurit *pancen*.

Pengerahan prajurit *pancen* terjadi setelah *bupati nayaka* memerintahkan *bekel* mengumpulkan dan menyusun pasukan *pancen*. Hampir setiap laki-laki di desa terkena kewajiban itu sehingga desa menjadi sepi. Di tiap desa tinggal 2 atau 3 orang laki-laki untuk menjaga keamanan desa. Para prajurit ini segera mendapat latihan di istana sebagai pasukan tempur. Mereka dilatih kemahiran perang seperti menggunakan tombak, panah, keris dan berbagai jenis senjata tajam lainnya. Desa-desa harus menyediakan tenaga pengangkut seperti sapi, kerbau dan kuda yang hanya dinaiki oleh *bekel*, *demang*, *pengarah* dan *manggal*⁷).

Prajurit Mataram dibedakan menjadi dua, yakni prajurit tetap yang disebut *tamtama* dan prajurit *pancen* yang disebut prajurit arahan. Kelompok prajurit itu dibedakan menurut jenis senjata yang dipakai, misalnya *sara geni* yakni prajurit yang bersenjata api dan *jagabela*, yakni pengawal pribadi. Satuan pasukan dibedakan dengan sebutan *sewuhan* yakni pasukan prajurit yang berjumlah 1.000 orang; *wedanan* yakni pasukan prajurit yang berjumlah 3.000 orang; *tindih* yakni pasukan yang berjumlah 80 orang di bawah pimpinan *ki lurah* dan 20 orang prajurit di bawah pimpinan *bekel*.

Penggunaan istilah *bregada* hanya untuk menyebut besarnya pasukan, misalnya 1 *bragada* dengan kekuatan 2 *sewuhan* (2.000); dapat juga berarti 3 *wedanan* (9.000 orang). Setiap pertempuran diangkat seorang *senopati* yang menjadi panglima perang. Ia dibantu *wedana* yang berkekuatan 3.000 orang prajurit; pasukan pilihannya berjumlah 10%-nya yang dipimpin oleh 4 orang *tindih* yang dikordinasikan oleh seorang lurah. *Tindih* dibantu oleh 4 orang bekel masing-masing berkekuatan 20 orang prajurit.

Prajurit arahan bersenjata lengkap, termasuk pakaian serta bekal dalam peperangan. Dalam keadaan perang tidak perlu membuat senjata tetapi cukup mengambil di rumah para *bekel* yang bertanggung jawab terhadap segala perlengkapan perang; oleh karena itu ada kebiasaan di Jawa, di rumah kepala desa selalu tersimpan berbagai jenis senjata untuk keperluan mendadak. Dalam keadaan aman, tugas pembuatan senjata seperti tombak, keris, dan tameng dikerjakan oleh seorang empu yang mempunyai keahlian khusus.

Sebenarnya yang mula-mula menjadi perhatian Mataram adalah Banten, karena kerajaan ini masih bebas dan mempunyai kebebasan politik ke luar. Mataram ingin mendapat pengakuan atas Banten, tetapi memerlukan bantuan Kompeni di Batavia. Kompensi tidak menginginkan kekuatan tunggal pada Mataram yang dapat mengancam Kompeni sewaktu-waktu. Kompeni lebih suka kalau dua kerajaan itu lemah sehingga dapat bergerak dengan leluasa; oleh karena itu ajakan Mataram untuk menyerang Banten ditolak. Namun demikian Mataram tidak segan-segan mengambil sikap tegas dan memberi ultimatum kepada Kompeni agar (1) Kompeni mengakui Sultan Agung sebagai raja terbesar di Jawa (2) mengakui kedaulatan Mataram dan (3) Kompeni harus segera mengirim utusan ke Mataram.

Ultimatum itu tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Kompeni. Ia hanya mau mengirim utusan ke Mataram karena kepentingannya akan beras⁴). Berhubungan ultimatum itu tidak semuanya dipenuhi, Sultan Agung merasa kuat untuk menghukum Kompeni di Batavia, Taktik yang dilakukannya adalah menundukkan Banten lebih dulu, menghancurkan kekuatan laut penguasa pantai Jawa Timur dan barulah menyerang Batavia; oleh karena itu Sultan Agung melakukan persiapan-persiapan untuk menyerang Batavia melalui berbagai tahap persiapan yakni menundukkan kota-kota pantai Jawa Timur.

Kota-kota pantai Jawa Timur merupakan saingan Mataram, karena kota-kota itu menjadi kekuatan sosial politik yang mempunyai basis ekonomi yang mampu menandingi Mataram. Kekuatan militernya mampu mengadakan pengawalan perdagangannya dan dapat mencegah ancaman dari luar dan bahkan melakukan ekspansi ke Kalimantan maupun ke Indonesia bagian timur. Salah satu hal mengapa kota-kota pantai akhirnya jatuh ke tangan Mataram ialah karena kota-kota itu saling bersaing.

Akhirnya kota-kota itu satu demi satu jatuh dan ditundukkan oleh Sultan Agung, yakni Tuban (1619), Gresik (1613), Madura (1624) dan Surabaya (1625), kemudian Pasuruan dan Giri.

Sebelum Sultan Agung mengalihkan perhatiannya untuk menaklukkan Jawa Barat, kota-kota pantai Jawa Timur harus betul-betul tunduk pada Mataram. Ini dimaksudkan agar pada waktu Sultan Agung menghadapi Jawa Barat, kota-kota pantai Jawa Timur itu tidak melepaskan diri. Selain itu kota-kota pantai itu mempunyai hubungan yang erat dengan kota-kota di luar Jawa. Giri mempunyai pengaruh di Ambon, Gresik di Ternate dan Tidore, dan Surabaya di Sukadana. Kekuatan laut kota-kota itu betul-betul tangguh menghadapi Mataram. Surabaya misalnya, baru jatuh setelah adanya upaya untuk membendung aliran Sungai Mas¹⁰).

Cara lain yang ditempuh untuk melangsungkan keserasian politik Mataram adalah dengan cara perkawinan, misalnya Pangeran Pekik dari Surabaya dikawinkan dengan putri Mataram. Penguasa-penguasa pantai itu dibiarkan di daerahnya selama tidak membahayakan, tetapi yang membahayakan ditarik ke Mataram. Pernah seorang pangeran dari Madura di bawa ke Mataram dengan pengikutnya serta 40.000 penduduknya dipaksa pindah ke daerah Lumajang, Jawa Timur.

Akibat dari penaklukan kota-kota pantai ini pelabuhan-pelabuhan sepi kalau tidak dapat dikatakan mati. Kekuatan laut Mataram menjadi lemah dan mengakibatkan lumpuhnya kontak internasional pada waktu itu. Politik penghancuran kota-kota pantai ini berakibat fatal bagi Kerajaan Mataram.

Apa yang dilakukan oleh Sultan Agung di Jawa Barat agak berlainan dengan pada waktu menghadapi Jawa Timur. Secara sosial politik kota-kota pantai Jawa Timur memang kuat, dengan demikian mutlak harus ditundukkan, tetapi terhadap Banten Sultan Agung menjalankan diplomatik dengan cara halus membujuk dan mendekati Banten. Pendekatan Mataram ini tentu saja oleh Banten dianggap mempunyai arti solidaritas setelah hilangnya Jayakarta ke tangan Kompeni Belanda. Oleh Kompeni kota itu kemudian diberi nama Batavia pada 30 Mei 1611¹¹).

Kesempatan demikian digunakan oleh Sultan Agung untuk mendekati Banten dan diajak bersama-sama mengusir Kompeni dari Batavia. Dalam menghadapi ajakan ini ternyata Banten bersikap hati-hati karena sifat-sifat Mataram yang ekspansif. Pada waktu itu Mataram sudah melancarkan serangan ke Priangan dan besar kemungkinannya Banten juga akan diserang. Banten tidak memberi jawaban yang tegas tetapi menunggu situasi yang lebih baik sampai penyerangan Mataram terhadap Batavia selesai.

Mataram memerintahkan Cirebon agar membujuk Banten, tetapi tidak berhasil. Sekali lagi pada 1625 Cirebon bersama-sama Tegal membujuk Banten, tetapi utusan dan pengiringnya bahkan dihancurkan oleh Banten di Tanahara, daerah pesisir Banten. Pada tahun 1628 Mataram memerintahkan Ukur dan Sumedang untuk menyerang Banten, namun serangan itu dapat digagalkan.

Ajakan Mataram selalu ditolak oleh Banten, karena Banten ingin agar tidak terikat dengan Mataram, walaupun Banten juga melakukan penyerangan terhadap Batavia dalam waktu yang bersamaan dengan penyerangan Mataram terhadap Batavia. Pada tahun 1628 dan 1629 Banten menyerang Batavia dari arah barat. Dengan singkat kerjasama Mataram dan Banten ada, tetapi tidak resmi sehingga Banten merasa terikat oleh Mataram.

Ternyata Banten tidak puas dengan tindakan Mataram yang ekspansionistis. Banten bergerak ke arah timur. Pengiriman prajurit Banten dilakukan setelah serangan atas Batavia oleh Mataram yang kedua. Prajurit Banten dipimpin oleh Pangeran Nager Agung ke Undang-undang, wilayah Rangka-Sumedang. Tindakan ini dibalas oleh Sultan Agung dengan mengirim Aria Surengrana dengan pasukan sebanyak 1000 *cacah*. Pasukan ini bergerak ke arah barat melalui Banyumas dan Ciasen, kemudian pasukannya ditempatkan di Banyumas sebanyak 3000 *cacah* dan Ciasen 400 *cacah*. Sebagian prajurit ditempatkan di Adiarsa. Tujuan pengiriman Surengrana ini mungkin merupakan persiapan penyerangan ke Batavia yang ketiga kalinya.

Pertahanan Pangeran Nager Agung lebih kuat sehingga mampu melawan pasukan Surengrana, namun akhirnya Nager Agung dapat dikalahkan oleh Adipati Kertabumi, bupati Galuh yang membantu Mataram. Setelah kekalahan Nager Agung daerah Sumedang dan Karawang tetap di bawah Mataram.¹²⁾

Pendekatan Mataram terhadap Cirebon sudah dimulai sejak pemerintahan Penembahan Senopati. Cirebon dianggap penting karena merupakan batu loncatan untuk bergerak ke barat dan di samping itu Cirebon mempunyai kekuatan darat dan laut yang dapat digunakan untuk membantu Mataram. Selain itu Cirebon juga menjadi pintu masuk untuk menguasai daerah Priangan.

Menurut sumber Belanda, hubungan Mataram dan Cirebon terjalin dengan baik. Mula-mula kedudukan Cirebon sejajar dengan Mataram, tetapi lama-kelamaan mirif vasal Mataram. *Babad Cirebon* mengatakan bahwa Panembahan Ratu, sultan Cirebon, memberi gelar "sultan" kepada Panembahan Senopati dengan gelar Sultan Abdulkahar Ibnu Mataram. Pada zaman pemerintahan Sultan Agung, Cirebon sudah ada di bawah Mataram.

Salah satu kerajaan di Priangan yang penting adalah Sumedang. Daerahnya meliputi Sungai Citarum terus ke barat sampai ke Pelabuhan Ratu. Penguasanya adalah Pangeran Kusuma Dinata, seorang keturunan cikal-bakal yang setia pada Mataram. Penggantinya adalah Rangga Gede, tetapi ia tidak cakap yang kemudian diganti oleh Adipati Ukur. Penguasa baru ini giat meluaskan wilayahnya sampai ke perbatasan Banten.

Pada tahun 1628 Palembang mengirimkan utusan ke Mataram dengan membawa tujuh ekor gajah sebagai hadiah. Hadiah itu dimaksudkan untuk persahabatan antara Palembang dengan Mataram dalam menghadapi Kompeni di Batavia. Selain itu Palembang juga bersaing dengan Banten yang tidak mau diawasi oleh Mataram.

Sebab-sebab terjadinya perselisihan antara Palembang dengan Banten adalah pasar lada di Jambi dan Tulang Bawang. Dua daerah itu berada di bawah kekuasaan Banten, tetapi Pa-

lembang berusaha menguasainya. Palembang bersatu dengan Mataram karena memerlukan berasnya.

Menurut dongeng, hubungan Mataram dengan Banten dilebih-lebihkan. Mula-mula Banten akan menyerang Mataram, tetapi dapat digagalkan oleh Sultan Agung yang berkendaraan *jutu taman*, semacam makhluk halus yang mendatangi tempat perundingan yang akan menyerang Mataram. Akhirnya Banten menyatakan pasukan paksaan, pasukan ini dikerahkan dari petani daerah-daerah yang sudah dikalahkan pada waktu pasukan Mataram menuju ke arah Batavia. Pasukan ini terdiri atas tawanan perang, para penebus dosa dan petani yang dipaksa menjadi prajurit. Banyak petani Sumedang dan pelaut Madura dipaksa menjadi prajurit.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi pasukan Mataram adalah medan perang yang sangat sulit ditempuh. Hubungan dan pengangkutan tidak mudah karena harus menembus hutan-hutan. Jalan-jalan yang ada belum memadai, lebih-lebih pada musim hujan pasukan Mataram mengalami hambatan dan bahkan terhenti. Jalur yang ditempuh melalui jalur tengah yakni Banyumas. Umbanegara, Sumedang terus ke Bogor.

Kesulitan lain adalah untuk menyiapkan prajurit *pancen* yang berasal dari petani harus menunggu sampai musim panen selesai, pada waktu mereka sudah tidak mengerjakan sawah dan bagi keluarga yang ditinggal harus ada persediaan bahan makan. Sedapat mungkin penyerangan dilakukan sebelum musim hujan tiba. Bulan-bulan yang paling baik adalah dari Mei sampai dengan Oktober. Setelah musim hujan, penyerangan harus dihentikan, sebab kalau diteruskan akan menyulitkan dan akan terhalang lumpur, rawa-rawa dan banjir.

Penyerangan melalui laut tidak banyak mendapat gangguan, tetapi angkatan laut Kompeni jauh lebih kuat daripada armada

Mataram, apalagi persenjataan dan teknik perang laut Kompeni sudah jauh lebih tinggi dan unggul¹⁴).

Walaupun kesulitan-kesulitan di atas jelas akan melemahkan pasukan Mataram, namun tetap dicari upaya agar kesulitan itu dapat dilampaui. Untuk itu Sultan Agung merencanakan penyerangan dalam tiga kelompok yang berlainan jalurnya. Pasukan pertama di front selatan dipimpin oleh Adipati Ukur. Jalur yang ditempuh adalah Mataram, Banyumas, Umbanegoro, Sumedang terus ke Bogor. Jalur ini dapat diatasi dengan mudah karena Adipati Ukur mendapat bantuan dari para petani Sumedang dan Priangan. Pasukan kedua ada di front timur dipimpin oleh Tumenggung Baureksa, bupati Kendal, dengan jalur Mataram, Cirebon, Karawang terus ke Batavia. Pasukan ketiga adalah kekuatan laut yang berasal dari kekuatan gabungan Palembang, Banten dan Sampang yang menyerang dari laut. Di samping itu masih ada pasukan Banten yang menyerang dari arah barat, sebagai pasukan keempat. Pasukan ini bergerak sendiri dan tidak bergabung dengan pasukan Mataram.

Latihan-latihan tetap bagi pasukan inti diadakan seminggu sekali tiap-tiap hari Sabtu. Latihan ini disebut *sodoran* atau *watangan*, karena prajurit-prajurit berlatih saling menusukkan tombak ke arah lawannya. Oleh karena latihan semacam ini diadakan pada hari Sabtu, maka sering disebut *ston*.

Berita mengenai latihan prajurit Mataram dilaporkan oleh dr. de Hoen pada waktu berkunjung ke Kerta pada tahun 1623. Persiapan perang itu menurut de Hoen, ditujukan pada Banten, karena Banten tidak mau diajak bersama-sama menyerang Batavia. Namun ada kemungkinan persiapan ini ditujukan untuk menyerang Batavia¹⁴). Utusan lain, J. Vos, pada tahun 1624 datang ke Istana Kerta. Mataram mendesak utusan itu agar Kompeni di Batavia mengakui kedaulatan Mataram. Secara diplomatis Vos menolak paksaan kedaulatan Mataram itu¹⁵).

Senjata-senjata tradisional yang digunakan untuk perang adalah keris, tombak, panah, *bandil*, pedang, golok, *mentok* dan berbagai macam senjata tajam lainnya. Bagi masyarakat Jawa Kuna, senjata yang disimpan mempunyai kekuatan gaib dan memberikan perlindungan, tuah, dan kesejahteraan bagi penyimpannya. Senjata-senjata itu dikumpulkan di rumah-rumah bekel, demang, petinggi, wedana, bupati, dan di kraton. Tuah dari senjata itu juga sampai pada petani yang ikut terlindungi. Sewaktu terjadi peperangan, petani tinggal mengambil senjata itu di rumah penguasa-penguasa setempat. Pengerahan prajurit *pancen* dilaksanakan dengan cepat karena kesetiaan petani terhadap raja yang mempunyai kekuatan kosmis magis.

Persediaan perbekalan disiapkan di tempat-tempat yang dilalui. Di tempat-tempat seperti Jepara, Tegal, Kendal, Pekalongan, Ciasem, Cirebon dan Karawang ditimbun padi yang siap diangkut ke medan perang. Sayang usaha ini sudah diketahui Kompeni lebih dulu sehingga timbunan padi itu dimusnahkan. Dengan demikain Mataram kehilangan perbekalan yang tidak ternilai harganya untuk pertahanan dan penyerangan.

Penyelidikan ke medan perang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Sultan Agung karena mereka memiliki kecerdikan dan kelincahan untuk mengamati daerah lawan. Penyelidikan pada penyerangan pertama ditugaskan kepada Kiai Rangga, bupati Tegal dan Tumenggung Baureksa, bupati Kendal. Sebelum penyerangan pertama, Kiai Rangga sudah menyelidiki lebih dahulu benteng benteng Kompeni. Tumenggung Baureksa, penyelidik yang tajam pengamatannya, bahkan memberikan ultimatum akan memusnahkan Batavia di samping akan menghentikan pengiriman beras ke Batavia.

Pada penyerangan kedua, Sultan Agung mengirim seorang penyelidik yang cerdik dan ulet bernama Warga. Ia berhasil me-

nyusup ke dalam benteng sehingga tidak dicurigai oleh Kompeni¹⁶).

2.3.2 *Penyerangan*

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Sultan Agung untuk menyerang Batavia baik dengan cara diplomatik maupun dengan kekerasan militer. Semua itu adalah usaha mematangkan maksudnya untuk menyerang Batavia yang dianggap mengganggu terselenggaranya kekuasaan tunggal di seluruh Jawa; oleh karena itu Kompeni harus mengakui kekuasaan dan kebesaran Mataram.

2.3.2.1 *Serangan Pertama*

Sore hari 22 Agustus 1628 datanglah 59 kapal Mataram di pelabuhan Batavia untuk pertama kali kapal-kapal itu berhasil merapat di pelabuhan dengan menyamar sebagai perahu dagang. Kapal-kapal itu mengangkut 153 ekor lembu, 120 last beras (1 last = 2 ton), 12.000 ikan padi, 25.000 buah kelapa, 7.000 bungkus gula, bawang merah dan putih. Awak kapalnya diperkirakan berjumlah 900 orang. Kompeni sudah menaruh kecurigaan karena banyaknya kapal yang datang sehingga tidak diperkenankan masuk pelabuhan. Dua hari kemudian ternyata awak kapal Mataram sudah banyak yang menyusup ke kota. Penjagaan kota makin diperketat oleh Kompeni karena berita-berita mengenai penyerangan yang akan dilakukan oleh Mataram bersama dengan Banten pada tanggal 23 Agustus.

Pada tanggal 24 Agustus datang armada kedua dengan tujuh buah kapal perang. Kapal-kapal itu tidak merapat ke pelabuhan. Perbekalan dan alat-alat perang diangkut dengan kapal tersebut untuk persediaan pasukan terdahulu. Walaupun dengan alasan izin permintaan sebagai kapal dagang sekalipun, Kompe-

ni tidak memberi izin masuk, bahkan mencurigai kapal-kapal itu. Patroli diperketat, jalan-jalan dan terusan di sungai-sungai ditutup.

Angkatan laut Banten menyerang patroli Kompeni di perairan dekat Sungai Untung Jawa dekat Tangerang. Dalam penyerangan itu 15 orang serdadu Belanda tewas dan 11 orang ditahan. Kapal Kompeni lain yang akan menolong dapat dihalau sampai di Pulau Onrust. Kompeni banyak menderita kerugian¹⁷).

Pada tanggal 24 Agustus kekuatan Mataram, baik pada pendaratan pertama maupun yang kedua bergabung dan berhasil mendarat untuk mendesak pertahanan Kompeni. Serdadu Kompeni melarikan diri ke Benteng Parel yang baru dibangun setinggi 12 kaki. Prajurit Mataram dapat memanjatnya. Dari Benteng Holland Kompeni menembakkan meriam untuk mengusir prajurit Mataram. Benteng-benteng lain seperti Diamant, Robijn dan Safier juga menembakkan meriamnya. Pertempuran sengit berlangsung lima jam, tetapi karena koordinasi dan konsolidasi pasukan Mataram kurang baik, maka pasukan itu terpaksa mundur.

Pada tanggal 25 Agustus terjadi pendaratan ketiga, terdiri atas 27 kapal perang. Kapal-kapal tersebut berpangkalan di muara Sungai Marunda, lebih-kurang 9 km di sebelah timur Tanjung Priok. Prajurit-pajurit terus melakukan kontak dengan prajurit yang sudah ada di dalam kota. Di pihak lain, Kompeni makin memperkuat penjagaan dan memperbaiki benteng serta perlengkapan perangnya.

Pada tanggal 26 Agustus pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Baureksa tiba di Batavia. Pasukan ini terlambat dua hari sehingga waktu yang ditentukan untuk melakukan serangan bersama hanya dilakukan dari laut saja. Kompeni sudah sempat

memperbaiki dan memperkuat pertahanannya untuk menghadapi serangan darat pada tanggal 27 Agustus dengan sasaran Benteng Holland. Senjata berat Kompeni sering ditembakkan sehingga kehabisan peluru dan landasan-landasan meriamnya hancur. Orang-orang Belanda panik dan lari ketakutan masuk ke benteng-benteng, terutama wanita dan anak-anak, termasuk orang-orang Cina.

Kompeni yang sudah terdesak itu segera mendapat pertolongan kapal perang yang sedang pulang dari perondaan di perairan Banten. Kapal itu memuat 200 orang serdadu dengan senjata lengkap. Sementara itu di front selatan ikut sera dalam serangan itu prajurit Sumedang di bawah pimpinan Adipati Ukur. Kompeni terdesak mundur sambil melakukan pembakaran guna mencegah lanjutnya serangan prajurit Mataram. Karena serangan ini tidak berhasil, maka pembakaran Tumenggung Bau-reksa dan Adipati Ukur mengadakan konsolidasi untuk mengatur serangan yang lebih terkordinasi.

Pada tanggal 3 September, prajurit Mataram membuat tanggul dan lubang-lubang persembunyian. Di situ dipasang pula meriam yang menghadap Benteng Holland. Serangan Mataram menyebabkan kerusakan kecil pada benteng itu. Kerusakan yang agak berat terjadi di Benteng Gelderland yang diserang pada tanggal 7-8 September. Benteng Paarel juga mengalami kerusakan. Serangan Mataram dilakukan pada waktu malam dan setelah melakukan serangan terus menghilang. Demikian pula pada waktu siang mereka menyergap patroli-patroli Kompeni. Pada malam hari serdadu Kompeni tidak berani keluar benteng karena takut serangan mendadak. Kompeni menyediakan hadiah 100 real bagi siapa yang dapat menangkap prajurit Mataram. Namun usaha ini si-sia dan tidak membawa hasil.

Pada tanggal 10 September terjadi pertempuran di front utara, yakni di muara Sungai Marunda. Tekanan-tekanan yang semula dilancarkan Kompeni dapat dibalas oleh Mataram sehingga Kompeni terpaksa masuk ke kota. Serangan serentak yang dilancarkan oleh Mataram menyebabkan Kompeni memobilisasikan sekitar 1500 orang Cina, 400 orang Jepang, dan 70 orang Marijker¹⁸).

Perbekalan Mataram sudah menipis sekali. Banyak di antara prajurit Mataram yang hanya makan buah-buahan dan apa saja yang dapat dimakan di hutan. Untuk mengatasi kekurangan bahan makan ini kemudian didatangkan bantuan dari Banten dan Sumedang. Kompeni merencanakan serangan balasan dengan menyiapkan 700 orang pasukan inti ditambah pasukan milisi. Untuk menghadapi serangan Kompeni Tumenggung Baureksa mengumpulkan prajuritnya sebanyak 4.800 orang; 3.600 orang pelaut dan 3.000 orang prajurit Sumedang. Pasukan Banten tetap berdiri sendiri.

Pada tanggal 21 September Gubernur Le Febre menerima surat tantangan dari Tumenggung Baureksa. Tantangan ini menyebabkan Kompeni semakin takut. Mereka meningkatkan kewaspadaan dan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan serangan mendadak.

Pada tanggal 22 September Tumenggung Baureksa memimpin serangan serentak.. Sasaran utama adalah benteng-benteng Kompeni dan mengepung Benteng Bommel serta Friesland yang terletak di selatan benteng induk, sedangkan Benteng Holland menderita kerusakan berat. Suasana kota menjadi sibuk disertai dentuman meriam sambung-menyambung dan semburan bunga-bunga api menyatu seperti terjadi kebakaran yang melanda seluruh kota. Keadaan ini jelas terlihat pada malam hari. Rumah-rumah penduduk kota ikut terjilat api. Prajurit Mataram su-

dah menduduki kota pada malam sebelum serangan ini tetapi pagi harinya terpaksa mereka mundur karena terdesak oleh pasukan-pasukan bantuan Kompeni yang dipimpin oleh van Gorcum.

Pasukan Kompeni diperkuat oleh prajurit cadangan terdiri atas 24 orang kavaleri, 420 orang infantri, 210 orang milisi, 210 orang penembak bangsa Jepang, 700 orang Cina terlatih, 800 orang prajurit cadangan, 42 orang pemburu, dan 200 orang cadangan yang terdiri atas budak-budak belian.

Pada tanggal 25 September serangan Tumenggung Baureksa diulangi lagi. Serdadu Kompeni yang sedang membongkar kubu-kubu prajurit Mataram tiba-tiba diserang oleh Tumenggung Baureksa sehingga lari kocar-kacir. Benteng Holland menjadi sasaran serangan yang membawa korban 56 orang tewas, 24 orang luka-luka berat, 200 orang membuang senjata mereka serta 200 senjata tajam dirampas oleh Mataram.

Sebagian serdadu Kompeni berasal dari tenaga sukarela dan pedagang-pedagang yang diundang ke Batavia. Karena orang-orang Cina banyak yang membantu Kompeni, maka Tumenggung Baureksa mengirim surat kepada Sauw Beng Kong, kapten Cina di Batavia agar orang-orang Cina tidak membantu Kompeni. Permintaan itu tidak diterima oleh Sauw Beng Kong. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang Cina menjadi sasaran prajurit Mataram, seperti pengeroyokan-pengeroyokan di Sungai Angke dan Sungai Ancol pada tanggal 8 sampai dengan 11 Oktober.

Setelah Kompeni mendapat serangan bertubi-tubi dari Mataram, J.P. Coen, gubernur jenderal Kompeni merencanakan serangan balasan pada tanggal 21 Oktober dengan menyiapkan pasukan inti sebanyak 700 orang, 210 orang milisi Mardijker dan 700 orang Cina dan Jepang. Sebagai komandan serangan

balasan ditunjuk Jaques le Febre. Serangan balasan ini mengakibatkan gugurnya Tumenggung Baureksa. Prajurit Mataram merasa kehilangan senapati dan prajurit Sumedang melarikan diri bersembunyi di Gunung Lambung, Banten.

Sehari kemudian, setelah terjadinya serangan balasan datanglah pasukan bantuan dari Mataram di bawah pimpinan Sura Agul-Agul, Kiai Adipati Mandurareja dan Kiai Adipati Upasanta. Bantuan yang datang ini tidak mengubah suasana karena prajurit Mataram sudah lelah dan sejak bulan September menderita kekurangan bahan makan. Usaha membendung Sungai Ciliwung dengan mempekerjakan 1000 orang tiap hari tidak membawa hasil. Seandainya sungai itu dapat dibendung, Kompeni pun tidak akan menyerah karena mereka tinggal di dalam benteng-benteng yang mempunyai persediaan bahan makan dan air yang dapat diambil dari Sungai Untung Jawa yang bebas dari penjagaan prajurit Mataram atau Banten. Mereka telah menggali sumur-sumur untuk mengatasi kekurangan air. Untuk pertahanan, sungai-sungai di dalam kota dihubungkan dan dipasang pintu-pintu air yang sewaktu-waktu dapat dibuka dan ditutup. Di tempat-tempat itu selalu dijaga keras dan tiap sudut benteng didirikan *bastilon* atau "cakruk" sebagai rumah penjagaan.

Serangan Mataram terakhir, termasuk serangan besar, di bawah pimpinan Kiai Adipati Upasanta atas Benteng Holland terjadi pada 15 Nopember. Pertempuran ini mengakibatkan jatuhnya banyak korban pada kedua belah pihak. Mataram kehilangan 744 orang prajurit dan Kompeni ratusan serdadu. Kekalahan ini menyebabkan para senapati takut menghadapi tanggung jawab yang dibebankan oleh Sultan Agung, karena tidak berhasil mengusir Kompeni dari Batavia. Untuk mengurangi tanggung jawab dan kesan yang kurang baik, Tumenggung Sura Agul-agul membunuh Kiai Adipati Mandurareja dan Kiai Adipati Upasanta. Namun perbuatan Tumenggung Sura Agul-

agul ini akhirnya diketahui oleh Sultan Agung. Setibanya Sura Agul-agul di Mataram pada tanggal 3 Desember 1628, ia dija-tuhi hukuman mati karena dipersalahkan membunuh dua orang adipati yang masih kerabat raja¹⁹).

2.3.2.2 *Serangan kedua*

Setelah serangan pertama terhadap Kompeni di Batavia gagal, maka Sultan Agung menyiapkan serangan kedua. Persiapan dilakukan dengan teliti dan seksama dengan mengambil penga-laman pada serangan pertama. Terlebih dulu dikirim seorang penyelidik bernama Warga yang tiba di Batavia pada tanggal 16 April 1629. Ia menyamar sebagai pedagang dan berhasil mengamati seluruh benteng beserta isinya. Semua laporan ber-hasil disampaikan kepada penanggung jawab serangan kedua. Namun malang baginya, ia ditangkap Kompeni, disiksa dan di-penjarakan.

Serangan kedua dimulai pada tanggal 22 Agustus 1629 dan sasarannya diarahkan pada benteng-benteng Paarel, Holland, Robijn, Safier dan Diamont. Benteng-benteng itu dikepung ber-lapis-lapis dan semua perbekalan dan persenjataan diatur dengan tertib.

Sebaliknya Kompeni juga sudah memperkirakan segala ke-mungkinan yang terjadi apabila Mataram melakukan serangan. Kompeni telah mengetahui persiapan Mataram dan tempat-tempat penyimpanan dan penimbunan padi dibakar habis oleh Kompeni. Perondaan di sepanjang pantai utara diperkuat dan kapal-kapal penyelidik bekerja ektras untuk mengamati setiap gerakan pasukan Mataram. Pintu-pintu penghubung rahasia an-tara benteng satu dengan lainnya dibuat, sehingga apabila ter-jadi serangan mendadak dapat segera melarikan diri atau menda-tangkan bantuan dari benteng lain.

Serangan Mataram pada bulan September tidak berarti, karena hanya berupa serangan kecil-kecilan. Kedua belah pihak sangat hati-hati dan saling memperhatikan gerak-gerik lawan. Dalam serangan ini pasukan Mataram mengerahkan 130.000 orang prajurit yang diperkuat dengan meriam. Pada 20 September terjadi pertempuran. Meriam-meriam Mataram berhasil merusak Benteng Holland, tetapi prajurit Mataram tidak mendobrak dan menaiki benteng itu walaupun serdadu Kompeni yang bertahan di dalamnya sudah kehabisan peluru. Dalam pertempuran itu Gubernur Jenderal J.P. Coen tewas yang menurut sumber Belanda disebabkan wabah penyakit menular.

Perbekalan Mataram sudah makin menipis pada awal Oktober sehingga kelaparan mengancam prajurit Mataram. Serangan Mataram masih berlangsung terus sampai 3 Oktober dan sempat menghujani benteng Kompeni dengan tembakan-tembakan gencar.

Bulan Oktober dan bulan-bulan selanjutnya, adalah musim hujan sehingga penyerangan harus dihentikan. Selain perbekalan sudah menipis juga berjangkit wabah penyakit menular. Mataram memutuskan menarik pasukannya dari Batavia walaupun belum ada tanda-tanda kemenangan pada pihak Mataram. Serangan ini selain menewaskan J.P. Coen juga 600 serdadu Kompeni. Pada tanggal 7 Oktober 1629 Senopati Mataram Tumenggung Singaranu kembali menuju Mataram setelah dapat memberikan kesan dan tekanan terhadap Kompeni, kendatipun Kompeni masih bertahan di Batavia²⁰).

2.4 Akibat-akibat Penyerangan

Penyerangan Sultan Agung terhadap Kompeni di Batavia berlangsung dua kali, yakni pada tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama memberikan kesan bahwa Mataram dapat me-

nunjukkan kekuatan terhadap Kompeni di Batavia walaupun akhirnya terpaksa harus menarik diri. Serangan kedua tidak berbeda karena Kompeni jauh lebih kuat persenjataan dan kekuatannya.

Perlu diperhatikan apakah akibat-akibat serangan itu Mataram masih dapat menunjukkan kekuatannya dan kebesarannya atautkah mengalami kemunduran. Sjah mana kekuasaan Kompeni mendesak dan memperluas pengaruhnya, bukan hanya terbatas di Batavia saja tetapi juga meluas ke seluruh Jawa dan bahkan seluruh Indonesia saja. Dua hal di atas digunakan untuk mengukur kebesaran dan kemunduran Mataram, yang mendorong dinamika kerajaan itu baik faktor intern dari Kerajaan Mataram itu sendiri maupun faktor ekstern yang berasal dari kekuatan luar yang dipaksakan untuk menandingi dominasi Mataram atas Jawa.

Walaupun Mataram tidak mutlak dapat menghancurkan Kompeni di Batavia serta mengusirnya dari Jawa, tetapi Sultan Agung sudah menunjukkan semangat dan gerakan anti orang asing, khususnya orang Belanda yang berkedudukan di Batavia dan diperkirakan kedudukannya makin bertambah kuat. Kompeni Belanda meperluas kekuasaan dan mendirikan pemerintahan yang menandingi kekuasaan Mataram. Sudah barang tentu perluasan wilayah akan mempersempit dan mendesak Mataram; oleh karena itu dapat dimengerti bahwa tindakan penyerangan Sultan Agung itu adalah tindakan preventif guna mencegah meluasnya kekuasaan asing (baca: imperialisme dan kolonialisme).

Penyerangan Sultan Agung itu untuk menekan dan memperingatkan kepada Kompeni di satu pihak dan menunjukkan kebesaran Mataram di lain pihak. Sayang sekali pengganti-penggantinya tidak sekuat Sultan Agung. Kompeni membantu

raja-raja yang sedang menghadapi musuh-musuhnya, dan bantuan Kompeni itu didasarkan pada perjanjian-perjanjian untuk mendapatkan wilayah, misalnya pada masa Sunan Mangkurat I²¹).

Tidak berhasilnya serangan Mataram itu antara lain karena kekuatan laut yang digunakan untuk menggempur Batavia terlalu lemah. Kelemahan ini makin mendalam sejak pusat Kerajaan Mataram berpindah ke pedalaman yang berarti mematikan semangat kekuatan bahari. Lagi pula kekuatan laut yang dimiliki para adipati pantai utara Jawa sudah dihancurkan sendiri dari dalam. Akibatnya Mataram makin terisolasi dari dunia internasional dan makin tersisih dari kesibukan perdagangan antarpulau.

Faktor lain yang menyebabkan kelemahan Mataram adalah karena jauhnya jarak sasaran penyerangan dari pusat kerajaan ditambah lagi keadaan medan yang tidak menguntungkan. Hubungan dan pengangkutan sulit dilakukan sehingga pengiriman perbekalan tidak lancar atau bahkan macet sama sekali, sehingga tidak mengherankan kalau prajurit Mataram mengalami kekurangan makan.

Sejauh yang dapat diikuti, serangan Mataram tidak terkoordinasikan dengan baik. Senadainya pasukan gelombang pertama dan kedua bersama-sama menyerbu dan dibarengi bantuan dari prajurit-prajurit Sumedang dan Ukur, kemungkinan besar Kompeni akan kalah. Banten tetap tidak mau bersatu dengan Mataram walaupun melakukan serangan dari arah barat, sedangkan angkatan laut Cirebon, Sampang dan Palembang tidak dapat mengimbangi keunggulan pelaut pelaut Belanda. Koordinasi yang baik tidak tercapai karena hubungan dengan pasukan lain sukar dilakukan. Panglima-panglima serangan dipegang oleh adipati-adipati pantai seperti Kendal, Tegal dan Juwana, sedangkan panglima dari pedalaman Mataram kurang tangguh dan kurang memiliki kemampuan tempur yang ulet.

Salah satu hal yang menambah kekuatan pertahanan Kompeni adalah dibuatnya benteng-benteng dengan tembok-tembok yang tebal dan tinggi yang mampu menahan serangan dan tembakan meriam Mataram. Di sekeliling benteng dibuat parit-parit dan pintu-pintu air yang menghubungkan benteng satu dengan yang lain. Ini semua dimaksudkan untuk menghambat serangan musuh. Persediaan bahan makan dan air masih dapat diusahakan sehingga dapat memperpanjang pertahanan Kompeni walaupun mereka terkurung dalam benteng.

Penyerangan Sultan Agung ini adalah awal kecurigaan terhadap kekuasaan asing yang makin lama mendesak kekuasaan Mataram. Tindakan ini akan diikuti oleh pengganti-penggantinya yang tidak menghendaki bercokolnya kekuasaan asing di Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Pembebasan terhadap kekuasaan asing ternyata terbukti di kemudian hari dan tindakan preventif ini diprakarsai oleh Sultan Agung, raja besar yang menentang Kompeni pada pertengahan abad ke-17.

Usaha melawan penjajahan bangsa asing dari bumi Indonesia oleh Sultan Agung ternyata masih berkelanjutan juga. Ini dibuktikan dengan perlawanan Sultan Hamengkubuwono II terhadap kekuasaan kolonial Belanda dan penjajahan yang dilakukan oleh Inggris, sebagaimana terdapat pada uraian berikut ini.

CATATAN

- 1) Lihat lebih lanjut mengenai sistem ekonomi dan politik Mataram dalam B. Schrieke, *Indonesia Sociological Studies, I Selected Writings* (Bandung : Sumur Bandung, 1960, hal 3-82, dan *Indonesia Sociological Studies, II, Ruler and Ralm in Early Java* (The Hague dan Bandung : NV Mij Vorkeuk – Van Houve, 1957).
- 2) G.P. Rouffaer, "Vorstenlandend" dalam *Adab-rechtbundel*, XXXIV, 1931, hal. 233-378.
- 3) W.L. Olthafed, *Poemika Babad Tanah Djawi, wiwit saking Nabi Adam doemoegi ing taoen 1647*. (IS. - Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1941).
- 4) R.M. Soekanto, *Dari Djakarta ke Djajakarta* (Djakarta Soeroengan, 1954), hal. 21.
- 5) H.J. de Graaf, "De Regering van Sultan Agung vert van Mataram (1613-1645 en die van zijn voorganger Panembahan Seda ing Krapjak 1601-1613, *Verhandeligen*, XXIII, 1958, hal. 99.
- 6) Ibid, p. 125.
- 7) Th. S. Raffles, *History of Java*, I, (London, Block, Porbuy and Allen.
- 8) P.J. Veth, *Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch*, II, (batavia/Haarlem De Eren Bohn/G. Kalff & Co., 1907), hal. 104.

- 9) R. Moh. Ali, *Perjoangan Feodal Indonesia*, (Bandung/Djakarta, N.V. Ganaco, 1963), hal. 80-82.
- 10) De Graaf, op. cit., hal. 95.
- 11) F. de Haan, *Oud Batavia*, (Bandung A.C. Nix & Co., 1935), hal. 1 – 33.
- 12) Veth, op. cit., hal. 336.
- 13) B.H.M. Vlekke, *Nusantara : A History of Indonesia*, (Bruxelles : A. Manteau S. A., 1961), hal. 121 - 144.
- 14) J.K.J. de Jonge, *Opkomst van het Nederlandsch Gazagin Oost-Indie*, V (is Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1862 – 1875), hal. 30-39
- 15) Ibid, hal. 40-53.
- 16) F. Valentijn, *Oud en Nieuw Oost Indien*, III (Amsterdam Kstuen & Zoon, 1862), hal. 346.
- 17) J.E. Heeres, *Dagh Register Anno 1624 – 1629* ('s Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1896), hal. 340.
- 18) Ibid, hal. 348 - 350.
- 19) W. Feruen Mees, *Geschiedenis van Java*, II (Welteverden : Volkkalectuur, 1920), hal. 119-124.
- 20) Lihat Serangan ke dua dalam Fruin Mees, op. cit. hal 124-127.
- 21) B.H.M. Vlekke, *Nusantara, A History of Indonesia* (Bruseelles : A. Manteau S.A. 1961), hal. 145-184.

BAB III HAMENGKUBUWONO II MELAWAN BELANDA DAN INGGRIS

3.1 Latar Belakang

Perjanjian Gianti mengakhiri perang saudara setelah Kerajaan Ngayogyakarta ditetapkan terlepas dari Kerajaan Surakarta. Di kerajaan baru ini bertahta Pangeran Mangkubumi dengan gelar Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatulah, atau disebut Sultan Hamengku Buwono I (1755–1752)¹).

Sepeninggal HB. I pada tanggal 24 Maret 1792, dan pada tanggal 2 April 1792 putra mahkota Mataram bernama Raden Mas Sundoro, yang sudah diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom, menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamengku Buwono II atau Sultan Sepuh. Keadaan berbeda dalam masa pemerintahan HB. II. Pada masa pemerintahan HB. I sudah dapat dicapai konsolidasi politik sehingga pada masa pemerintahannya terjadi kestabilan politik. Pergolakan dan pertentangan antar keluarga istana tidak terjadi, tetapi setelah digantikan HB. II timbul berbagai persoalan politik yang kompleks. HB. II dalam menghadapi Belanda maupun Inggris dengan tegas menolak

campur tangan dua gupermen itu lebih besar. Selain itu sikapnya yang tegas ini membawa konsekuensi juga terhadap konsolidasi politik ke dalam kerajaan sehingga menyeret korban politik lingkungan istana.

Sebelum diadakan pelantikan sebagai HB. II oleh Kompeni, di lingkungan istana, penobatan itu telah diselenggarakan lebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh Kompeni dalam penggantian tahta. Dengan berbagai jalan, terutama pada masa kekosongan pemerintahan, Kompeni selalu membatasi atau bahkan melarang kegiatan putra mahkota untuk segera menggantikan ayahnya sebelum Kompeni melaksanakan pelantikan atas dirinya; sebab itu Kompeni menyita cap kerajaan dan gamelan yang biasa dipakai sebagai alat upacara penobatan raja baru. Kecuali itu Kompeni mengawasi agar putra mahkota tidak masuk di istana.

Bagaimana sikap HB. II dalam menghadapi Kompeni Belanda maupun Inggris? Menurut babad, watak HB. II berbeda dengan watak ayahnya. Babad tidak memberi gambaran yang baik pada HB. II ini. Namun sebaliknya van Nes berpendapat bahwa HB. II adalah seorang yang lincah, tak percaya pada orang lain, keras hati dan pemurah hati. Selanjutnya ia mengatakan bahwa perpecahan di istana juga bersumber pada HB. II setelah penggantian birokrat lama²).

Apa sebabnya HB. II tegas menolak campur tangan Kompeni Belanda maupun Inggris? Sistem politik yang bagaimana memungkinkan HB. II memerintah sampai tiga kali? HB. II naik tahta pertama kali pada tahun 1792, tetapi pada 1810 dipecat oleh Kompeni Belanda. Selama pemecatannya, sultan tetap tinggal di istana. Pada waktu pemerintahan Kompeni Inggris, Sultan dipecat untuk kedua kalinya oleh Raffles, sehingga pemerintahan yang kedua hanya berlangsung tahun 1811-1812. Pada waktu itu ia diasingkan ke Pulau Pinang. Pada tahun 1816

sultan dikembalikan ke Batavia dan pada 1817 diasingkan lagi ke Ambon. Selama pembuangannya, tahta kerajaan diduduki oleh HB. III yang memerintah tahun 1812–1814. Selanjutnya digantikan oleh HB. IV atau Sultan Jarot yang memerintah tahun 1814–1822. Demikian pula penggantinya tahun 1822–1826. HB. II naik tahta yang ketiga kalinya setelah dikembalikan dari Ambon terus dibawa ke Surabaya dan memerintah dari tahun 1826 sampai dengan meninggalnya tahun 1828.

Apakah perkembangan politik ini, baik ke luar maupun ke dalam menguntungkan Kerajaan Yogyakarta? Jawaban-jawaban atas pertanyaan di atas akan disajikan dalam uraian di belakang dalam konteks masyarakat agraris pada saat itu. Kerajaan Yogyakarta adalah kerajaan pedalaman yang agraris, mewarisi Kerajaan Mataram yang berpusat di Plered maupun Kota Gede. Latar belakang sosial ekonomi masyarakat agraris akan memperjelas orientasi politik kerajaan. Selanjutnya akan dibahas konsolidasi politik yang dilakukan oleh HB. II baik ke dalam dengan mengangkat birokrat istana yang mendukung pemerintahannya dan ke luar dengan sikap politiknya yang tegas dan fleksibel dalam menghadapi Kompeni Belanda maupun Inggris serta akibat-akibat yang terjadi.

3.2 Situasi Sosial Politik

3.2.1 Palihan Nagari

Sudah disebut di muka bahwa Kerajaan Mataram dibagi dua. Pembagian ini tercantum dalam Perjanjian Ganti (1755), yang menyebutkan bahwa baik sultan maupun sunan mendapat tanah seluas 53.100 *cacah*. Tanah-tanah yang dimaksudkan di sini adalah tanah-tanah yang dekat dengan dan di sekitar kerajaan atau *negara agung*, sedangkan tanah-tanah yang jauh dari kerajaan disebut daerah *mancanegara*. Dari sini sultan mendapat

33.950 *cacah* dan sunan mendapat 32.350 *cacah*. Sultan mendapat lebih banyak yakni 1.600 *cacah*, tetapi tanah ini kurang subur.

Tanah-tanah sultan maupun sunan yang terletak di *negara agung* berceceran letaknya. Suatu daerah misalnya, dapat menjadi daerah sultan atau sunan. Letaknya yang tidak teratur ini banyak menimbulkan kesulitan dan memudahkan timbulnya kerusuhan di pedesaan. Banyaknya perang desa, yakni perang antara desa sultan maupun sunan atau sesama pemegang tanah *lungguh* (*apanage*).

Tanah-tanah yang termasuk *negara agung* adalah Mataram, (Mataram), Pajang (bagian barat daya Surakarta), Bangwetan atau Sukawati (timur laut Surakarta, Bagelen, Kedu dan Bumi Gede) sekitar Ungaran—Kedungjati. Tanah-tanah yang ada di daerah *mancanegara* meliputi daerah Madiun, Magetan, Caruban, separuh Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Japan (Majakerta) Jipang (Bojonegoro), Teras—Keras (Ngawen), dan Sela, Warung (Kuwu Wirosari). Daerah-daerah *mancanagara* dikuasakan pada para bupati, yang wajib menyerahkan pajak berupa hasil bumi kepada raja dan wajib menghadap raja pada hari raya Gerebeg Puasa dan Mulud.

Oleh HB. I pusat Kerajaan Yogyakarta sudah digeser ke tengah, di Hutan Bering di mana kemudian didirikan istana. Pada zaman pemerintahan Sultan Agung, pusat kerajaan jauh di pedalaman, dekat daerah persawahan, pengairan teratur. Pada zaman pemerintahan Panembahan Senopati pun ibu kota bergeser ke utara yakni ke Kota Gede. Pada zaman HB. I dan kemudian diteruskan oleh HB. II pusat kerajaannya ada di Yogyakarta.

Selain menjadi ibukota kerajaan yang diperintah oleh seorang raja, Yogyakarta juga menjadi tempat kedudukan seorang

residen yang muncul bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Yogyakarta pada tahun 1755. Residen Kompeni Belanda yang ditempatkan di Yogyakarta pada awal pemerintahan HB. II adalah W.H. van Ilseldijk (1786–1799).

Sebagai kerajaan agraris, Yogyakarta mempunyai basis daerah persawahan yang subur yakni di aliran pertemuan Sungai Opak dan Oya, di bagian timur laut dan di aliran Sungai Progo yang terletak di bagian barat Kerajaan Yogyakarta. Daerah ini menjadi penghasil beras yang subur karena abu vulkanis dari Gunung Merapi.

Pada masa pemerintahan HB. II, Yogyakarta masih menjadi gudang beras karena produksi padinya berlebihan sehingga terjadi perdagangan beras ke luar Yogyakarta. Beras itu diangkut ke Semarang dan Jepara dan kemudinin diperdagangkan ke Batavia atau ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Beras ini menjadi alat tukar utama dalam perdagangan pantai Jawa dan di seluruh Indonesia.

Pola ibu kota Kerajaan Yogyakarta dapat dikatakan sama dengan Surakarta. Istana raja yang didirikan di Hutan Bering itu menghadap utara. Bagian paling depan dari istana itu adalah bangunan besar yang disebut *pagelaran*, di situ para *sentana* dan *abdi dalem* menghadap raja dan raja duduk di *siti hinggil*, bagian bangunan yang lebih tinggi sehingga raja dengan mudah melihat kawulanya. Di muka *pagelaran* terdapat halaman yang luas yang disebut *alun-alun*. Di tengah-tengahnya terdapat dua buah pohon beringin.

Di alun-alun tersebut tiap-tiap hari Sabtu digunakan untuk latihan perang-perangan oleh prajurit. Mereka mengendarai kuda dan memegang tombak (*watangan*) dan saling menusuk. Oleh karena latihan-latihan ini diselenggarakan pada hari Sabtu maka biasa disebut *seton* atau *watangan*. Ketrampilan berperang ditun-

jukkan dalam latihan ini, misalnya bagaimana membela diri, menyerang dengan keris, tombak dan mempertahankan diri dengan tameng, pedang dan lain-lain. Suatu pertunjukan yang menarik adalah pesta *rampogan*; seekor harimau yang dilepas dari kandang dan dikepung prajurit yang bertombak. Harimau ini pun akhirnya mati di ujung tombak.

Di sebelah barat alun-alun terdapat mesjid besar. Di sini diselenggarakan upacara-upacara kerajaan, upacara gunungan setelah *Idul Fitri* dan upacara Grebeg Mulud. Upacara ini dipimpin oleh seorang penghulu istana. Kampung-kampung di sekeliling istana, yang termasuk *kutagara* didiami oleh para *sentana* dan *abadi dalem* raja. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh para *abdi dalem* yakni memberikan pelayanan kepada raja di istana, seperti *abdi silir* bertugas memelihara dan memasang lampu, *abdi patehan* bertugas menyediakan air teh, *abdi sekul langgen* bertugas menyediakan nasi langgi, dan *abdi dalem* yang menyediakan barang-barang tertentu untuk keperluan raja dan rumah tangga kerajaan. Para *abdi* ini adalah para tukang yang dengan keahliannya sendiri-sendiri menyediakan barang kebutuhan, misalnya *kemasan* bertugas membuat barang-barang dari emas, sayang membuat barang-barang dari tembaga, *gemblak* membuat barang-barang dari kuningan, *undagi* membuat barang-barang ukiran kayu, *jlagra* membuat barang-barang dari batu, dan lain-lain.

Masih ada lagi *abdi dalem* yang bertugas menjaga keamanan istana dan sebagai prajurit kerajaan. Mereka terbagi dalam kesatuan prajurit dengan perlengkapan perangnya ditandai oleh panji-panji sebagai tanda kesatuan. Ada berbagai macam kesatuan prajurit dengan berbagai pakaian seragam berbeda-beda. Kesatuan prajurit itu antara lain prajurit Nyutra, Wirobrojo, Pra-wirotomo, Ketanggung, dan ada kesatuan Daeng dan Bugis.

Di sebelah utara alun-alun ada jalan besar yang seolah-olah membatasi istana dengan kompleks tempat tinggal orang-orang Belanda. Di sebelah utara jalan itu berdiri berbagai bangunan yang disebut *loji*, antara lain bangunan besar yang ada di sebelah barat jalan membelah tengah alun-alun terus ke utara sampai di kaki Gunung Merapi, itulah tempat kediaman residen. Berhadapan dengan bangunan ini adalah Benteng Vreedeburg yang menjadi tangsi serdadu Kompeni. Di sebelah utara rumah residen terletak Gereja Kristen yang menjadi tempat peribadatan orang-orang Belanda. Di sebelah timur jalan terdapat pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi kota dan tempat-tempat lain di sekitar kota. Tidak jauh dari tempat ini terdapat *pecinan* atau kampung cina dan selalu dekat dengan pasar yang menjadi pusat perhatian kehidupannya. Di sebelah utara pasar ada bangunan kepatihan. Bangunan ini menghadap ke selatan dan menjadi tempat kediaman Patih Danureja. Pada masa pemerintahan HB. II yang menjadi patih adalah Danureja I (1755–1799) dan kemudian digantikan oleh cucunya yang bergelar Danureja II (1799–1811).⁴⁾

Jelas dari letak bangunan tempat tinggal Kompeni yang ada di tengah-tengah dua bangunan pejabat tinggi kerajaan, yakni istana dan kepatihan membuktikan betapa ketatnya Kompeni mengawasi pejabat-pejabat tinggi itu. Kompeni mengawasi setiap kegiatan dari raja maupun patih. Biasanya Kompeni cenderung untuk memihak pada patih karena kedudukan dan peranan patih lebih labil. Selain itu kekuasaan dan wewenang raja yang mutlak yang mampu menolak setiap keinginan Kompeni, menyebabkan Kompeni mencari bantuan pada patih, seperti halnya pada Danureja II.

3.2.2. *Sistem Pemerintahan*

Pemerintahan Kerajaan Mataram berpusat di ibu kota kerajaan dan semua kegiatan pemerintahan diatur dari istana, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakan perintah dari istana. Apa yang dikatakan raja harus dilakukan oleh para sentana dan abdi dalem. Tak seorang pun dapat menolak perintah raja. Penolakan terhadap perintah raja berarti melawan. Raja dapat menindak orang yang tidak menurut perintahnya. Dengan demikian raja mempunyai kekuasaan mutlak terhadap seluruh isi kerajaan.

Bentuk struktur pun berjenjang berbentuk piramida dan makin ke bawah makin jauh dari pusat kerajaan. Sejalan dengan bentuk konsentris ini raja memerintah dengan segala kekuasaan politiknya berada di istana. Tempat ini menjadi titik pusat kerjaan dan disebut negara. Pejabat-pejabat kerajaan bertempat tinggal di sekeliling istana, termasuk patih. Daerah-daerah di luar istana dikuasakan kepada para bupati. Sebagai pejabat kerajaan mereka harus tetap setia pada raja. Daerah kekuasaan mereka disebut *negara agung*. Daerah-daerah di luar yang jauh dari negara dan *negara* dikuasakan oleh para bupati. Daerah ini disebut *mancanegara*, menurut Perjanjian Gianti, Yogyakarta juga mempunyai daerah *mancanegara wetan* dan *kulon*⁵⁾.

Bagaimana cara melakukan kontrol politik terhadap penguasa daerah baik bupati, *negara agung*, maupun *mancanegara*. Bagi raja yang perlu sebenarnya adalah adanya pengakuan para bupati untuk tunduk kepada raja. Dengan adanya kesediaan tunduk ini, kedudukan raja menjadi penguasa dan para bupati menjadi yang dikuasai atau mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Kedudukan semacam ini dapat disamakan dengan kedudukan raja vasal atau raja taklukan.

Ada dua hal yang dituntut oleh raja terhadap bupati-bupati. *Pertama*, pada hari-hari besar dan hari tertentu para bupati harus menghadap raja. Pada hari raya Grebeg Puasa dan Maulud mereka harus menghadap (*seba*) sebagai tanda setia kepada raja. Apabila mereka tidak hadir dalam pertemuan ini raja menjadi curiga dan langsung mengambil keputusan bahwa mereka tidak setia kepada raja dan akan melakukan pembrontakan (*kra-man*). Terhadap keadaan semacam ini raja terus mengambil tindakan tegas. *Kedua*, mereka harus menyerahkan pajak tanah berupa hasil bumi dari daerah mereka. Penyerahan ini pun diartikan sebagai tanda setia yang harus disertai bukti. *Ketiga*, mereka harus menyerahkan tenaga kerja untuk kepentingan pekerjaan kerajaan dan istana seperti pembuatan dan perbaikan jalan, perbaikan istana dan rumah-rumah bangsawan, menyediakan tenaga kerja pada hari raya dan pesta-pesta di istana seperti perkawinan, khitanan, dan kematian. *Keempat*, mereka harus menyediakan tenaga *cadangan* yang disebut *pancen*. Biasanya tenaga ini diperlukan untuk kepentingan perang apabila sewaktu-waktu kerajaan memerlukan. *Pancen* diartikan kesediaan kawula dan kesetiaannya ikut serta membela kerajaan dan mempertahankannya.

Jabatan tertinggi setelah raja adalah patih. Ia sebenarnya menjadi perantara dalam urusan-urusan baik berasal dari raja maupun para bupati serta Kompeni. Sebagai perantara, ia harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Dapat pula terjadi bahwa patih banyak berhubungan ke luar sehingga raja tidak percaya adanya. Ia dianggap tidak setia pada raja dan ia dapat disingkirkan dari kerajaan. Namun sesungguhnya ia adalah orang yang mengetahui segalanya, pusat segala urusan politik kerajaan sampai dengan masalah pajak.

Patih adalah pembantu raja, jadi rajalah yang menentukan siapa yang cocok menjadi pembantunya. Pada masa HB. I yang diangkat sebagai patih adalah Danureja I, tetapi pada masa pemerintahan HB. II patih ini dianggap tidak cocok untuk kerjasama dengan rajanya; oleh karena itu patih diganti, walaupun dengan cara-cara yang tidak wajar.

Suatu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan politik kerajaan adalah politik perkawinan. Penguasa-penguasa yang berpengaruh di daerahnya diambil menantu dan dikawinkan dengan putri-putri HB. II. Melalui hubungan kekeluargaan ini perbedaan-perbedaan kepentingan dapat diperlunak sehingga tidak menyebabkan terjadinya perselisihan yang membahayakan keutuhan kerajaan.

Apabila ternyata ada seorang menantu sultan masih diragukan kesetiiaannya maka ia ditarik ke pusat kerajaan dan dijauhkan dari kawulanya. Ia berdiam di pusat kerajaan dengan segala kemewahan dan dengan sendirinya melupakan penderitaan kawulanya. Ia tidak tahu apakah kawulanya hidup tenteram ataukah mengalami kegelisahan.

Cara-cara ini jelas mengurangi timbulnya perasaan tidak senang terhadap raja sehingga munculnya pembontakan untuk melepaskan diri dari kekuasaan raja. Namun ada suatu aspek yang tidak dapat dibendung yaitu kepentingan pribadi setiap menantu raja dan perasaan iri hati terhadap sesama menantu. Inilah yang menimbulkan sistem klik. Beberapa menantu sultan mendekati putra mahkota untuk mengambil hati, tetapi ada pula putra menantu lain mencari perlindungan pada pangeran adipati anom. Masing-masing kelompok mempertahankan pendiriannya dan kepentingannya mereka sendiri, sehingga tidak jarang terjadi konflik di antara mereka.

Ada konflik-konflik yang dapat diatasi oleh raja, misalnya raja mengambil putusan untuk memecat atau menyingkirkan menantunya, tetapi karena tidak senang dengan situasi, sang menantu meninggalkan istana dan menjadi pembontak. Konflik-konflik meruncing sehingga menyebabkan pembontakan. Pada masa pemerintahan Sultan II terjadi pembontakan Raden Rangga Prawirodirdjo III yang berasal dari daerah Madiun, dan pembontakan Pangeran Diponegoro.

Apabila suatu keputusan politik tidak terlaksana, maka jalan ke luar lain tidak mendapatkan tantangan dari raja. Biasanya ada pihak ketiga, yakni Kompeni yang turut mengambil bagian dalam memaksakan berlangsungnya suatu kepentingan. Sudah barang tentu hal itu akan menyangkut kepentingan Kompeni dan jelas akan menguntungkan mereka.

3.3 Konsolidasi Politik

Pada awal pemerintahan HB. II timbul masalah baru yang berhubungan erat dengan kestabilan pemerintahannya. Kerebakan mulai terjadi baik berasal dari kerabat istana maupun dari Kompeni Belanda. Hal-hal semacam ini tidak pernah terjadi pada masa HB. I karena memang pengangkatannya pun penuh dengan pertimbangan dan saling menjaga hubungan baik antara HB. I dan Kompeni. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Setelah wafatnya HB. I segera timbul perpecahan. Intrik istana dan sistem klik memperkuat posisi masing-masing pihak yang saling bersaing. Kelompok pertama adalah kelompok yang sedang memerintah dengan dukungan HB. II, mewakili golongan penguasa yang sedang mengatur pemerintahan. Kelompok kedua adalah kelompok birokrat istana yang masih sempat menikmati kejayaan HB. I. Kelompok ini diangkat oleh raja sebelumnya tetapi pada pemerintahan raja baru mulai disingkir-

kan. Kelompok ini ada di bawah pengaruh Patih Danureja II. Kelompok ketiga adalah kelompok Pangeran Natakusuma dan Pangeran Natadiningrat, yang sebenarnya ingin menjadi pene-nghah dalam pertentangan antara HB. II dengan Kompeni, tetapi rupa-rupanya dua pangeran ini cenderung untuk mendapat du-kungan Kompeni dan merealisasikan bentuk pemerintahan sen-diri yakni Kadipaten Pakualaman. Kelompok keempat diwakili oleh Rangga Prawiradirdja III. Ia meninggalkan istana karena tidak puas dengan situasi yang berlaku. HB. II tidak tahu-mena-hu kembalinya Prawiradirdja ke daerah Madiun, namun Kom-peni menganggap ia sangat membahayakan keamanan secara keseluruhan, bukan saja bagi kelangsungan pemerintah Mata-ram tetapi juga gupermen sendiri.

Kelompok-kelompok itu terkonsolidasi dengan sendirinya dan tentu saja dimenangkan oleh kelompok penguasa yang se-dang memegang pemerintahan. Ada kelompok lain yang dapat bertahan karena dukungan Kompeni dan ini semata-mata un-tuk menyalurkan kekuatan politik yang sedang tumbuh. Apabi-la hal ini tidak ditolerisasi pasti akan menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di Kerajaan Yogyakarta. Kelompok-kelom-pok lain sudah tersingkir dengan digantikannya Danureja II dan Prawiradirdja III. Konsolidasi politik ke dalam betul-betul sudah tercapai dengan menghilangkan rintangan yang diwakili oleh ke-lompok-kelompok politik masing-masing.

Setelah konsolidasi ke dalam, HB. II merasa kuat dan bersi-kap tegas dalam menghadapi Kompeni Belanda maupun Inggris. Campur tangan ke dalam kerajaan dan Kompeni selalu dito-lak, tetapi pada kesempatan lain sikap politik HB. II menjadi fleksibel sehingga Kompeni merasa segan dan memberikan peng-hormatan yang setinggi-tingginya atas pengaruh dan wibawa yang ada padanya. Hal ini menjadi jelas karena HB. II meme-

gang roda pemerintahan Mataram sampai tiga kali. Mengenai bagaimana cara HB. II menghadapi Kompeni Belanda dan Inggris akan dibicarakan lebih lanjut.

Konsolidasi ke dalam

Pada waktu awal pemerintahan HB. II masih banyak birokrat pembantu HB. I. Mereka adalah orang-orang yang sangat setia pada raja dan berpengalaman banyak dalam pemerintahan. Di antara mereka sudah banyak yang berusia lanjut dan bahkan banyak yang sudah meninggal dunia, tetapi ada pembantu raja yang sebeanrnya masih kuat namun terpaksa disingkirkan karena bukan pilihan HB. II. Orang ini adalah orang kedua setelah raja yakni Raden Tumenggung Martanegara dengan sebutan Danureja II.

Danureja I adalah patih yang dipilih oleh HB. I. Mula-mula ia adalah Raden Tumenggung Yudanegara, bupati Banyumas yang diangkat pada 1755. Dalam menjalankan tugas sehari-harinya Danureja dibantu oleh Raden Tumenggung Natayuda, seorang *wedana lebet*. Tumenggung ini sudah berusia lanjut. Ia sangat setia pada raja dan berbagai pihak yang berhubungan dengan tidak banyak mendapat kesulitan.

Pada tahun 1799 Danureja I meninggal dan digantikan oleh cucunya yang kemudian bergelar Danureja II. Ia sangat berbeda dengan mendiang kakeknya. Tabiatnya jauh menyimpang. Ia adalah menantu HB. II, tetapi ia tidak pernah mendapat kepercayaan dari raja. Kebiasaan hidupnya tidak baik dan ia mempunyai banyak hutang. Karena kelakuannya yang tidak baik itu, raja sering kali mengenakan denda padanya, namun Danureja II tetap mencari akal supaya tetap dekat dengan raja dan selalu dikasihi. Ia mencari kelompok lain dan berpihak pada Pangeran Adipati Anom.

Salah seorang putra Pangeran Natakusuma yang menjadi *abdi dalem* sangat setia dan bekerja dengan baik. Karena tingkah lakunya yang baik itu, maka raja tertarik untuk menjadikannya menantu. Danureja tidak senang dan berusaha menjatuhkan nama baik keluarga Natakusuma. Ia mencari akal, yakni dengan meminta keris milik Pangeran Natakusuma yang akan digunakan untuk *kraman*. Usaha ini tidak dikabulkan karena apabila kerisnya diberikan berarti pangeran itu mendukung maksudnya. Pangeran akan dituduh sebagai penghasut dan akan mendapat nama buruk raja, sedangkan Danureja akan mendapat nama baik dari raja, sekurang-kurangnya ia akan mendapat hadiah.

Di sini jelas hubungan antara HB. II dan Danureja tidak berjalan baik. Dalam konflik yang terjadi antara HB. II dengan Daendels, Danureja berpihak pada Kompeni. Oleh karena itu HB. II minta kepada Kompeni agar Danureja II diganti, tetapi permintaan ini tidak disetujui oleh Kompeni. Danureja tidak secara langsung dipecat oleh HB. II karena semua pekerjaan diselesaikan oleh Natadiningrat. Niat buruk dari Danureja untuk membalas dendam dilakukan dengan mencari jalan untuk menjatuhkan kelompok Natadiningrat, Natakusuma, dan Ratu Kencana Wulan, ibu dari istri Natadiningrat.

Pembersihan terhadap pembantu-pembantu raja yang diangkat oleh raja sebelumnya terus dilakukan. Mulai dari pejabat tinggi sampai tukang-tukang tidak luput dari pemecatan. Natayuda misalnya, juga diberhentikan pada tahun 1797, beberapa orang *wedana lebet*, tukang dan pembersih kandang kuda pun tidak terlepas dari intaian kecurigaan. Ini semua dalam usaha untuk menciptakan suasana aman pada pemerintahan HB. II dan sekaligus memperkuat kelompok yang sedang berkuasa

Munculnya kelompok Natakusuma memang terjadi dengan sendirinya karena di satu pihak sikap serta tingkah lakunya yang menarik dan di lain pihak HB. I sangat sayang padanya. Ia adalah saudara HB. I lain ibu. Menurut babad, HB. I sudah mengangkat Raden Mas Suntara Menjadi putra mahkota untuk memenuhi janjinya. Selanjutnya babad menceritakan bahwa raja kecewa terhadap perbuatan putra mahkota; oleh karena itu cintanya jatuh pada Natakusuma. Namun demikian HB. I pandai menutupi situasi dan perasaan hatinya sehingga hal-hal itu semua tidak diketahui oleh orang lain, bahkan Kompeni pun tetap beranggapan bahwa raja tetap sayang pada putra mahkota.

Begitu besar perhatian raja terhadap Natakusuma terbukti pada perkawinannya yang dirayakan secara besar-besaran dan istrinya itu adalah pilihan raja sendiri yang diambilkan dari putri Tumenggung Sasrawinata. Ia rajin mempelajari kesusastran Jawa, politik dan hukum yang berlaku di kerajaan. Ia mendapat banyak pengaruh dari Pangeran Diponegoro, Raden Tumenggung Natayuda dan Danureja I. Pengalaman ini sangat bermanfaat baginya dalam memimpin pemerintahan kelak di kemudian hari.

Pada waktu tersiar berita mengenai pembrontakan Raden Rangga, Daendels minta kepada HB. II untuk menyerahkan Natakusuma, Natadiningrat dan Sumadiningrat. Alasan mengapa Daendels menuntut penyerahan mereka itu karena mereka adalah sumber segala kejadian dan merekalah yang mempunyai pengaruh kuat terhadap gerakan Raden Rangga yang akan menyingkirkan putra mahkota sekarang, yaitu kelompok Danureja II.

Bersamaan dengan kejadian Raden Rangga itu, intrik dari Danureja makin merajalela. Ia ingin mendapat kepercayaan dari Kompeni dengan jalan memisahkan HB. II dari Natakusuma,

Natadingrat serta Sumadiningrat. Atas tipu daya Danureja, Daendels minta agar Natakusuma dan Raden Rangga secara rahasia membenci Kompeni.

Akhirnya HB. II terpaksa memenuhi tuntutan Kompeni. Natakusuma dan Natadiningrat diserahkan kepada Kompeni untuk membuktikan bahwa raja tidak turut campur dalam pembrontakan Raden Rangga, dan setelah ia tertangkap pagar Natakusuma dikembalikan lagi ke Yogyakarta.

Dua orang pangeran ini berangkat ke Semarang bersamasama Tumenggung Danukusuma dan Danureja II melalui Klaten, Boyolali dan Salatiga. Dalam pertemuan yang berlangsung di Semarang diputuskan bahwa HB. II dipecat dan putra mahkota dinobatkan menjadi raja. Natakusuma ternyata dibawa ke Pekalongan, dengan dalih di Semarang berjangkit penyakit. Selanjutnya ia dibawa ke Batavia, tetapi dari Yogyakarta minta supaya pangeran itu segera dipindahkan ke lain tempat. Dengan cara-cara halus, melalui istri van Gram dan juga atas persetujuan Waterloo di Cirebon yang dulu menjabat minister di Yogyakarta, akhirnya Daendles mengizinkan kedua pangeran itu dipindahkan ke Cirebon. Selanjutnya Waterloo diminta untuk menyelesaikan perkaranya dan membunuhnya, tetapi akhirnya pangeran itu dapat diselamatkan. Setelah Daendels diganti Jansens pada bulan Mei 1811, dan atas permohonan Ijsseldijk, kedua pangeran diminta menghadap penguasa yang baru.

Raden Rangga Prawiradirdja III, menantu HB. II adalah *bupati wedana* Madiun dan daerah *mancanegara* Yogyakarta. Ia memegang pemerintahan antara tahun 1801–1901 dan menguasai 14 orang bupati, namun selama pemerintahannya ia lebih banyak tinggal di pusat pemerintahan, Yogyakarta, bukan di Maospati, Madiun.

Suasana istana menjadi keruh dan muncul "klik-klik" yang saling mencurigai. Ia merasa termasuk dalam satu "klik" yang setia pada raja dan membenci Kompeni yang didukung oleh Danureja II. Dalam menentukan sikapnya ia sudah tahu bahwa Kompeni menginginkan agar ia disingkirkan. Agar ia tidak ditangkap lebih dulu, ia berniat melakukan pembrontakan terhadap Kompeni dan sekaligus melarikan diri.

Rangga Prawiradirdja menyampaikan kekesalannya kepada Natasukuma dan Natadiningrat. Ia mengatakan lebih baik menyerah pada Kompeni dan akan pergi ke Bogor. Untuk itu ia meminjam kuda milik Natadiningrat. Pada malam hari 20 November 1810, dengan diikuti lebih kurang 300 orang prajurit ternyata ia tidak menuju Bogor, tetapi ke arah timur yakni Madiun.

Setelah Rangga Prawiradirdja berada di Madiun, ia menyebut dirinya Sunan Prabu Ngalaga dan Tumenggung Sumanagara bernama Panembahan Senapatiningprang. Untuk mendapatkan pengakuan atas daerah di sekelilingnya, ia mengirim utusan ke daerah *mancanagara* Surakarta dan pesisir agar mengakui dirinya sebagai penguasa. Penguasa *mancanegara* takut memberikan pengakuan. Sultan Yogyakarta mengirimkan prajurit yang dipimpin oleh Tumenggung Purwadipura untuk mengejar Raden Rangga. Pengiriman ini bersifat terpaksa karena sultan telah berjanji pada Kompeni bahwa ia tidak akan terlibat dalam pembrontakan Raden Rangga. Selain itu Natakusuma dan Natadiningrat sudah ditangkap Kompeni. Mereka akan membebaskan setelah Raden Rangga terbunuh.

Tumenggung Purwadipura berhasil mengejar Raden Rangga sampai di luar Kota Madiun. Ia kembali ke Yogyakarta bukan karena takut seperti dikatakan Danureja II, tetapi karena sebenarnya ia berpihak pada Raden Rangga. Setibanya di Yogya-

karta ia langsung dipecat dan sultan mengirimkan Pangeran Adinegara disertai beberapa orang pengikut yang dapat diandalkan.

Pada tanggal 7 Desember 1810 Pangeran Dipakusuma, pengganti Purwadipura, berhasil menduduki istana Maospati tanpa mendapat perlawanan yang berarti. Empat hari kemudian, ibu, adik-adik, dan anak-anak Raden Rangga menyerah. Keadaan di Madiun kembali aman, tetapi Raden Rangga dikejar terus. Pada tanggal 17 Desember 1810 ia berada di Desa Sekaran, Kertsana. Di situ ia dengan 100 orang prajuritnya menahan serangan dengan hebat. Banyak di antara prajuritnya yang melarikan diri dan dalam pertempuran itu ia terbunuh oleh bupati-bupati Wiryanegara, Martalaya dan Yudakusuma dan mayatnya dibawa ke Yogyakarta sebagai bukti. Dalam babad, keluarga dari keturunan Prawirasentika disebutkan bahwa Pangeran Dipakusuma diperintah oleh sultan untuk menangkap Raden Rangga hidup atau mati. Setelah tertangkap Raden Rangga memilih mati dibunuh dalam perkelahian pura-pura, sehingga Kiai Blabar sempat menyambar tubuh Raden Rangga.

3.4 Melawan Kompeni Belanda dan Inggris

Pemerintahan HB. II berlangsung selama tiga masa, yakni pada masa Belanda, masa Inggris atau sering disebut pemerintahan sisipan Inggris (1811–1816), dan masa Belanda lagi yakni pada awal Perang Diponegoro. Sesungguhnya sukar dibahas sikap HB. II dalam menghadapi Kompeni kalau tidak dikaitkan pembahasannya dengan konsolidasi politik intern yang menyangkut seluruh kerabat istana. Mengenai politik intern telah diungkapkan di muka, jadi dalam pembahasan politik dan melawan Kompeni Belanda maupun Inggris dibicarakan secara terpisah. Namun sekali-sekali juga dikaitkan dalam penampilan bersama agar uraian menjadi jelas.

3.4.1 *Konflik dengan Daendels*

Sudah disebut di muka bahwa HB. II bersikap tegas dan tidak mau menerima campur tangan Kompeni dalam pemerintahannya. Usaha untuk menghindari campur tangan ini terlihat dalam masa transisi setelah wafatnya HB. I dan HB. II menunggu pengangkatannya oleh Kompeni. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menobatkan dirinya di dalam istana sebagai pengganti yang sah dari HB. I. Dengan demikian secara tradisional sudah berlaku pemerintahannya yang sah tanpa menunggu pelantikan Kompeni.

Sikap-sikap lain yang ditunjukkan oleh HB. II, bahwa pendiriannya tegas dan keras. Seperti apa yang dilukiskan oleh P.G. van Overstraten, Gubernur Java's Noord Oost-kust (1791–1796). Van Overstraten mengatakan bahwa sultan keberatan apabila pada waktu pengangkatannya, patih harus menandatangani suatu perjanjian yang menetapkan bahwa "tanah-tanah yang diserahkan oleh Kompeni kepada sultan adalah sebagai tanah pinjaman". Hal ini jelas tidak menyenangkan sultan, sebab pada hakekatnya ia tetap berpendirian bahwa pemilik tanah bukanlah Kompeni, tetapi raja sendiri⁷⁾. Sikap demikian adalah sikap menolak kekuasaan asing terhadap kekuasaan raja Yogyakarta. Semestinya raja yang lebih berkuasa dari pada Kompeni. Di sinilah terjadinya konflik terus-menerus antara sultan dengan Kompeni.

Pada waktu Daendels menjadi gubernur jenderal (1808–1811), tindakan yang diambil pertama kali adalah menyentralisasi pemerintahan. Gubermen Java's Noord Oost-kust dan residen-residen di Vorstenlanden diganti dengan istilah minister. Hubungan surat-menyurat antara minister dengan gubernur jenderal dilakukan secara langsung.

Sementara itu juga terjadi perubahan di Yogyakarta yang menyangkut upacara resmi penyambutan tamu-tamu Kompeni. Sebelumnya telah berlaku ketentuan bahwa tamu-tamu yang datang, harus terlebih dahulu mempersembahkan minuman kepada raja yang duduk di kursi. Apabila menuju istana, sebelum melewati alun-alun, tamu-tamu yang diundang harus turun dari kereta dan berjalan kaki. Selain itu mereka duduk di tempat yang lebih rendah dari tempat duduk sultan. Hal ini menurut Kompeni harus diubah karena merendahkan kekuasaan dan wibawa Kompeni.

Kurang lebih 6 bulan setelah Daendels memegang pemerintahan, tepatnya pada 28 Juli 1810, ia mengeluarkan peraturan cara-cara penerimaan tamu. Pada dasarnya menempatkan tamu dan raja sama kedudukannya, tidak ada yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Agaknya hal ini adalah ide-ide persamaan hak dan kedudukan seperti yang dipakai dalam semboyan Revolusi Perancis.

Sebelumnya, misalnya minister-minister harus mempersembahkan sirih atau minuman kepada raja, tetapi sekarang yang menyajikan cukup para pelayan secara bergantian pada raja dan minister. Selanjutnya apabila minister mengunjungi istana dengan kereta, ia diantar oleh seorang pengawal disertai 12 orang prajurit berkuda. Tempat duduk raja sama tingginya dengan minister. Peraturan baru lainnya yang menunjukkan persamaan antara raja dan minister ialah pada waktu tamu mendekati raja, raja harus berdiri dan tamu boleh membuka topi dan memakainya lagi. Selanjutnya bila mereka berbicara tamu boleh membuka topinya.

Peraturan baru ini tentu dianggap merendahkan wibawa raja sebagai penguasa kerajaan. Selain itu masih ada tanda-tanda kebesaran dan keagungan yang ikut dihilangkan, misalnya penggunaan payung. Peraturan yang berlaku mulai tahun 1810 itu

ditolak oleh HB. II, namun akhirnya dilaksanakan juga di istana karena beberapa hal yang mendesak.

Pada waktu P. Engelhard (25 Pebruari – 19 Nopember 1809) menjabat minister di Yogyakarta tidak terjadi konflik yang berarti antara sultan dan minister, tetapi penggantinya, G.W. Wiese (Nopember 1808 – Januari 1810), mendapat komisi pembayaran sarang burung dari sultan atas perintah gubernur jenderal. Ternyata Daendels menyatakan tidak tahu-menahu tentang komisi itu. Wiese merasa malu dan minta dipindahkan dari Yogyakarta. Walaupun sudah membujuk sultan agar tidak membuka rahasianya, tetapi sultan menolak. Penggantinya adalah J.W. Morress (Januari 1810 – Oktober 1810).

Pada waktu Daendels datang di Yogyakarta pada 29 Juli 1809, sultan menerima dengan tatacara baru, tetapi pada kunjungan balasan sultan sangat marah karena Daendels tidak mau menyongsong kedatangannya dan tetap duduk di kursinya. Peristiwa penerimaan tamu yang sama-sama tidak berkenan di hati masing-masing ini tidak membawa akibat yang berkepanjangan.

Ketika menerima Noorrees, sultan menggunakan cara-cara lama. Moorrees yang merasa kesal kemudian diganti lagi oleh P. Engelhard (Oktober 1810 – 14 Nopember 1811), karena pekerjaannya tidak memuaskan. Selain itu sultan selalu menolak tuntutan Daendels.

Untuk menyelesaikan hal-hal yang selalu menemui jalan buntu, Daendels mengirim van Braam, minister untuk Istana Surakarta. Van Braam membawa surat yang isinya, *pertama*, supaya Raden Ranga menyerahkan diri ke Bogor dan minta ampun atas perbuatannya kepada gubernur jenderal, dan *kedua*, supaya Tumenggung Natadiningrat diberhentikan dari jabatannya karena sangat membahayakan kedudukan raja mau-

pun gupermen. Apabila permintaan ini tidak dipenuhi, Daendels akan datang sendiri ke Yogyakarta dengan membawa serdadu. Namun yang sangat penting adalah permintaan ketiga yaitu mengembalikan Danureja II sebagai patih.

Kedatangan van Braam di Yogyakarta disambut baik oleh Danureja II, karena merasa nasibnya akan dibela. Danureja mengatakan bahwa niat gubernur jenderal tidak pernah terlaksana karena ada "klik" yang terdiri atas Ratu Kencana (istri sultan), Natakusuma dan Natadiningrat. Putra mahkota yang dekat dengan Danureja II selalu dibenci oleh mereka. Segala sesuatu yang diusulkan kepada sultan selalu diterima dan itu semua menyulitkan Kompeni. Apabila Kompeni ingin segala keinginannya terlaksana, maka "pembangkang" itu harus disingkirkan. Van Braam bersedia menyampaikan hal-hal itu kepada Daendels. Danureja menginsafkan Van Braam bahwa sesungguhnya "klik" lawan yakni Ratu Kencana, Natakusuma, Ratu Kencana, dan Natadiningrat di satu pihak dengan gupermen dan Danureja II di lain pihak.

Tidak diketahui dengan pasti apa sebabnya sultan menerima tuntutan Kompeni. Apakah itu disebabkan oleh kecerdikan van Braam ataukah juga karena adanya ancaman serdadu Kompeni. Menghadapi desakan yang lain terpaksa Natadiningrat diturunkan dan diganti lagi oleh Danureja II sebagai patih pada tanggal 12 Nopember 1810. Orang kuat di pihak sultan, yakni Raden Rangga harus diserahkan pula pada gupermen. Sultan menetapkan keberangkatan Raden Rangga ke Bogor pada tanggal 26 Nopember 1810. Begitu pula Natakusuma, Natadiningrat serta Sumadiningrat harus diserahkan. Tuntutan ini berdasarkan muslihat Danureja II agar mereka juga disingkirkan.

Taktik yang terakhir dari Danureja II adalah menurunkan tahta HB. II. Hal ini ternyata terlaksana dengan datangnya Daendels ke Yogyakarta pada 23 Desember 1810, untuk menu-

runkan tahta HB. II dan mengangkat putra mahkota sebagai raja dengan nama Kanjeng Sultan Mataram atau HB. III. Dengan demikian cita-cita Danureja — Kompeni sudah tercapai. Sementara itu Sultan Sepuh tidak berkuasa dan diperbolehkan tinggal di istana. Pada waktu Grebeg ia hadir di sisi HB. III. HB. II pun masih diizinkan tinggal di Yogyakarta.

Walaupun HB. II sudah tidak berkuasa lagi, tetapi ia tetap berpendirian, bahwa raja adalah pemilik kerajaan seisinya. Dalam suratnya kepada Daendels ia menandakan bahwa penyerahan mahkota kerajaan bukan berarti raja mendapat tanah pinjaman (baca : tanah Kompeni). Sebenarnya Daendels sendiri tidak konsekuen dengan paham yang dianutnya. Di satu pihak ia adalah penganut Revolusi Perancis yang menolak ide penguasaan dan peminjaman tanah, tetapi sebagai penguasa di Jawa ia merupakan seorang *despoot*.

Pada masa HB. III inilah, Daendels minta agar tuntutannya dipenuhi, karena ia telah membantu mengangkatnya menjadi sultan. Daendels minta agar sultan membayar 196.320 uang perak Spanyol untuk membiayai ekspedisinya. Selain itu menteri-menteri Yogyakarta dan Surakarta harus membuat persetujuan dengan patih Yogyakarta dan Surakarta untuk menentukan perbatasan antara tanah-tanah kerajaan dan tanah gupermen. Selanjutnya masih dibuat lagi suatu perjanjian dengan pihak Kerajaan Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 1811 yang menetapkan bahwa uang pembayaran sewa pantai yang biasanya dibayar oleh Kompeni dihapuskan. Kompeni mendapat tanah-tanah sebagai tanah gupermen yang terletak di Semarang, Demak, Jepara, Salatiga, dan distrik-distrik Wirosari, Grobogan dan Sela. Yogyakarta mendapat tanah-tanah di sekitar Boyolali dan beberapa daerah *mancanegara*.

Pemerintahan HB. III tidak berlangsung lama. Setelah Inggris menggantikan Belanda, HB. II diangkat lagi sebagai raja un-

tuk keduanya yakni pada akhir bulan September 1811, sedangkan Kanjeng Raja kembali sebagai putra mahkota. Dengan demikian pemerintahan HB. II memasuki periode baru, yakni masa kekuasaan Kompeni–Inggris 1811–1816.

3.4.2 *Melawan Kekuasaan Inggris*

Setelah Kompeni Belanda menyerah kepada Inggris di Tuntang pada tanggal 18 September 1811, mulailah pemerintahan sisipan Inggris. Dikatakan sisipan karena pemerintahannya hanya berlangsung tahun 1811–1916, dan setelah itu dikembalikan pada Kompeni Belanda. Beberapa hari kemudian tepatnya pada 23 September, Kapten Robinson datang di Yogyakarta dan mengumumkan bahwa guna menjaga kelangsungan pemerintahan Inggris, segala peraturan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku dan tidak boleh diubah.

HB. II tidak mepedulikan pengumuman baru tersebut bahkan dalam masa peralihan ini ia memerintahkan membunuh Danureja II dan kemudian mengangkat penggantinya, Sindunegara, pada bulann Oktober 1811⁹⁾. Menghadapi tindakan ini, P. Engelhard, minister Yogyakarta, tidak setuju dan akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 14 Nopember 1811. Penggantinya adalah J. Crawford (14 Nopember 1811 – September 1814) yang menjabat sebagai residen Kompeni – Inggris. Crawford datang di Yogyakarta disertai 300 serdadu dan menyampaikan protes kepada HB. II maupun kepada Sultan Raja tentang kejadian yang baru berlaku. Untuk sementara waktu ia tidak mengadakan hubungan dengan istana sebelum mendapat perintah dari pemerintah pusat Inggris. Rupa-rupanya pendiriannya tidak mendapat persetujuan pemerintah sehingga ia diperintahkan segera mengadakan kunjungan secara resmi kepada HB. II. Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1811 dan berakhir dengan ramah-tamah.

Sebulan kemudian, yakni tanggal 27 Desember 1811 Raffles datang di Yogyakarta dan pada tanggal 28 Desember ia membuat perjanjian yang menetapkan bahwa HB. II tetap memegang pemerintahan dan Kanjeng Raja diturunkan menjadi putra mahkota, sedangkan Sindureja diangkat menjadi patih. Apakah tindakan mengangkat HB. II ini tidak tepat? Tidak dapat diketahui dengan pasti karena dokumen perjanjian pengangkatan itu tidak ditemukan lagi. Mungkin setelah Raffles insaf bahwa tindakannya itu tidak benar, maka ia berusaha menghilangkan dokumen tersebut. Selanjutnya ia kembali ke Batavia dengan perasaan puas karena hubungan dengan raja-raja Vorstenlanden sudah pulih kembali.

Suasana di kalangan istana pun dapat dikatakan aman karena kelompok yang merasa menang berusaha mengadakan pembersihan sampai tuntas, sebaliknya kelompok yang merasa tersisih berusaha mencari kawan yang dapat diajak melawan kelompok penguasa. Pembersihan dilakukan terhadap Kiai Danukusuma (ayah Danureja II) yang menemui ajalnya di hutan dekat Pacitan. Putra mahkota yang terpencil dapat berhubungan dengan Tan Jin Sing, seorang kapten Cina di Yogyakarta. Dengan perantaraan. Kanjeng Raja dapat berhubungan dengan Crawford.

Pada waktu pelantikan Kanjeng Raja pada tanggal 10 Januari 1810, disebutkan bahwa Yogyakarta tidak menerima uang sewa pantai lagi. Batas-batas kerajaan diatur lagi dan ada pertukaran daerah. Ada yang diberikan gupermen dan ada pula yang diberikan sultan. Atas permintaan Raffles, perjanjian dilaksanakan juga tetapi baik sunan maupun sultan keberatan. Keadaan yang demikian ini digunakan oleh putra mahkota untuk berpihak pada Inggris dan Natadiningrat yang pada waktu itu sudah kembali di Yogyakarta juga memihak pada Inggris.

Kelihatannya baik putra mahkota maupun Natakusuma berpihak pada Inggris, tetapi kenyataannya mereka saling mencurigai. Putra mahkota khawatir kalau Natakusuma dengan bantuan Inggris dapat menggantikan HB. II; oleh karena itu ia berusaha menyingkirkan Natakusuma dengan mengundang *kecu* (perampok) dari daerah Pajang, Mataram dan Sukawati. Mereka diminta pura-pura merampok rumah Natakusuma dan sekaligus membunuhnya. Namun para *kecu* tidak ada yang datang memenuhi undangan itu karena takut terkena kutuk dari orang yang tidak bersalah.

3.4.2.1 *Persiapan Perang.*

Situasi sudah semakin meruncing, di satu pihak karena adanya kelompok penguasa dan adanya kelompok tandingan, di samping masih ada kelompok-kelompok kecil yang menggabung pada kelompok penguasa ataupun lawan. Keadaan demikian semakin memuncak sehingga Kompeni Inggris memihak pada kelompok lawan; oleh karena itu Inggris berusaha mempercepat perubahan-perubahan ke arah tercapainya kepentingannya dengan mendesak agar pelaksanaan perjanjian yang pernah dibuat oleh raja segera ditepati¹⁰⁾.

Namun demikian sudah dapat diketahui sebelumnya bahwa HB. II tidak akan begitu mudah mengikuti tuntutan Inggris. Dengan demikian baik sultan maupun Inggris saling memperkuat diri untuk menjaga kemungkinan terjadinya konflik yang memuncak sehingga timbul perang antara kedua belah pihak. Sultan memanggil patih Sindunegara dan pembantu-pembantu lain seperti Pringgakusuma dan *carik* Prawirasastra untuk membicarakan masalah yang makin gawat dengan bersatunya tiga kekuatan yang membantu putra mahkota, yakni Danureja II, Kapten Jin Sing, dan Residen Crawford.

Sementara itu Raffles datang di Semarang, sehingga residen maupun Patih Danureja II harus menjemput di kota itu bersama-sama rombongan penjemput dari Surakarta. Sejak itulah serdadu Inggris makin banyak kelihatan di Yogyakarta. Sultan juga menyiapkan prajurit dengan membagi-bagi daerah penjagaan yang pada pokoknya mempertahankan istana dari segala penjuru. Sultan memerintahkan Tumenggung Majegan, kadipaten dan Lowanu menjaga halaman, Tumenggung Bagelen menjaga pintu pamengkang, dan Tumenggung Gagatan serta Jayawidanta menjaga pantai.

Penjagaan lorong timur diserahkan pada Pangeran Adinegara, bagian barat diserahkan pada Panji Surengrana, dan di belakang dijaga prajurit Jayapura. Bagian timur diperkuat oleh Tumenggung Sumadiningrat, Wirawinata dan Cokrodirja dan diperkuat oleh prajurit Ketanggung Bugis, Mandrapraptono, Mertanegara, Sumadiwiryana dan Padmawijaya, sedangkan bagian dalam diperkuat oleh Ki Jayakusuma.

Pada awal bulan Desember 1811 Raffles pergi ke Jawa Tengah. Pada tanggal 23 Desember ia pergi ke Surakarta dan menyodorkan kontrak dengan sunan dan Pemerintah Inggris diwakili oleh Residen Kolonel Adams. Perjanjian ini penting untuk mengubah hubungan antara Inggris dengan raja-raja Vorstenlanden. Sebelum berlakunya perjanjian ini raja-raja mendapat penghasilan dari daerah masing-masing, tetapi sekarang mereka mendapat ganti sejumlah uang dari Inggris yang dibayar setiap tahun¹¹⁾.

Pada tanggal 29 Desember Raffles mengirim surat dari Semarang kepada wakil ketua Dewan Hindia, bahwa telah dibuat perjanjian dengan raja-raja Vorstenlanden, tetapi ia menambahkan bahwa perlu kepastian pelaksanaan perjanjian itu dan tidak boleh diingkari. Raffles mengetahui adanya intrik yang merong-

rong kekuasaan Pemerintah Inggris yang sudah terjalin kuat. Dengan tegas sultan tidak mau memenuhi tuntutan perjanjian itu walaupun residen berkali-kali mendesak agar perjanjian itu dipenuhi. Untunglah kemudian terjadi pembontakan di Palembang yang melibatkan hampir semua serdadunya.

Dari Palembang Raffles terus ke Yogyakarta untuk menin-dak sultan. Sementara itu Crawfurd yang tidak berdaya itu per-gi ke Semarang untuk mencari bantuan pasukan. Tepat pada saat itu muncul pasukan dari Palembang yang dipimpin oleh Kolonel Gillespie.

Dalam babad dikisahkan bahwa setibanya di Yogyakarta Raffles mengirim surat kepada sultan agar turun dari tahta dan digantikan oleh putra mahkota. Pangeran Mangkudiningrat harus membawa surat ini kepada sultan, tetapi surat itu di-buang. Hal ini menyebabkan Raffles marah dan sebaliknya sul-tan menyiapkan barisan untuk menghadapinya.

3.4.2.2 *Perang Spehi*

Perang antara Yogyakarta pada masa HB. II melawan Kom-peni Inggris ini dalam babad disebut *Geger Spehi*. Disebut *spehi* karena sebagian tentara Inggris terdiri atas prajurit Sepoy (In-dia) yang memasuki dinas tentara Inggris.

Sultan sudah menyiapkan prajuritnya untuk menghadapi se-rangan tiba-tiba. Di sebelah timur istana dijaga oleh Jayadi-ningrat dibantu oleh Wiryodipuro dan bagian barat oleh Rana-diningrat. Di selatan mesjid diperkuat oleh prajurit yang dipim-pin oleh Purbakusuma. Semua orang *mutihan*, *pengulu*, *modin*, dan *ketib* berjaga-jaga di mesjid untuk berperang sabil melawan Inggris. Pasukan Inggris yang menyerang istana selain pasukan inti Inggris dan spehi juga mendapat tambahan prajurit Prang-

wadana sebanyak 300 orang, pengikut Kapten Jin Sing sebanyak 40 orang, pengikut Natakusuma, dan Natadiningrat.

Peringatan terakhir dari Raffles berupa surat kepada sultan agar turun dari tahta tidak dihiraukan, bahkan sultan marah dan tidak takut akan ancaman serangan Inggris.

Tepat pukul empat tanggal 18 Juni, Inggris menembakkan meriamnya dari benteng ke arah *pagelaran*. Sejak itulah terjadi tembak-menembak dan saling membalas dengan tembakan meriam. Inggris mendatangkan bantuan dari benteng-benteng di daerah Surakarta, yakni dari Klaten, Boyolali dan Surakarta. Pada awal perang itu, serangan-serangan banyak dilakukan oleh prajurit Yogyakarta di bawah pimpinan Sindurejo, sehingga serdadu Inggris dikejar sampai benteng. Banyak serdadu Inggris menjadi korban serangan itu. Pasukan lain yang dipimpin Jayawinata menyeberang Sungai Code ke arah barat. Bantuan tembakan meriam menghalau Jayawinata dan prajuritnya. Mereka lari ke arah timur dan terjadi korban 3 orang serdadu.

Pertempuran di medan timur dipimpin oleh Reksanegara dengan bantuan dari *mancanegara*. Pertempuran ini menyebabkan tewasnya 4 orang serdadu Inggris. Pertempuran lain di sebelah barat mesjid sengit sekali. Bantuan datang dari prajurit Ngabeyan dan Patangpuluhan. Serangan yang berasal dari sebelah barat Sungai Winongo menyebabkan Inggris mengundurkan diri.

Pada awal perang ini, Inggris terdesak sehingga perlu mendatangkan bantuan prajurit Mangkunegaran, pengikut Natakusuma dan Natadiningrat. Prajurit sultan makin nekad dengan membongkar tembok Pecinan dan membakar Kampung-kampung Sayidan, Ketandan, Jayanegaran, dan Loji Wetan serta Loji Kebon. Serdadu Inggris makin panik. Mereka tidak membalas tembakan tetapi mereka sibuk memadamkan api yang sudah berkobar.

Tembakan meriam balasan dari benteng diarahkan ke masjid. Kampung Kauman terbakar dan penghulu-penghulu melarikan diri ke Dongkelan selatan istana. Selanjutnya Inggris melakukan pagar betis mengepung istana dimulai dari Pangurakan. Pagelaran terus ditembaki dan menjadi sasaran utama. Raffles memerintahkan serdadunya memanjat benteng. Serangan balasan diperkuat dengan tembakan meriam.

Di medan barat alun-alun terdapat 400 serdadu spehi di bawah pimpinan Buysks yang berhadapan dengan prajurit Rana-diningrat. Pertempuran tidak dapat dielakkan. Pagi hari berikutnya 400 serdadu spehi dipersiapkan melawan Adinegara. Meriam di Pagelaran dapat menolong mengusir Inggris. Dua tawanan serdadu Ambon ditangkap dan diislamkan. Tembok Pecinan kidul dirusak untuk pangkalan meriam-meriam Inggris dan tembakan-tembakan ke arah Kadipaten mengakibatkan kerusakan hebat. Mangkudiningrat luka terkena peluru.

Sementara itu sultan memerintahkan Sawunggaling untuk mencari bantuan prajurit *pancen* pada *wong cilik* (petani) di daerah Surakarta. Hal ini dianggap penting karena prajurit sultan semakin terdesak. Inggris pun makin memusatkan serangan balasan dan melakukan penyerangan pada hari berikutnya langsung dipimpin oleh Raffles. Pasukannya terdiri atas 200 orang serdadu spehi di medan barat dan 200 orang serdadu di bawah Kapten Jin Sing. Bagian tenggara benteng sudah dijaga 200 orang spehi dan bagian barat daya juga 200 orang spehi. Prajurit Prangwedana ikut dalam penyerangan ini.

Pukul lima 200 orang spehi langsung menyerang Pagelaran. Dari loji ditembakkan meriam dan dibalas dari Pagelaran sehingga tembak-menembak ini seru sekali. Raffles yang memimpin penyerangan itu menderita luka-luka pada tangannya. Serangan ini ternyata hebat dan prajurit sultan tidak dapat menahan me-

reka, sekalipun Raden Mas Salya masih tetap mempertahankan Pagelaran. Medan perang timur dihujani meriam, begitu pula medan barat sehingga prajurit sultan melarikan diri berlindung di Pagelaran. Banyak korban mati akibat serangan spehi.

Sultan disertai istri dan putra-putrinya lari ke barat. Sementara itu di medan tenggara terjadi pertempuran sengit. Sumadiningrat, Cakradirjo dan Wiryawinata secara berani melawan serangan spehi. Dalam pertempuran tersebut Sumadiningrat tewas. Pertempuran medan barat daya juga tidak kalah seru. Di situ Jayadipura terpaksa lari ke arah Dongkelan. Medan pertempuran tenggara meminta korban Jayengasmara dan Jaya murcinata.

Prajurit sultan sudah terdesak dan tidak mungkin mengadakan perlawanan. Mereka menyatakan menyerah pada tanggal 28 Juni 1812. Orang Ambon yang sudah menjadi tawanan perang itu dikirim kepada Raffles dengan pakaian putih untuk menyampaikan berita kekalahan sultan. Di berbagai tempat pertempuran dipasang bendera putih sebagai tanda menyerah. Sultan dan beberapa orang putra dan pengikutnya dibawa ke Loji. Selama 12 hari sultan tinggal di loji, kemudian dibawa ke Semarang melalui Klaten, Boyolali, Salatiga, dan Ungaran. Dari Semarang diangkut dengan kapal menuju pembuangannya di Pulau Pinang.

3.4.2.3 *Akibat Perang*

Perang melawan Inggris yang hanya berlangsung dua hari memaksa HB. II mengakui keunggulan serdadu spehi. Sultan terpaksa menyerah dan dikenakan pembuangan ke Pulau Pinang. Dengan kekalahan HB. II, maka gupermen menuntut pihak yang menang yakni Sultan Raja memenuhi permintaan-permintannya.

Sultan Raja kemudian diangkat menjadi HB. III pada tanggal 28 Juni 1812. Lebih-kurang sebulan lamanya Inggris menyiapkan perjanjian dengan HB. III yang akan ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1812. Perjanjian secara ringkas membatasi kekuasaan raja di bidang ekonomi dan politik sehingga raja tidak dapat bergerak sama sekali.

Betapa berat isi perjanjian dan ikatan itu nampak dalam pokok-pokok perjanjian di bawah ini, (seluruhnya terdapat 24 pokok), antara lain sebagai berikut :

- (1) Sultan tetap bersahabat dengan Inggris selama-lamanya
- (2) Sultan dan penggantinya tidak diperbolehkan memiliki prajurit kecuali dengan persetujuan gupermen
- (3) Sultan menyerahkan tanah-tanah di daerah Kedu, Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan
- (4) Sultan menyerahkan pelabuhan-pelabuhan dan pasar-pasar kepada gupermen dan sultan mendapat ganti rugi sebesar 120.000 uang perak Spanyol
- (5) Sultan menyerahkan gua-gua penghasil sarang burung
- (6) Sultan menyerahkan semua hutan jati
- (7) Sultan bersedia menjalankan pemerintahan dan setia pada gupermen
- (8) Sultan membiayai pembangunan loji, jembatan dan jalan-jalan
- (9) Sultan tidak diperkenankan mengangkat patih sebelum mendapat persetujuan dari residen
- (10) Sultan dilarang berhubungan dengan raja-raja Jawa ataupun orang-orang kulit putih lainnya
11. Sultan tidak diperkenankan mengganggu pemerintahan Paku Alam I dan kawulanya 12).

Kekuasaan HB. III sangat dibatasi dengan maksud agar tidak muncul kekuatan politik baru yang mampu melawan kekuasaan gupermen. Dalam hal ini gupermen menggunakan kekuatan lain untuk ikut serta mengontrol pemerintahan HB. III, yakni dengan berdirinya pemerintahan Paku Alam. Natakusuma diangkat sebagai pangeran bebas dengan gelar Paku Alam I dan memerintah atas sebagian tanah kesultanan seluas 4000 cacah. Ia masuk dalam dinas gupermen Inggris dilengkapi dengan korp prajurit yang dimasukkan sebagai kekuatan kontrol terhadap setiap gerakan HB. III.

Perjanjian antara Pemerintah Inggris dengan Natakusuma berisi 9 pokok yang ditandatangani oleh Residen Crawford dan Natakusuma pada tanggal 1 Maret 1813. Adapun pokok-pokok perjanjian itu antara lain sebagai berikut:

- (1) Paku Alam dan keluarganya dilindungi gupermen
- (2) Paku Alam mendapat tunjangan sebesar 750 uang perak Spanyol tiap bulan dan lungguh seluas 4000 cacah
- (3) Setelah Paku Alam I meninggal akan digantikan putranya, Suryodiningrat
- (4) Perubahan batas hanya dapat diselenggarakan oleh gupermen dan penarikan pajak baru tidak diperkenankan
- (5) Paku Alam I mempunyai 100 orang prajurit yang dipersenjatai dan diberi pakaian seragam atas biaya gupermen.¹³⁾

Orang yang dianggap berjasa pada Pemerintah Inggris yakni Kapten Tan Jin Sing yang menjadi perantara antara Sultan Raja dan Inggris. HB. II mencari bantuan gupermen Inggris. Berhubung telah tercapai kemenangan, Sultan Raja yang diangkat sebagai HB. III itu memberikan hadiah atas jasa-jasanya. Kapten Cina ini diberi tanah lungguh seluas 800 cacah dan setelah ia masuk Islam diangkat menjadi abdi dalem dengan pangkat bupati dengan gelar Raden Tumenggung Secadiningrat.

Pada waktu pecah Perang Diponegoro, Kerajaan Yogyakarta diperintah oleh HB. V atau Sultan Menol. Raja ini masih berusia 3 tahun sehingga memerlukan perwalian dan memerintah dari 19 Desember 1822 sampai dengan 17 Agustus 1828. Anggota perwakilan terdiri atas nenek, ibu, Pangeran Mangkubumi (putra HB. II) dan Pangeran Diponegoro. Diponegoro meninggalkan tugas perwalian pada tanggal 20 Juni 1825 yakni hari pertama ia melawan kekuasaan Pemerintah Belanda.

Ia menggantikan HB. IV atau Sultan Jarot yang memerintah pada tanggal 16 November 1816 — sampai dengan meninggalnya tanggal 16 Desember 1822. Mula-mula raja ini juga di bawah perwalian Paku Alam I sampai ia cukup umur untuk memerintah.

Sementara berkobar Perang Diponegoro, timbul krisis kepemimpinan di Kerajaan Yogyakarta. Pada waktu Diponegoro dan Mangkubumi masih menjadi wali, kedudukan raja masih kuat, tetapi setelah mereka meninggalkan raja, tidak seorang pun pemimpin yang bertanggung jawab terhadap perubahan politik. Wali-wali lain hanyalah wanita-wanita yang tidak berdaya. Raja yang masih kecil itu tidak dapat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pelik.

Melihat keadaan ini Pemerintah Belanda berusaha untuk mengembalikan kewibawaan kekuasaan kerajaan, tetapi tidak mungkin diambilkan orang-orang dari lingkungan istana yang mempunyai wibawa dan sanggup mengembalikan keamanan dan meredakan peperangan. Satu-satunya yang dipandang dapat menolong mengembalikan situasi seperti semula adalah Sultan Sepuh yang selama ini hidup dalam pembuangan. Tempat pengasingannya yang terakhir adalah Ambon, oleh karena itu Pemerintah Belanda berusaha untuk mengembalikan ketakwaan Kerajaan Yogyakarta. Akhirnya Komisaris Jenderal Dubus memerintahkan agar Sultan Sepuh dibawa ke Surabaya.

Sesampainya di Yogyakarta, Sultan Sepuh diangkat menjadi raja yang ketiga kalinya. Pemerintahannya hanya berlangsung dari 17 Agustus 1826 sampai dengan meninggalnya 2 Januari 1828 karena usia lanjut. Pada waktu Sultan Sepuh memerintah lagi, HB. V diturunkan dari tahta dan tetap menjadi Sultan Anom. Maksud Belanda mengembalikan Sultan Sepuh tidak berhasil meredakan peperangan bahkan sebaliknya pembrontakan meluas dan mengacaukan ekonomi politik Belanda. Walaupun Sultan Sepuh dianggap berwibawa oleh Belanda tetapi rupanya raja ini berpihak pada sang pangeran karena adanya persamaan cita-cita untuk melawan kekuasaan kolonial.

3.5 Akibat-akibat Perlawanan

Setelah mengikuti rangkaian uraian perlawanan HB. II terhadap Kompeni Belanda maupun Inggris, baik secara ideologis berupa mempertahankan feodalisme yang sudah berakar lama maupun pemaksaan kekuasaan Kompeni Inggris agar HB. II turun tahta, dapatlah dilihat akibat-akibat yang terjadi sebagai hasil kepahlawanan dan keberanian menentang kolonialisme.

Sikap perlawanan yang dipelopori oleh HB. II ternyata tetap membara. Walaupun sultan ini sudah mengalami pembuangan yang cukup lama tetapi cita-citanya untuk menolak campur tangan asing tetap dipertahankan dengan mati-matian. Hal ini memberikan inspirasi juga kepada kerabat istana yang mempunyai ideologi yang sama yakni anti asing. Raden Rangga Prawiradirja III sudah mengawali secara fisik menentang Kompeni Belanda dan HB. II juga merasa terdesak oleh kelompok penentang raja dibantu oleh Kompeni Inggris.

Tepat kiranya apabila Pangeran Diponegoro juga meneruskan api perlawanan terhadap dominasi kekuasaan Belanda. Masih banyak kerabat istana semasa Diponegoro yang masih

menjadi pengikut Sultan Sepuh. Baik bangsawan maupun petani merasa tertekan oleh sistem peraturan persewaan tanah yang digunakan untuk tanam-tanaman yang hasilnya laku di pasar Eropa. Mereka dirugikan oleh sistem ini, di satu pihak bangsawan karena adanya peraturan baru dari van der Capellen yang harus mengembalikan uang sewa yang sudah terlanjur diterima dan di pihak lain petani yang harus menyerahkan pajak berupa tenaga dan hasil bumi. Mereka merasa berat menerimanya dan oleh karena itu mereka mendukung gerakan Pangeran Diponegoro.

Perjanjian yang ditandatangani baik oleh HB. II dan HB. III ternyata merupakan pemaksaan pengakuan pemerintahan kolonial dan mengurangi kekuasaan raja-raja Yogyakarta sampai seminimal mungkin, sehingga mereka tidak berdaya lagi untuk melakukan hubungan-hubungan ke luar kerajaan. Kekuasaan raja dipersempit, wilayah dikurangi, kebebasan dirampas dan semuanya harus mengikuti perintah dan kemauan gupermen. Sejak itu kekuasaan raja-raja *vorstenlanden* makin surut dan mereka tidak lagi menjadi birokrat tradisional tetapi lebih menjadi kolonial.

Setelah dibuangnya HB. II dan digantikannya oleh HB. III, maka kekayaan kerajaan dan istana diangkut oleh Inggris. Kekayaan seharga 400.000 uang perak Spanyol dan barang-barang perhiasan. Sesungguhnya kolonialisme adalah 'perampok' politik dan ekonomi. Secara politik ia menekan kekuasaan dan bahkan menghilangkan kekuasaan tradisional dan secara ekonomis ia akan menguras seluruh keuntungan seisi istana dan kerajaan¹⁴⁾.

Kompeni Belanda maupun Kompeni Inggris selalu mencegah agar tidak terjadi kekuatan tunggal yang mampu melawan mereka; oleh karena itu mereka selalu membantu pihak-pihak yang lemah. Setelah dibantu dan menang, mereka menuntut upah. Setelah muncul kekuatan tandingan, seperti halnya pengangkatan HB. III dan berdirinya pemerintahan Paku Alam I.

Jelas terjadinya pertentangan kepentingan, di satu pihak dengan makin meluasnya usaha memerosotkan feodalisme sejalan dengan perkembangan liberalisme yang makin menyebar dan di pihak lain pelaksanaan praktek pemerintahan sehingga memerosotkan feodalisme hanya untuk kepentingan kolonial yang memudahkan cara-cara mengatur pemerintahan. Ide liberalisme dalam arti meringankan beban petani belum terjangkau sama sekali. Pelaksanaan liberalisme yang tersendat-sendat dan penderitaan petani yang dirasakan makin dalam itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Diponegoro.

Kepincangan-kepincangan sosial inilah yang tidak pernah diketahui oleh Kompeni Belanda maupun Inggris, sehingga setiap kali terjadi gerakan-gerakan menentang mereka. Gerakan ini bukan sekedar terjadi di permukaan saja tetapi sebenarnya berakar dalam sehingga perlawanan itu terus-menerus demi hilangnya sistem kekuasaan kolonial yang selalu mendominasi kekuasaannya. Perjuangan anti asing dan bara perlawanannya ternyata selalu muncul selama kepincangan ekonomi politik tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah kolonial. Perjuangan dan perlawanan ini wajar kiranya dalam mencari jalan baru untuk mencari penerang ke jalan yang diidamkan yakni suatu masyarakat yang tenteram tanpa gangguan rokhaniah dan jasmaniah.

CATATAN

- 1) M.C. Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi* (London : Oxford University Press, 1972).
- 2) J.F. Walvaren van Nes, Verhandeling over de waarschi jinlike aarzaken, die aanleiding tot de onlusrun van 1825 en de volgende jaren in de Vorestenlanden gegeven hebben, "(TNI, 6, hal. 844, hal. 113 - 171).
- 3) Penyelesaian mengenai perbatasan antara Yogyakarta dan Surakarta baru tercapai setelah selesainya Perang Diponegoro, yakni pada Penetapan Perbatasan pada 27 September 1930.
- 4) P.J. Veth, *Java, Geografisch, Historisch* Batavia/Haarlem De Erven F. Bohn/G. Kalf & Co., 1907, hal. 617-625.
- 5) Pembagian Daerah kerajaan secara horisontal dilihat dalam Soemarsoed Moertono, *Stute and Graft in Oed Java* (Ithaca: Cornell University Pers. 1968).
- 6) "Oversicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjcartasche Rijk, 1755 - 1811" (TNI, 31844), hal. 279.
- 7) C. Poencen, "Amengkubuwana II, Ngajogjakarta's twee de Sultan," B K I, LVIII, 1905, hal. 103, 129.
- 8) "Overziet van de voornaamste gebeurtenissen in het Djoejakartasche-Rijk, sedert deszelfs stiehting 1755 tot aan het cinde van het Engelsehetussenbestuur in 1815," (TNI, 8, 1844), hal. 150 - 151.

- 19 Ibid, hal 228.
- 10) Persiapan perang dan peperangannya diceriterakan secara detail oleh Pangeran Mangkudiningrat dalam *Babad Spehi*, (transkripsi Panti Budaya 1936).
- 11) H.D. Levysohn Norman, *De Bristische Heerschappij over Java Onder hoorigheden* (The Hague : Gebroeders Belifante, 1857), hal. 67–69.
- 12) Ibid., hal. 72–74. Teks perjanjian dalam bahasa Jawa dapat dilihat pada lampiran dari R.M. Soekanto, *Sekitar Yogyakarta* (Jakarta ; Mahabarata, 1952) Lampiran 8a,b.
- 13) R.M. Soekanto, *Sekitar Jogjakarta* (Jakarta : Mahabarata, 1952, hal. 99).



BAB IV PERANG DIPONEGORO

4.1 Lata Belakang

Setiap orang Indonesia, khususnya yang telah memperoleh pelajaran sejarah di bangku sekolah, sudah tentu mengenal nama Diponegoro. Nama itu tetap harum di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Ada yang diabadikan sebagai nama perguruan tinggi, nama Kodam VII Jawa Tengah dan nama-nama jalan di berbagai kota di Indonesia.

Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengku Buwono III dari istri selir bernama Raden Ayu Mangkara-wati¹⁾). Ia lahir pada tanggal 11 Nopember 1735. Ia adalah cucu Sultan Hamengku Buwono I, pendiri Kerajaan Yogyakarta. Jadi Pangeran Diponegoro adalah keturunan raja-raja Yogyakarta. Nama kecil P. Diponegoro adalah Raden Antawirya.

Pangeran Diponegoro adalah seorang pemimpin yang revolusioner, tabah, taqwa dan berwatak satria. Meskipun berasal dari bangsawan, tetapi ia selalu dekat dengan rakyat.

Sejak kecil ia dididik secara Islam sehingga menjadi orang yang saleh. Kasih sayang Ratu Ageng selalu dicurahkan kepadanya. Dengan didikan yang demikian, setelah dewasa ia benci terhadap penjajah Belanda. Ia biasa hidup sederhana dan tidak menyukai adat Barat yang telah banyak berpengaruh dalam kehidupan kraton. Cita-citanya luhur; ingin mendirikan masyarakat baru yang merdeka dan makmur dijiwai Islam. Sikapnya itu jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan Pemerintah Kolonial Belanda untuk terus memperkuat kedudukannya di Indonesia.

Karena tekanan yang terus-menerus menghimpit bangsanya, maka bangkitlah Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mendapat dukungan dari rakyat dan bangsawan tinggi kraton.

Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda merupakan kaitan tali-temali dengan berbagai peristiwa bersejarah sebelumnya, yakni terbentuknya Kerajaan Yogyakarta berdasarkan Perjanjian Ganti tanggal 13 - 2 - 1755. Berdasarkan perjanjian itu, Kerajaan Mataram dibagi dua, yaitu Kerajaan Surakarta dengan raja Susuhunan Paku Buwono III dan Kerajaan Yogyakarta dengan raja Pangeran Aria Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Dengan Perjanjian Ganti tersebut Kompeni Belanda mempergunakan kesempatan untuk mendapat keuntungan. Kompeni Belanda sebagai pihak ketiga ikutserta mengesahkan Perjanjian Ganti yang diwakili oleh Gubernur Jendral Nicolass Hasling.

Mengapa Kompeni Belanda ikutserta dalam Perjanjian Ganti itu? Kehadirannya didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Susuhunan Paku Buwono II dengan Kompeni Belanda pada waktu ia akan wafat (1749). Dalam perjanjian itu diten-

tukan bahwa Paku Buwono II menyerahkan Kerajaan Mataram dan menitipkan putra mahkota yang belum dewasa kepada Kompeni Belanda 2). Kompeni Belanda memanfaatkan perjanjian tersebut untuk kepentingan sendiri seolah-olah. Kerajaan Mataram dan kekuasaannya secara total sudah ditangan Kompeni Belanda. Jadi menurut anggapan Belanda, Paku Buwono III naik takhta (1749 – 1988) menggantikan ayahnya yang wafat itu hanya atas kemurahan Kompeni Belanda saja.

Sebenarnya, arti perjanjian tersebut menurut adat Jawa tidaklah demikian; yang dimaksud ialah, bahwa Paku Buana II minta kepada Kompeni yang dipandang sebagai sahabat dekat untuk melindungi Kerajaan Mataram dan putra mahkotanya yang belum dewasa. Kelak, Kerajaan Mataram harus diserahkan kepada putra mahkota setelah ia dewasa atau setelah menjadi raja; tetapi Belanda seolah-olah tidak tahu menahu akan adat Jawa dan karena sifat serakahnya ingin menguasai Pulau Jawa, maka perjanjian itu diartikan bahwa kerajaan Jawa sudah menjadi hak dan kekuasaan Belanda.

Sebenarnya sejak tahun 1755 Kerajaan Mataram sudah tidak ada dan sudah timbul kerajaan baru yaitu Kerajaan Surakarta dengan raja Sunan Paku Buana III dan Kerajaan Yogyakarta dengan raja Sultan Hamengku Buwono I; tetapi Belanda beranggapan bahwa Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta itu tak lain adalah Kerajaan Mataram. Atas dasar anggapan tersebut Kompeni berhak ikut campur dalam urusan kedua kerajaan tersebut.

Dengan wafatnya Sultan Hamengku Buwono I pada tanggal 24-3-1792, maka putra mahkota dinobatkan menjadiraja Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwono II. Selama pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II banyak terjadi pertentangan antara keluarga raja sehingga menyebabkan perpecahan. Hal ini terjadi ketika Sultan Hamengku Buwono II memecat

serta menggeser kedudukan pegawai istana dan bupati-bupati yang dahulu diangkat oleh Sultan Hamengku Buwono I. Ia mengangkat para menantu sebagai pembantu-pembantunya untuk memperkuat kedudukannya sebagai raja Yogyakarta. Ia mengangkat Raden Adipati Danureja II sebagai patih, Raden Tumenggung Sumodiningrat sebagai wedana dalam dan Raden Ronggo Prawirodirja II sebagai bupati mancanegara. Hal ini membuat para pegawai yang dahulu diangkat oleh Sultan Hamengku Buwono I menjadi sangat gelisah. Mereka minta perlindungan Pangeran Diponegoro.

Kanjeng Ratu Ageng, ibunda Sultan Hamengku Buwono II yang tak tahan lagi hidup dalam istana, bersama Pangeran Diponegoro terpaksa pindah ke Desa Tegalreja yang terletak di sebelah barat laut Istana Yogyakarta. Ketika Kanjeng Ratu Ageng wafat, Desa Tegalreja diwariskan kepada cucunya, yaitu Pangeran Diponegoro yang sudah menjelang dewasa.

Situasi di dalam istana semakin tidak tentram. Patih Danureja II, memusuhi raja. Karena patih ini membantu Belanda, akhirnya ia terpaksa dibunuh atas perintah Sultan Hamengku Buwono II, sedangkan menantu Sultan Hamengku Buwono II yang lain, yaitu Raden Ronggo Pawiradirja III yang disayanginya, gugur dalam pertempuran melawan Daendels pada tanggal 17-12-1810 di Desa Sekaran, Kertasana³⁾. Sultan Hamengku Buwono II yang kemudian memusuhi Belanda diturunkan tahtanya oleh Daendels. Sebagai penggantinya diangkat Pangeran Adipati Anom (putra mahkota) sebagai raja dengan gelar Sultan Hamengku Buwono III. Walaupun demikian, Sultan Hamengku Buwono II masih diperbolehkan tinggal di dalam Istana Yogyakarta. Hal ini dilakukan oleh Daendels untuk mengadudomba ayah dan anak dengan maksud dapat mengambil keuntungan dari situasi yang timbul. Ini terjadi pada tahun 1811.

Beberapa daerah kesultanan diberikan oleh Sultan Hamengku Buwono II kepada Belanda. Di samping itu Kompeni Belanda dibebaskan membayar pajak daerah pantai. Upacara-upacara yang berlebihan untuk menghadap raja oleh residen ditiadakan dan diganti upacara yang menaikkan martabat bangsa Belanda; misalnya, waktu menghadap raja, residen boleh terus naik kereta melalui alun-alun utara. Residen boleh memakai payung kebesaran. Tempat duduk residen harus sama dengan raja. Hal ini tak disukai oleh kalangan kraton.

Karena Sultan Hamengku Buwono III dirasa lemah menghadapi Kompeni Belanda, maka tahta kerajaan diminta kembali oleh Sultan Hamengku Buwono II. Sultan Hamengku Buwono III diturunkan menjadi putra mahkota lagi (adipati anom). Hal ini terjadi tahun 1811, yakni pada waktu Pemerintah Inggris di bawah Gubernur Jenderal Raffles. Karena bermusuhan dengan Inggris, maka Sultan Hamengku Buwono II dibuang ke Penang pada tahun 1812. Sultan Hamengku Buwono III naik tahta lagi, tetapi pada tahun 1814 ia wafat. Atas usul Inggris ia diganti oleh putranya, Pangeran Jarot yang baru berusia 13 tahun. Ia bergelar Sultan Hamengku Buwono IV (1814–1822). Walaupun putra sulung, Pangeran Diponegoro tidak diangkat menjadi raja, karena ia lahir dari istri selir dan dulu memang sudah pernah ditawari jadi sultan menggantikan ayahnya, tetapi tidak mau, karena peraturan kraton tak mengizinkan. Hal ini disadari sepenuhnya oleh Pangeran Diponegoro, bahwa yang berhak naik tahta adalah adiknya, Pangeran Jarot, yang lahir dari permaisuri.

Pada waktu Inggris berkuasa, Pangeran Diponegoro jarang ke kraton. Ia hanya menghadap raja pada upacara-upacara besar, seperti Grebeg Maulud dan Idul Fitri. Hal ini disebabkan adat istiadat kraton sudah banyak dipengaruhi Barat seperti pesta minuman keras, di samping ia memang tidak suka dengan

kekuasaan penjajah dan anteknya berada di dalam Istana Yogyakarta.

Di Tegalreja, Pangeran Diponegoro dengan tekun mempelajari *Al Qur'an* dan *Hadits*. Kerap kali ia mengembara ke bukit-bukit, gua-gua⁴⁾ dan hutan-hutan serta bersemedi ke tempat yang sunyi untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Mahapencipta. Ia menjadi seorang muslim militan. Ia beranggapan bahwa penjajah merupakan hal yang mungkar yang wajib dimusnahkan oleh setiap muslim; karena itu tak heran kalau ia kemudian menjadi pemimpin perjuangan yang tangguh dalam mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Di samping itu pengembaraannya ke seluruh Jawa Tengah membekali dirinya sebagai pimpinan perang yang ulung sehingga lebih mengenal medan peperangan dari pada musuhnya.

Kekuasaan Inggris di Indonesia berlangsung dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Setelah itu pemerintahan kembali ke tengah penjajah Belanda dan muncul peraturan baru yang mengizinkan orang asing boleh menyewa tanah secara besar-besaran. Hal ini sangat dibenci Pangeran Diponegoro, karena bisa menimbulkan pemerasaan tenaga dan kekayaan rakyat.

Pada tanggal 6 Desember 1822 Sultan Hamengku Buwono IV wafat. Atas persetujuan Belanda, Pangeran Menol, putranya yang masih berumur 3 tahun diangkat menjadi raja dengan gelar Hamengku Buwono V (1822-1826). Karena masih kanak-kanak, ia didampingi oleh suatu Dewan Perwalian yang terdiri atas nenek (permaisuri Sultan Hamengku Buwono III), ibunda sultan (permaisuri Sultan Hamengku Buwono IV), Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Mangkubumi (putra Sultan Hamengku Buwono I), tetapi kemudian Pangeran Diponegoro mengundurkan diri karena sering tidak diajak musyawarah dalam mengambil keputusan, ditambah lagi karena urusan intern kerajaan sangat dipengaruhi oleh Belanda yang menurut Pangeran Diponegoro bertentangan dengan Islam.

Urusan kerajaan banyak dijalankan oleh Patih Danureja IV yang sangat erat berhubungan dengan Kompeni Belanda. Sementara itu adat-istiadat Barat telah merasuk dalam keraton. Para bangsawan dan pembesar Belanda mengadakan pesta-pesta sampai larut malam dengan meminum-minuman keras yang menurut Pangeran Diponegoro, di samping bertentangan dengan Islam juga merupakan pemborosan.

Residen Belanda di Yogyakarta waktu itu, A.H. Smislaert, bersama patih Danureja IV merencanakan pembuatan jalan raya yang kebetulan melalui tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro sendiri tidak diberi tahu sama sekali. Dengan lancang Danureja yang menjadi antek Belanda memancarkan "patok-patok" melintasi tanah milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kemudian memerintahkan kepada pembantu-pembantunya untuk mencabut "patok-patok" tersebut. Demikianlah setiap kali anak buah Danureja IV memancarkan patok-patok, kemudian dicabuti oleh pengikut Pangeran Diponegoro. Hal ini terjadi berulang kali; dan inilah awal dari pertentangan itu.

Akhirnya terdengar kabar bahwa Belanda akan melakukan penyerangan ke Desa Tegalreja dan menangkap Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro segera mengadakan rapat dengan pengikut-pengikutnya dan keluarganya untuk membicarakan tindakan-tindakan yang perlu diambil bilamana terjadi penyerangan oleh Belanda.

Pada waktu itu Sultan Hamengku Buwono V mengutus Pangeran Mangkubumi untuk datang ke Tegalreja dan menanyakan maksud Pangeran Diponegoro mengumpulkan rakyat di desanya. Pangeran Diponegoro menjawab, bahwa mereka berkumpul untuk menghadapi serangan Belanda. Selanjutnya dari kraton mengutus Patih Danurejo IV untuk membujuk Pangeran Diponegoro supaya mau menghadap sultan di istana. Pa-

ngeran Diponegoro menolak. Datang pula Pangeran Mangkubumi ke Tegalrejo sebagai utusan residen Yogyakarta untuk minta supaya Pangeran Diponegoro datang ke loji Residen Smissaert. Atas persetujuan pengikut-pengikutnya, Pangeran Diponegoro menolak. Rakyat bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul walaupun dengan nyawa sekalipun. Pangeran Mangkubumi bahkan tak kembali ke keresidenan ataupun ke kraton melainkan ikut menggabungkan diri dengan Pangeran Diponegoro.

Pangeran Mangkubumi menyarankan agar wanita, anak-anak, dan orang-orang tua diungsikan dari Tegalrejo ke Bukit Selarong di daerah Bantul. Datanglah utusan dari residen untuk memanggil Pangeran Mangkubumi kembali ke kraton. Utusan itu menyampaikan surat kepada Pangeran Diponegoro yang isinya menanyakan kehendak Pangeran Diponegoro mengumpulkan rakyat. Jawabnya ditulis leh Pangeran Mangkubumi, tetapi sebelum surat selesai ditulis terdengar letusan senjata Belanda yang menyerang Desa Tegalrejo. Mulailah perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 20 Juli 1825.

Cita-cita perjuangan Pangeran Diponegoro ialah untuk membangun masyarakat baru yang merdeka, adil dan makmur ber-sendikan Islam dan adat-istiadat Jawa. Pangeran Diponegoro bermaksud melenyapkan penindasan dan pemerasan yang tidak mengenal peri kemanusiaan.

Pangeran Diponegoro menentang kekuasaan asing yang bertindak sewenang-wenang, terutama Belanda yang bercokol di Indonesia khususnya di wilayah kekuasaan Yogyakarta dan Surakarta.

4.2 Jalannya Perang

Ketika Desa Tegalrejo dihanguskan oleh pasukan Belanda, Pangeran Diponegoro beserta pengikut-pengikutnya menying-

kir ke daerah Kabupaten Bantul Di Desa Kalisoka, Pangeran Diponegoro telah dinanti oleh rakyat dan para pangeran yang setia kepadanya untuk bangkit melawan penjajah Belanda.

Orang tua, anak-anak dan wanita tetap tinggal di Kalisoka, sedangkan Pangeran Mangkubumi ditunjuk sebagai pelindung mereka. Pangeran Diponegoro dengan pasukannya bermarkas di Bukit Selarong. Di markas besar Selarong ini pun berkumpul para pangeran.

Di Selarong Pangeran Diponegoro membagi tugas untuk melakukan perlawanan. Pangeran Diponegoro Anom (putra Pangeran Diponegoro) dan Tumenggung Danukusuma diberi tugas mengadakan perlawanan di daerah Bagelen. Pangeran Adiwino dan Mangundipuro mendapat tugas mengadakan perlawanan di daerah Kedu dan sekitarnya. Pangeran Abubakar dan Tumenggung Jaya Mustopo mengadakan perlawanan di daerah Lowanu. Pangeran Adisurya dan Pangeran Sumonegoro mengadakan perlawanan di Kulon Progo. Tumenggung Cokronegoro disuruh mengadakan perlawanan di daerah Gamplong (Godean). Pangeran Joyokusumo (Pangeran Bei) memimpin pasukan di daerah utara Yogyakarta dibantu oleh Tumenggung Surodilo. Perlawanan Yogyakarta sebelah timur diserahkan kepada Tumenggung Suryonegoro dan Tumenggung Suronegoro. Pertahanan markas besar Selarong dan sekitarnya diserahkan kepada Joyonegoro, Pangeran Suryodiningrat dan Pangeran Joyowinoto. Perlawanan di Gunung Kidul diserahkan kepada Pangeran Singosari dan Pangeran Warsakusuma. Perlawanan di daerah Pajang diserahkan kepada Pangeran Mertoloyo, Pangeran Wiryokusumo, Tumenggung Sindurejo, dan Pangeran Diporejo. Perlawanan di Sukawati dipimpin oleh Kertonegoro, Bupati Mangunnegoro memimpin perlawanan di daerah Madiun, Megetan, Kediri, dan sekitarnya.

Insiden Tegalrejo dengan cepat terdengar ke Batavia. Gubernur Jenderal van der Capellen mengirimkan Jendral De Kock

untuk mengambil tindakan dan memulihkan keamanan. Jendral de Kock sampai di Semarang tanggal 29 Juli 1825, dan tiba di Kraton Surakarta tanggal 30 Juli 1825. Susuhunan Surakarta menyatakan kesediannya membantu Jenderal de Kock memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro.

Untuk memadamkan perlawanan rakyat di sekitar Yogyakarta, Belanda mendatangkan pasukan dari Semarang. Sesampainya di Desa Logerok (Lembah Pisangan) bala bantuan yang dipimpin Kapten Keemsius tadi disergap oleh pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Musyosentika. Sebagian besar pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang tewas, senjata-senjata mereka dirampas beserta uang 50.000 gulden yang akan disampaikan kepada residen Yogyakarta. Barang rampasan ini kemudian dibawa ke Selarong. Kemenangan pertama ini terjadi akhir Juli 1825.

Bala bantuan dari timur terdiri atas prajurit Mangkunegaran yang dipimpin oleh Raden Mas Suwongso, menantu Mangkunegoro, disergap oleh pasukan rakyat di bawah pimpinan Tumenggung Surejo di Desa Randugunting (Kalasan). Hampir semua prajurit Mangkunegaran binasa. Pemimpinnya, Raden Mas Suwongso, tertawan dan dibawa ke Selarong, tetapi kemudian dibebaskan kembali oleh Pangeran Diponegoro.

Mendengar berita kemengan pasukan rakyat di Logorok, Randugunting dan di lain-lain tempat, rakyat bergerak dan hebat. Keluarga Kraton Yogyakarta menjadi ketakutan, lalu berlindung di dalam benteng Belanda. Banyak alim-ulama kraton meninggalkan kraton dan ikut berjuang dengan pasukan Diponegoro.

Pertempuran di daerah Kedu berlangsung sengit. Pasukan Belanda dibantu oleh Bupati Magelang Tumenggung Danuningrat. Pasukan perlawanan rakyat yang disebut Bulkiya menyerang pasukan Belanda dan pasukan Danuningrat. Pasukan Bulkiya

yang terkenal gagah berani ini dipimpin oleh Haji Usman Alibasah dan Haji Abdulkabidr. Bersama sama pasukan yang dipimpin oleh Teumenggung Seconegoro dan Tumenggung Kertonegoro, Pasukan Diponegoro dapat memukul mundur musuh dan menewaskan Tumenggung Danuningrat.

Di daerah Kulon Progo, di Bukit Menoreh, pasukan Diponegoro juga mendapat kemenangan. Pasukan Belanda mendapat pukulan hebat. Bupati Menoreh Ario Sumodilogo tewas dalam pertempuran melawan tentara Diponegoro.

Pertempuran terus berkobar di mana-mana dengan kemenangan pasukan Diponegoro. Karena kekalahan-kekalahannya itu maka Jenderal de Kock dan pihak kraton ingin berunding dengan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 7 Agustus 1925 Jenderal de Kock mengirim surat dari markasnya di Surakarta sampai dua kali. Jenderal de Kock berjanji akan memberi jaminan mau mengadakan perundingan dengan pihak Belanda dan kraton.

Agar kedudukannya sederajat dengan pihak lawan dalam perundingan itu, pengikutnya menobatkan Pangeran Diponegoro menjadi raja dengan gelar Sultan Ngabdulhamid Herucokro Amirul Mukminin Khalifatullah Jawa. Kenyataannya Jenderal de Kock tak kunjung datang di Selarong.

Perlawanan rakyat untuk mengusir Belanda terus berkobar. Untuk memadamkannya dikerahkan semua opsirnya. Opsir-opsir yang bertugas di luar Jawa terpaksa ditarik ke Jawa untuk memadamkan perlawanan Diponegoro. Jenderal Van Geen yang terkenal kejam menumpas perlawanan di Sulawesi Selatan ditarik ke Jawa untuk membantu de Kock memulihkan keamanan di Jawa. Selama berminggu-minggu dia harus memeras keringat untuk memadamkan perlawanan rakyat Semarang yang dipimpin oleh Pangeran Serang. Pangeran Serang menuju ke selatan menggabungkan diri dengan pasukan rakyat di Sukawati yang dipimpin oleh Kartodirja. Kemudian mereka mengobar-

kan perlawanan rakyat di daerah Rembang, Blora, dan Bojonegara. Tumenggung Kartadirja tertembak kakinya kemudian ditawan di Semarang. Pangeran Serang bergabung dengan pasukan rakyat di Madiun dan selanjutnya bersama-sama Pangeran Sukur pergi ke Yogyakarta bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro yang ada di Yogyakarta.

Jenderal de Kock berusaha mengepung markas Pangeran Diponegoro yang ada di Selarong, tetapi ia harus menghadapi perlawanan rakyat di daerah Semarang, Magelang, Bagelan, Kedu, Banyumas, Madiun, Surakarta dan sekitarnya lebih dulu. Untuk maksud itu Jenderal de Kock menugaskan dua orang opsir andalannya, yaitu Letkol Diell dan Letkol Cleerens. Letkol Diell disuruh memadamkan perlawanan di daerah Banyumas, sedangkan Letkol Cleerens di Tegal dan Pekalongan.

Pasukan Belanda dengan dipimpin langsung Jenderal de Kock mengadakan serangan besar-besaran di markas besar Selarong pada tanggal 2 dan 4 Oktober 1825 namun Selarong sudah kosong ditinggalkan oleh Pangeran Diponegoro. Dengan sangat marah Jenderal de Kock memerintahkan prajuritnya membakar Selarong dan perumahan penduduk sekitarnya.

Markas besar Pangeran Diponegoro dipindahkan dari Selarong ke Dekso (Kulon Progo). Para wanita anak-anak dan orang yang telah lanjut usia dipindahkan ke Suwela (utara Dekso). Di situ Pangeran Diponegoro memperbaiki dan memperkuat pasukannya. Ia membentuk kesatuan-kesatuan prajurit yang dipimpin oleh senopati-senopati perang yang tangguh dan berpengalaman. Selain itu diadakan juga pembagian tugas baru.

Kesatuan prajurit pilihan dipimpin oleh senopati muda Raden Dullah Prawiradirja, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sentot. Ia adalah putra Raden Rangga Prawiradirdja III yang gugur melawan kekuasaan Daendels. Kesatuan prajurit Surojo dipimpin Haji Abu Sungeb. Kesatuan Prajurit Bulkiyo dipimpin Haji Mukhamad Usman Alibasah dan Haji Abdulkadir.

Kesatuan Prajurit Suryagama (Prajurit Kaji) dipimpin Dullah Kaji Badarudin. Kesatuan prajurit Suronoto dipimpin Surip Samparwadi. Kesatuan Prajurit Jogosuro dipimpin Pangeran Ngabehi Joyokusumo yang terkenal dengan sebutan Pangeran Bei. Kesatuan Prajurit Jagakarya dipimpin Pangeran Mangkubumi dengan tugas mengawal keluarga Pangeran Diponegoro yang sudah tua, anak-anak dan wanita serta urusan rumah tangga. Pertahanan Yogyakarta selama dipimpin Tumenggung Joyonegoro. Pertahanan di Imogiri dipimpin oleh Syeh Kaji Muda dan Raden Reksokusumo. Pertahanan di Yogyakarta timur dipimpin Tumenggung Suronegoro. Pertahanan Kulon Progo diserahkan Tumenggung Kerta Pengalasan. Pertahanan Purbo-linggo dan Muntilan diserahkan kepada Raden Joyonegoro. Pertahanan di Bagelen diserahkan kepada Pangeran Diponegoro Anom. Pertahanan di Gunung Kidul diserahkan kepada Pangeran Singasari.

Pada akhir tahun 1825 pasukan gabungan dari Gunung Kidul, Imogiri dan Bulkiya setelah bertempur seru dapat memukul mundur pasukan Belanda yang menyerang Imogiri, demikian pula pasukan gabungan Tumenggung Suronegoro bersama bupati Yogyakarta timur berhasil menggempur pertahanan Belanda yang ada di Prambanan dan merampas banyak senapan maupun meriam dari Belanda.

Hanya di Yogyakarta sebelah barat pasukan Belanda dapat merebut daerah demi daerah untuk mengepung pasukan Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Dekso. Pada tanggal 16 April 1826 pasukan gabungan Belanda dan Mangkunegaran di bawah pimpinan Jenderal Van Geen dan Kolonel Cochius menyerang pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro di Plered, tetapi Plered kemudian ditinggalkan Belanda dan diduduki kembali oleh pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Tumenggung Kerta Pengalasan. Pasukan Belanda kemudian mengadakan serangan yang kedua pada tanggal 9 Juni 1826 bersama-sama dengan pasukan Mangkunegaran. Belanda di bawah pimpinan

Kolonel Cochius sedangkan Prajurit Mangkunegaran di bawah pimpinan Pangeran Suria Mataram dan Pangeran Suriadiningrat. Kraton tua Plered dapat diduduki oleh Belanda untuk keduanya. Pasukan perjuangan yang dipimpin Kerto Pengalasan mundur ke barat sampai di Sungai Progo (Kulon Progo). Pada waktu itu banyak pasukan Pangeran Diponegoro yang gugur.

Pada tanggal 8 Juli 1826 markas besar yang ada di Deksa diserang oleh pasukan Belanda yang besar jumlahnya dan langsung dipimpin oleh Jenderal Van Geen yang sangat bernaflu untuk menangkap Pangeran Diponegoro, tetapi setiba di Dekso pasukan Van Geen menjumpai markas dalam keadaan kosong. Pangeran Diponegoro bersama pasukannya telah bergerak di Desa Kasuran.

Setelah 20 hari menduduki Dekso, pada tanggal 28 Juli 1826 Belanda kembali ke Yogyakarta. Perjalanan mereka ke Yogyakarta itu melintasi daerah Kasuran. Di situ mereka disergap oleh pasukan Pangeran Diponegoro yang dipimpin Sentot Prawirodirjo. Banyak sekali prajurit Belanda mati terkubur dalam jurang. Jenderal Van Geen sendiri lari terbirit-birit menyelamatkan diri bersama Kolonel Cochius, Pangeran Murdaningrat, dan Pangeran Panular (dua orang bangsawan kraton)⁵⁾.

Pada tanggal 30 Juli 1826 terjadi pertempuran yang dahsyat di Nglengkong. Pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Hanbert dibantu prajurit Kraton Yogyakarta di bawah pimpinan Pangeran Panular dan Pangeran Murdaningrat. Pasukan rakyat dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dibantu oleh Sentot Prawirodirdjo. Dalam pertempuran ini Hanbert mati terbunuh dengan pedang oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Murdaningrat dan Pangeran Panular tewas dalam pertempuran ini juga. Mendengar kekalahan di Nglengkong ini Jenderal de Kock sangat gelisah dalam markasnya.

Pada tanggal 4 Agustus 1826 terjadi pertempuran yang seru di daerah Mangir antara pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Le Baron dan Mayor Sollewiyn dengan pasukan rakyat dipimpin oleh Pangeran Adisuryo yang diperkuat dengan prajurit Bulkiya dan Pinilih. Selain di Mangir, Pangeran Diponegoro juga mendapat kememangan di Selarong dan Kalisat; demikian pula perlawanan rakyat di Bagelan mencatat kemenangan.

Pada tanggal 9 Agustus 1826 terjadi pertempuran yang sengit di Desa Kejiwan (utara Yogyakarta). Belanda dipimpin oleh Mayor Sollewyns sedangkan pasukan Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dibantu Adipati Urawan dan Pangeran Bei. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan Diponegoro.

Setelah menyingkalkan markas besarnya di Desa Dekso, pasukan Diponegoro bergerak ke timur untuk memindahkan markasnya ke daerah Surakarta agar dekat dengan markas besar tentara Belanda. Di samping itu juga untuk menimbulkan semangat juang rakyat antara Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Diponegoro lebih bersifat agresif. Mereka menyerang pos-pos pertahanan tentara Belanda yang ada di Klanggen dan Singasari. Pos-pos ini direbut oleh pasukan Pangeran Diponegoro dan dapat merampas senjata dari pasukan Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro lainnya mendirikan markasnya di daerah Delanggu, karena di situ dikenal sebagai daerah yang kaya raya dan penghasil beras, untuk persediaan perang.

Pada tanggal 28 Agustus 1826, atas usul Sentot Prawiradirja, pasukan Diponegoro menyerang pertahanan Belanda di Delanggu. Mengetahui hal itu pasukan Belanda lalu membuat siasat perang. Sebagai sayap kiri diajukan serdadu-serdadu dari Madura, Surakarta dan prajurit Belanda. Sayap kanan terdiri atas adipati Surakarta. Dada pasukan terdiri atas para bangsawan Surakarta dan opsir Belanda.

Pasukan Pangeran Diponegoro mengajukan kesatuan prajurit Pinilih yang dipimpin oleh Sentot Prawiriadirjo. Sebagai dada pasukan dipilih prajurit Bulkiya di bawah pimpinan Haji Usman. Barisan para adipati Surakarta ditandingi oleh prajurit Jogosura yang dipimpin oleh Pangeran Bei Joyokusumo. Di belakang ada pasukan bantuan yang diketuai langsung Pangeran Diponegoro. Setelah terjadi pertempuran sengit, kemenangan yang gilang-gemilang ada di pihak pasukan Pangeran Diponegoro. Banyak sekali serdadu musuh tewas dalam pertempuran di Delanggu ini. Pasukan Pangeran Diponegoro mendapat senjata rampasan banyak dari pasukan musuh. Kemenangan di Delanggu ini merupakan kemenangan terbesar di pihak Pangeran Diponegoro. Dari pertempuran ini bisa dirampas berpuluh-puluh senapan dan dua belas pucuk meriam¹⁰⁾. Dengan kemenangannya di Delanggu Pangeran Diponegoro beserta pada pengikutnya bercukur gundul.

Karena kekalahan yang beruturu-turut sejak permulaan, maka pada tanggal 17 Agustus 1828 Jenderal de Kock berusaha mempengaruhi pimpinan perlawanan rakyat dengan mengangkat kembali Sultan Hamengku Buwono II (kakek Pangeran Diponegoro) sebagai raja Yogyakarta dan menurunkan Sultan Hamengku Buwono V dari tahta kerajaan. Hal ini dimaksudkan agar pimpinan perlawanan rakyat yang dulu setia Hamengku Buwono II meninggalkan perjuangan dan kembali ke kraton dan berpihak kepada Sultan Hamengku Buwono II. Di samping itu dengan wibawanya, sultan ini diharapkan dapat menghentikan perlawanan Pangeran Diponegoro. Ternyata pemimpin pasukan tetap setia kepada perjuangan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, demikian pula waktu Sultan Hamengku Buwono II yang didesak Jenderal de Kock mengirimkan surat kepada Pangeran Diponegoro supaya berhenti berjuang dan kembali ke istana, Pangeran Diponegoro tetap menolak dan terus melanjutkan perjuangannya mengusir penjajah Belanda dari Indonesia.

Pada tanggal 15 Oktober 1826 atas desakan Kiai Maja, Pangeran Diponegoro mengadakan penyerangan ke Surakarta dengan 4.000 pasukan. Sebelum masuk Surakarta ia harus menggempur dulu pertahanan Belanda yang ada di Gawok. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Le Biron digempur habis-habisan oleh pasukan Diponegoro sehingga kocar-kacir berlindung di pekuburan. Karena malam telah tiba pertempuran tidak dilanjutkan.

Keeseokan harinya, tanggal 16 Oktober 1826, pertempuran dilangsungkan lagi. Kalah-menang silih beganti. Pasukan perjuangan rakyat dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro hanya berjalan kaki, didampingi oleh Sentot Prawirodirjo dan Tumenggung Joyonegoro. Pasukan Belanda memusatkan perhatiannya untuk pembalasan penyerangan. Ketika Pangeran Diponegoro terkena peluru pada pergelaan tangan, ia terus memimpin perjuangan.

Ketika melintas jalan besar, dadanya kena peluru musuh. Baju besinya kurang rapat sehingga ada peluru yang bersarang di dada. Ia luka parah. Oleh Sentot Prawiradirjo kemudian dibawa mundur untuk beristirahat di Desa Kenderan, selanjutnya dibawa ke utara di Desa Kemiri di lereng Merapi untuk dirawat sampai sembuh. Pimpinan perjuangan diserahkan kepada Pangeran Bei Joyokusumo. Rakyat makin marah karena pemimpin mereka luka parah. Dengan dipimpin oleh Pangeran Bei Joyokusumo dan dibantu Sentot mereka menggempur pertahanan musuh. Musuh terdesak mundur ke timur hampir masuk Kota Surakarta.

Atas perintah Pangeran Diponegoro, penyerbuan ke Kota Surakarta dibatalkan. Ia tidak sampai hati melihat pembunuhan yang akan terjadi di Kraton Surakarta yang masih keluarga sendiri. Yang menjadi tujuan hanya pengusiran tentara Belanda. Ia tidak bermaksud membunuh kerabat Kraton Surakarta.

Sampai dengan akhir tahun 1826 kemenangan-kemenangan ada di pihak pasukan Pangeran Diponegoro. Tahun 1825 sampai dengan 1826 merupakan tahun kejayaan bagi perjuangan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.

Karena menderita kekalahan yang bertubi-tubi dari pasukan rakyat selama dua tahun berturut-turut sejak permulaan perang (1827), maka Belanda mengadakan perubahan siasat perang. Siasat perang Belanda yang baru itu adalah sistem perbentengan. Benteng *stelsel* dimaksudkan untuk mengimbangi pasukan Pangeran Diponegoro yang menggunakan siasat perang gerilya serta siasat gerak cepat. Hal ini disebabkan pimpinan ini tidak menetap akan tetapi selalu bergerak secara cepat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Untuk menghadapi hal ini diciptakan siasat baru itu. Mereka tidak lagi mengejar-ngejar Pangeran Diponegoro tetapi mendirikan benteng-benteng di tempat-tempat yang selalu mereka duduki dan di tempat-tempat yang strategis. Setiap benteng ditempatkan pasukan yang menjaga keamanan dan menindas setiap perjuangan rakyat di sekitar perbentengan itu. Di daerah perang yang luas di Pulau Jawa itu, Belanda berhasil banyak sekali mendirikan benteng. Antara benteng yang satu dengan benteng yang lain diadakan patroli pada siang dan malam hari. Jumlah benteng yang dibuat Belanda pada waktu itu mencapai 200 buah.

Pada bulan Pebruari 1827 perlawanan rakyat bergolak di daerah Singosari dan Klaten. Rakyat bangkit mengangkat senjata melawan penjajah. Jenderal de Kock mengirimkan pasukan dipimpin Le Brions dibantu oleh Pangeran Surya Mataram dan Pangeran Notokusumo dari Surakarta untuk memadamkan perlawanan rakyat tetapi tidak berhasil.

Pasukan Pangeran Diponegoro bergerak ke daerah Kedu untuk membangkitkan perjuangan rakyat yang telah mengendor karena menyerahnya Pangeran Mangkudiningrat pada tanggal 19 Januari 1827 di Desa Plindingan. Pada tanggal

30 April 1827 pasukan Diponegoro menyerang daerah Blabak dan Trayem. Pimpinan pasukan Belanda Kolonel Clerens mendapat luka-luka sehingga mundur ke Kota Magelang.

Di daerah Banyumas pasukan Belanda mengalami keadaan yang pahit. Komandan pasukan mereka, yaitu Kolonel Diels dan Letkol de Bost tewas dalam pertempuran. Pimpinan pasukan kemudian diganti oleh Mayor Bushkens. Belanda terpaksa mendatangkan bala bantuan. Belanda berpatroli siang dan malam.

Pasukan Yogyakarta selatan yang dipimpin Pangeran Noto-projo diserbu oleh Jenderal de Kock. Atas bujukan Residen Yogyakarta Van Lowick Van Pabst, bersama Pangeran Serang ia menyerah kepada Belanda tanggal 21 Juni 1827. Penyerahan ini sangat menyenangkan Belanda. Sebaliknya kejadian itu merupakan pukulan yang keras bagi perjuangan Pangeran Diponegoro.

Sementara itu jalan damai yang ditempuh Belanda untuk menghentikan perlawanan Pangeran Diponegoro selalu gagal. Perundingan yang diadakan antara Stavers dan Kiai Maja tanggal 19 Agustus 1827 tak membuahkan hasil; demikian pula perundingan yang diadakan oleh wakil Belanda Roeis dan wakil rakyat Tumenggung Mangun Pawiro. Akibatnya perlawanan rakyat berkobar lagi di mana-mana, seperti di daerah Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, dan lain-lain.

Di daerah Rembang pertempuran berkobar dengan pimpinan Bupati Rembang Tumenggung Aria Saradilaga. Perlawanan menjalar dari Rembang ke daerah Bojonegoro. Jenderal Belanda yang memimpin pasukan Belanda sangat kewalahan sehingga terpaksa minta bantuan dari daerah lain. Karena terlalu payah memimpin perang, maka Jenderal Holsman jatuh sakit dan diganti oleh Kolonel Roest. Belanda mendirikan benteng-benteng pertahanan di daerah ini. Karena kekuatan Belanda terlalu besar, maka perjuangan rakyat di daerah ini dapat

dipadamkan. Tumenggung Aria Sasradilaga mengembara sebagai rakyat biasa.

Pada awal tahun 1828 kegiatan Pangeran Diponegoro dipusatkan di daerah bekas Kerajaan Mataram. Di mana-mana terjadi pertempuran yang sengit antara pasukan rakyat melawan Belanda.

Belanda makin giat melaksanakan sistem perbentengannya dengan mendirikan benteng di daerah-daerah yang telah mereka kuasai seperti di Bantul, Kanigoro, Bligo, Minggir, Tegalwaru dan lain-lain. Di samping itu Belanda mempergiat pasukan yang bergerak dan pasukan-pasukan patroli untuk mendesak daerah pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro.

Pada tanggal 13 Maret 1828 Jenderal de Kock menempatkan markasnya di Kota Magelang, sebab letaknya strategis untuk mengadakan gerakan memadamkan perjuangan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dari strategi militer memang Magelang lebih tepat dan lebih baik dari pada Solo.

Perlawanan rakyat di Jawa Tengah bagian barat dipimpin oleh Pangeran Diponegoro Anom dibantu oleh Imam Musbah dan Mas Lurah. Di daerah ini para pejuang terdesak. Di daerah-daerah yang telah dikuasainya, Belanda mendirikan benteng-benteng untuk mempersempit gerak pasukan Pangeran Diponegoro.

Pada tanggal 18 April 1828 Pangeran Natadiningrat, putra Pangeran Mangkubumi, beserta pengikutnya terdesak dan akhirnya menyerah kepada pasukan Belanda pimpinan Letkol Sollewiyn. Penyerahan ini sangat menggembirakan Belanda dan diterima dengan senang sekali. Dengan menyerahnya Pangeran Notodiningrat mereka mengharapkan Pangeran Mangkubumi akan segera menyerah pula.

Di samping serangan-serangan dengan senjata lengkap, Belanda terus giat menjalankan politik busuknya. Mereka me-

narik pemimpin-pemimpin perjuangan rakyat ke kraton atau menyerahkan diri karena bujukan-bujukan halus dan janji-janji yang muluk-muluk.

Sementara itu pertempuran masih saja berlangsung antara pasukan Belanda dan pasukan Diponegoro. Pusat pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro telah beralih ke Sambirata.

Pada tanggal 5 September 1828 Sentot Prawirodirjo yang memimpin kesatuan Wanengprang berhasil membikin kocak-kacir prajurit Belanda yang dipimpin oleh Letkol Sollwyns, di tepi Sungai Progo,

Setelah diserang secara besar-besaran, Sambirata jatuh ke tangan Belanda. Pusat perjuangan kemudian dialihkan di Pengasih. Sementara itu berkat kemahiran Belanda menjalankan politik memecahbelah, Kiai Maja berhasil dipengaruhi. Kiai Maja memisahkan diri dari pasukan induk Pangeran Diponegoro dan berjuang sendiri mempertahankan daerah Pajang di mana ulama ini berasal.

Mengetahui bahwa pusat pertahanan Pangeran Diponegoro berada di Pengasih, Belanda berusaha mengepung dari segala jurusan. Pasukan di barat daya dengan pimpinan Mayor Busch-lans yang bergerak dari Bagelen menuju tepi Sungai Bogowonto. Pasukan yang dipimpin Mayor Michel bergerak dari arah barat laut menuju ke arah Lowanu.

Pasukan di utara langsung dipimpin Kolonel Cleerens. Di timur laut pimpinan pasukan Belanda diserahkan kepada Letkol Lidl. Kolonel Cocheus dan Letkol Sollwiyns bergerak dari tenggara Bantul menuju Pengasih. Untuk menghadapi pasukan tersebut, dikerahkan pemimpin-pemimpin perjuangan seperti Pangeran Dipnegoro Anom, Tumenggung Kertopangalasan, Imam Musbah dan Mas Lurah.

Perlawanan di Winongo pada bulan September 1828 dipimpin Basah Sentot Prawirodirjo dan Tumenggung Mertonegoro.

Pasukan Belanda pada waktu itu dipimpin Kolonel Sollewiyns dibantu oleh Mayor Buschkens. Korban berjatuhan dari kedua-belah pihak. Di daerah Pajang pasukan pimpinan Kiai Maja mulai bergolak.

Kekuatan musuh dipimpin Kolonel Raefs dan Le Baron ternyata jauh lebih kuat. Pada tanggal 5 Nopember 1828 Kiai Maja menyerah di Klaten. Ia dibawa ke Semarang melalui Salatiga menuju Batavia dan akhirnya diasingkan ke Menado. Sementara itu Mas Lurah, pemimpin perjuangan di sekitar Gunung Perahu, menyerah pada 25 Nopember 1828 karena kuburan nenek moyangnya diancam akan dihancurkan.

Pada tanggal 28 Desember 1828 terjadi pertempuran di daerah Penanggulan. Di sini jatuh banyak korban di kedua-belah pihak. Di pihak Belanda, Kapten Van Ingen dan Pangeran Prangwedana tewas. Di pihak pasukan Diponegoro Raden Basah Puthut Lawa dan komandan Prajurit Mantrijeron tewas. Kedua-belah pihak mengundurkan diri untuk mengatur siasat.

4.3 Akhir Perjuangan Diponegoro

Pada awal tahun 1829 terjadi pergantian pimpinan dalam pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Komisaris Jenderal Du Bus akan diganti oleh Johannes Van den Bosch sebagai gubernur jenderal, sedangkan Jenderal Marcus de Kock diganti oleh Mayor Jenderal Benyamin Bisschof.

Mayor Jenderal Bisschof tiba di Jakarta tanggal 13 Mei 1829. Jenderal ini selalu sakit-sakitan, sehingga tak pernah menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin pasukan Belanda di Indonesia. Sebelum timbang terima dengan Jenderal de Kock, ia sudah meninggal di Cianjur (Jawa Barat) pada tanggal 7 Juni 1829; karena itu Jenderal de Kock tetap minta memimpin pasukan Belanda sampai Gubernur Jenderal Van den Bosch datang ke Indonesia.

Sementara terjadi perubahan pimpinan dalam pucuk pimpinan pemerintahan kolonial Belanda, perjuangan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tetap menguasai daerah antara aliran Sungai Progo dan Bagowonto, daerah Bagelen dan Banyumas.

Di daerah Yogyakarta selatan perlawanan rakyat di bawah Pangeran Bei mengadakan serangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Pasukan-pasukan Belanda berusaha mengurung dan memberikan tahanan berat kepada pasukan-pasukan pahlawan Diponegoro. Pasukan Belanda dari Bagelen dan sepanjang Sungai Bogowonto bergerak dari barat, sedangkan pasukan dari timur Sungai Progo mengurung dari arah timur. Di tempat-tempat yang penting yang telah mereka kuasai didirikan benteng-benteng atau pos-pos keamanan. Perlawanan rakyat di daerah Ledok dan Karangobar yang dipimpin oleh Imam Musbah masih tetap melakukan perlawanan. Belanda terpaksa memperkuat pasukannya untuk memadamkan perlawanan rakyat di daerah ini dengan mendatangkan serdadu dari Sulawesi, Maluku, Bali dan Eropa.

Perundingan-perundingan yang diadakan antara pihak pahlawan Diponegoro dan pihak Belanda pada awal tahun 1829 selalu gagal, karena Belanda selalu curang dalam perundingan dan ingin menang sendiri. Pertempuran berkobar lagi di mana-mana tanggal 10 April 1829. Kolonel Coehius ditugaskan memadamkan perlawanan rakyat di selatan Yogyakarta yang dipimpin seorang panglima yang gagah berani yaitu Pangeran Bei. Untuk memukul mundur Pangeran Bei, Belanda terpaksa mengerahkan opsirnya yang berpengalaman seperti Kolonel Coehius, Letkol Sollewyn, dan Mayor Sprengler.

Sentot Prawirodirjo memimpin perlawanan rakyat di Pengasih, Wates. Pangeran Diponegoro bergerak ke mana-mana untuk membangkitkan perlawanan rakyat. Ia diikuti oleh pasukan-pasukan tangguh di bawah pimpinan Basah Usman,

Basah Abdullatip dan R. Adipati. Ia juga ditemani beberapa orang pangeran seperti Pangeran Prabu, Pangeran Abdurachim, Pangeran Adinegoro dan Pangeran Suryodipuro. Ia ke Bagelen untuk memberi instruksi kepada Basah Gandakusuma yang harus mengobarkan perlawanan rakyat di daerah itu. Sepasukan pengikut Pangeran Diponegoro di bawah pimpinan Pangeran Sumonegoro dapat menerobos pertahanan Belanda, sehingga dapat menyeberangi Sungai Progo untuk menyerang pertahanan di Grogol. Pasukan patroli Belanda memperkuat penjagaan untuk menghalau serangan Pangeran Sumonegoro ini.

Ketika berusaha menangkap Mangkubumi yang menjaga kaum wanita dan anak-anak di Desa Kulur, pasukan Belanda terpaksa mundur karena tiba-tiba diserbu oleh pasukan di bawah pimpinan Sentot Prawirodirjo. Hal ini terjadi tanggal 23 Mei 1829. Setelah berkunjung di daerah barat, Pangeran Diponegoro kembali ke Pengasih. Belanda berusaha mengepung rapat pertahanan Pangeran Diponegoro ini dari segala jurusan.

Sementara itu markas Pangeran Bei di Desa Geger, 5 km dari Kemijang, diserang Belanda tanggal 17 Juli 1829. Dalam serbuan ini Pangeran Bei luka parah. Pimpinan perjuangan untuk sementara diserahkan kepada Raden Joyonegoro. Karena pasukan musuh terlalu *kuat*, pasukan R. Joyonegoro terpukul mundur. Bersama beberapa pemimpin ia gugur sebagai pahlawan dalam membela keadilan dan keberanian.

Selain di Yogyakarta, pertempuran juga berkobar di luar Yogyakarta. Pada tanggal 30 April 1829 Basah Prawirakusuma, panglima perlawanan rakyat di Bagelen timur, luka parah terkena peluru meriam Belanda dalam pertempuran di Prawaganda. Pada tanggal 18 April 1829 Tumenggung Banyak Wide menyerah kepada Mayor Buschkens di Kemit. Peristiwa tersebut mengurangi kekuatan perlawanan rakyat di daerah Begelen.

Pada bulan Mei 1829, atas petunjuk mata-mata Belanda, Belanda dapat menangkap Raden Tumenggung Nitilaya, RA.

Pakuningrat, R. Wirowijoyo, istri Pangeran Cokrokusuma, dan lain-lain. Setelah itu Belanda berusaha membujuk sanak keluarga yang masih berjuang agar menyerah atau berhenti mengadakan perlawanan. Mulai bulan Juli 1829 pasukan-pasukan Belanda dapat memajukan pos-pos pertahanannya sedikit demi sedikit, sehingga dapat mendesak dan mempersempit daerah perjuangan pahlawan Diponegoro. Dalam penyerangan yang dipimpin Letkol Sollevijn pada akhir bulan Juli 1829, P. Diponegoro Anom dan R. Hasan Mahmud (R. Sukur) tertangkap oleh Belanda. Hal ini merupakan pukulan yang hebat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro, sebaliknya sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Belanda mencoba memaksa Pangeran Diponegoro menghentikan perlawanan dengan mengancam dibunuhnya Pangeran Diponegoro Anom, tetapi Pangeran Diponegoro tetap bertekad untuk terus berjuang mengusir penjajahan.

Pada tanggal 23 Juli 1829, seorang istri Pangeran Mangkubumi menyerah kepada Belanda bersama tiga putranya, yaitu R.M. Wiryakusuma, R.M. Wiryaatmaja, dan R.M. Surdi. Pada tanggal 3 Agustus 1829, dalam pertempuran sengit di Desa Serma, pihak Pangeran Diponegoro kehilangan seorang pemimpin yaitu Syeh Muhammad Usman Ali Basah.

Pada tanggal 5 September 1829 Tumenggung Wanareja dan Tumenggung Wiryadirja bersama para pengikutnya menyerah pada Belanda. Sehari sesudah itu, tanggal 6 September 1829, Tumenggung Suradeksana menyerah juga di Kali Bawang. Tanggal 9 September 1829 Pangeran Pakuningrat menyerah. Pada tanggal 28 September 1829 Pangeran Mangkubumi meninggalkan perjuangan, pulang ke kraton karena usia sudah sangat tua. Kembalinya Pangeran Mangkubumi dari Mangir itu disambut oleh Belanda dan tokoh-tokoh kraton dengan meriah sekali. Belanda sangat senang, karena salah seorang pejuang yang sangat berpengaruh telah menghentikan per-

lawanannya. Pada akhir bulan September 1829, ketika Pangeran Bei sedang berada di Sangir, secara mendadak ia disergap oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Cochius. Pangeran Bei beserta kedua putranya yaitu Joyokusumo dan Atmokusumo gugur dalam pertempuran melawan sergapan Belanda ini. Dengan gugurnya Pangeran Bei yang merupakan salah satu tulang punggung perjuangan dalam bidang militer, maka perjuangan rakyat mengalami pukulan yang hebat; sebaliknya pihak Belanda semakin gembira dan meramalkan bahwa akhir perjuangan Pangeran Diponegoro sudah dekat. Dengan gugurnya Pangeran Bei, Pangeran Diponegoro menyerahkan pimpinan perang kepada tiga orang perwira, yaitu Sentot Prawirodirjo untuk Yogyakarta selatan, Basah Sumanegara untuk Yogyakarta utara, dan Basah Abdulatip memimpin pasukan yang bergerak antara Sungai Progo dan Bogowonto.

Keadaan sudah semakin memburuk bagi Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 24 Oktober 1829 Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda di Kraton Yogyakarta. Sentot tidak menyerah seratus persen, karena ia masih diberi kesempatan oleh lawan untuk menuntut. Menyerahnya Sentot Prawirodirjo yang dikenal sebagai senopati perang Diponegoro yang cakap dan berani ini, diterima oleh Belanda dan kraton dengan upacara militer yang besar. Dalam upacara ini datang menyambut para pembesar Belanda termasuk de Kock dan pembesar Kraton Yogyakarta. Dengan menyerahnya senopati perang Sentot Prawirodirjo ini sangat memperlemah perjuangan Pangeran Diponegoro dan sangat menguntungkan pihak Belanda.

Pada tanggal 1 Nopember 1829 menyerah pula saudara-saudara Pangeran Diponegoro yaitu Pangeran Aria Suria-kusuma, Pangeran Adinegara, Pangeran Surya Baranta, Pangeran Suryadipura, Pangeran Adiwijaya, Pangeran Diposono dan

lain-lain. Pada pertengahan Nopember 1829 pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, yaitu Tumenggung Karta Pangalasan, menyerah pula kepada Belanda. Pada bulan Desember 1829 Patih Joyo Sudargo menyerah di Kemiri. Pada tanggal 18 Januari 1830 Patih Danurejo juga menyerah. Dengan demikian maka pada awal tahun 1830 telah banyak pemimpin perjuangan bersama pengikutnya yang menyerah kepada Belanda. Dengan demikian jumlah pasukan maupun pemimpin perjuangan sangat berkurang, sehingga tak mengherankan bila kekuatan perlawanan sangat lemah.

Walaupun demikian Pangeran Diponegoro dengan para pengikutnya yang masih setia terus mengadakan perlawanan. Mereka bergerak ke daerah Kedu. Ketika berada di Desa Panjer, pasukan pejuang Pangeran Diponegoro disergap Belanda. Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya menyelamatkan diri ke dalam jurang dan masuk ke dalam hutan. Pertahanan kemudian dipindah dari Panjer di Desa Crema. Akhirnya markas Pangeran Diponegoro ini diketahui juga oleh pihak musuh. Jenderal de Kock mengutus Letkol Cleerens ke markas Pangeran Diponegoro itu dan mengajaknya berunding di Keresidenan Magelang. Tanggal 17 Pebruari 1830 Letkol Cleerens berangkat ke Kecawang menjemput Pangeran Diponegoro untuk ke Menoreh. Pada tanggal 21 Pebruari 1830 mereka sampai di Menoreh. Kepada Letkol Cleerns Pangeran Diponegoro minta kekebalan diplomatik selama perundingan atau jika perundingan gagal; artinya, selama perundingan Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya tak boleh ditangkap oleh Belanda. Demikian pula jika perundingan mengalami kegagalan, Pangeran Diponegoro harus diperbolehkan meninggalkan tempat perundingan bersama pengikutnya.

Pangeran Diponegoro tiba di Magelang tanggal 18 Maret 1830, tepat pada bulan Ramadhan. Ia disambut dengan upacara militer oleh Jenderal de Kock dan opsirnya. Pangeran Dipone-

negoro lalu mengusulkan agar perundingan baru diadakan setelah Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 27 Maret 1830. Pada tanggal 25 Maret 1830 Jendral de Kock memberi surat rahasia kepada Letkol Du Perro yang isinya memerintahkan agar disiapkan pasukan inti pada waktu perundingan guna menangkap Pangeran Diponegoro bila perundingan mengalami kegagalan.

Sehari setelah Idul Fitri, yaitu tanggal 28 Maret 1830 pagi hari. Pangeran Diponegoro datang berkuda dengan diiringi putra-putranya dan seorang bersenjata. Sampai di muka gedung keresidenan ia disambut oleh Jenderal de Kock, dan opsir-opsirnya serta Residen Magelang Valck. Di situ diadakan upacara militer untuk menghormat kedatangan Pangeran Diponegoro beserta rombongannya.

Pihak Pangeran Diponegoro pada waktu itu terdiri atas Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro Muda, Raden Mas Jonet, Raden Mas Roub, Raden Basah Mertanegoro dan Kiai Badarudin, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Jendral de Kock, Residen Valck, Letnan Roest, Mayor de Stuers dan Kapten Roefs sebagai juru bahasa. Kolonel Cleerens yang menjamin kekebalan politik terhadap rombongan Pangeran Diponegoro tidak tampak dalam perundingan tersebut. Dalam perundingan itu Pangeran Diponegoro menuntut didirikannya negara merdeka bersih dari penjajahan dan bersendikan Islam.

Oleh Jenderal de Kock tuntutan ini dinyatakan terlalu tinggi sehingga tidak bisa dipenuhi pihak Belanda, bahkan Pangeran Diponegoro dan pemimpin-pemimpin lainnya ditangkap dan pengikut-pengikutnya dilucuti oleh pasukan Belanda pimpinan Kolonel Du Baron. Selanjutnya Mayor de Stuers dan Kapten Roefs dengan sepasukan tentara Belanda membawa Pangeran Diponegoro dan pemimpin lainnya ke Ungaran, terus ke Semarang dan akhirnya ke Jakarta (Betawi). Tindakan yang tak mengenal malu ini terjadi hari Minggu tanggal 28 Ma-

ret 1830. Dengan demikian Perang Diponegoro yang sempat menggoyahkan Kolonialisme Belanda di Indonesia berakhir sudah. Dari Jakarta Pangeran Diponegoro dan pengikut-pengikutnya dibawa ke Menado yakni di dalam Benteng Amsterdam pada tanggal 3 Mei 1830. Pada tahun 1834 ia dipindah ke Benteng Ujung dan ditawan di sana sampai wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855.

4.4 Akibat Perang

Selama Perang Diponegoro berlangsung, pasukan-pasukan Belanda yang mati berjumlah tidak kurang dari 80.000 orang; suatu jumlah yang cukup besar, apalagi diingat bahwa persenjataan Belanda jauh lebih unggul. Selain itu, ongkos yang dikeluarkan untuk membiayai perang itu tidak kurang dari duapuluh juta gulden (\$. 20.000.000); suatu jumlah yang sangat besar untuk ukuran waktu itu.

Untuk menutup kerugian yang sangat besar itu, Belanda lebih ketat lagi menindas dan memeras rakyat Indonesia. Gubernur Jenderal Van den Bosch menciptakan sistem *Culturstelsel* (tanam paksa) untuk memeras habis-habisan tenaga dan kekayaan rakyat Indonesia untuk kepentingan kolonialisme.

Beribu-ribu rakyat Indonesia mati kelaparan di tanah airnya yang terkenal kaya-raya. Pada tahun 1844 bahaya kelaparan melanda daerah Cirebon dan menewaskan beribu-ribu jiwa manusia. Pada tahun 1848 daerah Demak diserang bahaya kelaparan, yang menyebabkan tewasnya beribu-ribu penduduk; demikian pula tahun 1849 di Grobogan, Purwadadi beibu-ribu rakyat mati kelaparan. Dari catatan diperoleh keterangan bahwa penduduk Demak yang jumlahnya 336.000 jiwa, 65% mati kelaparan sehingga tinggal kurang dari 120.000 jiwa yang hidup. Di Grobogan, rakyat yang mati kelaparan hampir mencapai 90% sehingga jumlah penduduk hanya tinggal 9.000 orang

saja. Semua itu disebabkan sistem tanam paksa yang kejam dari Van Den Bosch tersebut.

Untuk mempercepat usahanya mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, Belanda mengurangi hak-hak kekuasaan Sunan Paku Buwono VI. Belanda mengambil daerah mancanegara yang merupakan bagian dari Kerajaan Surakarta. Pencaplokan itu dianggap sebagai imbalan, karena Paku Buwono VI pernah minta uang \$ 25.500,— Paku Buana VI merasa sangat kecewa karena ia pernah banyak membantu Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Ia menjadi kecewa dan bertapa di gua-gua. Kegiatan ini dianggap oleh Belanda sebagai pembrontakan sehingga akhirnya Paku Buana VI ditangkap pada bulan Juni 1830 di Gua Langse, Mancingan, di pantai selatan. Ia kemudian dibuang ke Pulau Ambon.

Walaupun peperangan Pangeran Diponegoro sudah tampak selesai, tetapi semangat perjuangannya tidak pernah padam. Semangat kepahlawanannya tertanam di dada setiap patriot bangsa yang menginginkan kemerdekaan, keadilan dan kebenaran. Kenyataan ini dapat dilihat dengan bangkitnya Pangeran Ario Renggo yang tetap mengaku Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin. Bersama-sama dengan para pengikutnya ia mengangkat senjata.

Cita-cita Pangeran Diponegoro luhur, yaitu mendirikan suatu negara yang bersendikan agama. Cita-citanya akan selalu diteruskan oleh bangsa Indonesia.

Sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dapat kita jadikan suri teladan dalam perjuangan kita. Perjuangannya betul-betul memberikan pelajaran kepada kita, bahwa setiap perjuangan tidak mungkin berhasil tanpa pengorbanan. Dari perjuangannya dapat kita tarik kesimpulan bahwa penjajah tidak akan melepaskan begitu saja daerah jajahannya; oleh karena kemerdekaan harus diperjuangkan.

Hikmah lain yang harus kita ambil dari Perang Diponegoro adalah bahwa gagalnya perjuangan tersebut disebabkan tidak adanya persatuan. Keadaan perpecahan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak Belanda untuk mengadudomba kita sama kita.

CATATAN

- 1) Sagimun, MD, *Pahlawan Diponegoro Berjuang, Bara Api Kemerdekaan Tak Kunjung Padam*, Departemen P.P.&K, Yogyakarta, 1960, hal. 52–65.
- 2) Ricklefs. M.C., *Yogyakarta Under Mangkubumi 1779 – 1792*, Oxford University Press, New York Toronto, Kuala Lumpur 1974, hal. 49–50.
- 3) Soekanto, Dr. *Sekitar Jogjakarta 1755–1825*, Mahabarata, Djakarta – Amsterdam, hal 73 – 74.
- 4) Sutarto Mangkuwilogo R.M., *Babad Pangeran Diponegoro*, Yogyakarta, 1903, hal 21.
- 5) Sagimun M.D., op. cit., hal. 131.

BAB V PEMOGOKAN BURUH

5.1 *Latar Belakang*

Pada abad ke-19 kehidupan masyarakat Indonesia mengalami peralihan dari bentuk masyarakat tradisional menuju bentuk masyarakat modern. Tampak adanya perubahan-perubahan sosial, yaitu lenyapnya institusi sosial tradisional dan timbulnya institusi sosial baru¹⁾. Perubahan-perubahan sosial ini terjadi karena timbulnya kondisi-kondisi sosial baru, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar.

Perubahan-perubahan sosial yang diutamakan di sini terutama yang berasal dari luar yang pada pokoknya ada dua hal²⁾. *Pertama*, birokrasi moderen pemerintah kolonial yang dibentuk demi kepentingan kolonial dalam abad ke-19 yang makin meluas. *Kedua*, timbulnya pengaruh-pengaruh Barat sebagai akibat logis dari kepentingan-kepentingan kolonial itu. Perubahan itu terjadi di Jawa termasuk juga Daerah Istimewa Yogyakarta, dan selanjutnya berkembang di berbagai tempat di seluruh kepulauan Indonesia.

Industri-industri baru bermunculan di dunia Barat yang didukung mekanisme pengangkutan baik di darat, laut, maupun udara. Industrialisasi ini merupakan salah satu sebab timbulnya imperialisme modern. Negara-negara Barat itu membutuhkan

daerah-daerah yang dapat menjual bahan mentah dan membeli barang-barang jadi.

Sejalan dengan semakin berkembangnya zaman, politik Pemerintah Belanda di Indonesia juga mengalami perubahan. Untuk memperlancar pemasaran barang-barang hasil industri Eropa dan juga sebagai areal untuk mendapatkan bahan mentah, di Indonesia berlaku Politik Pintu Terbuka bagi para penanam modal. Pemerintah Belanda memberi kesempatan orang-orang asing menyewa tanah di Indonesia untuk jangka panjang. Dengan kesempatan yang baik itu perusahaan-perusahaan swasta Belanda mengambil tanah dijadikan areal penanaman tebu dan usaha lainnya.

Sebagaimana kita ketahui, untuk daerah Yogyakarta di berbagai tempat telah didirikan pabrik gula milik orang-orang Belanda. Pabrik-pabrik gula ini umumnya tumbuh pada pertengahan kedua abda ke-19³⁾.

Pembuatan gula sebagai suatu perusahaan di Jawa baru timbul pada tahun 1637 oleh orang Cina di sekitar Betawi⁴⁾. Perusahaan ini didirikan terutama untuk memenuhi kebutuhan Kompeni; oleh sebab itu sebagian besar dimodalinya dari Kompeni pula. Orang-orang Cina hanya sebagai pemilik alat-alat penggiling dan mengusahakan penanaman tebu di tanah belukar sekitar Batavia.

Pada tahun-tahun permulaan *Cultuurstelsel*, perusahaan-perusahaan gula tersebut menjadi pemborong pembuatan gula untuk pemerintah. Perusahaan-perusahaan itu sama sekali tidak ikut campur mengenai penanaman tebu, mencari bahan bakar, pemotongan tebu, pengangkutan dari kebun-kebun tebu ke pabrik, dan tenaga yang dipekerjakan di pabrik. Semuanya menjadi urusan para pejabat pemerintahan dari tingkat atas sampai tingkat terbawah, yaitu dari bupati sampai dengan kepala desa, tetapi sistem ini dalam perkembangannya ternyata tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang dituntut oleh perusa-

haan-perusahaan gula bermodal besar, terutama setelah perusahaan itu tumbuh menjadi pabrik yang mempergunakan alat penggiling dengan mesin uap⁵⁾. Sistem produksi tradisional desa dan birokrasi dalam pemerintahan terlampau lambat untuk melayani kebutuhan pabrik yang serba cepat itu.

Kesukaran-kesukaran yang dialami pabrik-pabrik gula itu pertama-tama berkisar pada masalah tenaga kerja, baik di kebun-kebun untuk pemotongan dan pengangkutan ke pabrik, maupun untuk pekerjaan di pabrik. Teknologi modern di pabrik-pabrik gula ternyata tidak dapat mengandalkan penduduk sebagai buruh di kebun tebu atau di pabrik-pabrik yang bekerja sesuai dengan peraturan *heerendiensten*. Jumlah hari kerja dan lamanya waktu kerja juga terbatas oleh adat kebiasaan. Tenaga kerja *herendiensten* dalam prakteknya menimbulkan kesulitan-kesulitan baik bagi pabrik maupun bagi penduduk desa sendiri.

Kesulitan utama dari pabrik gula adalah faktor tenaga kerja yang tidak dapat dipakai secara kontinyu sesuai dengan lamanya proses pembuatan gula⁵⁾, yaitu sejak mulai menggiling tebu yang pertama sampai terakhir. Masa giling ini memerlukan waktu beberapa bulan, tergantung pada luas areal penanaman tebu. Lamanya waktu itu tidak sesuai dengan lamanya waktu *herendiensten*. Berhubung dengan itu pabrik menghadapi dua alternatif, yaitu menahan tenaga kerja *herendiensten* itu sampai proses pembuatan gula selesai seluruhnya dengan memberi kompensasi upah, atau melepaskan tenaga kerja wajib yang sudah habis waktunya dan diganti dengan rombongan baru dengan menanggung segala kesulitan-kesulitan teknis.

Kesulitan yang dihadapi penduduk desa yang bekerja di kebun-kebun tebu atau pabrik-pabrik itu ialah letak kebun-kebun yang tidak selalu dalam lingkungan desa tempat tinggalnya, bahkan sering cukup jauh. Selain itu juga ada kesulitan dalam pekerjaannya sendiri. Bekerja di kebun-kebun tebu

(menanam dan memotong) tidaklah begitu berat karena pekerjaan itu masih dekat dengan kebiasaan pekerjaan penduduk desa sebagai petani, akan tetapi pekerjaan di pabrik penggilingan yang paling berat. Pekerjaan di pabrik adalah pekerjaan teknis yang berlainan sama sekali dengan kebiasaan penduduk desa. Mereka yang mendapat giliran bekerja di pabrik banyak mengalami tekanan-tekanan, karena diawasi terus dan harus menurut peraturan-peraturan yang keras sesuai dengan syarat-syarat teknologi menggiling tebu secara besar-besaran⁶⁾.

Kesulitan-kesulitan tersebut, baik yang dialami oleh pabrik maupun yang dialami oleh penduduk desa, akhirnya menimbulkan penyesuaian-penyesuaian baru. Hal ini bagi desa berarti suatu perombakan institusi hubungan kerja tradisional. Berhubung dengan itu, sejak tahun 1837 mulai nampak adanya pekerja-pekerja upahan di kebun-kebun tebu, meskipun pada umumnya mereka itu sebenarnya masih setengah dipaksa. Kerja upahan yang secara sukarela mau bekerja di pabrik baru berkembang sesudah tahun 1870 yaitu setelah pemerintah secara berangsur-angsur melepaskan campur tangannya dalam pabrik-pabrik gula(77).

Pabrik-pabrik gula memilih alternatif yang pertama, Namun ada masalah lain. Menurut peraturan *Culturstelsel* pemerintah memang akan memberi upah kepada pekerja-pekerja di perkebunan-perkebunan tebu, tetapi upah yang dimaksud oleh pemerintah lain daripada upah yang dimaksud oleh pabrik-pabrik gula. Menurut *Culturstelsel* dasar pengupahan masih per desa sedangkan pihak pabrik menghendaki upah pekerja perseorangan⁷⁾.

Kesulitan yang timbul di desa ialah karena kewajiban bekerja di pabrik gula menimbulkan penyesuaian-penyesuaian baru yaitu timbulnya tenaga kerja "pocokan" Kerja berat di pabrik-pabrik menyebabkan penduduk desa yang mampu menyerahkan kewajibannya bekerja di pabrik kepada penduduk

desa yang kurang mampu dengan imbalan tertentu (upah). Dengan demikian lahirlah semacam pekerja upahan, walaupun tenaga "pocokan" tersebut masih termasuk *herrendiensten* juga. Dengan begitu seakan-akan ada pendekatan antara desa dan pabrik. Proses terjadinya buruh upahan dalam arti yang sebenarnya masih membutuhkan waktu cukup lama.

Tenaga kerja upahan yang sebenarnya dimulai dengan "setengah memaksa", yakni menggunakan kewibawaan kepala desa dan pemberian upah secara langsung oleh pabrik. Selain melalui kewibawaan kepala desa, tenaga kerja ditarik ke pabrik dengan jalan sistem uang muka. Setelah sifat setengah memaksa dan sistem uang muka itu hilang, penduduk desa secara sukarela bersedia bekerja di pabrik dengan menerima upah secara langsung.

Ada beberapa hal yang merintangi terwujudnya sistem tenaga upahan secara sukarela. Bekerja di pabrik-pabrik gula adalah suatu pekerjaan baru bagi penduduk desa, sehingga sudah sewajarnya akulturasi teknologi Barat membutuhkan waktu. Di samping itu para petani masih dibebani *herendiensten* dan *pantjendiensten* di desanya; jadi walaupun ada kesempatan bekerja di pabrik, tetapi menjadi buruh upahan terlepas dari ikatan desa tidak terjadi begitu saja. Bagaimana pun penduduk desa masih terikat oleh beban-beban tradisional di desanya. Masalah inilah yang sebenarnya menjadi latar belakang dari penghapusan *pantjendiensten* pada tahun 1882. Dengan dihapuskannya *pantjendiensten*, beban penduduk desa menjadi berkurang, dan mereka dimungkinkan untuk bekerja di pabrik sebagai buruh upahan. *Herendiensten* kemudian dihapuskan secara setapak demi setapak, sebab pemerintah sendiri nampaknya masih mengalami kesukaran-kesukaran untuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan umum dengan menggunakan tenaga upahan.

Upah kerja yang rendah semula belum menjadi masalah, sebab peredam uang masih dalam taraf permulaan sehingga nilai uang masih cukup tinggi⁸⁾. Selain itu, jaminan sosial yang diberikan pabrik-pabrik boleh dikatakan jauh lebih baik. Walaupun demikian keuntungan yang diperoleh pada permulaan ekonomi uang itu tidak merata. Keuntungan-keuntungan terutama hanya dirasakan oleh mereka yang bekerja sepenuhnya di pabrik. Pekerja musiman dan pemilik tanah tidak banyak merasakan perubahan-perubahan. Penghasilan mereka tidak lebih daripada penghasilan yang diperoleh bila mengerjakan sendiri tanahnya. Rendahnya penghasilan mereka disebabkan oleh ukuran pemberian upah musiman dan penyewaan tanah. Dasarnya adalah penghasilan tanah pertanian rakyat yang sangat rendah, karena cara-cara bertani yang sederhana.

Didirikannya pabrik-pabrik gula ternyata tidak banyak membawa perubahan struktur terhadap pemerintahan desa. Pejabat-pejabat lapisan atas (ikatan feodal) sesudah 1870 boleh dikatakan semuanya sudah diintegrasikan dalam birokrasi pemerintahan kolonial. Pemerintah desa justru masih tetap dipertahankan kedudukannya sebagai masyarakat hukum yang otonom.

Kesatuan desa tetap dipertahankan, sebab dalam beberapa hal masih diperlukan untuk kepentingan-kepentingan perusahaan Barat partikelir, misalnya dalam hal penyewaan tanah. Meskipun dalam *Grondhuur-Ordonantie* (1895, 1900, 1918) disebutkan bahwa sewa tanah harus dilakukan atas dasar kontrak secara sukarela antara pabrik dan penduduk desa, akan tetapi dalam praktek pemilik tanah tidak dapat menolak untuk menyewakan tanahnya kepada pabrik. Sistem "dawuh" (perintah) kelurahan masih lebih berpengaruh daripada bunyi undang-undang. Tanpa kewibawaan kepada desa, pabrik-pabrik gula tidak akan memperoleh tanah. Gerakan-gerakan sosial yang terjadi pada waktu itu tidak sedikit yang berlatarbela-

kang penyewaan tanah kepada pabrik-pabrik gula yang sebenarnya setengah dipaksa 9).

Berhubung dengan itu maka, Undang-undang Agraria tahun 1870, yang pada pokoknya adalah individualisasi pemilikan tanah, tidaklah begitu, berarti bagi kehidupan sosial desa yang sebenarnya. Desa tetap mempunyai prioritas atas tanah. Secara yuridis, Undang-undang Agraria tersebut lebih banyak memberi perlindungan perusahaan Barat partikelir kepada pabrik-pabrik gula untuk menyewa tanah menurut hukum Barat yang tidak dikenal oleh desa.

Dari uraian di atas dapat dibuat suatu kesimpulan, bahwa pendirian pabrik-pabrik gula di Jawa dan khususnya di daerah Yogyakarta memberi peluang ekonomi kepada masyarakat, namun karena peraturan-peraturan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek dan di sana-sini terjadi penyalahgunaan serta kecurangan-kecurangan dalam memberikan apa yang menjadi hak dan wewenang masyarakat, khususnya para buruh tani dan pekerja pabrik, maka berakibat rendahnya ekonomi mereka. Rakyat tetap menderita karena ditekan dan dipaksa oleh penguasa dan aparat-aparatnya. Perasaan tidak puas makin meliputi segala aspek kehidupan masyarakat. Tak heran apabila kemudian timbul aksi-aksi buruh pabrik gula di berbagai tempat di daerah Yogyakarta pada tahun 1882.

Selanjutnya nasib yang tidak menguntungkan itu ternyata tidak hanya menimpa para buruh pabrik gula saja, tetapi juga buruh-buruh pegadaian dan buruh-buruh pabrik lainnya.

Aksi mogok para buruh pegadaian di Yogyakarta membaja setelah mereka mulai dibina oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pergerakan buruh Indonesia yang muncul sesudah tahun 1900 berbeda dengan sebelumnya. Pergerakan yang muncul sesudah tahun 1900 lebih terarah dan teratur. Ada 4 faktor yang menyebabkan munculnya pergerakan buruh Indonesia¹⁰⁾. *Pertama*, adanya perkumpulan-perkumpulan

politik, menyebabkan pikiran kaum buruh menjadi lebih terbuka untuk berorganisasi. Dari kalangan mereka yang telah mengikuti sekolah yang didirikan Belanda sehingga muncul putra-putri Indonesia yang sadar akan nasib bangsa dan tanah airnya. Mereka bergerak hanya untuk memperbaiki nasib bangsa dan tanah airnya. Mereka bergerak hanya untuk memperbaiki nasib bangsanya dalam mencapai kedudukan yang lebih wajar. *Kedua*, adanya perkumpulan sekerja bangsa Eropa dan campuran antara Eropa dan Indonesia. *Ketiga*, adalah timbulnya pergerakan dalam masa perang dunia, yang menyebabkan merosotnya penghidupan karena kesukaran pemasukan barang. *Keempat*, adanya hasrat orang-orang politik mendekati kaum pekerja untuk memperkuat aksinya dengan mempergunakan perkumpulan buruh.

Untuk melihat seberapa jauh aksi-aksi para buruh untuk memperjuangkan perbaikan nasib dan melepaskan ikatan kerja rodi (*herendiensten*) dapat kita ikuti uraian berikut :

Ketika itu berlaku 3 macam kerja rodi, yaitu:

1. *Krigadiensten*, ialah kerja rodi untuk kepentingan bersama, yakni kepentingan raja atau lurah dan kepentingan petani, misalnya perbaikan jalan, perbaikan jembatan, dan sebagainya.
2. *Wachtdiensten*, ialah kerja rodi dalam bentuk jaga malam, yakni untuk menjaga rumah, pekarangan atau milik berharga dari raja atau lurah;
3. *Gugurgunungdiensten* ialah kerja rodi untuk menanggulangi malapetaka atau kecelakaan dan juga pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat.

Beban petani menjadi lebih berat setelah raja dan kerabat raja menyewakan tanahnya kepada orang-orang Belanda. Dengan disewakannya tanah milik raja yang ditempati sendiri (tanah *daleman* dan tanah *lungguh*) kepada penyewa Belanda,

maka hak-hak raja dan lurah *patuh* yang berhubungan dengan tanah-tanah turut dialihkan pada penyewa, khususnya hak memanfaatkan kerja rodi petani.

Dengan hak-hak feodal yang didapat dari raja atau buruh patuh ini, para penyewa Belanda dengan sewenang-wenang memperlakukan para buruh tani. Tuntutan yang dikenakan pada para petani melebihi batas-batas yang wajar, yakni lebih tinggi daripada yang dituntut oleh raja atau lurah patuh atas tanah-tanah tersebut sebelum disewakan. Di sini para penyewa menggunakan dua macam "eksploitasi" yakni eksploitasi kapitalis dan eksploitasi feodal ¹²⁾, tetapi "eksploitasi feodal" ini telah dirasionalisasikan ke dalam "eksploitasi kapitalis". Dengan demikian para buruh menjadi sangat tertekan, bahkan menurut van Klaveren nasib buruh di perkebunan swasta tidak lebih baik daripada yang bekerja pada perkebunan pemerintah yang didasarkan atas kulturstelsel. Dengan demikian tujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial masyarakat bumi-putra ternyata sebaliknya hanya menguntungkan para kapitalis ¹³⁾. Nasib buruk yang makin menimpa buruh berakibat timbulnya pemogokan-pemogokan.

5.2 *Jalannya Pemogokan*

Pemogokan kaum buruh yang dibicarakan di sini akan dibagi dalam dua bagian, yakni, pemogokan buruh tani tahun 1882¹⁴⁾ dan pemogokan buruh setelah tahun 1900.

5.2.1 *Pemogokan Buruh Tani 1882*

Pemogokan ini berlangsung dalam tiga gelombang. Gelombang pertama berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai dengan tanggal 4 Agustus 1882, melanda empat buah pabrik gula. Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 buah pabrik dan perkebunan; sedangkan gelombang ketiga

berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan pertengahan bulan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan.

5.2.1.1. Gelombang pertama

Pada awal minggu terakhir bulan Juli 1882 ratusan buruh tani dari Pabrik Gula Barongan (Kabupaten Kalasan) mogok kerja sambil berteriak menuntut kenaikan upah dan keringanan kerja. Berbondong-bondong mereka menuju ke rumah dua orang pengawas Belanda (Kersch dan Smith). Mereka mengepung dan menggeledah rumah kedua pengawas tersebut, namun rumah-rumah tersebut telah kosong, sebab penghuninya telah melarikan diri.

Pemogokan di Pabrik Gula Barongan ini kemudian diikuti oleh ratusan buruh tani dari Pabrik Gula Padokan (Kabupaten Sleman). Mereka juga menuntut kenaikan upah dan keringanan kerja. Sambil berteriak-teriak mereka menyerukan mogok kerja. Ratusan buruh tani memakan tebu yang berada di kereta, malahan ada seorang di antaranya melempar batu ke mesin penggilingan. Mereka kemudian beramai-ramai mendatangi dan merusak rumah seorang pengawas Belanda yang bernama Breece W.J. de Reevert de Wildt, seorang administrator Pabrik Gula Barongan yang disertai tugas memimpin pabrik gula Padokan. Pengawas-pengawas Belanda lainnya yang melihat tindakan buruh tani itu menjadi takut, sehingga melarikan diri ke Yogyakarta.

Sebagian buruh tani dari Pabrik Gula Padokan kemudian bergerak ke Bantul untuk mencari pengikut. Rupanya para buruh tani dari Pabrik Gula Bantul telah siap juga untuk mengadakan pemogokan, sehingga mereka langsung menggabungkan diri dengan para pemogok dari Pabrik Gula Padokan. Bersamaan mereka menghadap Bupati Bantul Raden Tumenggung Suria Kusuma untuk mengadukan keresahan mereka dan menuntut kenaikan upah. Bupati tidak dapat memenuhi tuntutan

para pemogok, karena menurut dia, hal tersebut merupakan urusan patih. Mendengar jawaban bupati tersebut para pemogok merasa tidak puas dan memutuskan untuk segera meninggalkan kabupaten. Beberapa saat sebelum para pemogok meninggalkan kabupaten, tiba-tiba Ratu Kencana, yang rupanya dengan tekun telah mengikuti jalannya pemogokan, meminta pra pemogok untuk tidak meninggalkan kabupaten dulu karena ia ingin memberikan hadiah.

Setelah suasana agak tenang, Ratu Kencana segera membagikan hadiah yang dijanjikannya. Setiap pemogok atau buruh tani diberi uang sebesar 4 duit. Setelah semuanya menerima uang para pemogok diperkenankan meninggalkan kabupaten. Karena belum merasa puas, maka di tengah jalan kira-kira setengah paal dari kabupaten mereka membakar ladang tebu seluas 20 bau.

Mendengar kejadian tersebut, Hoordijk, administrator pabrik menjadi takut, dan meminta bantuan militer kepada residen. Rupanya residen terlampau optimis akan kemampuannya mengatasi keadaan. Ternyata keadaan belum sepenuhnya tenang karena tiba-tiba di dalam pabrik sejumlah tujuh belas orang buruh tani meneruskan lagi mogok kerja dan sekali lagi menuntut kenaikan upah. Kali ini mereka ditangkap dan dikirim ke Yogyakarta untuk dipenjarakan.

Penangkapan dan penahanan tidak membuat gentar atau jera buruh tani yang lain. Malah buruh Pabrik Gula Cebongan (Kabupaten Sleman) mulai melancarkan aksi mogok.

Raden Adipati Danureja, seorang patih atau pegawai administrasi tertinggi dari kesultanan yang juga berperan sebagai penghubung antara sultan dan residen, setelah mendengar dan mendapat laporan mengenai adanya pemogokan yang melanda keempat pabrik gula tersebut (Barongan, Padokan, Bantul dan Cebongan) segera datang ke tempat kejadian untuk mengadakan penyelidikan dan kalau mungkin menyelesaikan masalahnya.

Dalam penyelidikan ini patih dibantu bupati dan panji setempat. Hasil penyelidikan patih menunjukkan bahwa tuntutan upah dan keringanan kerja dianggap wajar dan masuk akal, oleh karena itu tuntutan para pemogok dapat disetujui.

Walaupun tuntutan kenaikan upah dan keringanan kerja tersebut dipenuhi, namun keadaan belum sepenuhnya mereda. Pemogokan di keempat pabrik tersebut pada pertengahan minggu pertama bulan Agustus ternyata masih berlangsung terus. Hanya di Pabrik Gula Bantul sebagian buruh tani sudah mulai bekerja kembali. Pemogokan di keempat pabrik tersebut baru berhenti pada tanggal 4 Agustus 1882.¹⁵⁾

5.2.1.2 *Gelombang Kedua*

Pemogokan buruh di keempat pabrik gula (Barongan, Padokan, Bantul dan Cebongan) baru berakhir. Pemogokan buruh terjadi lagi di Pabrik Gula Ganjuran (Kabupaten Sleman). Buruh tani dari Pabrik Gula Ganjuran berkumpul di depan pabrik sambil meneriakkan tuntutan mereka. Seorang pengawas Belanda yang melihat tindakan para pemogok menjadi panik melepaskan tembakan. Tembakan tersebut ternyata mengenai seorang buruh tani sehingga menderita luka ringan.

Pemogokan di Pabrik Gula Ganjuran kemudian diikuti oleh buruh tani dari Pabrik Gula Gesikan (Kabupaten Bantul) dan beberapa perkebunan nila, tetapi oleh residen dianggap enteng saja. Menanggapi pemogokan tersebut *De Locomotief* justru sebaliknya. Surat kabar itu memberitakan bahwa buruh-buruh tani yang mogok melakukan tindakan-tindakan brutal.

Pada tanggal 20 Agustus 1882 terjadi pula beberapa pemogokan, yakni di perkebunan tebu Plered, perkebunan nila Ngoto, dan perkebunan tembakau siluk Centeng. Ketiga perkebunan ini berada di wilayah Kabupaten Kalasan. Para pemogok dari perkebunan nila Ngoto dan perkebunan tembakau Siluk Centeng hanya mengadu ke Patih Danureja di Yogyakarta.

Mereka segera meninggalkan kepatihan karena telah merasa puas.

Pemogokan yang dilancarkan oleh ratusan buruh tani dari perkebunan tebu Plered bermula ketika para buruh tani tersebut berbondong-bondong menuju ke rumah Bupati Kalasan Raden Tumenggung Sosrodipuro. Mereka menuntut kenaikan upah dan keringanan kerja. Mereka mendapat jawaban akan diadakan penelitian terlebih dahulu. Mendengar jawaban tersebut para buruh tani menjadi kecewa dan memutuskan untuk mengadu ke Patih Danurejo di Yogyakarta.

Dalam perjalanan ke rumah Patih Danurejo yang jaraknya tidak kurang dari sepuluh kilometer, para pemogok berteriak-teriak sambil merusak tanaman tebu. Menurut *De Locomotief* mereka bukan hanya merusak dan memakan tebu, tetapi juga melempari rumah-rumah pengawas dengan batu. Mereka mengacung-acungkan klewang, sabit atau golok serta melambai-lambaikan sapu tangan sambil berteriak-teriak. Sesampainya di kepatihan, para pemogok langsung menuntut kenaikan upah dan keringanan kerja. Melihat situasi yang demikian ini patih segera memberi jawaban bahwa masalahnya akan diteliti terlebih dahulu. Mendengar jawaban itu para buruh memutuskan untuk tidak meninggalkan kepatihan sebelum tuntutan mereka dikabulkan.

Situasi membuat patih mulai merasa khawatir, jangan-jangan para pemogok akan membuat huru-hara atau keonaran di kepatihan; oleh karena itu ia segera minta pertimbangan kepada residen. Dalam hal itu residen memberi jawaban bahwa para pemogok harus diusir dan bahkan kalau perlu dengan kekerasan. Mendengar jawaban residen patih segera minta bantuan tentara kerajaan untuk mengusir para pemogok. Para pemogok meninggalkan kepatihan dengan rasa berat. Dalam perjalanan kembali ke desa, para pemogok bersorak-sorak melewati tengah pasar yang terletak di sebelah utara Benteng Vredeburch.

Rupanya residen kurang begitu percaya terhadap kemampuan tentara kerajaan; oleh karena itu dia minta bantuan kepada komandan militer Benteng Vredeborg untuk mengirimkan patroli dan tentara untuk bergabung dengan tentara kerajaan mengusir para pemogok sampai di luar kota Yogyakarta.

Mengenai pengusiran para pemogok ini, *De Locomotief* memberitakan bahwa telah terjadi bentrokan antara para pemogok dengan tentara yang mengakibatkan sejumlah pemogok menderita luka-luka dan lima orang tewas. Tetapi berita tersebut dibantah oleh residen.

Pengusiran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata ini tidak membuat takut atau jera para buruh tani. Sesampai di Plered mereka tetap melancarkan aksi mogoknya. Melihat kenyataan itu Patih Danurejo segera berangkat ke Plered. Keberangkatan patih ke Plered ini di samping untuk memenuhi tuntutan para buruh tani, juga untuk menangkap empat orang yang dianggap sebagai pengacau. Dengan dipenuhinya tuntutan mereka mengenai keringanan kerja dan kenaikan upahnya, maka buruh tani dari perkebunan Plered ini mulai menghentikan aksi mogoknya dan mulai bekerja seperti biasa.

5.2.1.3 *Gelombang Ketiga*

Dua hari setelah terjadi bentrokan antara buruh tani dari perkebunan tebu Plered dengan pasukan bersenjata, empat perkebunan lainnya dilanda pemogokan. Perkebunan-perkebunan tersebut adalah perkebunan nila Salakan Potorono, perkebunan nila Salakan Lor, dan perkebunan nila Waludoyo yang kesemuanya termasuk Kabupaten Kalasan. Di samping itu di Kabupaten Sleman juga terjadi pemogokan di perkebunan tebu Rewulu. Para buruh tani dari keempat perkebunan ini mengadu kepada panji dan bupati masing-masing. Mereka menuntut agar upah mereka dinaikkan. Tuntutan tersebut langsung dipenuhi, kecuali tuntutan buruh tani dari perkebunan

Waludoyo, karena harus menunggu penyelidikan terlebih dahulu.

Pemogokan-pemogokan selanjutnya terjadi di perkebunan nila Waringin (Kabupaten Kalasan) dan perkebunan tebu Pundong (Kabupaten Bantul). Tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para buruh tani langsung dapat dipenuhi.

Semakin lama pemogokan semakin meluas ke perkebunan-perkebunan lainnya. Sampai dengan pertengahan bulan Oktober 1882 tercatat 15 pemogokan yang meliputi sembilan perkebunan nila, lima perkebunan tebu dan satu perkebunan tembakau¹⁶⁾. Perkebunan-perkebunan tersebut adalah: Perkebunan nila: Sonosewu (Kabupaten Sleman), perkebunan nila Demak Ijo (Kabupaten Sleman), perkebunan nila Kebon Agung (Kabupaten Sleman), perkebunan nila Mlati (Kabupaten Sleman), perkebunan nila Pendulan (Kabupaten Sleman), perkebunan nila, Duku dan Pisangan (Kabupaten Sleman), perkebunan nila, Mengkang Rejo (Kabupaten Bantul), perkebunan nila Kenayan (Kabupaten Kalasan), dan perkebunan nila Muja-muju (Kabupaten Kalasan), perkebunan tebu Ngemplak (Kabupaten Sleman), perkebunan tebu Klaci (Kabupaten Sleman), perkebunan tebu Tegal Waru (Kabupaten Sleman), perkebunan tebu Mlati (Kabupaten Sleman), dan perkebunan tebu Tanjung Tirta (Kabupaten Kalasan), perkebunan tembakau Rejosari (Kabupaten Kalasan).

Sejak pertengahan bulan Oktober sudah tidak terdengar lagi terjadinya pemogokan. Rupanya pemogokan telah berakhir karena tuntutan buruh tani, khususnya mengenai kenaikan upah dan keringanan kerja dipenuhi.

5.2.1.4 *Sebab-sebab Pemogokan*

Secara keseluruhan, penyebab pemogokan dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Upah yang terlalu rendah. Upah di daerah Yogyakarta sangat rendah; jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dibandingkan dengan upah buruh di Surabaya dan Yogyakarta yang sama peraturan dan persyaratan sewa tanahnya, daerah Yogyakarta masih jauh lebih rendah. Upah buruh tani di Surakarta perhari 30-60 sen, sedangkan di Yogyakarta hanya 25-30 sen. Di samping itu produksi pabrik gula perkebunan di Yogyakarta, pada tahun 1881 sangat melonjak bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan upah buruh masih sangat rendah.
- (2) Kerja gugurgunung (*gugurgunungdiensten*) dirasakan terlalu berat karena petani dipaksa bekerja sekali setiap hari; padahal menurut peraturan gugur gunung ini hanya dilakukan 1 kali dalam 30 hari atau 1 kali dalam 35 hari⁹⁾.
- (3) Kerja jaga (*wachtdiensten*) dirasakan terlalu berat karena harus dilaksanakan, satu kali dalam tujuh hari; padahal menurut peraturan, pekerjaan ini dilaksanakan 1 kali dalam 14 hari.
- (4) Kerja moargan (*moargandiensten* atau *buitengenwoondiensten*) yang sudah tidak lazim dilaksanakan, masih dipaksakan kepada buruh tani untuk dilaksanakan.
- (5) Upah tanam (*plantloon*) yang dalam bahasa Jawa disebut *persen* yang seharusnya diterima buruh tani jarang sampai ke tangannya; kalau toh sampai biasanya sudah berkurang, karena dikorup oleh mandor (kadang-kadang oleh bekel, apabila pembagiannya melalui bekel).
- (6) Banyak pekerjaan buruh tani yang tidak dibayar padahal pekerjaan tersebut di luar waktu kerja wajib atau kerja rodi. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibayar ini misalnya pengangkutan tebu ke kereta, pengangkutan *rapak* (daun tebu) ke jalan, pembuatan pagar di perkebunan dan lain-lain.

- (7) Buruh tani yang dibutuhkan oleh pabrik/perkebunan di bayar jauh di bawah harga pasaran. Harga pasaran saat itu 10 *duit*, sedangkan pihak pabrik hanya membayar 3 *duit*.
- (8) Keterlambatan pengambilan *glebagan* dari pemilik perkebunan.
- (9) Perlakuan dari beberapa pengawas Belanda yang tidak simpatik, yaitu sering mengadakan pemukulan terhadap beberapa buruh tani.

Kesembilan masalah tersebutlah yang pada prinsipnya menyebabkan terjadinya pemogokan. Kecuali itu masih ada hal yang penting, khususnya untuk pabrik gula/perkebunan tebu, yakni hujan lebat yang terjadi pada awal bulan Juli 1882. Hujan lebat ini menyebabkan pekerjaan di pabrik gula dan penanaman tebu di sawah mengalami kelambatan. Untuk mengejar kelambatan ini pihak pemilik pabrik/perkebunan memaksa buruh tani untuk bekerja keras. Dalam melaksanakan pekerjaan ini buruh tani sama sekali tidak boleh datang terlambat. Kalau sampai terlambat dikenakan hukuman kerja, yakni bekerja dua kali lipat dari yang telah ditentukan.

5.2.1.5 *Reaksi terhadap Pemogokan*

Pemogokan buruh tani di Yogyakarta tahun 1882 ternyata mengundang berbagai reaksi dari pihak Belanda, terutama pihak pemerintah, pihak pemilik pabrik/perkebunan dan pihak pers.

5.2.1.5.1 *Reaksi Pemerintah*

Residen Yogyakarta van Baak dalam laporannya kepada gubernur jendral menekankan bahwa sejak April 1872 ketika ia memangku jabatan, daerahnya selalu dalam keadaan tentram, kecuali tahun 1882. Di dalam laporannya ini residen antara lain mengingatkan kepada gubernur jendral bahwa pada

tahun 1872, yakni semasa pemerintahan Presiden A.J.B. Wittendorff, pernah terjadi pengaduan dari buruh tani, tetapi anehnya van Baak sama sekali tidak menyinggung bahwa pada tahun 1879, yakni tahun kedua masa pemerintahannya, juga terjadi pengaduan buruh tani. Nampak di sini bahwa residen berusaha menutupi dirinya agar ia tidak mendapat penilaian yang tidak baik dari Batavia.

Selanjutnya van Baak menambahkan bahwa peristiwa yang terjadi di Yogyakarta tahun 1882 bukanlah suatu gerakan politik, tetapi hanyalah merupakan gejala atau gerakan agraris yang murni.

Untuk memberi bobot pada laporannya itu van Baak memberikan perbandingan dengan keadaan buruh tani di Surakarta. Dikatakan bahwa buruh tani di Surakarta tidak mengadakan pemogokan, padahal kepada mereka dikenakan peraturan yang sama mengenai sewa-menyewa tanahnya. Selanjutnya van Baak memberikan jawaban mengenai beberapa penyebabnya, antara lain, bahwa jumlah penduduk di Yogyakarta lebih banyak dari pada di Surakarta; kerja rodi di Yogyakarta lebih berat dari pada di Surakarta; tanah di Yogyakarta lebih sempit dari pada di Surakarta; pajak di Yogyakarta lebih berat dari di Surakarta.

Melihat kebijaksanaan Residen van Baak yang kontraversial itu, Gubernur Jendral Hindia Belanda menugaskan J. Huyting, seorang residen Kedu yang juga menjabat sebagai inspektur kepala perkebunan, untuk mengadakan penelitian mengenai pemogokan di Yogyakarta dan membentuk suatu komisi yang terdiri atas dia sendiri (Huyting), residen Surakarta dan Yogyakarta dengan tugas mempersiapkan suatu peraturan mengenai sewa-menyewa tanah di daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.

5.2.1.5.2 *Reaksi Pemilik Pabrik/Perkebunan*

Terjadinya pemogokan yang dilancarkan oleh buruh tani itu membuat pemilik pabrik/perkebunan menjadi panik dan terkejut. Mereka sedikit pun tidak berusaha menanggapi tuntutan para buruh tani, bahkan sebagian besar dari mereka melarikan diri ke Yogyakarta.

Sebab-musabab pemogokan para buruh tani ini dituduhkan pada Ratu Kencana. Pemberian uang 4 *duit* kepada para pemogok di Bantul dibesar-besarkan dan dijadikan dalih atau alasan untuk memperkuat desas-desus tersebut. Oleh karena itu Ratu Kencana digolongkan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Ia dituduh tidak hanya menghasut para buruh tani saja, bahkan juga para priyayi, yaitu kepala distrik dari Kalasan.

Bupati Bantul Raden Tumenggung Surio Kusumo, adik laki-laki Ratu Kencana, juga dituduh sebagai penghalang atau penghasut. Kedudukannya sebagai bupati dikutik-kutik. Saat itu Suria Kusumo memang mempunyai pengaruh besar, bukan saja terhadap buruh tani tetapi juga di kalangan priyayi. Di antara para priyayi yang dituduh menjadi kaki tangan Surio Kusumo adalah Raden Rio Tirtonegoro dan Raden Kerto Sembono. Untuk memperkuat tuduhan kepada kedua orang priyayi itu, dikatakan bahwa mereka selalu menyebut-nyebut nama Surio Kusumo sebagai *reati guru*. Dengan alasan itulah para pemilik pabrik/perkebunan berusaha mengkambinghitamkan kedua priyayi tersebut.

Usaha menyebarluaskan desas-desus bahwa priyayi sebagai dalang pemogokan terus dilancarkan. Berbagai alasan dicari-cari untuk memperkuat tuduhannya. Dan kali ini ditujukan kepada Raden Tirta Negoro, seorang bekas bupati Bantul. Pemecatan terhadap dirinya karena penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan, dijadikan alasan oleh pihak pemilik pabrik/perkebunan, untuk menuduh bahwa dia juga seorang penghasut.

Priyayi-priyayi lain yang dituduh sebagai penghasut adalah Pangeran Mangkubumi (kakak tertua Sultan Hamengku Buwono VII), Pangeran Yudonegoro (adik ipar Sultan Hamengku Buwono VII) dan Raden Tumenggung Gondokusumo (anak patih Danurejo V). Ketiga orang tersebut dikatakan sebagai orang-orang yang berbahaya dan tidak dapat dipercaya.

Demikianlah tuduhan-tuduhan liar yang dilontarkan oleh para pemilik pabrik/perkebunan. Setelah diadakan penyelidikan, ternyata tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti dan hanya merupakan isapan jempol belaka¹⁸).

5.2.1.5.3 Reaksi Pers

Sedikitnya ada tujuh koran yang terbit di Hindia-Belanda yang memuat berita pemogokan 1882 itu, yaitu *Mata-ram*, *De Locomotief*, *Soerabaja Courant*, *Soerabaiasche Handelsblad*, *Java Bode*, *Het Indisch Vaderland*, dan *Javasche Courant*. Di antara persuratkabaran itu *De Locomotief* dan *Soerabaja Courant* memberi komentar dan ulasan mengenai pemogokan tersebut.

De Locomotief dalam ulasan-ulasannya lebih banyak menyoroti kebijaksanaan Residen van Baak daripada masalah pemogokannya sendiri. Dalam terbitannya tanggal 24 Agustus 1882, *De Locomotief* menyalahkan Residen van Baak yang sampai tidak mengetahui kedatangan para pemogok di Yogyakarta dari perkebunan *Plered*. Dalam penerbitan-penerbitan selanjutnya *De Locomotief* berusaha untuk menjatuhkan Residen van Baak dengan berbagai macam alasan. Menurut penilaiannya van Baak bukanlah orang yang cakap dalam jabatannya, baik waktu di Yogyakarta maupun waktu menjabat di Kedu. Namun di mana ketidakcakupannya waktu menjabat di Kedu tidak dijelaskan. Selanjutnya *De Locomotief* mengimbau kepada pemerintah pusat di Batavia agar Residen van Baak diganti saja dengan orang yang lebih bijaksana. Di samping menjatuhkan

Residen van Baak, *De Locomotief* cenderung membela kepentingan pemilik pabrik/perkebunan dari pada kepentingan buruh tani. Koran ini dalam penerbitannya tanggal 24 Agustus 1882 antara lain mengatakan bahwa tuntutan buruh tani mengenai kenaikan upah adalah tidak beralasan sebab upah kerja di Yogyakarta pada umumnya tinggi. Pemberitaan ini dibantah oleh Vindese dalam *Soerabaja Courant*, dengan mengatakan bahwa pernyataan *De Locomotief* tersebut tidak benar dan hanya merupakan kebohongan belaka. Selanjutnya dikatakan bahwa tuntutan buruh tani mengenai kenaikan upah tidak perlu diragukan lagi sebab upah yang diterima buruh tani memang terlalu rendah. Untuk itu Vindese memberi contoh mengapa buruh tani Bantul mengadakan pemogokan dengan pernyataan sebagai berikut.¹⁹⁾

"... de bevolking gedwongen werd door den landheer tegen een dagloon van nog geen dubbeltje, terwijl een koeli in vrijen arbeid 40 cent of meer verdienen kan" ("... rakyat dipaksa bekerja oleh tuan tanah dengan upah harian 10 sen, sedangkan seorang kuli yang bekerja bebas mendapat upah lebih dari 40 sen").

Mengenai hal ini terjadi polemik antara Vindese dengan *De Locomotief*. *De Locomotief* kemudian menanggapi lagi bahwa pernyataan Vindese dalam *Soerabaja Courant* tersebut tidak benar. Dikatakan bahwa upah di perkebunan Bantul sama dengan upah di perkebunan-perkebunan lain, yakni 25 sen per hari. Secara umum upah buruh di Yogyakarta pada tahun 1882 adalah 25–30 sen per hari.

De Locomotief masih berusaha menolak tanggapan *Soerabaja Courant* dan tidak mau mengakui kenyataan yang ada bahwa terjadinya pemogokan disebabkan rendahnya upah dan beratnya kerja, karena ada pula perkebunan yang upahnya lebih rendah dari yang lain tidak mengadakan pemogokan dan terdapat perkebunan yang upahnya lebih tinggi malahan mengadakan pemogokan.

5.2.1.5.4. Akibat Pemogokan

Usaha buruh tani memperbaiki nasibnya dengan melancarkan pemogokan ternyata berhasil. Tuntutan mereka pada umumnya disetujui, khususnya mengenai kenaikan upah dan keringanan kerja. Dipenuhinya tuntutan para buruh ini ternyata membawa akibat yang lebih luas, yakni keamanan di daerah Yogyakarta menjadi lebih baik. Residen Yogyakarta dalam *Laporan Umum Tahun 1882* mengungkapkan keadaan ini sebagai berikut²⁰⁾:

"De batere bertaling die de arbeiders bij de sui ker fabrieken ontvangen en het minder worderen van merk zonder loon verbeterde dan toestand worderen der bevolking en kwam ook de veiligheid ten goede." ("Bayaran yang lebih baik bagi pekerja-pekerja pabrik gula dan berkurangnya kerja tanpa upah telah memperbaiki keadaan masyarakat dan mendatangkan keamanan yang baik.")

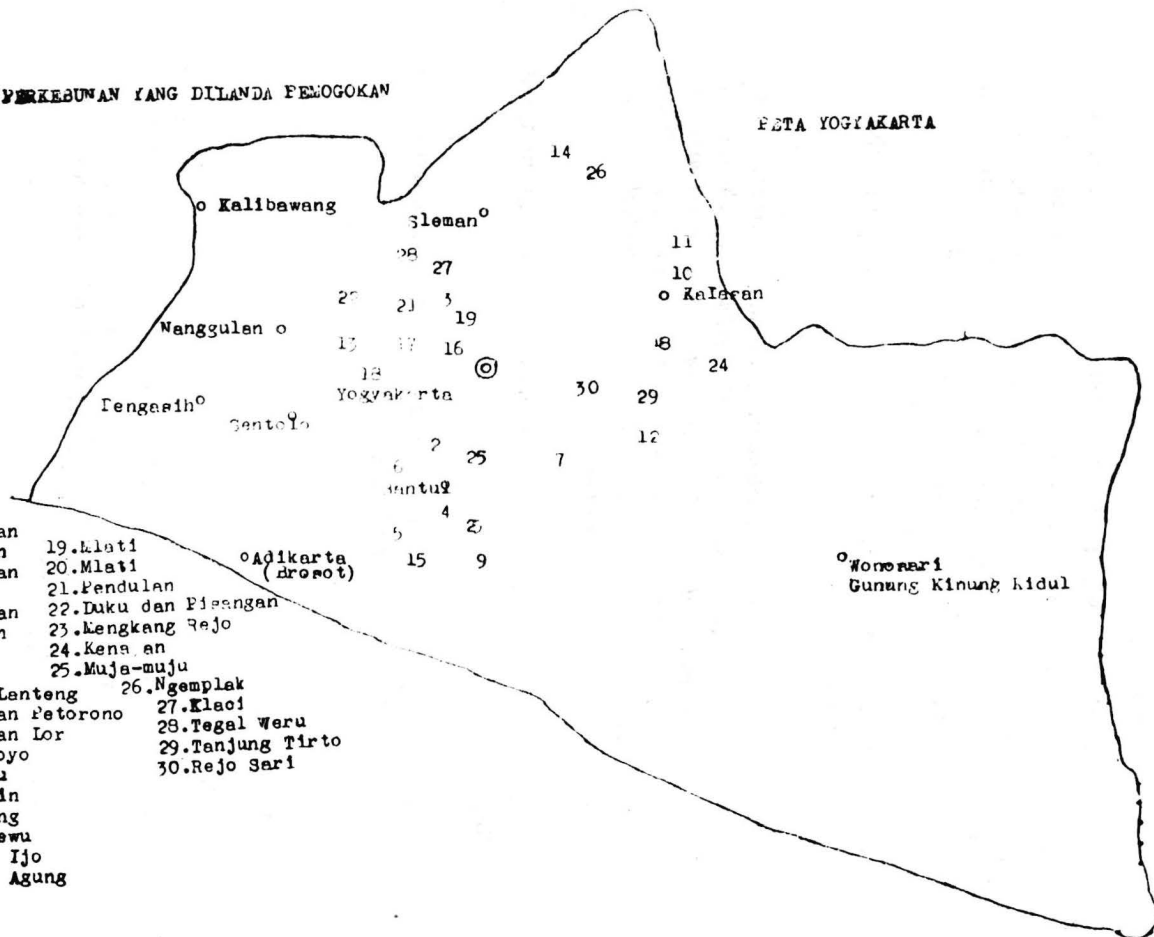
Pernyataan van Baak tersebut memang benar. Hal ini dapat dilihat dari²¹⁾.

- (1) Menurunnya pembakaran tebu. Selama berlangsungnya pemogokan telah terjadi lebih dari tigapuluh pembakaran tebu yang menghabiskan tidak kurang dari 150 *bau* tanaman tebu, sedangkan setelah dipenuhi tuntutan buruh tani diberitakan bahwa keadaan menjadi aman.
- (2) Menurunnya perampokan secara drastis. Pada tahun 1882 terjadi 29 perampokan, sedangkan pada tahun 1883 hanya terjadi sepuluh perampokan. Menurunnya perampokan ini menurut Groeneman, adalah karena adanya perbaikan masyarakat. Perbaikan kehidupan ini terjadi setelah pemogokan buruh tani 1882.

PERKEBUNAN YANG DILANDA PEMOGOKAN

PETA YOGYAKARTA

1. Barongan
2. Padokan
3. Cebongan
4. dentul
5. Ganjuran
6. verikan
7. Flered
8. Ngoto
9. Siluk Lenteng
10. Solakan Petorono
11. Salakan Lor
12. Wanujoyo
13. Rewulu
14. Wringin
15. Fundung
16. Sonoesewu
17. Demak Ijo
18. Kebon Agung
19. Mlati
20. Mlati
21. Pendulan
22. Duku dan Pisangan
23. Mengkang Rejo
24. Kena'an
25. Muja-muju
26. Ngemplak
27. Klaci
28. Tegal Weru
29. Tanjung Tirto
30. Rejo Sari



Bagi pihak pemilik perkebunan, pemogokan tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian. Di samping mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk memperluas produksi karena upah buruh tani naik, juga produksi mereka pada tahun 1882 menunjukkan kemerosotan bila dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 1881, khususnya pabrik/perkebunan yang dilanda pemogokan.

5.2.2 Pemogokan Buruh Setelah 1900: Sebab dan Akibatnya

Pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada umumnya mempengaruhi juga perjuangan kaum buruh. Di Indonesia yang mula-mula berdiri adalah organisasi kaum pengusaha/majikan. Pada tahun 1879 berdiri perkumpulan Pemilik Perkebunan Deli (*Deli Planters vereniging*). Tahun 1910 berdiri Perkumpulan Pemilik Perusahaan Karet di Sumatera Timur. Seterusnya perkumpulan-perkumpulan semacam itu terus berdiri.

Serikat buruh yang pertama-tama berdiri ialah Serikat Buruh dari Perusahaan Kereta Api Negara (*Staatspoor*) pada tahun 1905. Tidak lama kemudian Serikat Buruh itu dibubarkan dan anggota-anggotanya masuk ke dalam VSTP (*Vereniging Van Spoor en Tram weg Personeel*) di bawah pimpinan Snevliet dan Semaun (didirikan pada tahun 1908 di Semarang).

Tidak lama setelah berdirinya VSTP, muncullah serikat-serikat buruh lain. Tahun 1911 berdiri PBP (Perhimpunan Bumi-putra Pabean). Tahun 1912 berdiri PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda) yang kemudian berganti nama menjadi PGI (Perhimpunan Guru Indonesia). Pada tahun 1914 berdiri PPPB (Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra). Tahun 1917 oleh RM Suryopranoto di Yogyakarta didirikan PFB (*Personeel Fabrieks Bond*). Tahun 1918 muncul VvL (*Verbond van Landsdienaren*) yang terdiri atas beberapa perkumpulan pegawai.

Suasana kehidupan rakyat setelah Perang Dunia I tahun 1919 baik para petani maupun kaum buruh pada umumnya sangat buruk dan menyedihkan sekali. Para petani yang memiliki sawah diwajibkan menanam 2/3 dari sawahnya dengan tanaman tebu untuk pemerintah, sedangkan bagi pemiliknya 1/3 bagian untuk keperluan hidup keluarga. Menurut peraturan, sawah yang dipergunakan perkebunan harus disewa oleh perusahaan, tetapi keadaannya lebih celaka lagi karena ternyata sewa tanah yang dijanjikan tidak sampai di tangan petani. Uang itu masuk kantong para penguasa Belanda dengan antek-anteknya. Rakyat tidak tahu tentang sewa tanahnya dan bahkan sama sekali tidak pernah menerimanya²²⁾. Bangsa Indonesia tidaklah dipandang sebagai manusia sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dengan gaji yang sangat rendah²³⁾. Gaji buruh jauh di bawah pengeluaran untuk anjing majikannya²⁴⁾. Perlakuan demikian menimbulkan kemarahan para pemimpin dalam pergerakan itu.

Tanpa memperhitungkan resiko yang akan menimpa dirinya, maka bergeraklah RM. Suryopranoto demi kepentingan bangsanya. RM. Suryopranoto membentuk serikat buruh di Yogyakarta yang tergabung dalam *Personeel Fabrieks Bond*. Jumlah buruh yang digerakkan sejak tahun 1917 sampai dengan tahun 1920 mencapai 30.000 orang. Kaum buruh yang bersatu itu menuntut perbaikan nasibnya, sehingga di berbagai pabrik gula di Yogyakarta terjadi perlawanan dan juga pemogokan melawan perlakuan sewenang-wenang dari pihak penguasa pabrik.

Perkumpulan PFB yang didirikan di Yogyakarta tahun 1917 dengan tujuan memberi pertolongan kepada keluarga buruh pabrik di Yogyakarta, kemudian menyebar ke seluruh Jawa. Pimpinan PFB RM. Suryopranoto yang merangkap komisaris Sentral Sarekat Islam, menuntut pengakuan PFB sebagai perwakilan para buruh dan supaya menaikkan upah mereka.

Karena penguasa kebun tebu tidak mau menuruti tuntutan PFB, maka pada tanggal 9 Agustus 1920 PFB terpaksa bertindak. Meskipun Pemerintah Belanda pada saat itu telah mengeluarkan peraturan larangan mengadakan pemogokan, seluruh buruh di bawah R.M. Suryopranoto serentak mengadakan pemogokan. Pemogokan ini diikuti oleh para buruh pabrik di berbagai daerah, di antaranya di Bondowoso dan Situbondo, Jawa Timur.

Aksi pemogokan buruh itu dianggap oleh Belanda sudah menjurus kepada pergerakan politik, bukan sekedar untuk perbaikan nasib. Meskipun para buruh mendapat tekanan dan ancaman tetapi tetap gigih. Mereka tidak akan bekerja sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Berkat kegigihan para pemogok, akhirnya majikan perusahaan dan pabrik memenuhi tuntutan mereka. Gaji mereka yang semula f10,— dinaikkan menjadi f15,—. Ini berarti ada kenaikan 50% dari gaji mereka semula. Dalam hal ini pemerintah juga mengingatkan agar perusahaan gula sebaiknya menambah upah buruhnya karena timbul kekhawatiran akibat yang makin meluas.

Dengan dipenuhinya tuntutan kaum buruh ini para majikan telah memberikan perhatiannya. Orang-orang Indonesia yang semula dipandang sebagai kuli yang rendah, kemudian berubah. Sembah jongkok yang biasa diwajibkan pada kuli oleh majikannya, berubah pula.

Pada tanggal 1 Agustus 1920 diadakan Kongres PPPB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) yang pertama kali di Yogyakarta yang dihadiri 22 serikat pekerja dengan jumlah anggota 72.000. Sebagian dari persatuan buruh itu beraliran komunis, sedangkan sebagian lagi beraliran sosialis. Kedua aliran ini terdapat perbedaan pandangan. Bagi yang beraliran sosialis, pergerakan buruh sekedar alat untuk perbaikan nasibnya, dan bukan menjurus pada pergerakan politik. Menurut cita-cita RM. Suryopranoto, didirikannya PFB bukanlah hanya

untuk mendapatkan kenaikan upah buruh agar tercukupi kebutuhan hidupnya, tetapi lebih penting dari itu ialah menjunjung martabat bangsa. Dengan kenaikan upah buruh diartikan adanya kelayakan martabat bangsa Indonesia.

Aksi pemogokan buruh yang semula timbul di Yogyakarta dan kemudian juga di kota lainnya mendapat sambutan hebat. Di mana-mana RM. Suryopranoto membangkitkan keberanian dan semangat bangsa Indonesia agar tidak takut terhadap para penguasa Belanda.

Dalam bulan Nopember 1920 di Surabaya juga timbul pemogokan karena upah buruh yang tidak sesuai dengan adanya kenaikan barang-barang. Pemogokan di kota ini juga karena perluasan apa yang pernah terjadi di Yogyakarta. Pemogokan tersebut terjadi di perusahaan-perusahaan, di pelabuhan dan juga di kalangan pengusaha teknik.

Dengan adanya pemogokan di berbagai kota dan daerah itu, maka Pemerintah Belanda membentuk suatu panitia untuk menentukan perbaikan nasib.

Suryopranoto mulai dikenal dengan sebutan Raja Mogok. Di mana daerah yang didatangi RM. Suryopranoto selalu disusul dengan pemogokan. Karena menjabat kepala departemen perburuhan Sarekat Islam, maka pengaruh Suryopranoto makin luas jangkauannya, karena saat itu Sarekat Islam telah tersebar luas dalam masyarakat. RM. Suryopranoto pun pandai membakar semangat.

Selama tiga tahun saja, PFB telah mencatat anggota sebanyak 30 ribu. Selama 3 tahun itu di mana-mana terjadi tuntutan dan pemogokan. Pemogokan dalam tahun 1922 diperbuat lagi pemogokan yang dilakukan oleh buruh kereta api. Aksi pemogokan yang dilakukan buruh kereta api ini telah menjadi lebih ekstrim lagi karena pemogokan dilancarkan dengan pembakaran gudang dan lain-lain. Untuk menghadapi pemogokan itu pemerintah mendatangkan polisi.

RM. Suryopranoto benar-benar ditakuti Pemerintah Belanda karena kata-katanya selalu ditaati kaum buruh. Pada tahun 1920 di Yogyakarta terdapat sekitar 22 pabrik gula antara lain Wonocatur, Prambanan, Plered, Sewugulur, Sendangtirto dan juga pabrik gula di Beran Sleman. Di berbagai tempat ini RM. Suryopranoto memberi semangat kepada para buruh; oleh karena itu maka tidak mengherankan apabila pemogokan mudah menyebar di sini pula. Rakyat dibakar semangatnya dan di lain pihak diberi gambaran tentang kekejaman dan melimpah ruahnya keuntungan Belanda yang diperoleh dari tenaga mereka. Dengan cara demikian tidak mengherankan apabila para buruh mudah digerakkan untuk mengadakan pemogokan.

Untuk perbaikan nasib buruh pada umumnya di Yogyakarta juga digerakkan buruh di pegadaian yang tergabung dalam gerakan PPPB (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi-putra). Perkumpulan ini didirikan di Yogyakarta pada tahun 1923. PPPB juga digerakkan untuk melakukan pemogokan dengan tujuan untuk melawan kekejaman dan perlakuan sewenang-wenang dari pimpinan pegadaian yang pada umumnya dipegang oleh orang-orang Belanda. Para penggerak dan pengurus PPPB itu antara lain RM. Suryopranoto, Reksodiputro dan R. Suwitoprawirowiharjo.

Timbulnya ide pembentukan PPPB berasal dari Sarekat Islam yang tidak rela buruh bangsa Indonesia hanya dianggap dan diperlakukan sebagai budak saja oleh para majikan. Belanda tidak hanya memandang rendah buruh perkebunan dan pabrik-pabrik saja, tetapi juga pegawai-pegawai pada instansi-instansi lain, misalnya pada pegawai pegadaian.

Dengan adanya pemogokan yang terjadi di mana-mana, Pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang khusus. Artikel 161 bis, KUHP tidak melarang orang mengadakan pemogokan, melainkan melarang orang untuk menghasut pemogokan²⁵⁾. Jadi dalam hal ini yang diancam ialah pemimpin

pemogokan. Dengan keluarnya peraturan ini hanya para pemimpin rakyat bangsa kita terkena hukuman, diantaranya RM. Suryopranoto dan Reksodiputro.

Pemogokan di kalangan pegadaian pertama kali terjadi di Pegadaian Ngupasan Yogyakarta. Sebelum itu sebenarnya telah diadakan rencana-rencana sesuai keputusan kongres PPPB. Keputusan itu diambil karena nasib buruh pegadaian sangat menyedihkan. Di samping gaji mereka rendah, juga perlakuan orang-orang Belanda yang memandang terhadap pegawai-pegawai bangsa kita sebagai buruh kasar saja.

Asal mula terjadinya pemogokan di Pegadaian Ngupasan itu dapatlah dituturkan sebagai berikut. *Baamkte-baamkte* pegadaian, yaitu pegawai yang tugasnya melelangkan barang-barang yang digadaikan yang sudah habis waktunya, menyuruh pegawai-pegawai pegadaian dari bangsa kita untuk mengangkut dan membawa barang-barang dari tempat penyimpanan ke tempat pelelangan, padahal pada waktu itu yang dilelangkan bukan hanya perhiasan dan pakaian saja, tetapi juga alat-alat dapur seperti dandang, kenceng, dan lain-lain. Para pejabat tersebut memerintahkan pegawai bangsa Indonesia mengangkut barang-barang tersebut dengan nada menghina.

Perasaan seseorang yang terhina tak dapat diabaikan begitu saja. Perintah demikian itu dipandang sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai suatu bangsa. Orang-orang Belanda atau Indo-Belanda saat itu tak ada yang bertugas sebagai pegawai rendah-an. Mereka paling sedikit menjabat wakil kepala rumah gadai tersebut. Mereka belum pernah melakukan pekerjaan seperti taksasi (penafsiran suatu barang) emas, intan dan lain-lain. Mereka juga tidak mempunyai pengertian sama sekali mengenai pekerjaan semacam itu. Ini biasanya dikerjakan oleh bangsa Indonesia yang telah mahir.

Karena perintah yang semena-mena itu dianggap suatu penghinaan, maka pegawai-pegawai Indonesia menolak melaksanakannya, bahkan diikuti dengan pemogokan.

Dalam melaksanakan pemogokan di pegadaian tersebut PPPB menentukan dua tujuan yaitu untuk menjunjung tinggi derajat bangsa dan untuk perbaikan nasib ekonomi para pegawai pegadaian itu sendiri. Mereka menuntut agar pengangkatan barang-barang yang akan dilelang itu tidak dibebankan kepada petugas bangsa Indonesia tetapi harus ada petugas khusus.

PPPB juga menuntut perbaikan gaji buruh karena keadaan perekonomian setelah Perang Dunia I sangat buruk. Permintaan PPPB ditolak Pemerintah Belanda, bahkan para pegawai pegadaian itu tetap diperintahkan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Para pegawai pegadaian tetap membangkang dan membuang barang-barang tersebut. Kejadian yang pertama di Pegadaian Ngupasan ini diikuti oleh pegawai Pegadaian Lempuyangan Yogyakarta.

Berita mengenai peristiwa di Ngupasan meluas. PPPB memerintahkan agar diadakan aksi pemogokan serentak di mana-mana. Sosrokardono yang memimpin PPPB ketika itu kemudian mengadakan propaganda di semua rumah gadai di seluruh Jawa. Setelah mendengar bahwa para pegawai di Pegadaian Ngupasan mengadakan pemogokan, pegawai-pegawai lainnya mengikuti secara serentak. Pemogokan menjalar ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada saat itu hampir seluruh pegadaian di Jawa ditutup dan tidak menjalankan pekerjaannya²⁶⁾.

Dalam peristiwa pemogokan itu RM. Suryopranoto membantu dari luar, karena pada waktu itu ia sedang dalam tahanan Pemerintah Belanda berhubungan dengan pemogokan yang dilakukan perkumpulan PFB di Pasuruhan²⁷⁾.

Dalam pemogokan pegawai pegadaian PKI tidak turut campur tangan karena sudah mengetahui bahwa PPPB dipimpin Sarekat Islam. PKI pada waktu itu telah mempunyai persatuan buruh pula yang bernama VSTP. Waktu VSTP mengadakan pemogokan, Sarekat Islam pun tidak ikut campur tangan di dalamnya.

Menghadapi pemogokan tahun 1923 ini penjajah Belanda bersikap keras, tak mau memberikan tuntutan-tuntutan dari PPPB, sehingga pemogokan mengalami kekalahan, padahal pemogokan itu dilakukan secara total. Pimpinan PPPB Sosrokardono juga bersikap tegas dan keras pula. Ia menyatakan bahwa pegawai-pegawai pegadaian yang tidak mengadakan aksi mogok diroyer dari keanggotaan PPPB dan dihapuskan hak-haknya dalam PPPB.

Hak-hak anggota PPPB antara lain ialah: *Pertama*, apabila anggota sedang mendapat musibah kematian, maka PPPB memberi bantuan. *Kedua*, setiap anggota PPPB mempunyai adil dalam percetakan yang dimiliki oleh PPPB yaitu percetakan *Harmoni* di Yogyakarta.

Pada tahun 1925 RM. Suryopranoto dikeluarkan dari tahanan dan mendapat instruksi dari pucuk pimpinan Sarekat Islam untuk menghidupkan lagi PPPB. Atas tanggung jawab yang dilimpahkan itu maka dibentuklah PPPB baru yang diubah namanya menjadi PPPH (Perserikatan Pegawai Pegawai Hindia).

Pemogokan yang dikoordinasi oleh PPPB membawa akibat bagi perekonomian anggotanya. Mereka yang dipecat mengalami kegoncangan dalam kehidupannya. Pimpinan PPPB kemudian turun tangan untuk memberi bantuan agar keluarganya yang menjadi pemogokan itu tidak terlalu berat penderitannya. Suryopranoto berusaha membentuk suatu panitia yang disebut Komite Hidup Merdeka. Komite ini bertujuan membantu korban pemogokan bangsa kita dengan jalan mengumpulkan dana untuk keluarga mereka. Duduk sebagai sekretaris komite tersebut adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantoro), sedangkan anggota-anggotanya antara lain: Haji Fakhruddin, ayah AR. Fakhruddin. Pimpinan Komite Suryopranoto dan Ki Hajar Dewantoro, berusaha keras agar para korban pemogokan ini selanjutnya dapat hidup sendiri atas usaha sendiri

dan tidak selalu bergantung kepada pemerintah. Untuk mencapai tujuan itu Suwardi Suryaningrat memberikan bimbingan kerajinan tangan. Dengan demikian para buruh itu akan tetap terpelihara mentalnya dan tidak patah semangat akibat penderitaan tersebut.

Pemogokan yang terjadi di mana-mana itu akhirnya membuka kesadaran rakyat. Kesadaran inilah yang memungkinkan terjadinya pemogokan secara habis-habisan pada tahun 1923.

Pemogokan membawa korban sebagian kaum buruh bangsa Indonesia. Nasib yang diderita mereka itu membangkitkan RM. Suryopranoto bersama pengurus PPPB lainnya untuk bekerja lebih keras lagi, terutama membela mereka yang dilepas dengan alasan yang dicari-cari oleh Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1929 Pemerintah Belanda mengadakan pelepasan buruh yang dianggapnya tidak cakap. Alasan sebetulnya adalah krisis ekonomi yang melanda pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian kesalahan itu bukanlah pada kaum buruh tetapi terletak sepenuhnya kesalahan para majikan sendiri.

Pengurus PPPH yang diketuai oleh dr. Sukiman, dengan R. Suwito Prawirowiharjo sebagai sekretarisnya dan RM. Suryopranoto sebagai penasihat tidak sampai hati melihat pemecatan buruh yang tidak bersalah itu. Cokroaminoto yang duduk dalam kepengurusan PPPH, juga menaruh perhatian sepenuhnya pada penderitaan buruh pegadaian khususnya dan buruh lain pada umumnya.

Usaha nyata PPPH di bawah pengurus yang baru, yaitu Dr. Sukiman dan R. Suwito Prawirowiharjo, adalah mengadakan tuntutan terhadap pelepasan 900 orang buruh dari pegadaian di seluruh Indonesia. Kesemuanya itu dilepas dengan alasan tidak cakap bekerja.

Kemarahan rakyat timbul di mana-mana. Aksi secara terbuka melawan Pemerintah Belanda terjadi di Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan juga di Semarang. Mereka menuntut agar pemerintah mengadakan koreksi terhadap kesa-

lahan yang dilakukan oleh Jawatan Pegadaian. Cokroaminoto menegaskan, bahwa aksi-aksi rakyat adalah akibat ketidakadilan terhadap pegawai-pegawai pegadaian yang dilepas oleh Pemerintah Hindia Belanda. Untuk meneliti kebenaran tuntutan itu, pemerintah membentuk suatu komisi yang disebut *Komisi Overleg* 28). Komisi ini bertugas memeriksa kembali pegawai-pegawai yang dilepas itu. Dalam komisi tersebut duduk tiga orang dari PPPH, tiga orang dari Dinas Pengadilan dan ditambah satu orang dari pemerintah. Perwakilan dari PPPH ialah HOS. Cokroaminoto, R. Suwito Prawiroharjo dan RM. Suryopranoto.

Komisi tersebut menemukan, bahwa dari 900 orang itu hanya 30 orang yang tergolong tidak cakap bekerja. Tidak cakupnya sejumlah 30 orang pekerja tersebut karena buta warna atau kurang terang penglihatan. Buta warna ini bukanlah dari pembawaannya sejak lahir, tetapi akibat tugas pekerjaannya memeriksa barang-barang yang digadaikan itu dengan alat yang dapat mengganggu mata.

Berkat kegigihan PPPH, nasib buruh yang telah menderita itu dapat diangkat kembali, bahkan mereka mendapat uang *waledan* dalam jumlah yang cukup besar. Di sinilah kemenangan besar dari perjuangan PPPH ini. Pemerintah terpaksa mengeluarkan uang berjuta-juta gulden untuk uang rapelan. Dengan keberhasilan perjuangan ini, maka sejak tahun 1932 nama PPPH menanjak terus.

Atas berbagai pertimbangan dan kesepakatan antara berbagai tokoh, maka kaum buruh memiliki persuratkabaran yang kuat untuk melindungi haknya dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kaum majikan. Diputuskan bahwa *Mustika* perlu dioper menjadi milik PPPH. Di samping itu diputuskan pula untuk menerbitkan surat kabar baru dengan nama *Utusan Indonesia* 29).

Utusan Indonesia merupakan surat kabar pertama bagi kaum buruh Indonesia yang ditangani oleh PPPH.

CATATAN

- 1) P.Jl. Suwarno, dkk., *Sejarah Indonesia Dalam Monografi*, IKIP Santa Dharma, Yogyakarta, 1980, yal. 69.
- 2) Ibid., hal.70
- 3) Ibid.
- 4) Ibid., hal. 71
- 5) Ibid-
- 6) Ibid., hal. 76.
- 7) Upah menurut ketentuan Cultuurstelsel dihitung berdasarkan gula yang sudah jadi, yaitu f.3.50 setiap pikul. Hal ini tidak berarti mungkin upah itu diberikan kepada perseorangan tetapi harus perdesa. Jadi upah itu boleh dikatakan semacam premi kepada desa.
- 8) Ibid., hal 81.
- 9) Ibid.
- 10) Mr. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat Djakarta, 1949, hal. 26.
- 11) Djoko Utomo, *Pemogokan Buruh Tani di Yogyakarta tahun 1882*, Naskah Seminar Sejarah Nasional ke III), Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1981, hal. 2.
- 12) Ibid.
- 13) Ibid. hal. 3

- 14) Pengertian atau istilah buruh tani di sini adalah petani yang sekaligus menjadi kuli, tetap petani rumah tangga yang berorientasi komunitas dan sekaligus juga buruh upahan. Kaki-nya yang sebelah tertancap di lumpur sawah yang sebelah lagi menginjak lantai paberik.
- 15) Ibid., hal. 3.
- 16) Ibid., hal. 8.
- 17) Ibid., hal. 14. 15.
- 18) Ibid., hal. 13
- 19) Ibid., hal. 15
- 20) Ibid., hal.
- 21) Ibid., hal. 15 – 16.
- 22) Informasi dari Bapak Sontani Martowiharjo., Godean. I adalah kurir R.M. Suryopranoto, (Pengaruh Buruh dalam PFB).
- 23) Informasi R. Suwito Prawirowiharjo, Perintis Kemerdekaan d/a Jalan Suka NO. 9 Yogyakarta yang saat itu ikut memimpin penggerakkan P.F.B).
- 24) Idem.
- 25) Wawancara dengan R.M. Suwito Prawiroharjo.
- 26) Idem, dari informasi R. Suwito Prawiroharjo.
- 27) Keterangan yang sama dari R. Suwito Prawiroharjo.
- 28) s.d.a. No. 27
- 29) s.d.a.

BAB VI PERJUANGAN MUHAMMADIYAH DALAM MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

6.1 *Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*

Masyarakat Islam pada permulaan abad ke-20 boleh dikatakan tidak memuaskan. Hal ini disebabkan sikap Pemerintah Hindia Belanda yang menghalang-halangi perkembangan Agama Islam, ditambah keadaan kejiwaan dalam masyarakat Indonesia yang masih jauh dari yang diinginkan menurut ajaran Agama Islam itu sendiri.

Umat Islam di Indonesia sebelum tahun 1900 nampak dalam keadaan kemunduran. Umat Islam dilanda oleh arus *formalisme* belaka tanpa menyadari dan menghayati yang terkandung dalam ajaran agama. Mereka hanya tahu melakukan upacara-upacara ibadah saja, tetapi tidak mengerti sebenarnya tentang kewajiban-kewajiban agama dan bahkan tidak memahami ajaran agama yang sebenarnya. Mereka menjadi Islam karena keturunan.

Keadaan umat Islam seperti disebabkan usaha para wali di dalam menyiarkan Agama Islam belum sampai kepada taraf memberikan ajaran yang termuat dalam *Al Qur'an*, tetapi baru

sampai kepada hal-hal yang membentuk umat Islam, dalam pengertian sebagai suatu bangsa yang menganggap Agama Islam itu adalah agama dari para raja. Walaupun pengajaran untuk shalat, puasa dan sebagainya sudah diberikan, tetapi para wali belum sempat memberikan hikmah dan faedah dari ibadah-ibadah tersebut; oleh sebab itu ibadah secara Islam pada waktu itu baru menjadi upacara keagamaan dan belum dipahami maksud dan tujuannya. Itulah sebabnya tidak terdapat sinar kebesaran dan kecemerlangan dalam masyarakat yang menganut Agama Islam.

Penghayatan Islam pada masa itu seperti beku, tanpa ada pengaruh yang membesarkan hati. Formalisme dalam agama menunjukkan gejala di mana masyarakat pendukung dan pemeluknya hanya berpegang dan memperlihatkan segi lahiriah dari pengalaman agama itu tanpa mendalami arti sebenarnya, sehingga tidak mengherankan apabila Agama Islam pada waktu itu dipengaruhi oleh berbagai bentuk kehidupan yang mungkin tidak berasal dari Agama Islam sendiri. Dengan keadaan yang demikian itu, kelihatan bahwa agama Islam itu sudah menjadi semacam campuran dengan bentuk-bentuk lain dan terasa makin jauh dari kemurnian agama. Boleh dikatakan bahwa berbagai segi kehidupan yang negatif seperti serba *khurafat* tidak jarang merupakan unsur-unsur dalam jalinan pengamalan Agama Islam pada waktu menjelang abad ke-20 itu. Pengamatan dalam masyarakat memberi petunjuk bahwa hukum dan ajaran Islam itu seolah-olah tidak berjalan, tidak terasa kehadirannya dalam masyarakat. Sebetulnya ajaran Agama Islam sepanjang zaman tetap sama saja. Sumber Agama Islam memang sama seperti yang terdapat dalam *Al Qur'an* ¹⁾.

Demikian pula masyarakat juga melaksanakan zakat bagi yang mampu dan berada, juga kurban seperti yang diajarkan agama Islam dipenuhi dengan seksama. Masyarakat juga mencari ilmu dan menyadari, bahwa menyia-nyiakan anak yatim itu ber-

dosa. Meskipun demikian, dalam masyarakat seperti tidak kelihatan hukum dan ajaran Agama Islam. Ditambah lagi masyarakat Islam waktu itu seperti belum mantap dalam hal ketauhidannya. Pengertian umat Islam dalam hal tauhid belum sempurna.

Alam animisme masih kuat di lingkungan masyarakat, seperti memperlakukan *Al Qur'an* sebagai jimat, sebagai kitab keramat, yang perlu dipuja-puja, padahal *Al Qur'an* perlu dibaca dan dimengerti sebagai petunjuk dalam amalan manusia agar supaya selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Sesuai dengan alam dan pikiran animisme itu masyarakat sering mengadakan selamatan ataupun pertemuan di antara keluarga dan para tetangga, dengan menghidangkan berbagai sesajian lengkap untuk dipersembahkan kepada para arwah leluhur dan juga arwah Nabi Muhammad saw.

Ditinjau dari segi kemasyarakatan dan budaya, selamatan mempunyai nilai sosial seperti keakraban di antara anggota masyarakat itu sendiri, namun karena penyajian sesajian itu justru untuk suatu tujuan yang berdasarkan alam pikiran animis; maka terasa menyimpang dari ajaran Agama Islam yang murni. Kemudian di dalam masyarakat sendiri terutama di kalangan intelektual hidup suatu pandangan yang negatif terhadap Agama Islam²⁾.

Muhammadiyah di samping bergerak di bidang agama juga mempunyai perhatian khususnya dalam pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekitar tahun 1900, masyarakat Indonesia sudah dijajah oleh Belanda lebih kurang 300 tahun. Pada masa itu Pemerintah Hindia Belanda berhasil memasukkan rasa kebelanda-belandaan di sementara lapisan masyarakat, terutama kaum terpelajar melalui pendidikan. Pada waktu itu pengajaran diberikan di Sekolah Angka Satu kepada anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta, di Sekolah Angka Dua kepada anak-anak pribumi pada umum-

nya. Sekolah jenis pertama didirikan di ibukota keresidenan, *afdeeling*, *onderafdeeling* atau kota pusat perdagangan dan kerajinan. Tujuannya adalah mendidik calon pamong praja. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan tiga sekolah OSVIA yaitu di Bandung, Magelang dan Probolinggo, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan guru, didirikan tiga sekolah guru di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo³⁾. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah tidak untuk mencerdaskan orang-orang Indonesia, tetapi disebabkan oleh kebutuhan Pemerintah Hindia Belanda atau pengusaha asing akan tenaga kerja yang murah.

Segi negatif dari pendidikan Barat ini jelas disayangkan, bahkan sampai menimbulkan penilaian yang salah terhadap Agama Islam. Seakan-akan Agama Islam sama dengan kemunduran. Agama Islam tidak menjamin ke arah kemajuan, sebaliknya mewakili suatu masyarakat yang masih serba kekurangan dan serba tertutup. Jelas hal-hal demikian merupakan segi-segi yang ekstrim, tetapi ada juga unsur-unsur pendidikan Barat yang mempunyai nilai *universal* yang baik dan menunjang kemajuan. Tidak semua kaum terpelajar termakan oleh suara-suara yang mengecilkan hati. Sebagian besar mereka menolak pendapat-pendapat tersebut. Andaikata dalam masyarakat Islam Indonesia terdapat suasana yang serba mundur, miskin, bodoh dan sebagainya, sebabnya antara lain adalah sistem pemerintahan kolonial itu sendiri.

Keadaan yang tidak memuaskan di lingkungan umat Islam itu juga menimpa para kiai. Jarang kelihatan kiai yang mau berdakwah ke sana ke mari dengan mendatangi para santri dan masyarakat untuk membimbing umat Islam. Sebaliknya para santri harus mendatangi para kiai untuk belajar mengaji. Keadaan demikian menyebabkan masyarakat kurang memperoleh syiar atau penerangan mengenai Agama Islam⁴⁾. Kecuali itu metode atau cara penyampaian ajaran Agama Islam memang

belum memuaskan. Di sana-sini terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki menurut kehendak zaman. Perbaikan juga perlu pada sikap-sikap tertentu pada masyarakat, misalnya mengenai pengertian suci dan hubungannya dengan kebersihan lahiriah. Di sementara kalangan masyarakat kadang-kadang kelihatan bahwa antara kedua pengertian itu tidak terdapat keselarasan. Orang menganggap bahwa apa pun yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan adalah suci. Seperti shalat, wudlu, pakaian, suasana mesjid, kolam untuk mengambil air wudlu dan sebagainya seharusnya sudah suci, tetapi seringkali orang melihat kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan pengertian suci itu sendiri. Seperti orang pergi ke mesjid dengan kurang memperhatikan kebersihan atau kerapihan pakaiannya, suasana tempat ibadah yang tidak terpelihara, kolam air wudhu yang jauh dari persyaratan kesehatan modern. Masyarakat sudah terbiasa dengan keadaan semacam itu, sehingga bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya⁵⁾.

Keadaan masyarakat Islam yang demikian itu sangat merisaukan hati Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia merasa bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membangunkan, menggerakkan dan memajukan umat Islam Indonesia. Apa pun yang terjadi, bahkan andaikata ia harus kehilangan segalanya, ia tetap akan melaksanakan apa yang dirasa menjadi kewajiban itu. Baginya kehidupan duniawi terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat yang didambakannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga yakin bahwa kewajiban itu tidak mungkin dilakukan seorang diri, melainkan harus dilakukan oleh beberapa orang yang diatur dengan teliti. Untuk itu harus dibentuk organisasi atau perkumpulan.

Demikian juga lembaga-lembaga pendidikan Islam pada permulaan abad ke-20, perlu disempurnakan bentuk dan isinya sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Memang sudah menjadi kenyataan, bahwa lembaga-lembaga pendidikan pada masa itu terbagi ke dalam dua jalur yaitu :

6.1.1 Pendidikan Bersistem Pondok Pesantren

Sistem pendidikan ini pada umumnya dijalankan oleh umat Islam dan merupakan sistem pendidikan yang sudah tua umurnya. Ini merupakan satu-satunya sistem pendidikan yang ada pada waktu itu yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan saja. Di dalamnya tidak diajarkan ilmu pengetahuan umum dan cara pengajarannya banyak menggunakan metode ceramah dan metode *sorogan* di mana santri *menyorongkan* (menyodorkan) kitabnya untuk dikaji dan kiai membaca serta menerangkannya. Sistem pendidikan semacam inilah jelas mempunyai arti dan hasil tersendiri yang banyak manfaatnya, akan tetapi jika dilihat dari segi pendidikan secara keseluruhan, sistem itu masih memerlukan penyempurnaan, terutama segi-segi yang bersifat umum dan kecakapan-kecakapan praktis lainnya.

6.1.2 Pendidikan Bersistem Sekolah

Sistem pendidikan ini terutama sekali dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum, tanpa memasukkan ke dalamnya pendidikan agama. Meskipun metode dan alat-alat pendidikan serta pengajarannya cukup lengkap akan tetapi masih terdapat kekurangan yang sangat penting yaitu lemahnya pendidikan moral.

Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pendidik dan organisator yang berpandangan maju. Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mengombinasikan unsur-unsur yang baik dari kedua sistem yang ada. Pada tahun 1911 ia mendirikan Sekolah Muhammadiyah. Dengan berdirinya Sekolah Muhammadiyah tersebut, tidak lagi dipisahkan pelajaran agama dan pelajaran umum. Hal ini disebabkan Muhammadiyah menyadari bahwa semua pelajaran merupakan perintah agama yang mendorong untuk menuntut segala macam ilmu yang bermanfaat. Dengan

keyakinan yang sama sekolah Muhammadiyah tidak lagi mem-bagi-bagi pelajaran dalam wujud sekian persen pelajaran agama dan sekian persen pelajaran umum, sebab pada dasarnya, pemisahan pelajaran dalam ilmu agama dan ilmu umum adalah akibat dari penjajah Belanda yang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Semua itu sama sekali bukan merupakan pelajaran Islam yang benar⁶⁾. Untuk menjamin sistem dan isi pendidikan yang diharapkan dapat menghantarkan kepada tujuan, maka harus didirikan suatu organisasi atau perkumpulan yang mampu mengurus dan mengelola sistem pendidikan seperti tersebut di atas.

Kiai Haji Ahmad Dahlan boleh dikatakan seorang *intelektual* agama pada waktu itu. Ia banyak memiliki kitab agama, dan selalu mengikuti arus perkembangan ilmu. Kitab-kitab terbitan baru dan karangan alim ulama belakangan pun selalu diikutinya dengan seksama. Di antara kitab-kitab yang digemarinya dan sering dibaca adalah: kitab *Taukhid*, karangan Syeh Muhammad Abduh, kitab Tafsir *Jus Amma*, karangan Syeh Mohammad Abduh, kitab-kitab *Fil Bid'ah*, karangan Ibnu Taimiyah antara lain kitab *Atta Wassul Wal Wasilah*, dan kitab-kitab *Tafsir Al Mannar* karangan Sayid Rasyid Ridla dan masih banyak lagi kitab-kitab yang ia baca untuk ditelaah isinya.

Tujuan memperdalam ilmu dari buku-buku memang tidak untuk menulis buku baru, tetapi untuk mengambil pokok-pokok pikiran guna bertindak, berbuat dan beramal. Dengan banyak membaca buku-buku karangan Syeh Mohammad Abduh, Ilmu Taimiyah inilah, kemudian ia menghayati pandangan dan sikap para pembaharu agama tersebut. Terutama sekali Mohammad Abduh yang menjiwai dan mengilhami pemikiran dan sepak terjangnya. Hal ini dapat dilihat dari buku-buku karangan Mohammad Abduh yang lebih banyak dibaca dan juga majalah *Al Mannar* yang berisi tinjauan dan karangan

mengenai ide-ide pembaharuan Islam pada akhir abad ke-20 dan permulaan abad ke-20⁷⁾

Sementara itu murid-murid dan sahabat-sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan terus mendesak mendirikan organisasi atau perkumpulan untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Agama Islam. Di antara murid-muridnya itu terdapat murid-murid Sekolah Guru Jetis, Yogyakarta. Mereka menyarankan dan mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mewujudkan cita-citanya dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya. Mereka melihat dan merasakan betapa tingginya dan luhurnya cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut ajaran Agama Islam. Ia selalu mengajak umat Islam untuk kembali hidup menurut tuntunan *Al Qur'an* dan *Hadis*. Kemudian dengan bantuan sahabat-sahabat dan murid-muridnya, pada tanggal 18 Nopember 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah perkumpulan atau organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nama tersebut sama dengan nama perguruan yang sudah ia dirikan pada tahun 1911.

Sebenarnya yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah adalah sebuah ayat firman Tuhan yang telah ditelaahnya benar-benar yaitu Surat Ali 'Imran ayat 104:

"Wal takun minkun ummatun yad'una ilal khairi wa yakmuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkari wa ulaika humul muflihun" artinya "Adakanlah di antara kamu golongan umat yang menyuruh manusia kepada keutamaan dan menyuruh berbuat kebajikan serta mencegah berlakunya perbuatan yang mungkar. Umat yang berbuat demikian adalah yang akan bahagia." ⁸⁾

Pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai pentingnya organisasi bagi pelaksanaan *da'wah amar ma'ruf nahi mung-*

kar memang mutlak. Meskipun dalam hal ini organisasi hanya merupakan sarana, bukan tujuan, tetapi sarana yang mutlak perlu guna tercapai tujuan. Tidak ada tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa sarana. Bahkan sarana pun banyak yang tidak dapat sampai kepada tujuan yang dicita-citakan. Hal ini disebabkan sarana itu tidak tepat atau kurang sesuai dengan kemajuan taman *Da'wah amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan dengan sarana kegiatan perorangan tanpa organisasi masih tetap harus dipertahankan, tetapi di samping itu harus ada pula sarana lain yang lebih maju, lebih teratur dengan kerja sama dan lebih sesuai dengan kemajuan dan kecerdasan. Sesuai dengan kemajuan, perbuatan maksiat, *munkar* dan kejahatan pun dilakukan dengan organisasi yang rapi, oleh karena itu jika tidak diimbangi dengan perbuatan baik yang dilakukan dengan organisasi yang rapi, maka dapat dibayangkan bahwa nantinya justru kejahatanlah yang akan mengambil pimpinan dan peranan yang menentukan dalam masyarakat.

Dalam menggerakkan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pemimpin lainnya selalu berpegang teguh dalam berpikir, berbicara dan bekerja. Berpikir dengan akal yang cerdas dan luas dengan berpedoman *Al Qur'an* dan *Hadis*. Berbicara dengan tegas dan sopan untuk menyampaikan *da'wah* Islam serta kebenaran *amar ma'ruf nahi munkar*. Bekerja untuk kemuliaan agama, kebahagiaan rakyat serta kemerdekaan bangsa.

Dilihat dari masa kelahirannya, Muhammadiyah terhitung salah satu organisasi Islam yang dilahirkan dalam masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Sebagai organisasi yang lahir dalam masa kebangkitan nasional, membawa pula sifat-sifat sebagai perintis. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang dilahirkan sebagai manifestasi dari kehendak dan tuntutan zamannya. Zaman di mana kehidupan Agama Islam menunjukkan kepudaran dan kesuraman; demikian pula umat Islam hidup

dalam alam kekolotan dan kebekuan, oleh karena itu kelahiran Muhammadiyah di masa itu bertugas menghilangkan suasana yang penuh kesuraman dan kepudaran yang melingkupi kehidupan Agama Islam di Indonesia.

Apabila diteliti, maka sebenarnya sebab-sebab mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yaitu:

- (1) Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan *Al Qur'an* dan *Hadis*, sehingga menyebabkan merajalelanya *syirik*, *bid'ah* dan *khurafat*; akibatnya umat Islam tidak merupakan suatu golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula Agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi.
- (2) Akibat adanya penjajahan di Indonesia, maka keadaan masyarakat Islam sangat menyedihkan, baik pada kehidupan politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
- (3) Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya "*ukhuwwah Islamiyah*" serta tiadanya organisasi Islam yang kuat.
- (4) Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam menghasilkan kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman.
- (5) Adanya tantangan dan sikap acuh tak acuh di kalangan intelektual kita terhadap Agama Islam, yang oleh mereka dianggap sudah kolot.
- (6) Adanya pengaruh dan dorongan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam.

Untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah ini, diperlukan pengorbanan yang besar dan kemauan yang ulet serta tahan uji. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri memang banyak mendapat dukungan dan sambutan, tetapi ada pula pihak yang menentang dan berusaha menggagalkannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menerima cercaan dan celaan serta rintangan dari umat

Islam termasuk kalangan keluarga. Mereka menyayangkan, mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menyia-nyiakan kesempatan dalam pembinaan jenjang kepangkatan di kemudian hari.

Hal ini disebabkan Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk *abdi dalem* Kesultanan Yogyakarta di bidang keagamaan. Andaikata ia tekun dengan pekerjaan dan menaati kebijaksanaan atasannya, tentu ada harapan akan mengalami masa depan yang indah dan mantap. Kenyataannya Kiai Haji Ahmad Dahlan justru mengadakan berbagai kegiatan yang belum tentu sesuai dengan kehendak pihak atasannya. Organisasi yang demikian besar dan tinggi baik ditinjau dari skala luas organisasi maupun skala tinggi cita-citanya, mesti menimbulkan tanggapan-tanggapan tertentu. Ini sangat disayangkan oleh anggota keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan.⁹⁾

Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Mohammad Darwis. Ia adalah anak ke-4 dari Kiai Haji Abubakar bin Kiai Haji Sulaiman, khatib mesjid Kesultanan Yogyakarta. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, ia pergi ke Mekkah tahun 1890. Di Mekkah ia belajar selama satu tahun. Salah seorang gurunya bernama Syeh Ahmad Khatib. Sekitar tahun 1903 ia mengunjungi kembali tanah suci dan menetap selama dua tahun¹⁰⁾.

Sekembalinya pergi haji pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan menghayati cita-cita pembaharuan. Sukar untuk dapat dibuktikan dengan pasti, apakah ia sampai pada pemikiran pembaharuan itu secara perserorangan atau dipengaruhi oleh orang lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai melaksanakan cita-citanya itu dengan mengubah arah orang bersembahyang kepada kiblat sebenarnya. Ternyata tindakan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menimbulkan kegemparan. Kanjeng Penghulu Kamaludiningrat merasa tidak senang dan tidak setuju. Ia memerintahkan

agar mesjid yang dibangun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu segera dibongkar, tetapi akhirnya pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diterima dan kemudian diikuti oleh umat Islam. Di samping itu ia juga mengorganisasi kawan-kawannya di daerah Kauman untuk melakukan pekerjaan gotong-royong dalam memperbaiki kondisi kesehatan daerahnya dengan jalan membersihkan jalan dan parit-parit.

Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, terdorong oleh rasa kebangsaan dan keinginan mempelajari tata organisasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan memasuki perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1909 dan menjadi salah seorang pengurusnya. Di sini ia memberikan pelajaran agama kepada anggota-anggotanya. Dengan jalan demikian ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mengharapkan akan dapat memberikan pelajaran Agama Islam di sekolah-sekolah pemerintah, sebab anggota-anggota Budi Utomo itu pada umumnya bekerja di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah dan juga kantor-kantor pemerintah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengharapkan agar guru-guru sekolah yang diajarnya itu dapat meneruskan Agama Islam kepada murid-murid mereka pula. Ternyata pelajaran-pelajaran yang diberikan olehnya kelihatan memenuhi harapan. Sebagai bukti mereka menyarankan agar membuka sekolah yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen untuk menghindarkan nasib kebanyakan pesantren tradisional yang terpaksa ditutup apabila kiai yang bersangkutan meninggal¹¹⁾.

Setelah Sarekat Islam berdiri di Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan memasuki partai itu serta aktif di dalamnya. Di sinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari persoalan politik. Dengan demikian terbinalah kerjasama yang rapih antara Muhammadiyah dengan Sarekat Islam yang berlangsung terus sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Pada tahun 1926 terjadilah masalah yang tidak diinginkan yaitu ketika Sarekat Islam melarang para anggotanya untuk memasuki Muhamma-

diyah. Peristiwa ini terjadi karena politik adu domba yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Kiai Haji Ahmad Dahlan memang berjiwa pergerakan. Di samping menjadi anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam, ia sudah pula menjadi anggota perkumpulan jami'ah Khair. Sebenarnya secara diam-diam jami'ah Khair sudah berdiri di Jakarta pada tahun 1901, tanpa izin dari Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1905 barulah jami'ah Khair resmi mendapat izin dari pemerintah. Perkumpulan ini bergerak di bidang sosial, dengan mendirikan sekolah-sekolah bahasa Arab. Di samping itu jami'ah Khair juga giat mengadakan hubungan dengan pemimpin-pemimpin di negara-negara Islam yang telah maju seperti Turki, Mesir dan lain-lain. Hubungan tersebut dilakukan dengan surat-menyurat, pertukaran majalah dan surat kabar.

Di dalam majalah-majalah yang terbit di negara-negara Islam seperti *Al Mannar* di Mesir sering memuat tulisan-tulisan yang bertema pembelaan terhadap nasib bangsa Indonesia yang sesedang hidup tertekan di bawah penjajahan Belanda. Tulisan-tulisan itu dikarang dan dikirimkan oleh para anggota dan pemimpin dari jami'ah Khair tersebut. Jami'ah Khair merupakan perkumpulan yang memihak perjuangan bangsa Indonesia sejak semula. Bahkan jami'ah Khair pernah mengirim surat kepada sultan Turki di Istambul selaku khalifat agar supaya mengirimkan utusan meninjau keadaan umat Islam di Indonesia. Pemerintah Turki mengabulkan permintaan itu dan mengirimkan utusannya, Ahmad Emin Bey. Melihat keadaan semacam itu Pemerintah Hindia Belanda semakin curiga terhadap jami'ah Khair.

Pada tahun 1911 jami'ah Khair mengadakan kongres yang memutuskan untuk mendatangkan guru-guru dari luar negeri. Guru pertama yang didatangkan yaitu Syeh Ahmad Surkati yang datang di Jakarta pada bulan Februari 1912. Dengan Syeh Ahmad Surkati ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan hu-

bungan yang akrab. Keduanya bersepakat untuk berjuang di garis masing-masing. Syeh Ahmad Surkati akan menggerakkan bangsa Arab di Indonesia agar berpikiran maju dan membantu perjuangan bangsa Indonesia. Sebaliknya Kiai Haji Ahmad Dahlan akan berjuang membimbing umat Islam Indonesia ke arah kemajuan seperti yang dibuktikannya dengan organisasi Muhammadiyah¹²⁾.

Seperti ulama-ulama lainnya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berdagang batik. Ia sering pergi ke Jawa Timur, Jawa Barat bahkan ke Sumatra Utara untuk urusan dagangannya. Di setiap kota yang dikunjungi, selain berdagang ia juga menemui alim ulama di sana untuk bermusyawarah dan bertukar pikiran tentang ajaran agama dan keadaan umat Islam Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak para alim ulama untuk menilai pelaksanaan ajaran Islam, apakah telah sesuai dengan ketentuan Rasulullah ataukah belum. Demikian pula para alim ulama diajak untuk memperbaiki keadaan umat Islam serta meningkatkan pengetahuannya. Di antara para alim ulama tersebut ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju, bahkan jumlah yang tidak setuju ini cukup banyak.

6.2 *Maksud dan Tujuan Muhammadiyah*

Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakan organisasi yang didirikannya Muhammadiyah. Nama tersebut sama dengan nama perguruan yang sudah ia dirikan sebelumnya. Rupanya nama Muhammadiyah itu sendiri dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil dari sembahyang *istikharah* yang berulang kali dilakukannya. Nama Muhammadiyah mempunyai tujuan tertentu serta harapan sangat luhur. Nama tersebut dapat mencerminkan secara ringkas dan padat hakekat dan bentuk gerakan yang sesungguhnya. Dengan nama itu pula memberi ciri dan corak yang tersendiri bagi Muhammadiyah di tengah-tengah bangsa dan umat Islam di Indonesia.

Ditinjau dari segi bahasa, nama Muhammadiyah berarti "umat Muhammad" atau "pengikut Muhammad" yaitu semua orang yang beragama Islam dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Dengan kata lain, siapa saja yang mengaku beragama Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah orang Muhammadiyah, tanpa dibatasi oleh adanya perbedaan golongan masyarakat dan kedudukan kewarganegaraannya.

Nama tersebut menginginkan agar anggauta-anggautanya mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad saw. Diharapkan pula agar semula anggota Muhammadiyah benar-benar menjadi muslim yang penuh pengabdian dan tanggung jawab terhadap agamanya serta merasa bangga dengan keislamannya¹³⁾.

Pada waktu itu di Indonesia sudah terdapat beberapa perkumpulan sosial dan politik. Perkumpulan tersebut adalah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi anggota Budi Utomo Kring Kauman, Yogyakarta. Di samping itu ia menjadi penasihat dalam Sarekat Islam dan menjadi anggota perkumpulan jami'ah Khair di Jakarta, bahkan ia juga tercatat sebagai anggota Panitia Tentara Pembela Kanjeng Nabi Muhammad saw.

Berdirinya Muhammadiyah, membuat Pemerintah Hindia Belanda makin curiga dan takut. Kecurigaan dan ketakutan Pemerintah Hindia Belanda ini terbukti ketika pada tanggal 20 Desember 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk memperoleh badan hukum Muhammadiyah. Permohonan ini baru dikabulkan pada tanggal 22 Agustus 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No.81 tanggal 22 Agustus 1914.

Mula-mula izin tersebut hanya diberikan untuk daerah Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Hindia Belanda takut akan perkembangan organisasi Muhammadiyah. Meski-

pun Muhammadiyah dibatasi ruang geraknya, tetapi daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi agar pemerintah tidak mencurigai Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Kota Yogyakarta mempergunakan nama lain misalnya di Ujung Pandang dengan nama Al Munir, di Pekalongan dengan nama Nurul Islam, di Garut dengan nama Ahmadiyah, dan di Solo dengan nama Sidik Amanah Tabligh Fathonah (SATF), bahkan untuk Kota Yogyakarta Kiai Haji Ahmad Dahlan menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Perkumpulan-perkumpulan dan jamaah-jamaah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, misalnya, Taqwimuddin, Khayatul Qulub, Ikhwanul Muslimin, Thaharatul Qulub, Thaharatul Aba, Ta'awamu alal birri, Ta'rifu bima kana, Wal Fajri, Wal Ashri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Mubtadi, Hambudi Suci, Cahaya Muda, Periya Utama. Perkumpulan ini kemudian menjadi ranting dan cabang Muhammadiyah¹⁴).

Maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah pada waktu permulaan berdirinya, dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Menyebarkan pengajaran agama Nabi Muhammad saw. kepada penduduk bumiputra, di dalam Residensi Yogyakarta
- (2) Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya

Sesudah Muhammadiyah berkembang di luar daerah Yogyakarta, dan di beberapa daerah wilayah Hindia Belanda sudah berdiri beberapa cabang, maka maksud dan tujuan Muhammadiyah pun disempurnakan menjadi:

- (1) Memajukan serta menggembarakan pelajaran dan pengajaran Agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya

- (2) Memajukan serta menggembirakan hidup sepanjang kemauan Agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya

Pada masa pendudukan Bala Tentara Jepang tahun 1942-1945, segala macam dan bentuk pergerakan mendapat pengawasan yang ketat termasuk Muhammadiyah. Pada masa ini Jepang berusaha mengatur maksud dan tujuan Muhammadiyah; oleh karena itu maksud dan tujuan Muhammadiyah disesuaikan dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, yaitu:

- (1) Hendak menyiarkan Agama Islam, serta melatih hidup yang selaras dengan tuntunannya
- (2) Hendak melakukan pekerjaan kebaikan umum
- (3) Hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya¹⁵⁾

Setelah masa kemerdekaan yaitu pada tahun 1950, rumusan maksud dan tujuan diubah dan disempurnakan sehingga lebih mendekati jiwa dan gerak yang sesungguhnya dari Muhammadiyah, sehingga berbunyi: "Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya"¹⁶⁾.

Maksud dan tujuan Muhammadiyah seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Menegakkan, berarti membuat agar tegak dan tidak condong yaitu dengan memegang teguh, mempertahankan, membela dan memperjuangkannya.
- (2) Menjunjung tinggi, berarti membawa atau menjunjung di atas segala-galanya; yaitu dengan cara mengamalkan, mengindahkan dan menghormatinya.



- (3) Agama Islam, yaitu agama yang dibawa para Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw. sebagai nabi nutup. Segenap isi ajaran agama yang dibawa oleh para Rasul tersebut, sudah tercakup dalam *syari'at* Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., berupa *Al Qur'an* dan *Hadis*.
- (4) Terwujud, berarti menjadi satu kenyataan akan adanya atau wujudnya.
- (5) Masyarakat Islam, yaitu suatu masyarakat yang di dalamnya terlaksana tuntunan dan ajaran Islam, baik bagi kehidupan dan penghidupan pribadinya, keluarganya maupun secara bersamanya.
- (6) Sebenar-benarnya, berarti yang sungguh-sungguh benar, tidak palsu, bahwa demikianlah keadaan yang sebenarnya. Kata sebenar-benarnya dicantumkan, untuk menghindari adanya anggapan umum yang salah terhadap beberapa praktek dan kenyataan yang semula dianggap sebagai masyarakat Islam, karena hanya semata-mata masyarakat beragama Islam. Padahal belum tentu menjadi jaminan yang nyata kalau masyarakat itu seluruhnya beragama Islam kemudian menjadi masyarakat Islam, disebabkan mereka belum dengan sungguh-sungguh menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam.

Ringkasnya, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah membangun, memelihara dan memegang teguh Agama Islam dengan rasa ketaatan, melebihi ajaran dan paham lainnya, untuk mendapatkan suatu kehidupan dalam diri, keluarga dan masyarakat yang sungguh-sungguh adil, makmur, bahagia, sejahtera, aman sentosa, lahir dan batin dengan naungan ridha Tuhan¹⁷⁾.

Rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah memang kelihatan sederhana, tetapi relevan dengan zamannya. Pada waktu

Muhammadiyah didirikan, masyarakat Islam di Indonesia sedang dalam kelemahan dan kemunduran akibat tidak adanya pengertian pada ajaran Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah berusaha mengungkap dan mengetengahkan ajaran Islam yang murni serta menganjurkan kepada umat Islam supaya mempelajari agamanya. Kepada para alim ulama dianjurkan agar dalam mengajarkan Agama Islam dalam suasana baru dan penuh kegembiraan. Kemudian ajaran Islam yang telah dipelajari itu dipahami benar-benar dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan itu hendaknya dilaksanakan sepanjang kemampuan ajaran Agama Islam dan sepanjang kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian sekaligus Muhammadiyah hendak menyatakan bahwa Agama Islam bukan semata-mata mengandung pengertian hubungan pribadi antara seseorang muslim dengan Tuhan, tetapi juga merupakan suatu sistem kehidupan manusia dalam segala segi. Muhammadiyah menganjurkan agar masyarakat Islam kembali pada ajaran yang termaktub dalam *Al Qur'an* dan *Hadis*, sedangkan hal-hal lain yang merupakan tambahan yang tidak berasal dari sumber itu sendiri, hendaknya ditinggalkan.

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan itu Muhammadiyah membuka bermacam-macam sekolah dan madrasah. Diselenggarakan pula berbagai pengajian, tabligh dan ceramah-ceramah. Para mubaligh Muhammadiyah keluar-masuk kampung dan desa memberikan pengajaran Agama Islam dan membimbing manusia untuk memahami agama dengan menggunakan akal pikiran yang sehat.

Muhammadiyah berkembang tidak hanya pada lapangan tabligh dan pengajaran, tetapi juga di bidang kemasyarakatan seperti panti-panti asuhan, rumah penampungan fakir miskin, rumah-rumah sakit dan lain-lain. Apa yang dilakukan Muhammadiyah tersebut mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Mereka merasa memperoleh bantuan dalam kehidupannya yang dirasakan berat pada masa penjajahan Belanda.

6.3 *Pengabdian Muhammadiyah*

Pada waktu permulaan Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjabat sebagai ketua, sedangkan sebagai sekretaris adalah Haji Abdullah Sirat. Organisasi Muhammadiyah semakin berkembang bahkan ada dua orang dari kalangan terpelajar ikut membantu jalannya Muhammadiyah yaitu Mas Ngabehi Joyosugito sebagai sekretaris dan Muhammad Husni sebagai komisaris. Jalannya organisasi itu makin hebat dan administrasinya teratur.

Tokoh-tokoh pengurus pusat Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 18 Nopember 1912 yaitu: Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Abdullah Sirat, Haji Ahmad, Haji Abdurrahman, Raden Haji Sarkawi, Haji Muhammad, Raden Haji Jaelani, Haji Anies, dan Haji Muhammad Pakih¹⁸⁾

Dalam mengarahkan kegiatan-kegiatannya, Muhammadiyah dalam masa permulaan berdirinya belum mengadakan pembagian tugas yang jelas di antara anggota pengurus. Hal ini disebabkan sampai dengan tahun 1917 ruang gerak Muhammadiyah hanya di Kampung Kauman Yogyakarta saja. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri aktif bertabligh, aktif pula mengajar di sekolah Muhammadiyah dan ikut memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan seperti shalat, memberikan bantuan kepada fakir miskin dan sebagainya. Sejak pertama berdirinya Muhammadiyah telah meletakkan sifat-sifat sosial dan pendidikan.

Di tengah-tengah pergerakan politik Indonesia yang dengan cepat meningkat, Muhammadiyah dalam masa pertama terus menempatkan diri di luar politik dan bukan merupakan partai politik. Selaku gerakan agama, Muhammadiyah bersifat keagamaan dalam segala tindakannya, sehingga mencerminkan wujud yang ideal yang lahir dari ajaran Islam yang murni. Muhammadiyah mengutamakan objeknya kepada masyarakat; karena itu bersifat kemasyarakatan. Dalam sifat ini kelihatan, bahwa

Muhammadiyah bukan partai politik dan bukan pula sekedar organisasi sosial, tetapi suatu gerakan Islam yang akan merealisasi ajaran Islam dan penerapannya dalam masyarakat, sehingga ajaran Islam itu benar-benar bermanfaat bagi pembangunan negara, material, dan mental spiritual¹⁹). Meskipun demikian Muhammadiyah selamanya tidak pernah menentang politik, bahkan pengikutnya diizinkan menjadi anggota perkumpulan politik, asal tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Muhammadiyah.

Muhammadiyah semakin lama semakin berkembang di seluruh Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1921 Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921²⁰). Dengan diterimanya permohonan tersebut berarti secara resmi Muhammadiyah boleh mendirikan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Ruang gerak Muhammadiyah yang luas ini harus diikuti dengan usaha yang makin besar.

Usaha yang mula-mula, di samping dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah, lebih banyak ditekankan pada pemurnian tauhid dan ibadah dalam Islam, misalnya:

- (1) Meniadakan kebiasaan menujuhbulani (Jawa: *tingkep*); yaitu selamat bagi orang yang hamil dalam usia tujuh bulan. Kebiasaan ini merupakan peninggalan dari adat Hinduisme—Budhisme. Masing-masing daerah berbeda-beda cara dan macam upacara menujuhbulan ini, tetapi pada dasarnya berjiwa sama yaitu dengan maksud berdo'a bagi keselamatan calon bayi yang masih berada dalam kandungan ibu.
- (2) Menghilangkan tradisi keagamaan yang timbul dari kepercayaan Islam, seperti selamat untuk menghormat Syeh

Abdul Qadir Jaelani, Syeh Saman dan lain-lain yang dikenal dengan *manakiban*; perayaan mana banyak diisi dengan puji-pujian serta permohonan-permohonan yang berlebihan sehingga melebihi permohonan yang semestinya hanya ditujukan kepada Tuhan. Selain itu terdapat pula kebiasaan membaca *Barzanji*, yaitu suatu karya puisi serta syair-syair yang mengandung banyak pujaan kepada Nabi Muhammad saw. Sebetulnya Muhammadiyah sendiri tidak anti sama sekali unsur kesenian yang terkandung di dalamnya, akan tetapi karena adanya kecenderungan yang kuat untuk kultus pada diri nabi yang dapat merusak kemurnian *tauhid*, maka Muhammadiyah berusaha membersihkannya sama sekali. Begitu pula perayaan "khaul", yaitu ziarah dan penghormatan secara besar-besaran orang-orang terhadap kuburan orang-orang alim dan yang dianggap *waliyul-lah*; dengan upacara yang berlebihan, dipandang dapat mengeruhkan jiwa *tauhid*. Diberantas pula kebiasaan meminta-minta rejeki, keselamatan, jodoh dan lain-lain kepada kuburan-kuburan keramat.

- (3) Mendo'akan orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati tidak dilarang oleh agama; akan tetapi mengirimkan bacaan ayat-ayat suci *Al-Qur'an* agar dapat diterima jenazah dalam kubur, jelas tidak berdasar pada agama yang benar, oleh sebab itu harus ditinggalkan. Demikian juga *tahlilan* dan *selawatan* pada hari kematian ke-3, ke-7, ke-100, ke setahun dan ke-1.000 hari, merupakan *bid'ah* yang mesti ditinggalkan dari peribadatan Islam.
- (4) Bacaan Surat Yasin dan bermacam-macam *dzikir* yang hanya khusus dibaca pada malam Jum'at, adalah suatu *bid'ah*, karena Nabi melarang mengkhususkan suatu ibadah hanya pada hari dan atau malam Jum'at saja. Begitu pula ziarah kubur hanya pada waktu-waktu tertentu dan pada kuburan tertentu; ibadah ini tak ada dasarnya dalam agama, harus

ditinggalkan, yang boleh ialah ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat adanya kematian pada setiap makhluk Tuhan.

Selain yang tersebut di atas, sebagai usaha menegakkan *aqidah* Islam yang murni serta mengamalkan ibadah yang sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad saw., masih banyak lagi usaha-usaha di bidang lain seperti:

6.3.1 Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Muhammadiyah berusaha mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya yaitu *Al Qur'an* dan *Hadis*. Muhammadiyah bertujuan meluaskan dan mempertinggi pendidikan Agama Islam secara modern serta memperteguh keyakinan tentang Agama Islam, sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenarnya. Untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

Masalah pendidikan dan pengajaran menjadi perhatian utama dari Muhammadiyah. Pada tanggal 30 Maret hingga 2 April 1923 Muhammadiyah secara mendalam membicarakan lembaga yang menentukan corak masyarakat di kemudian hari. Sebagai hasilnya pada tanggal 14 Juli 1923 berdirilah suatu badan yang diberi nama Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah. Ketua pertama Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah yang pertama yaitu Mas Ngabehi Joyosugito. 21).

Dalam dunia pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah telah mengadakan pembaharuan pendidikan agama. Modernisasi dalam sistem pendidikan dijalankan dengan menukar sistem pondok pesantren dengan pendidikan modern sesuai dengan tuntutan dan kehendak zaman. Pengajaran Agama Islam diberikan di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Muhammadiyah telah mendirikan sekolah-sekolah baik yang khas agama maupun yang bersifat umum.

Sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah selalu mengikuti *stelsel* pengajaran Pemerintah Hindia Belanda. Karena rencana pelajaran sekolah-sekolah Muhammadiyah sesuai dengan *stelsel* pengajaran Pemerintah Hindia Belanda, maka banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda. Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda Muhammadiyah mempunyai bagian-bagian sekolah: Taman Kanak-kanak (Bustanul Aftal), Sekolah Angka II, Sekolah Schakel, HIS, MULO, Inheemse MULO, Normaalschool, Kweekschool, HIK, dan AMS; sedangkan sekolah-sekolah agama yaitu: Ibtidaiyah (Sekolah Dasar dengan dasar Islam), Tsanawiyah (Sekolah Lanjutan dengan dasar Islam), Diniyah, yang hanya memberikan pelajaran Agama Islam, Muallimin/Muallimat (Sekolah Guru Bawah Agama Islam), dan Kulhiyatul Mubaligin (Sekolah Pendidikan Guru Agama Islam)²²). Pada zaman pendudukan Bala Tentara Jepang sekolah-sekolah Muhammadiyah ini pada umumnya berjalan terus, meskipun ada kegoncangan di sana-sini.

Di dalam memberikan pendidikan dan pelajaran Agama Islam, Muhammadiyah menanamkan keyakinan paham tentang Islam. Penerapan sistem pendidikan Muhammadiyah ini ternyata membawa hasil yang tidak ternilai harganya bagi kemajuan, bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya umat Islam di Indonesia²³).

Muhammadiyah berpendirian, bahwa para guru memegang peranan yang penting di sekolah dalam usaha menghasilkan anak-anak didik seperti yang dicita-citakan Muhammadiyah. Yang penting bagi para guru ialah memahami dan menghayati serta ikut beramal dalam Muhammadiyah. Dengan memahami dan menghayati serta ikut beramal dalam Muhammadiyah, para guru dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang dicita-citakan Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah guru menduduki tempat penting, tidak hanya sekedar alat yang

mekanis yang tanpa pengetahuan dan kesadaran tanpa mengetahui motivasi dan tujuan. Di dalam pengertian Muhammadiyah, guru merupakan subjek pendidikan, dan subjek *dakwah* yang sangat penting fungsi dan amal pengabdianya. Perlu diketahui bahwa tujuan Muhammadiyah dalam lapangan pendidikan yaitu membentuk manusia muslim yang cakap, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. Jadi tidak hanya bertujuan membentuk manusia intelektual saja, tetapi juga manusia muslim, manusia moralis dan manusia yang berwatak²⁴).

Dengan sistem pendidikan yang dijalankan Muhammadiyah, bangsa Indonesia dididik menjadi bangsa yang berkepribadian utuh, tidak terbelah menjadi pribadi yang berilmu umum atau yang berilmu agama saja.

6.3.2 Bidang Sosial

Bidang sosial merupakan medan perjuangan dan pengabdian Muhammadiyah yang sebenarnya. Sejak semula Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah langsung memberi contoh bagaimana seharusnya umat Islam bertindak untuk memperbaiki masyarakat.

Muhammadiyah sebagai suatu organisasi Islam yang berjuang dan bekerja di bidang sosial perlu memahami kenyataan yang ada di dalam masyarakat luas. Muhammadiyah perlu selalu menyelami aspirasi masyarakat; apa yang menjadi tuntutan dan harapannya. Sebaiknya Muhammadiyah berusaha membantu masyarakat di dalam memenuhi tuntutan dan harapan itu. Muhammadiyah perlu bekerja dan berjuang di atas dasar rencana dan perlu perhitungan yang realistis.

Pada zaman penjajahan dahulu, kehidupan rakyat sangat menyedihkan. Ini menjadi tugas Muhammadiyah untuk ikut membantu meringankan beban penderitaan masyarakat dengan berbagai jalan dan usaha sesuai dengan kemampuan kita masing-

masing berdasarkan pada ajaran Agama Islam. Sebenarnya masih amat luas lapangan usaha sosial yang dapat dikerjakan oleh Muhammadiyah, misalnya mengumpulkan anak-anak yang terlantar karena ditinggal oleh orang tuanya. Mereka perlu dipelihara dan diberi pendidikan sebagaimana terjelma dengan bentuk adanya rumah yatim piatu dan sebagainya. Untuk mempertinggi taraf kesehatan rakyat, didirikanlah poliklinik, rumah sakit serta balai pengobatan lainnya. Muhammadiyah juga mengumpulkan fakir miskin di dalam suatu asrama dan di sana mereka dididik serta dilatih dengan berbagai pekerjaan dan kerajinan tangan yang praktis, sehingga kelak mereka dapat bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri²⁵).

Bagian Muhammadiyah yang menangani ini semua disebut Penolong Kesengsaraan Umum. Perlu diketahui bahwa Penolong Kesengsaraan Umum ini mula-mula merupakan organisasi yang berdiri sendiri, yang didirikan pada tahun 1918 oleh beberapa orang pemimpin Muhammadiyah, untuk meringankan korban bencana alam akibat meletusnya Gunung Kelud. Akhirnya pada tahun 1921 Penolong Kesengsaraan Umum menjadi bagian yang khusus dari Muhammadiyah.²⁶)

Dalam bidang sosial, Muhammadiyah juga mendirikan perpustakaan dan taman bacaan, menerbitkan surat kabar, majalah, risalah, buku-buku baik mengenai keagamaan, pendidikan dan ilmu pengetahuan maupun kemasyarakatan, Muhammadiyah pernah menerbitkan majalah atau surat kabar antara lain *Suara Muhammadiyah*, *Mutiara*, *Suara Aisyiyah*, *Mitra*, *Pancaran*, *Berita Hisbul Wathon*, *Melati*, *Sinar*, *Suluh Remaja*, dan *Surya*. Semuanya ini diterbitkan di Yogyakarta²⁷).

Di samping itu Muhammadiyah juga memberi bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup dalam tuntunan Ilahi. Seperti diketahui, keluarga adalah masyarakat dan bentuknya yang terkecil. Dari keluarga akhirnya terbentuk suatu kehidupan bersama dan terjadi saling hubungan antara suami-

istri dan anak-anak serta anggota lain. Jika hubungan antara keluarga baik, maka dapat dipastikan kehidupan masyarakat pun baik pula, sebaiknya bila keluarga berantakan, maka tak mengherankan lagi kalau kehidupan masyarakatnya juga ikut hancur; oleh sebab itu Muhammadiyah berusaha mewujudkan usaha keluarga yang sejahtera lahir dan batin, dengan membentuk unit-unit perencanaan keluarga sejahtera di tiap-tiap wilayah daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia, di atas bahunya terpikul tugas moral yang menuntut agar Muhammadiyah tidak saja menjadi pelopor di masa lalu, tetapi juga menjadi pelopor di masa sekarang dan masa yang akan datang.

6.3.3 Bidang Keagamaan

Dalam bidang inilah sebenarnya pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah. Apa yang dilaksanakan tak lain adalah dorongan keagamaan semata-mata; karena baik kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, maupun yang digolongkan pada politik tidak dapat dipisahkan dari jiwa, dasar dan semangat keagamaan.

Bidang keagamaan, Muhammadiyah berusaha mengembangkan kemurnian ajaran Islam yang berdasarkan *Al Qur'an dan Hadis*. Muhammadiyah juga mempergiat penyiaran Agama Islam dengan jalan mengadakan pengajian-pengajian maupun tabligh. Selanjutnya perlu diketahui, bahwa Muhammadiyah telah memelopori sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha yang diselenggarakan di lapangan. Bersembahyang secara jemaah di lapangan tentu memberi kemungkinan lebih luas dari pada di dalam mesjid dan langgar yang sempit. Apalagi *syiar* keagamaan terasa lebih cemerlang dan mencapai daerah yang lebih luas. Efek psikologisnya juga lebih besar, apalagi itu dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Melihat umat Islam berduyun-duyun datang ke lapangan untuk bersembahyang dan mendengarkan

khotbah, tentu mengandung rasa hormat, kagum dan pengakuan akan kekuatan umat Islam pada diri orang-orang dan pembesar-pembesar Belanda. Ini merupakan sesuatu hal yang sungguh besar nilainya. Di samping itu di tanah lapang orang akan datang lebih banyak dari pada di dalam sebuah bangunan yang terbatas.

Pada zaman Rasulullah, shalat 'Id diadakan di lapangan atau *Shakra* yang letaknya kira-kira 300 meter dari mesjid Nabi. Laki-laki, wanita dan anak-anak diwajibkan hadir untuk shalat bersama-sama dengan mengenakan pakaian yang paling indah yang dimilikinya pada hari raya itu. Kaum wanita yang sedang haid sekalipun dianjurkan untuk datang, meskipun tidak untuk bershalat, tetapi sekedar ikut merayakan. Di sanalah dapat dilaksanakan pertemuan dan perkenalan agar supaya *ukhuwah serta silaturahmi* dapat dibina semesra-mesranya. Di dalam ajaran Islam, pertemuan sesama muslim sangat dipentingkan dan menjadi hikmah dalam setiap ibadah. Shalat berjamaah setiap hari merupakan pertemuan terkecil dan shalat Jum'at merupakan pertemuan mingguan yang lebih besar, sedangkan shalat 'Id di lapangan dua kali dalam setahun merupakan pertemuan yang lebih besar di lapangan terbuka. Akhirnya sekali setahun dilaksanakan pertemuan internasional dalam rangka ibadah haji.

Berabad-abad sesudah nabi dan sahabatnya wafat, umat Islam melaksanakan shalat 'Id tidak di lapangan lagi melainkan di dalam mesjid. Dalam hal ini Muhammadiyah telah melakukan tindakan mengembalikan shalat 'Id itu ke tempat aslinya yaitu di lapangan. Ternyata setelah diselidiki bahwa Imam Syafi'i mengutamakan bersembahyang 'Id di dalam mesjid, karena kemulyaan mesjid itu, dengan catatan selama mesjid itu dapat menampung umat sebanyak-banyaknya, dan mengutamakan di lapangan jika mesjid terlalu sempit. Kenyataannya mesjid selalu tidak cukup luas untuk menampung umat sebanyak mungkin.

Muhammadiyah sendiri untuk pertama kalinya mengadakan shalat 'Id di lapangan Kota Yogyakarta pada Idul Fitri tahun 1343 Hijriah atau tahun 1925 Masehi dengan dihadiri + 5.000 orang. Pada tahun itu juga Muhammadiyah mengadakan shalat Idul Adha. Tindakan Muhammadiyah ini sangat menggemparkan kaum kolot dan mendapatkan tentangan dari Pemerintah Hindia Belanda, karena dianggap mengganggu ketertiban; bahkan dalam kongresnya yang ke-15 di Surabaya pada tahun 1926, Muhammadiyah memutuskan agar semua cabang Muhammadiyah secara serentak menyelenggarakan shalat 'Id di lapangan. Pemerintah Hindia Belanda lalu bertindak dengan menetapkan peraturan, bahwa setiap shalat 'Id di lapangan terlebih dahulu harus mendapat izin dari kepolisian.

Selanjutnya sering terjadi peristiwa shalat 'id di lapangan dihalang-halangi atau dibubarkan karena belum mendapat izin atau memang tidak dimintakan izin. Banyak pengurus Muhammadiyah yang ditahan atau didengar kesaksiannya oleh polisi karena masalah shalat 'Id di lapangan. Dalam konggres Muhammadiyah yang ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934, diputuskan agar setiap cabang yang akan menyelenggarakan shalat 'Id di lapangan tidak perlu minta izin pada polisi, tetapi cukup memberi tahu saja. Andaikata dipaksa harus minta izin, maka permintaan izin itu cukup satu kali saja untuk selama-lamanya dan untuk seluruh Indonesia.

Tentu saja Pemerintah Hindia Belanda tidak mau menerima keputusan konggres Muhammadiyah yang sangat berani dan bebas. Pemerintah Hindia Belanda menjadi marah dan semakin ketatlah larangan yang ditujukan kepada Muhammadiyah, tetapi dalam praktek umat Islam makin senang dan tertarik bersembahyang di lapangan pada Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga Pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengizinkan²⁸).

Muhammadiyah juga bertindak sebagai pelopor dalam pembetulan arah kiblat dari semua langgar dan mesjid di Indonesia.

Muhammadiyah juga memelopori dimulainya puasa dan lebaran berdasarkan perhitungan *hisab*. Muhammadiyah mengadakan perubahan dalam bidang penentuan awal bulan *Qamariyah*. Dengan demikian dapat ditentukan saat-saat Idul Fitri dan Idul Adha serta waktu shalat fardlu, imsak dan berbuka puasa dengan tepat. Usaha ini mendapat tantangan dari masyarakat, tetapi akhirnya makin banyak pihak yang cenderung menggunakan *hisab*, Bahkan Persatuan Islam (Persis) dan Al Irsyad juga menggunakan *hisap*. Lambat tetapi pasti pemakaian *hisap* menjadi umum dan banyaklah almanak serta kalender diterbitkan dengan perhitungan *hisap*29)

Muhammadiyah juga memikirkan jemaah haji. Sudah kita ketahui bahwa perjalanan para jemaah haji pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda sangat tidak teratur, oleh karena itu pada tahun 1921 Muhammadiyah telah merintis jalan dengan membentuk sebuah Bagian Penolong Haji untuk menyelenggarakan pengangkutan bagi para jemaah haji. Ternyata usaha ini mendapat larangan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Muhammadiyah, para jemaah haji dari Indonesia termasuk orang yang sengsara. Mereka memerlukan pertolongan dan perbaikan, karena mereka betul-betul sengsara; padahal orang yang sedang menjalankan ibadah adalah orang yang mulia, dan seharusnya terhormat dan dihormati. Melihat kenyataan ini Muhammadiyah semakin bulat kemauannya untuk memperbaiki keadaan jemaah haji Indonesia. Dalam kongresnya yang ke-26 di Yogyakarta pada tahun 1937, Muhammadiyah berhasil membentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia dipimpin oleh Kiai Haji Sujak. Pada awal tahun 1941 mulai diadakan pembicaraan dengan wakil kongsi dagang kapal Jepang untuk membeli dua buah kapal. Usaha ini ternyata gagal karena pecah Perang Dunia II.

Kesanggupan umat Islam yang tergabung di dalam Muhammadiyah telah mendorong berdirinya satu perseroan terbatas

yang didirikan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia. Perseroan ini diberi nama N.V. Scheepvaart en Handelmaatschappij Indonesia, dengan akte notaris tertanggal 10 Oktober 1941. Perseroan ini kemudian diteruskan oleh Panitia Haji Indonesia melalui putusan Konggres Muslimin Indonesia dalam bentuk yayasan³⁰⁾.

Segi lain dari bentuk perjuangan Muhammadiyah ialah mendirikan musholla atau langgar khusus untuk wanita. Musholla untuk wanita yang pertama didirikan di Kauman Yogyakarta pada tahun 1922. Sementara itu ada pihak-pihak yang mengejek terhadap Muhammadiyah berhubung dengan pendirian musholla atau langgar untuk kaum wanita. Muhammadiyah dikatakan mengadakan keanehan dalam Agama Islam, tetapi ejekan itu tidak mendapat perhatian. Muhammadiyah terus bekerja menurut rencana yang telah digariskan.

6.3.4 Bidang Kewanitaan

Organisasi wanita Muhammadiyah yang bernama Aisyiyah pada permulaannya merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri. Kaum wanita dari daerah Kauman Yogyakarta sejak tahun 1914 telah aktif dalam suatu organisasi bernama Sopo Tresno yang bergerak dalam bidang sosial. Berdirinya Sopo Tresno adalah atas inisiatif Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Haji Ahmad Dahlan. Mereka berpendapat bahwa wanita juga mempunyai peranan dan dapat berprestasi apabila diberi kesempatan sebaik-baiknya. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapat tempat yang layak itulah maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan para wanita dari daerah Kauman untuk mengadakan pengajian. Di samping pengajian mereka juga diberi penerangan tentang pentingnya kaum wanita ikut serta memikirkan pendidikan masyarakat. Kelompok pengajian wanita tersebut dalam perkembangannya kemudian bernama Sopo Tresno.

Meskipun tanpa anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lain, tetapi organisasi ini telah mulai mengasuh beberapa anak yatim piatu. Seperti halnya dengan Penolong Kesengsaraan Umum, hubungan pribadi memudahkan kerja sama antara organisasi ini dengan Muhammadiyah dalam bidang sosial dan pendidikan. Pada tahun 1917 Sopo Tresno diubah namanya menjadi Aisyiyah sebagai suatu organisasi yang mempunyai peraturan dan pengurus yang tetap. Perubahan nama Sopo Tresno menjadi Aisyiyah ini adalah atas njanran Haji Muchtar, seorang anggota Muhammadiyah³¹⁾.

Pada waktu itu Aisyiyah masih merupakan organisasi yang berdiri sendiri, terlepas dari Muhammadiyah. Baru pada tahun 1923 Aisyiyah menjadi bagian atau majelis dari Muhammadiyah³²⁾. Pengurus Aisyiyah yang pertama terdiri atas : Siti Bariah sebagai ketua, Siti Badilah sebagai penulis, Siti Aminah Barrowi sebagai bendahara, Nyai Haji Abdullah sebagai pembantu, Siti Dalalah sebagai pembantu, Nyai Fatimah Wasool sebagai pembantu, Siti Wadingah sebagai pembantu, Siti Dawimah sebagai pembantu, dan Siti Busyro sebagai pembantu. Pemberian bimbingan administrasi dan organisasi adalah Haji Muchtar, sedangkan bimbingan jiwa keagamaan diberikan sendiri oleh Kiai Haji Achmad Dahlan³³⁾.

Perlu diketahui bahwa sifat organisasi ini adalah pembinaan dan pemeliharaan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu bahwa setiap muslim berkewajiban mendidik dan memelihara agama dan *aklaq* seluruh keluarga terutama kaum wanitanya, dan yang menegaskan hak-hak wanita beserta kewajibannya yang terpisah dari kaum pria. Wanita sendirilah yang nantinya bertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia pada Tuhan; tidak memboncong suaminya. Kaum wanita mempunyai hak untuk memperoleh kemajuan dan memajukan dirinya dengan cara-cara yang baik serta dengan mengatur organisasi. Dapatlah dikatakan bahwa berdirinya Aisyiyah menjadi pelopor kebangkitan wanita Islam.

Aisyiyah juga memberikan perhatian kepada wanita remaja. Untuk itu didirikan pula suatu bagian khusus bernama Nasyiatul Aisyiyah³⁴). Sebenarnya secara organisatoris kedudukan Aisyiyah hanya sebagai bagian atau majelis saja, tetapi daerah operasinya sama, yaitu Aisyiyah kepada anggota wanita dan Muhammadiyah kepada anggota pria.

Jalinan kerjasama antara Aisyiyah dengan organisasi lain yang ada di dalam negeri sangat baik. Aisyiyah sendiri mempunyai suatu prinsip untuk selalu bersahabat dengan organisasi lain baik yang ada di dalam negeri maupun dengan organisasi di luar negeri sepanjang hubungan itu tidak akan merugikan Aisyiyah. Tampilnya Aisyiyah dalam forum Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 merupakan suatu bukti bahwa Aisyiyah menginginkan adanya kesatuan dan persatuan bangsa, khususnya untuk mencari kesamaan pendapat dengan organisasi lain dalam menuju Indonesia merdeka.

6.3.5 Bidang Kepemudaan

Urusan kepemudaan bagi Muhammadiyah merupakan hal yang penting dan disadari sepenuhnya; karena itu segi ini mendapat perhatian yang khusus. Harus pula diingat bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Untuk itu maka pada tahun 1918 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan gerakan kepanduan Hizbul Wathon³⁵).

Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan kepanduan Hizbul Wathon setelah ia melihat kepanduan misi Kristen, *Jeugd Padvin-der Organisatie* (JPO) di Alun-alun Mangkunegaran, Solo. Sekembalinya di Yogyakarta, diajaknya guru-guru Muhammadiyah mendirikan suatu organisasi kepanduan yang berdasarkan Agama Islam. Pemberian nama Hizbul Wathon disesuaikan dengan nama partai politik nasional di Mesir yang didirikan oleh Mustaf Kamil pada tahun 1894. Bagi anak-anak pandu Muhammadiyah, Hizbul Wathon adalah wadah yang tepat, dan sejiwa

pula dengan ucapan "*Hukama*", "mencintai tanah air adalah sebagian dari iman." Maksud didirikan Hizbul Wathon yaitu untuk mendidik para pemuda mencintai bangsa dan tanah air dengan dasar tuntunan Islam. Pakaian seragam terdiri atas celana berwarna biru tua yang berarti lautan, kemeja berwarna cokelat bermakna daratan, bertopi bambu melambangkan bagi tanah air Indonesia yang kaya raya. Setiap pandu Hizbul Wathon melilitkan sapu tangan merah pada lehernya, berarti berani membela kebenaran dan tanah airnya. Simbolnya berbentuk sekuntum bunga melati. Pengurus pertamanya yaitu : Muchtar sebagai ketua, Rajid sebagai wakil ketua, Sumodirjo sebagai penulis, dan Abdul Hamid sebagai keuangan³⁶⁾.

Hizbul Wathon pernah diajak bergabung dalam *Nederlandsche Indische Padvinders Vereeniging* (NIPV), tetapi ajakan ini ditolak oleh Kiai Haji Fakhruddin dengan alasan bahwa Hizbul Wathon sudah mempunyai dasar sendiri yaitu Islam, dan sudah punya induk sendiri yaitu Muhammadiyah; oleh sebab itu tidak perlu diatur oleh *Nederlandsche Indische Padvinder* yang berbau kolonial.

Semula Hizbul Wathon merupakan bagian dari Majelis Pengajaran Muhammadiyah, tetapi ternyata Hizbul Wathon dengan cepat dapat berkembang di beberapa tempat. Dalam kongres Muhammadiyah tahun 1926 diputuskan untuk membentuk majelis khusus bagi gerakan kepanduan yang dinamakan Hizbul Wathon.

Muhammadiyah mendirikan Hizbul Wathon dengan persiapan dan perhitungan matang serta berjangka panjang. Pada suatu ketika bangsa Indonesia beserta umat Islam pasti membutuhkan pemuda-pemuda yang benar-benar sanggup membela tanah airnya. Kiai Haji Fakhruddin pernah berpidato di depan ratusan pandu Hizbul Wathon yang antara lain mengatakan, bahwa tongkat-tongkat yang mereka panggul itu pada suatu ketika akan menjadi senapan³⁷⁾.

Ucapan Kiai Haji Fakhruddin itu ternyata benar. Beberapa tahun kemudian banyak di antara pandu-pandu Hizbul Wathon itu turut serta mengangkat senjata. Pada zaman pendudukan Bala Tentara Jepang banyak anggota Hizbul Wathon memasuki barisan Pembela Tanah Air (Peta) dan sesudah proklamasi kemerdekaan, mereka menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Di antaranya ialah Sudirman, Basuki Rachmat dan lain-lain, bahkan Sudirman akhirnya diangkat sebagai panglima besar.

6.3.6 *Bidang Politik*

Muhammadiyah merupakan suatu gerakan agama yang bertujuan untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Muhammadiyah tidak berhubungan dengan kegiatan politik. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri memasuki berbagai organisasi yang ada hubungannya dengan kehidupan politik, seperti Jami'ah Khair, Al Irsyad, Sarekat Islam. Dalam kepengurusan Budi Utomo, Kiai Haji Ahmad Dahlan duduk juga sebagai pengurus cabang Yogyakarta. Ia juga menjadi penasihat Sarekat Islam.

Secara formal, Muhammadiyah memang bukan partai politik, tetapi seringkali gerakannya bercorak politik. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1924 Sarekat Islam diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, dan kedudukannya dipindahkan ke Yogyakarta, hubungan antara Partai Sarekat Islam Indonesia dengan Muhammadiyah makin erat. Kiai Haji Agus Salim sebagai ketua Partai Sarekat Islam Indonesia sangat erat hubungannya dengan Kiai Haji Fakhruddin, pemimpin Muhammadiyah yang menjabat sebagai bendahara³⁸).

Pada tahun 1926–1927 timbul ketegangan antara Muhammadiyah dengan Partai Sarekat Islam Indonesia. Ketegangan ini disebabkan oleh fitnah dan hasutan dari pihak ketiga, terutama dari Pemerintah Hindia Belanda yang menjalankan politik *de-*

vide et impera. Maksudnya agar kekuatan bangsa Indonesia menjadi lemah. Pemerintah Hindia Belanda merasa takut kalau bangsa Indonesia bersatu. Sehingga dikhawatirkan akan melawan Pemerintah Hindia Belanda. Ketegangan ini dimulai semenjak Haji Umar Said Cokroaminoto dan Kiai Haji Mansyur pulang dari Mekkah mengunjungi Mukhtar Alam Islam. Partai Sarekat Islam Indonesia Randublatung menyebarkan surat tanggal 13 Agustus 1926 kepada penduduk Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam surat itu dinyatakan bahwa Muhammadiyah sengaja mematikan Partai Sarekat Islam Indonesia, sebab sudah terbukti bilamana Muhammadiyah berdiri di situ, Partai Sarekat Islam Indonesia mengalami kemunduran. Muhammadiyah sering menghasut Partai Sarekat Islam Indonesia karena berpolitik. Dikatakan pula bahwa Muhammadiyah pernah meminta bantuan uang kepada pabrik gula yang ada di Yogyakarta untuk biaya pengiriman *mubalighin* yang mengajar Agama Islam di pabrik gula itu. Kecuali itu Muhammadiyah dituduh mendapat subsidi uang sebanyak 24 gulden dari Pemerintah Hindia Belanda. Terhadap fitnahan tersebut, Muhammadiyah sudah memberi tanggapan seperlunya.

Pada waktu itu suhu politik di Indonesia sedang menghangat. Ketika itu timbul perdebatan antara pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia tentang bagaimana mengambil sikap terhadap Pemerintah Hindia Belanda, yaitu sikap non-kooperasi atau sikap kooperasi. Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Nasional Indonesia menganut sikap non-kooperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan Budi Utomo menganut kooperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Muhammadiyah sebagai organisasi *tabligh*, sosial dan pendidikan tidak pernah menyatakan dirinya non-kooperasi atau kooperasi; karena itu Muhammadiyah mau menerima subsidi keuangan dari Pemerintah Hindia Belanda untuk membiayai sekolahnya, lalu dengan serta merta dikatakan oleh orang luar sebagai ko-

perator. Istilah non-kooperasi dan kooperasi adalah istilah politik. Padahal Muhammadiyah tidak mengenal istilah tersebut. Dalam menerima subsidi itu Muhammadiyah menyadari bahwa subsidi itu sebenarnya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh umat Islam dan kekayaan tanah air Indonesia.

Karena beberapa hal tersebut dan untuk mengkristalisasi dirinya sebagai partai politik, maka pada tahun 1927 itu Partai Sarekat Islam Indonesia menyatakan berlakunya disiplin partai. Sikap anggota Partai Sarekat Islam Indonesia tidak boleh merangkap menjadi anggota Muhammadiyah. Dengan adanya disiplin partai, maka Kiai Haji Fakhruddin keluar dari Partai Sarekat Islam Indonesia, karena ia tetap memilih Muhammadiyah³⁹).

Secara resmi, sejak berdirinya hingga sekarang, Muhammadiyah bukan merupakan partai politik, namun sepanjang sejarah hidup dan perjuangannya, Muhammadiyah selalu ikut serta membela kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Misalnya mengenai adanya "*Guru Ordonantie*" yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda; Muhammadiyah bersama-sama dengan organisasi lainnya seperti Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Pendidikan Nasional (PNI Baru), Taman Siswa, Budi Utomo, Partai Indonesia, dan Isteri Sedar menentang *guru ordonantie* tersebut. Berkat perjuangan yang ulet dari organisasi-organisasi tersebut, akhirnya keluarlah surat sekretaris gubernemen No: 462 a/A, tanggal 18 Februari 1931 yang isinya membebaskan para *mubaligh* dari *ordonantie* guru tersebut.

Pada tahun 1938 Muhammadiyah menentang adanya pajak potong hewan yang dikenakan bagi pemotongan hewan qurban pada tiap-tiap Idul Adha. Tuntutan ini berhasil dengan tidak dikenakannya pajak bagi pemotongan qurban. Di samping itu Muhammadiyah juga menentang rencana Pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan *ordonansi* perkawinan bagi umat Islam. Sebagai anggota dari al Madjlisul Ismail A'laa Indo-

nesia (MIAI), Muhammadiyah menyokong tuntutan GAPI (Indonesia berparlemen)⁴⁰).

Protes terhadap campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Agama Islam yang dipandang tidak pada tempatnya tersebut dibicarakan dalam Kongres Muhammadiyah ke-21 tahun 1932 di Ujung Pandang⁴¹). Muhammadiyah selalu menjaga hidup di luar gelombang politik, tetapi terhadap campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam urusan administrasi yang juga mengenai agama, tindakan Muhammadiyah boleh dikatakan sejalan dengan Partai Sarekat Islam Indonesia.

Pada tahun 1932 Dr. Sukiman memisahkan diri dari Partai Sarekat Islam Indonesia dan mendirikan Partai Islam Indonesia. Pada tahun 1936 Kiai Haji Agus Salim juga memisahkan diri dari Partai Sarekat Islam Indonesia dan mendirikan partai baru dengan nama Penyedar, yang berhaluan kooperasi. Para pemimpin Islam menjadi sedih dan prihatin melihat Partai Sarekat Islam Indonesia mengalami perpecahan. Selanjutnya para pemimpin Islam tersebut ingin mendirikan partai Islam yang kuat dan mendapat dukungan dari seluruh umat Islam. Para pemimpin Islam kemudian mengirim surat kepada Partai Sarekat Islam Indonesia mengenai dua pokok persoalan. *Pertama*, supaya Partai Sarekat Islam Indonesia melepaskan sikap non-kooperasi dan hendaknya non-kooperasi ataupun kooperasi itu dijadikan taktik saja dan jangan menjadi prinsip yang kaku. *Kedua*, supaya disiplin partai terhadap Muhammadiyah dicabut. Terhadap pokok pertama, Partai Sarekat Islam tetap menolak dan tidak menyetujui, dan terhadap pokok kedua Partai Sarekat Islam Indonesia bersedia mempertimbangkannya.

Selanjutnya diadakan beberapa kali persidangan dan yang terakhir yaitu sidang keempat, diadakan di rumah dr. Satiman pada tanggal 4 Desember 1938 di Solo. Sidang dihadiri para pemimpin Islam dan para ulama. Pada sidang keempat ini disepakati pembentukan partai baru bernama Partai Islam Indo-

nesia dengan tujuan mempersiapkan rakyat Indonesia untuk mencapai kesempurnaan kedudukan Agama Islam dan derajat umatnya. Pengurus Partai Islam Indonesia terdiri atas : Wiwoho sebagai ketua, dr. Sukiman Wiryosanjoyo sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Kasmat sebagai penulis I, Wali Alfatah sebagai penulis II, dr. Sukardi sebagai bendahara I, Haji Abdul Hamid sebagai bendahara II, Kiai Haji Mas Mansyur sebagai anggota, Kiai Haji Hadikusumo sebagai anggota, Haji Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Mohammad Faried sebagai anggota, dan Haji Rosyidi BA sebagai anggota. Kelihatan jelas, bahwa banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang duduk dalam pimpinan Partai Islam Indonesia. Berdirinya Partai Islam Indonesia mendapat sambutan hangat di seluruh Indonesia. Dalam waktu yang singkat sudah berdiri cabang-cabang di seluruh Indonesia dan kebanyakan terdiri atas orang-orang Muhammadiyah⁴²⁾.

Perlu diketahui bahwa Muhammadiyah sejak dulu sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, baik di dalam rapat-rapat, pengajian, konperensi, maupun dalam surat kabar, majalah ataupun buku-buku. Jadi jelas Muhammadiyah ikut pula memberi sumbangan pada pertumbuhan dan perkembangan kesadaran nasional di kalangan anggota-anggotanya dan masyarakat umum. Suatu tindakan nyata dari Muhammadiyah ialah bahwa pada tahun 1939 mengubah nama Hindia Belanda menjadi Indonesia. Peristiwa ini terjadi dalam Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan pada tahun 1939.

Pada tahun 1939 Muhammadiyah sebagai anggota MIAI mengirimkan utusan ke Jepang, terdiri atas Prof. Kiai Haji Kahar Muzakir, Prof. Haji M. Farid Ma'ruf, Mr. Ahmad Kasmat dan lain-lain untuk memenuhi undangan *The Tokyo Moslem Community and The Dai Nippon Kaikyo Kyokoi*, untuk menghadiri *The Islamic exhibition* di Tokyo dan Osaka⁴³⁾.

Kedatangan bala tentara Jepang di Indonesia membawa perubahan baru bagi Indonesia yaitu penderitaan akibat peperang-

an, tekanan dan kekurangan. Jauh sebelum Jepang menguasai seluruh Asia, mereka telah mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia pada beberapa wilayah Asia dan mendapati bahwa penduduknya terikat oleh kepercayaan akan adanya kekuasaan yang akan menyelamatkan mereka dari kehinaan dan kemelaratan. Khusus mengenai bangsa Indonesia, bangsa ini selama dalam keadaan terjajah dan tertindas oleh Belanda telah bangkit menuntut persamaan dan kemerdekaan, di mana rakyatnya selalu mengharap datangnya kekuasaan seorang ratu adil yang mampu memberi keadilan. Di samping itu keinginannya yang kuat untuk melepaskan diri dari tangan Belanda akan memudahkan bagi Jepang untuk memperoleh bantuan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Kekuasaan Islam inilah antara lain yang diharapkan oleh Jepang untuk membantu mencapai tujuan.

Dengan demikian kedatangan Jepang harus dipropagandakan sebagai kehadiran saudara tua yang akan membebaskan saudaranya dari cengkraman bangsa Belanda. Kedudukan kaisar Jepang harus menjadi pusat pemujaan dan penghormatan sebagai raja yang diutus Tuhan menyelamatkan bangsa yang tertindas. Bangsa yang telah ditaklukkan harus ditekan, dilatih dengan keras untuk kemudian diajak bersama-sama menghancurkan kekuatan barat. Namun MIAI kemudian diubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pada waktu itu semua organisasi telah dipaksa non-aktif oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang, lalu ditampung dalam organisasi gabungan yang didirikan oleh pemerintah dengan alasan untuk mempertahankan seluruh kekuatan rakyat dengan nama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipimpin oleh Ir. Sukarno, Drs. Muh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansyur, dan ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Karena Kiai Haji Mas Mansyur men-

jadi pengurus Putera, maka ia harus pindah ke Jakarta. Itulah sebabnya pimpinan Muhammadiyah diserahkan kepada wakil ketuanya yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Dalam menjalankan tugasnya memimpin Muhammadiyah, ia didampingi oleh Kiai Haji Ahmad Badawi.

Untuk mempertahankan seluruh rakyat Indonesia di bawah kekuasaannya, Pemerintah Bala Tentara Jepang di samping bertindak kejam juga mencoba menanamkan mitos baru yaitu mendewakan Kaisar Tenoo Haika. Rakyat dilatih untuk menghormat kepada Kaisar Tenoo Haika dengan cara membungkuk setengah badan atau *saikirei* menghadap ke arah matahari.

Pada waktu itu semua anak sekolah dan pegawai negeri sebelum masuk sekolah atau kantor, kira-kira pukul tujuh diharuskan berolahraga atau *taisyo* dan bersumpah, kemudian diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* dan mengadakan penghormatan ke arah Tenno Haika dengan cara *saikirei*. Cara-cara ini ditentang oleh Ki Bagus Hadikusumo dengan alasan bahwa penghormatan semacam itu sudah menyerupai penghormatan kepada Tuhan, karena itu hukumnya terlarang dan dapat menjurus kepada *syirik*. Pendapat Ki Bagus Hadikusumo ini mendapat dukungan dari para ulama Muhammadiyah, bahkan para ulama Muhammadiyah menggariskan hukum *saikirei* sebagai perbuatan yang terlarang oleh *syara*. Dengan cepat pendapat Ki Bagus Hadikusumo itu tersebar luas. Sejak itu bertambah banyak orang yang enggan melakukan *saikirei*. Keengganan ini semakin luas dan menyebabkan Pemerintah Bala Tentara Jepang merasa khawatir. Ki Bagus Hadikusumo kemudian mendapat panggilan dari *gunsaikan*, mengenai pernyataannya bahwa melakukan *saikirei* itu dilarang oleh agama Islam. Orang Islam tidak boleh memberi hormat sungguh kepada manusia dengan cara-cara seperti menyembah Tuhan.

Di luar dugaan Ki Bagus Hadikusumo bahwa pembesar Jepang tersebut tidak marah, bahkan menganggukkan kepalanya dan mengatakan kalau murid-murid memang keberatan, tidak dipaksakan melakukan *sakikirei*.⁴⁵) Akhirnya Jepang menyadari bahwa untuk tetap menguasai rakyat Indonesia, umat Islam harus didekati dan Agama Islam harus diberi kebebasan.

Menjelang akhir tahun 1944 tentara Jepang selalu mengalami serangan dari tentara Sekutu. Untuk menghadapi serangan tentara sekutu ini Pemerintah Jepang harus mengerahkan segenap tenaga termasuk rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Untuk itu kepada bangsa Indonesia perlu dijanjikan kemerdekaan.

Maka pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koi-so memberikan keterangan dalam sidang *Teikoku Gikai* di Tokyo tentang maksud pemerintah untuk memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan janji tersebut, maka pada bulan Februari 1945 tiga orang pemimpin bangsa Indonesia yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo dikirim ke Jepang untuk menghadap kepada Tenoo Haika untuk menerima janji kemerdekaan secara resmi.

Selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh dr. Rajiman Wedyadiningrat. Ki Bagus Hadikusumo juga menjadi anggota mewakili golongan Islam bersama dr. Sukiman Wiryo-sanjoyo, Kiai Haji Kahar Muzakir, Kiai Haji A. Wahid Haysim, Abikusno Cokrosuyoso, Mr. Ahmad Subarjo, dan Kiai Haji Agus Salim.

Ki Bagus Hadikusumo juga duduk dalam panitia kecil yang bertugas memeriksa usul-usul dan saran yang masuk. Di samping itu juga ikut merumuskan Pancasila, sebagai dasar negara.

Dengan demikian jelas bahwa Muhammadiyah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjuangan politik, baik pada zaman penjajahan Belanda maupun pada zaman pendudukan Jepang.

CATATAN

- 1) Sutrisno Kutoyo, *Kyai Haji Ahmad Dahlan*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Jakarta, 1978, hal. 16.
- 2) Ibid., hal. 17.
- 3) Sartono Kuntodirjo dkk., *Sejarah Nasional Indonesia V*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hal. 43-44.
- 4) Sutrisno Kutoyo, op. cit., hal. 19.
- 5) Ibid., hal. 20.
- 6) Drs. Musthofa Kemal Pasha dkk., *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Persatuan, Yogyakarta, 1976, hal. 27.
- 7) Sutrisno Kutoyo, op. cit., hal. 37.
- 8) Ibid., hal. 55 – 56.
- 9) Ibid., hal. 62.
- 10) Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1980, hal. 85.
- 11) Ibid., hal. 86.
- 12) Sutrisno Kutoyo, op.cit., hal. 51 – 52.
- 13) Drs. Musthofa Kemal Pasha dkk., op. cit. hal. 25.
- 14) Sutrisno Kutoyo, Drs. Mardanan Sofwan, *K.H. Ahmad Dahlan, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Angkasa, Bandung, hal. 32 – 33.
- 15) Drs. Musthofa Kemal Pasha dkk., op. cit. hal. 29–30.
- 16) H.M. Djindar Tamimy, H. Dharnawi Hadikusumo, *Penje-*

- lasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah*, Persatuan, Yogyakarta, 1972, hal. 29.
- 17) Drs. Musthofa Kamal Pasha dkk., op. cit., hal. 31.
 - 18) Sutrisno Kutoyo, op. cit., hal. 60 – 61.
 - 19) H.M. Djindar Tamimy, H. Djarnawi Hadikusumo, op. cit., hal. 49.
 - 20) Sutrisno Kutoyo dan Mr. Mardanus Sofwan, op. cit., hal.35.
 - 21) Tashadi, Suratmin, Zaman Kebangkitan Nasional Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta 1977 – 1978, hal. 65.
 - 22) I. Djumhur, Drs. M. Donosuparto, *Sejarah Pendidikan*, CV Ilmu, Bandung, hal. 165.
 - 23) Sutrisno Kutoyo, op. cit. hal . 118.
 - 24) Ibid, hal. 119.
 - 25) Ibid., hal. 120.
 - 26) Deliar Noer, op. cit. hal. 90.
 - 27) Sutrisno Kutoyo, loe. cit.
 - 28) Ibid., hal. 105 – 106.
 - 29) H. Djarnawi Hadikusumo. *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al Afghani sampai KHA Dahlan*, Persatuan, Yogyakarta, hal. 81.
 - 30) Sutrisno Kutoyo, op. cit. hal. 112.
 - 31) Deliar Noer, Loe. cit.
 - 32) HM Junus Anis., *Riwayat Hidup Nyai A Dahlan*, Jajasan Mertju Suar, Yogyakarta, 1968, hal. 21.
 - 33) Drs. Suratmin, *Nyai Ahmad Dhalan*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Jakarta, 1977, yal. 59.
 - 34) Deliar Hoer, op. cit., hal. 91.
 - 35) Ibid.
 - 36) H. Djarnawi Hadikusumo, op. cit., hal. 83.
 - 37) H. Djarnawi Hadikusumo, *Matahari Matahari Muhammadiyah jilid II*, Persatuan, hal. 23.
 - 38) Sutrisno Kutoyo, op. cit., hal. 135.
 - 39) H. Djarnawi Hadikusumo, op. cit., hal. 84–85.

- 40) sutrisno Kutoyo, op. cit. hal. 138–139.
- 41) A K Pringgodigdo SH, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hal. 169.
- 42) Sutrisno Kutoyo, op. cit., hal. 139. 140.
- 43) Ibid., hal. 140.
- 44) H. Djarnawi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin*, Persatuan, Yogyakarta, 1979, hal. 20.
- 45) H. Djarnawi Hadikusumo, *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al Afghani sampai KHA Dahlan*, op. cit hal. 97.

BAB VII PERJUANGAN TAMAN SISWA PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

7.1 Latar Belakang Berdirinya Taman Siswa

Pada permulaan abad ke-20, perhatian masyarakat Indonesia terhadap pengajaran sangat besar, sampai Departemen Pengajaran kewalahan untuk mengatasinya. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang ingin sekolah tetapi tempatnya tidak mencukupi. Perhatian masyarakat Indonesia pada waktu itu terutama ditujukan terhadap pengajaran Barat. Semua orang ingin belajar bahasa Belanda, karena bahasa ini adalah satu-satunya alat untuk mendapat jabatan yang baik, sedangkan usaha untuk meningkatkan kebudayaan bangsa belum terpikirkan.

Kaum menengah atau priyayi-priyayi Jawa¹⁾, yang anak-anaknya tidak dapat memasuki sekolah Barat terpaksa memasuki sekolah swasta yang diasuh oleh guru pensiunan. Para guru pensiunan ini memberi pelajaran dengan bayaran yang tinggi. Masa ini merupakan masa kejayaan bagi para pensiunan guru.

Sistem pengajaran pada waktu itu tidak memberi kepuasan pada rakyat. Pengajaran Pemerintah Hindia Belanda yang se-

olah-olah dijadikan contoh dan pada umumnya dianggap sebagai usaha untuk menjunjung derajat bangsa Indonesia, ternyata tidak dapat memenuhinya. Pengajaran yang diterima dari pemerintah sangat kurang dan mengecewakan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat pendidikan rakyat.

Sebelum ada HIS, rakyat hanya mengenal sekolah bumiputra yang rendah sekali pelajarannya. Memang ada sebagian kecil dari bangsa Indonesia, yaitu kaum priyayi, yang boleh menuntut pelajaran di sekolah Belanda hingga kemudian dapat meneruskan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi, tetapi untuk rakyat umum tertutuplah pintu yang dapat menuntun mereka ke arah penghidupan yang pantas.

Ketika bangsa Indonesia mendapat kesempatan memasuki sekolah bumiputra kelas satu yang kelak menjadi HIS, rakyat menyambut dengan gembira. Mereka berharap kelak anak-anaknya dapat mencapai kepandaian yang dapat dijadikan alat untuk mencapai derajat penghidupan yang sama dengan penghidupan orang-orang Belanda; akan tetapi harapan itu boleh dikatakan sia-sia belaka, karena keluaran HIS pada umumnya masih sangat kurang kepandaiannya untuk meneruskan pelajaran pada sekolah yang lebih tinggi. Kebanyakan anak-anak itu tidak dapat diterima di MULO, karena kurang kepandaiannya, terutama dalam hal bahasa Belanda. Untuk mencari pekerjaan, anak-anak keluaran HIS ini masih sangat mentah. Kebanyakan mereka itu hanya cakap untuk menjabat juru tulis atau juru tulis pembantu dengan gaji yang sama dengan gaji jongos atau koki; apalagi anak-anak yang dididik di HIS itu banyak yang kehilangan tabiat kerakyatan dan merasa lebih tinggi derajatnya dari pada saudara-saudaranya yang tidak pandai berbahasa Belanda.

Di sinilah kekurangan pendidikan dan pelajaran HIS. Anak-anak HIS seperti kehilangan rasa kerakyatan sebab mulai umur

6 tahun mereka dididik berjiwa dan bersikap seperti Belanda. Tiap hari mereka membaca bermacam-macam buku berbahasa Belanda sehingga seolah-olah terpisahkan jiwa kerakyatannya. Seringkali mereka membaca cerita atau mengarang cerita yang mengurangi kepercayaannya dan kebanggaannya terhadap bangsa sendiri. Kalau anak-anak Indonesia setiap hari dididik demikian, mereka itu tidak akan mencintai bangsanya.

Pemerintah tidak dapat memberi kepuasan hati kepada rakyat tentang pengajaran. Hal ini disebabkan pemerintah terlalu banyak urusan dan harus mementingkan keperluan-keperluan golongan lain. Sehubungan dengan itu perlu adanya usaha-usaha untuk :

- (1) Memperbanyak sekolah-sekolah bagi anak-anak di seluruh Indonesia;
- (2) Memperbaiki pelajarannya, hingga anak-anak dengan mudah dapat menuntut pelajaran yang lebih tinggi; dan
- (3) Mendidik anak-anak, agar mereka merasa bangga sebagai anak bangsa Indonesia.

Ketiga hal inilah yang harus dicapai agar rakyat menjadi kuat lahir dan batin untuk menjunjung tinggi derajat bangsanya. Untuk dapat mencapai ketiga pasal tersebut harus ditempuh sistem nasional yaitu sistem pondok atau asrama²⁾.

Sebelum pujangga pendidik Pestalozzi mengadakan sistem sekolahan, caranya mendidik dan mengajar di Eropa memakai sistem biasa, yaitu seperti pondok atau asrama. Sistem Pestalozzi itu ada baiknya, tetapi juga ada buruknya. Pada waktu itu di Eropa ada sistem-sistem baru yang bermacam-macam sifatnya. Ada Dalton sistem, methode Montessori, methode Humanaire, Pythagoras school dan lain-lain. Pada waktu itu sangat banyak haluan baru dalam lapangan pendidikan dan pengajaran.

Semua itu seolah-olah bertujuan memberi kemerdekaan kepada anak-anak agar tumbuh menurut tabiatnya sendiri.

Di Indonesia pada waktu itu Pemerintah Belanda menerapkan sistem Eropa (paksaan). Hasil pendidikan dengan sistem ini adalah anak-anak yang bertabiat kasar, kurang memiliki rasa kemanusiaan sehingga tumbuh rasa individualisme. Sistem pendidikan cara Eropa ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat³⁾. Sistem pendidikan yang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia adalah sistem pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional yang dimaksud adalah suatu sistem pendidikan baru berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini *intelektualisme* harus di jauhi dan harus dipraktekkan sistem mengajar yang disebut sistem among yang menyokong kodrat alam anak-anak didik, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan tuntunan, sehingga berkembanglah hidup lahir dan batin menurut kodratnya. Sistem among mengemukakan dua dasar, yaitu : (1) kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat hidup mandiri dan (2) kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.

Untuk mempraktekkan pendidikan nasional haruslah ada kemerdekaan yang seluas-luasnya; oleh sebab itu jangan suka menerima bantuan yang dapat mengikat diri. Untuk dapat mandiri harus dijalankan cara berbelanja sendiri dengan berdasar atas kekuatan sendiri. Selain itu pengajaran harus tersebar di kalangan rakyat banyak dan jangan hanya diberikan kepada lapisan tertinggi saja. Kekuatan bangsa tidak akan berkembang jika hanya kaum *elite* saja yang terpelajar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantoro mendirikan Na-

tional Onderwijs Instituut Taman Siswa di Yogyakarta. Sesudah Rapat Besar Umum yang pertama di Yogyakarta tahun 1930, nama tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Perguruan Nasional Taman Siswa, berpusat di Matraman Yogyakarta.

Sebelum Perguruan Nasional Taman Siswa, di Yogyakarta telah berdiri suatu himpunan yang dikenal dengan nama Paguyuban Selasa Kliwon. Para anggota himpunan ini berkumpul setiap hari Selasa Kliwon untuk membicarakan cara-cara terbaik untuk mengembangkan semangat kemerdekaan dan untuk memperoleh kebahagiaan perseorangan, bangsa-bangsa dan umat manusia. Kecuali itu himpunan ini juga mempelajari cara-cara pendidikan yang tepat dan baik agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai.

Pengurus Paguyuban Selasa Kliwon terdiri atas : Ki Ageng Suryomataram sebagai ketua, dan Ki Suyatmo Suryokusumo, Ki Probo Widigdo, Ki Prawirowiworo, R.M. Gondotmojo, R. M. Subono, Ki Suryoputro, Sutopo Wonoboyo, Suryodiryo dan Ki Hajar Dewantoro sebagai anggota. Setelah Taman Siswa berdiri, yaitu pada tanggal 3 Juli 1922, Paguyuban Selasa Kliwon tersebut kemudian dibubarkan. Dengan demikian Taman Siswa dapat dianggap sebagai perluasan Paguyuban Selasa Kliwon⁵⁾.

Sebelum Taman Siswa berdiri, sebenarnya bangsa Indonesia sudah ada usaha untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai sarana perjuangan. Gagasan untuk memajukan bangsa dengan pengajaran memang sudah ada, seperti yang diinginkan oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

Dengan mendirikan perguruan Taman Siswa yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengesampingkan pendekatan politik; namun demikian ia dapat mewujudkan keinginan bangsa Indonesia. Usaha untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa kebang-

saan Indonesia merupakan bagian penting dari pergerakan Indonesia dan merupakan dasar perjuangan untuk meningkatkan derajat rakyat. Banyak perkumpulan dan partai-partai memasukkan hal itu dalam programnya.

Pernyataan azas Taman Siswa tahun 1922 berisi 7 pasal yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut.

Pasal pertama: Di sinilah dapat disaksikan sendiri adanya dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Diterangkan bahwa kebebasan yang dimaksudkan bukan kebebasan yang leluasa, tetapi kebebasan yang terbatas. Dengan tegas ayat ke-2 dalam pasal itu mengemukakan tujuan dari hidup merdeka, yaitu hidup tertib dan damai. Bagaimana caranya melaksanakan azas ini terhadap anak-anak? Dalam melaksanakan azas ini, masing-masing harus dapat menentukan sendiri, menyesuakannya dengan keadaan masing-masing. Misalnya ketertiban di dalam klas, yang dicapai dengan kekerasan mengakibatkan "tertib" namun menimbulkan "kegelisahan". Ketertiban semacam itu tidak akan dapat berjalan terus. Kalau si guru tidak ada, pasti kekacauan akan kembali. Selain itu anak-anak tidak terdidik menjadi anak-anak yang berjiwa "Tertib damai". Sebaliknya mereka akan menjadi orang-orang yang bersifat takut dan dihindangi perasaan-rendah diri. Termasuk dalam pasal ini dasar kodrat alam, yang menerangkan perlunya mengganti sistem pendidikan cara lama, yang menggunakan perintah, paksaan dan hukuman. Kemajuan yang murni hanya dapat diperoleh dengan perkembangan kodrati, yang terkenal sebagai "evolusi". Dasar kodrat alam inilah yang kemudian mewujudkan sistem among, yaitu guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan "*tut wuri andayani*" yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada para anak didik untuk berjalan sendiri, tidak terus-menerus dituntun dari depan. Dengan begitu si pamong hanya wajib menyingkir-

kan segala apa yang merintang jalannya anak-anak serta hanya bertindak aktif dan mencampuri gerak-geriknya, jika anak-anak sendiri tidak dapat menghindarkan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam keselamatannya.

Pasal kedua: Pasal ini masih diteruskan dasar kemerdekaan yaitu, bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara anak-anak berpikir. Anak-anak jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Bebaskan batinnya, pikirannya dan tenaganya; itulah syarat-syarat untuk membimbing anak-anak agar menjadi orang-orang yang betul-betul merdeka lahir dan batin.

Pasal ketiga: Pasal ini menyinggung kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Kecenderungan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan hidup dan penghidupan kebarat-baratan menimbulkan pelbagai kekacauan. Sistem pengajaran yang timbul dianggap terlampau mementingkan kecerdasan pikiran, sehingga menyuburkan jiwa *intellectualistis* dengan segala akibat-akibatnya. Dalam pasal ketiga ini dapat dilihat keterangan mengenai dasar kebudayaan, yang selalu nampak dalam segala usaha kita, dan bersama dengan dasar-dasar kodrat pasti akan dapat memberi kepuasan dalam hidup kita.

Pasal keempat: Pasal ini mengandung dasar kerakyatan, dengan maksud mempertinggi pengajaran dan menyebarkan pendidikan dan pengajaran untuk seluruh masyarakat. Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda sudah ada perguruan-perguruan tinggi, tetapi karena sistem pengajaran rakyat masih sangat sederhana. Mahasiswanya kebanyakan berasal dari golongan Belanda dan bangsa asing lainnya.

Pasal ke lima: Inilah azas yang paling penting bagi semua orang yang betul-betul berkeinginan mengejar kemerdekaan

hidup sepenuhnya. Janganlah menerima bantuan yang dapat mengikat diri, baik berupa ikatan lahir maupun batin. Boleh menerima bantuan dari siapa pun asalkan tidak mengikat sedemikian rupa, sehingga mengurangi kemerdekaan dan kebebasan. Pokok dari azas ini yaitu percaya kepada kekuatan sendiri.

Pasal keenam: Berisi pernyataan dalam mengejar kemerdekaan diri dengan jalan keharusan untuk membelanjai sendiri segala usaha. Itulah yang disebut *Zelfbedruipings systeem*, yang bagi golongan-golongan lain, yang ingin hidup merdeka dan bebas, amat sukar untuk menirunya. Kesukaran tadi disebabkan karena untuk menegakkan sistem membelajari sendiri diperlukan keharusan untuk hidup sederhana.

Pasal ketujuh: Pasal ini mengharuskan keikhlasan lahir batin bagi guru-guru untuk mendekati anak-didiknya. Kita harus sanggup mematahkan segala ikatan lahir dan batin, yang mengikat, untuk dapat mengabdikan kepada sang anak⁶⁾.

Dengan berdirinya Taman Siswa, maka timbul berbagai kritik dan dukungan-dukungan. Beberapa pihak mengkritik dan menuduh bahwa Ki Hajar Dewantoro akan mendirikan sekolah komunis. Ada pula yang mengatakan bahwa pernyataan azas Taman Siswa itu berarti memutar jarum jam ke belakang. Ada juga yang mendukung berdirinya Taman Siswa. Semua kritik itu tidak mendapat jawaban dan tanggapan Ki Hajar Dewantoro, bahkan ia menganjurkan semboyan "delapan tahun berdiam diri" dan bekerja sekuat-kuatnya serta tidak boleh berpropaganda.

Kepeloporan Ki Hajar Dewantoro dan Taman Siswa dalam pendidikan nasional, tidak hanya dalam konsepsi, tetapi keberaniannya menempuh jalan baru melaksanakan konsepsi itu, bagaimana pun besarnya rintangan dan halangan, dan bagaimana pun besarnya korban yang harus diberikan untuk melaksanakan. Dalam hal konsepsi, Ki Hajar Dewantoro banyak belajar dari

Montessori, Frobel, Tagore, Dalton, pesantren dan asrama-asrama di zaman kuno.

Sistem pendidikan Taman Siswa besar pengaruhnya dalam perjuangan nasional. Ini dapat dibuktikan dari :

- (1) Berkembangnya Taman Siswa, meskipun mendapat rintangan hebat dari Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu.
- (2) Bahwa pendidikan Taman Siswa mempengaruhi masyarakat dan organisasi-organisasi rakyat dalam perjuangan nasional pada waktu itu.
- (3) Banyaknya pejuang-pejuang nasional yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh Taman Siswa dalam perjuangan kemerdekaan.

Dalam perjuangan itu Ki Hajar Dewantoro merupakan pusat, lebih-lebih pada waktu menghadapi *onderwijs ordonantie* Sekolah Partikelir pada tahun 1932. Bukti nyata bahwa perjuangan menghadapi *Onderwijs ordonantie* itu adalah perjuangan nasional, yaitu bahwa seluruh pergerakan nasional, politik, agama, maupun sosial, serentak berdiri di belakang Ki Hajar Dewantoro⁷⁾.

Di samping mempunyai pernyataan azas yang terdiri dari 7 pasal, Taman Siswa juga mempunyai adat-istiadat yaitu segala kebiasaan yang timbul dengan disengaja atau tidak namun kemudian diukur sebagai peraturan yang sah meskipun tidak tertulis. Pengakuan tadi disebabkan pertamakalinya adat tadi dibenarkan sebagai cara bergaulnya anggota-anggota dalam suatu masyarakat, yang memudahkan timbulnya tertib dan damai dalam masyarakat tadi. Keduakalinya karena adat itu meskipun berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun sangat ditaati; bahkan kadang-kadang sangat dipatuhi dari pada peraturan-peraturan yang tertulis. Tidak tertulisnya adat-istiadat itu

karena orang menganggapnya sebagai barang yang sudah semestinya, jadi tidak perlu ditulis, tidak perlu dibicarakan dan diputus dalam rapat-rapat. Harus disadari bahwa timbulnya adat itu karena dibutuhkan orang, sedangkan peraturan itu biasanya sebagai perintah atau paksaan yang datang dari luar.

Adat-adat apakah yang dapat ditemukan di dalam hidup dan penghidupan masyarakat Taman Siswa? Banyak yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu peraturan tertulis atau ditetapkan sebagai putusan. Adat-adat itu antara lain :

- (1) Tentang sebutan Ki, Nyai, dan Ni. Maksudnya ialah melaksanakan demokrasi dalam hidup pergaulan sehari-hari. Semua anggota keluarga Taman Siswa seharusnya jangan duduk bertingkat-tingkat. Mereka seharusnya melepaskan sebutan-sebutan yang berasal dari zaman feodal seperti : Raden, Raden Mas, Raden Ajeng dan sebagainya. Semuanya dengan ikhlas hati mengganti sebutan-sebutan dengan Ki, Nyi, atau Ni.
- (2) Tentang melenyapkan imbalan majikan buruh. Sebenarnya mewujudkan dasar sosialisme yang dilaksanakan secara damai. Guru-guru Taman Siswa bukan menerima gaji atau upah tetapi nafkah atau biaya hidup yang diperhitungkan menurut kebutuhan hidup yang nyata. Seorang yang berijazah rendah tetapi anaknya banyak, mungkin lebih banyak nafkah yang diterimanya dari pada seorang guru yang berijazah lebih tinggi tetapi belum beristri. Aturan nafkah ini adalah suatu contoh adat tetapi kemudian ditetapkan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh segenap anggota keluarga.
- (3) Tentang urusan keuangan. Hampir seluruh aturan untuk memelihara hidup serta penghidupan kekeluargaan dalam Taman Siswa tidak berdasarkan peraturan-peraturan yang ter-

tulis. Pada mulanya semata-mata timbul sebagai adat kebiasaan, sedangkan dasar-dasarnya demokratis.

- (4) Tentang sebutan ibu dan bapak. Murid-murid menyebut bapak atau ibu terhadap guru-gurunya. Ini tidak saja dianggap perlu sebagai cara formal tetapi sebagai prinsip. Guru-guru yang dianggap sebagai pamong seharusnya sekaligus sebagai bapak atau ibu dari murid-muridnya. Sebutan yang lama tuan, nyonya, nona, ndoro dan sebagainya harus dihilangkan sama sekali.
- (5) Tentang pengertian demokrasi dan *leiderschap*. Yang dimaksudkan bukan apa yang biasanya disebut demokrasi secara Barat dioper secara mentah-mentah, tetapi harus ditempatkan di bawah pimpinan kebijaksanaan.
- (6) Tentang adat kesusilaan. Banyaklah aturan-aturan yang mengenai pelbagai ketertiban dalam hal-hal kesusilaan, yang belum pernah terbentuk sebagai peraturan, namun terjadi dengan sendirinya dan ditaati oleh segenap keluarga Taman Siswa. Kesusilaan tadi ada yang berhubungan dengan hidup kekeluargaan, hidup kemasyarakatan, rumah tangga dan sebagainya serta yang terpenting ialah kesusilaan kewanitaan⁸⁾.

Inilah beberapa contoh tentang adat-istiadat yang ada di dalam hidup dan kehidupan keluarga Taman Siswa. Banyak peraturan-peraturan yang tadinya merupakan adat saja kemudian menjadi peraturan tertulis.

Sesuai dengan sifat pendidikannya yang kultural-nasional, maka Taman Siswa sebagai organisasi pendidikan berbentuk "perguruan", yaitu tempat berguru, tempat murid-murid mendapat pendidikan dan tempat guru bertempat tinggal (*School woning-type*). Dengan demikian gedung perguruan tidak hanya

digunakan untuk keperluan mengajar, melainkan juga sebagai tempat tinggal anak-anak berkumpul dengan gurunya sehabis sekolah. Dengan demikian akan eratlah hubungan batin antara yang mendidik dengan yang dididik, rasa kekeluargaan akan meresap.

Pada umumnya rumah Taman Siswa dipergunakan untuk pertemuan perayaan, rapat, penginapan dan sebagainya. Ruang-ruangan perguruan dibuat praktis, dinding-dinding antara kelas yang satu dengan yang lain dibuat supaya mudah diangkat, sehingga bila perlu, terdapat ruangan yang luas dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Ki Hajar Dewantoro menghendaki kelas-kelas itu berdinding tiga. Bangku-bangku dibuat rata supaya praktis pula dan dapat dipergunakan sebagai meja makan, tempat tidur, panggung dan sebagainya.

Selain guru-guru, juga murid-murid yang berasal dari daerah lain, bertempat tinggal di perguruan yang sudah bersifat "pondok asrama". Pondok-asrama ini menjadi salah satu alat pendidikan di Taman Siswa yaitu penididikan kekeluargaan. Pondok-asrama untuk anak laki-laki disebut "Wisma Priya" dan untuk anak-anak perempuan disebut "Wisma Rini". Mereka berada di bawah pimpinan guru-guru sehingga sifat kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam guru-guru sehingga sifat kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam Wisma Rini diperhatikan juga soal-soal kepuptrian, seperti memasak, menjahit, menyulam, memelihara kebun dan lain-lain. Dalam hal ini selalu diusahakan agar sifat ketimuran tetap terpelihara. Taman Siswa mempunyai keyakinan bahwa dengan sistem inilah penyelenggara pendidikan akan lebih berhasil. Ki Hajar Dewantoro juga berpendapat dengan cara pondok-asrama itu dapatlah ketiga lingkungan pendidikan bekerja bersama. Untuk kesempurnaan pendidikan, ketiga lingkungan pendidikan bekerja bersama. Untuk kesempurnaan pen-

didikan, ketiga lingkungan yaitu keluarga, perguruan dan perkumpulan pemuda menjadi satu kesatuan. Itulah yang dinamakan sistem Tri Pusat⁹⁾. Mengingat dasar pendidikan dan pembatasan umur, maka Taman Siswa memberi nama untuk bagian-bagian perguruannya sebagai berikut :

- (1) Taman Indriya, bagi anak-anak yang berumur 5–6 tahun.
- (2) Taman Anak (kelas I–III SD), bagi anak-anak yang berumur 6–7 tahun dan 9–10 tahun.
- (3) Taman Muda (kelas IV–VI SD), bagi anak-anak yang berumur 10–11 tahun dan 12–13 tahun.
- (4) Taman Dewasa (SMP)
- (5) Taman Madya (SMA)
- (6) (a) Taman Guru B I, sekolah guru untuk menyiapkan calon guru Taman Anak dan Taman Muda (1 tahun sesudah Taman Dewasa).
- (b) Taman Guru B II (1 tahun sesudah Taman Garu G I).
- (c) Taman Guru B III (1 tahun sesudah Taman Guru B II) menyiapkan calon Guru Taman Dewasa.

Pada Taman Guru B III itu diadakan defferensiasi yaitu:

- Bagian A (Alam/Pasti), bagi mereka yang akan mengajar dalam mata pelajaran Alam/Pasti.
- Bagian B (Budaya), bagi mereka yang akan mengajar Bahasa, Sejarah dan sebagainya.

- (d) Taman Indriya, khusus untuk gadis-gadis tamatan Taman Dewasa atau sekolah lanjutan lainnya SMP/SKP), yang ingin menjadi guru pada bagian Taman Indriya. Lama pelajaran 2 tahun.¹⁰⁾

Pada waktu pelajaran Taman Siswa sengaja mempergunakan nama-nama yang mengandung sejarah, dengan maksud menunjukkan sifat pertentangan kepada nama-nama yang berbau kolonial. Tidak pantas Taman Siswa menamakan bagian-bagian

perguruannya HIS Taman Siswa, MULO Taman Siswa, Kweek-school Taman Siswa.

Cabang Taman Siswa yang mempunyai beberapa bagian perguruan tetap merupakan satu perguruan, tetapi bukan merupakan sekolah yang berdiri sendiri. Keuangan perguruan menjadi satu. Keperluan alat-alat, perumahan diselenggarakan oleh satu organisasi. Guru Taman Madya tidak merasa kedudukannya lebih tinggi dari pada guru Taman Muda. Guru Taman Muda yang mempunyai kecakapan dan kesanggupan dapat pula mengajar di Taman Dewasa. Kepandaian dan ijazah tidak boleh dipergunakan untuk menunjukkan golongan-golongan guru di Taman Siswa.

Pada zaman penjajahan, Taman Siswa tetap menolak pemberian subsidi dari pemerintah, sebab bantuan itu akan mengikat dan akan melemahkan perjuangan melawan pendidikan kolonial dan bertentangan dengan Azas Taman Siswa. Bantuan apa pun akan ditolak jika akan mengurangi kemerdekaan.¹¹⁾ Hal ini merupakan bukti bahwa Taman Siswa dapat membiayai sendiri segenap usahanya. Dengan demikian juga dapat ditanamkan rasa percaya diri dan rasa kemerdekaan.

Dasar Taman Siswa adalah kultural nasional; oleh sebab itu pelajaran nasional harus diberikan dalam suasana yang tidak boleh bertentangan dengan haluan itu. Setiap mata pelajaran diberikan sebagai bagian dari peradaban bangsa. Di mana perlu juga harus memperbaiki segala persyaratan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Para pemuda tidak boleh lagi terkekang oleh ikatan tradisi dan konvensi-konvensi yang dapat menghambat pesatnya kemajuan bangsa.

Semua mata pelajaran harus dapat membangkitkan perasaan cinta kepada tanah air dan bangsa. Untuk itu penting sekali nyanyian-nyanyian nasional, cerita-cerita tentang pahlawan bangsa, mengenal keindahan tanah air dengan jalan darma wisata dan lain-lain.

Tidak hanya pendidikan kecerdasan, tetapi pengajaran kesusastraan lebih mendapat perhatian, demikian pula pendidikan kebudayaan yang bersifat kebangsaan. Murid-murid mempelajari berbagai kesenian; ada yang melukis, belajar musik, menari,

menabuh gamelan, dan lain-lain sesuai dengan pembawaan masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kesenian kebangsaan dapat diajarkan dalam kelas atau kepada umum, dan penting untuk menghaluskan kesusilaan dan meneguhkan semangat kebangsaan.

Di samping sebagai bahasa persatuan, Bahasa Indonesia juga diwajibkan menjadi bahasa pengantar di sekolah, sedangkan bahasa daerah diajarkan secukupnya di daerah masing-masing. Bahasa asing diberikan untuk keperluan melanjutkan pelajaran dan untuk menambah hubungan dengan luar negeri. Ki Hajar Dewantoro menegaskan, bahwa semua bahasa asing hendaklah diajarkan di sekolah, namun perlu dijaga agar mereka tidak memiliki jiwa kebarat-baratan. Sejarah dan ilmu bumi tanah air sangat dipentingkan, sebab di situ banyak hal-hal yang dapat dipakai untuk membangkitkan rasa kebangsaan.¹²⁾

Dalam rangka kelengkapan pengajaran dan pendidikan, Taman Siswa menggunakan semboyan-semboyan dan lambang-lambang. Hal ini dipandang perlu agar dapat menambah kesempurnaan perkembangan kepribadian anak, bukan saja pikirannya tetapi juga perasaannya. Semboyan-semboyan dan lambang-lambang itu diberikan dalam bentuk sastra, lukisan atau kesenian lainnya, sehingga anak-anak mudah mengingatnya. Semboyan-semboyan dan lambang-lambang tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

(1) Lawan Sastra Ngesti Mulia

Inilah semboyan Taman Siswa yang pertama dan yang menjelaskan maksud berdirinya Taman Siswa pada tahun 1922. Arti semboyan tersebut ialah "dengan kecerdasan jiwa menuju ke arah kesejahteraan."

(2) Suci Tata Ngesti Tunggal

Menjelaskan terjadinya persatuan Taman Siswa pada tahun 1923. Arti "semboyan tersebut ialah dengan Kesucian batin dan teraturnya hidup lahir, kita mengejar kesempurnaan". Ini dapat juga diartikan kesucian dan ketertiban menuju kesatuan.

(3) Tut Wuri Andayani

Arti semboyan tersebut ialah mengikuti dari belakang sam-

bil memberi pengaruh” maksudnya, jangan menarik-narik anak dari depan, biarkan mereka mencari jalan sendiri, kalau anak-anak salah jalan, barulah si pamong boleh bertindak untuk mencampuri. Kemajuan yang sejati hanya dapat diperoleh dengan perkembangan kodrati, tidak perlu mempergunakan perintah, paksaan dan hukuman.

Dasar kodrat alam pikiran itu berpadu dengan dasar kemerdekaan kemudian mewujudkan ”sistem among”. Tugas guru sebagai pamong ialah tetap mempengaruhi anak-anak didik dengan memberi kesempatan kepadanya untuk berjalan sendiri, tidak terus-menerus dituntun dari depan. Pamong hanya wajib menyingkirkan segala sesuatu yang merintang jalan anak-anak, jika mereka tidak dapat menghindarkan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam keselamatannya.

- (4) Kita berhamba kepada Sang Anak
Maksud semboyan tersebut ialah bahwa pendidik dengan ikhlas dan tidak terikat oleh apa pun mendekati anak didik untuk berkorban diri terhadapnya, jadi bukan murid untuk guru, tetapi sebaliknya.
- (5) Rawe-rawe rantas malang-malang putung, artinya ”semua yang menghalangi akan hancur. Semboyan ini dipakai untuk memperteguh kemauan.¹³⁾

7.2 Perkembangan Taman Siswa

Setelah perguruan Taman Siswa berdiri, maka beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 31 Desember 1922, para tokoh Taman Siswa, yaitu Ki Hajar Dewantoro, RM. Sutatmo Suryokusumo, RMH. Suryoputro dan Ki Pronowidigdo mengadakan pertemuan untuk menentukan sikap dan program kerja selanjutnya. Hal ini disebabkan tertariknya masyarakat pada Taman Siswa Banyak permintaan-permintaan dari daerah yang ditujukan kepada pendiri Taman Siswa agar di daerahnya didirikan Taman Siswa.

Utuk lebih menyempurnakan jalannya Taman Siswa, maka pada tanggal 6 Januari 1923 dibentuklah suatu majelis yang bernama *Instituutraad* yang anggota-anggotanya terdiri atas RM

Sutatmo Suryokusumo sebagai ketua, RMH. Suryoputro sebagai ketua dua, Ki Hajar Dewantoro sebagai panitia umum, dan Ki Pronowidigdo, Ki Sutopo Wonoboyo, BRM Subono, R Ruji-to dan M Ng Wirjodiharjo sebagai anggota. Majelis juga mengumumkan, bahwa Taman Siswa adalah suatu usaha rakyat untuk mengadakan pendidikan dan pengajaran bersifat nasional dan bersifat wakaf, yaitu semacam yayasan, tetapi tidak terdaftar pada Pengadilan Agama seperti halnya dengan wakaf-wakaf biasa yang diwajibkan mendaftar.¹⁴⁾ Taman Siswa tidak mau terikat oleh peraturan-peraturan Islam. Organisasinya memang tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; maksudnya agar dapat bebas untuk mencari jalan yang selaras dengan maksud dan tujuan Taman Siswa. Untuk menjaga ketertiban umum, Ki Hajar Dewantoro diberi hak penuh.

Sejak itu mulai berdatangan orang-orang dari luar Yogyakarta yang minta agar didirikan perguruan Taman Siswa di daerahnya, atau minta supaya sekolahnya dilebur menjadi Taman Siswa. Di antaranya ada yang melamar untuk menjadi guru Taman Siswa.

Pada tanggal 20 – 22 Oktober 1923 Taman Siswa mengadakan konferensi di Yogyakarta yang dikunjungi oleh utusan-utusan dari perguruan-perguruan Taman Siswa. Dalam konferensi tersebut diumumkan, bahwa Taman Siswa adalah "badan wakaf", dan diterangkan pula dengan sejelas-jelasnya tentang azas-azas Taman Siswa, sendi-sendi pendidikan serta rencana pelajarannya. Kecuali itu sebagai badan wakaf, Taman Siswa telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, sehingga *Instituut raad* diperluas menjadi *Hoofdraad* (sekarang Majelis Luhur). Adapun pengurusnya terdiri atas beberapa orang yang mendapat kepercayaan dari bermacam-macam golongan dan aliran dalam masyarakat. Susunan Majelis Luhur yang pertama itu terdiri atas: RM. Sutatmo Suryokusumo sebagai ketua, RMH Suryoputro sebagai ketua dua Ki Hajar Dewantoro sebagai panitera umum, Ki Pronowidigdo, M Ng Wiryodiharjo,

R. Rujito, Mr Suyudi, RM Suryoadiputro sebagai anggota, dan Ki Prawirowiworo, sebagai penasihat.

Anggota-anggota Taman Siswa di luar Yogyakarta atau disebut *Gedelegeerden* terdiri atas: Ki Sutopoi Wonoboyo dari Bogor, Ir Soekarno dari Bandung (Presiden Republik Indonesia pertama), Panuju Darmobroto, Mr. M. Besar dari Tegal, Ki Gokrodirjo, Ki Harjosusastro dari Semarang, Sutejo Brojo-nagoro dari Sala, Sudyono Joyoprayitno, Ki Notodiputro, dr. Suwarno, Mr. Ali Sastroamijoyo dari Surabaya, Ki Puger dari Malang dan Dr. Mr. Gondokusumo dari Pasuruan.¹⁵⁾

Sesudah konferensi ternyata perguruan Taman Siswa berkembang dengan pesat tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Sumatra dan Kalimantan. Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta seperti sudah dikatakan di atas menurut perjanjiannya dengan RM. Suryopranoto, hanya membuka bagian Taman Kanak-kanak dan Taman Guru saja, tetapi terdorong oleh banyaknya anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri yang ingin masuk Taman Siswa, maka dibuka bagian Taman Muda. Selanjutnya karena anak-anak yang telah tamat dari Taman Muda ingin juga melanjutkan pelajarannya, sedang untuk masuk di sekolah lanjutan negeri tidak mudah syarat-syaratnya, ditambah pula banyak permintaan orang tua murid yang telah tamat dari HIS minta supaya Taman Siswa membuka sekolah lanjutan sendiri, maka pimpinan Taman Siswa memenuhi permintaan tersebut.

Pada tanggal 7 Juli 1924 Taman Siswa di Yogyakarta membuka bagian MULO Kweekschool. Lama pendidikannya empat tahun. Sekolah ini merupakan lanjutan dari Taman Muda atau yang sederajat. Maksud dan tujuan dibukanya bagian tersebut selain memenuhi keinginan masyarakat, juga agar Taman Siswa mempunyai guru-guru didikan sendiri untuk bagian-bagian di bawahnya. Jumlah siswa klas pertama pada permulaan tahun ajaran baru sebanyak 55, lima di antaranya perempuan berasal

dari berbagai daerah di Jawa dan di luar Jawa. Taman Siswa kemudian mengadakan pondok atau asrama untuk para siswanya. Guru-gurunya pada waktu itu antara lain Ki Hajar Dewantoro (pengajar paramasastra Belanda, ilmu hayat, tatane-gara, pengetahuan umum dan ilmu mendidik); RMH. Suryopu-tro (pengajar bahasa Inggris, ilmu ukur, ilmu alam); M. Ng. Wiryodiharjo (pengajar bahasa Jawa dan Indonesia), Kunto (pengajar penyanyi Jawa); dan Ki Pronowidigdo (mengajar Babat Tanah Jawa).

Dengan dibukanya bagian MULO Kweekschool, maka ba-nyak orang mengejek Taman Siswa. Dikatakan bahwa usaha Taman Siswa akan berhenti di tengah jalan. Ejekan-ejekan tersebut tidak ditanggapi Taman Siswa, bahkan dianggap se-bagai cambuk untuk bekerja lebih giat. Naluri pergerakan pada waktu itu sudah ada pula di antara para siswa. Dalam satu klas ada dua kelompok siswa yaitu yang menamakan dirinya "*Kla-verblad van vieren*" di bawah pimpinan Sugondo Kartoprojo dan. "*Doodskop*" yang dipimpin Sundhoro Notodiputro. Di samping itu didirikan pula Kepanduan yang tidak berkostum. Untuk mempersatukan kedua perkumpulan tersebut, lalu di-dirikan *Sediyo Kang Utomo* (SKN) yang dipimpin oleh Suroso. Makin lama perguruan Taman Siswa makin besar, jumlah siswa-nya makin bertambah banyak.¹⁶⁾

Pada akhir tahun pengajaran 1927/1928, lulusan bagian MU-LO Kweekschool ikut ujian AMS Negeri. Dari 9 siswa lulus 5 siswa, berarti lebih dari 50%; suatu bukti prestasi yang baik. Pada bulan Agustus 1927 Rabindranath Tagore dari Santi Ni-keetan India dengan sekretarisnya Dr. Chatterjee yang sedang berkunjung ke Jawa mengunjungi Taman Siswa. Ia tahu bahwa sistem pendidikan Taman Siswa yang baru berusia 5 tahun itu tidak jauh bedanya dengan perguruanannya.¹⁷⁾

Pada tahun 1926 nama MULO Kweekschool dipisah yaitu bagian MULO atau Taman Dewasa dengan lama belajar 3 tahun

(sesudah Taman Muda) dan bagian Kweekschool atau Taman Guru dengan lama pendidikan satu tahun (sesudah tamat Taman Dewasa). Di lingkungan perguruan Taman Siswa, para siswa diizinkan untuk mendirikan perkumpulan, sebab dengan aktifnya para siswa di dalam perkumpulan, para siswa sudah terlatih untuk bekerja, sehingga sesudah tamat mereka dapat bekerja tanpa bergantung pada orang lain.

Pada tahun 1927 para siswa Taman Siswa mendirikan perkumpulan MULO Kweekschool Vereniging Taman Siswa (MK-VTS). Sugondo diangkat menjadi ketuanya. Di luar perguruan Taman Siswa para siswa juga aktif berorganisasi. Pada waktu itu semangat berorganisasi sejalan dengan bangkitnya pergerakan Indonesia yang berdasarkan kebangsaan. Pada tanggal 7 Agustus 1931 MULO Kweekschool Vereniging Taman Siswa diganti namanya menjadi Pemuda Taman Siswa. Pada tanggal 28 Juni 1933 Pemuda Taman Siswa diganti namanya menjadi Perikatan Pemuda Taman Siswa dan pada tanggal 27 Juni 1934 diganti lagi menjadi Persatuan Pemuda Taman Siswa.¹⁸⁾ Persatuan Pemuda Taman Siswa ini mengadakan kegiatan kemasyarakatan, antara lain menyelenggarakan pesta sekolah, kerja bakti dan lain-lain. Wadah ini besar manfaatnya untuk melatih mereka bekerja untuk masyarakat. Guna menghimpun murid-murid yang sudah tamat belajar dibentuk juga Persatuan Bekas Murid Taman Siswa (PBMTS).

Untuk mengurus kewanitaan, Taman Siswa membentuk badan kewanitaan dengan nama Badan Wanita Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 31 Maret 1931. Anggota-anggotanya adalah anggota perguruan wanita dan istri guru; jadi Wanita Taman Siswa ini hanya khusus untuk anggota perguruan Taman Siswa saja. Wanita Taman Siswa bertugas memberi nasihat dan membina pendidikan wanita, misalnya mengenai urusan kesusiilaan. Ternyata Wanita Taman Siswa tidak hanya bekerja ke dalam Taman Siswa saja, tetapi juga ke luar. Buktinya Wanita Ta-

man Siswa selalu bekerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Setiap diadakan Kongres Wanita Indonesia pusat Wanita Taman Siswa tentu mengirimkan wakilnya.

Seperti telah dikatakan di atas, jumlah perguruan Taman Siswa makin lama makin bertambah banyak. Perkembangan Taman Siswa yang begitu pesat tidak hanya menggembirakan hati para pendirinya tetapi seringkali juga menyusahkan, sebab tidak sedikit di antara mereka yang belum tahu akan Taman Siswa, lalu mendirikan cabang Taman Siswa begitu saja tanpa sepengetahuan Taman Siswa Yogyakarta. Akibatnya ada beberapa Taman Siswa yang hanya namanya saja, tetapi isinya sangat berlainan, oleh karena itu maka diusulkan agar segera diadakan Kongres Nasional Taman Siswa atau Rapat Besar Umum.

Kongres nasional pertama atau Rapat Besar Umum Taman Siswa yang pertama diadakan pada tanggal 6 sampai dengan 13 Agustus 1930 di perguruan pusat Taman Siswa di Yogyakarta. Para peserta datang dari 52 buah cabang di seluruh Indonesia, yaitu 25 dari Jawa Timur, 12 dari Jawa Tengah, 9 dari Jawa Barat, 3 dari Sumatra, 3 dari Kalimantan. Kongres nasional pertama dan berjalan dengan lancar dan berhasil mencetak keputusan-keputusan yang tidak sedikit bagi kepentingan Taman Siswa seluruhnya. Kongres nasional pertama telah menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut.

- (1) Menerima baik alasan-alasan berdirinya Taman Siswa.
- (2) Mengemukakan prinsi-prinsip pedoman pendidikan Taman Siswa, dengan sendi-sendi pendidikannya sebagai berikut:
 - (a) Taman Siswa bertujuan mengembangkan pendidikan nasional berlandaskan ketujuh prinsip pokok yang diterima baik dalam kongres tahun 1923.
 - (b) *National Onderwijs Instituut* diganti menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa berpusat di Yogyakarta

- (c) Taman Siswa merupakan suatu yayasan yang berdiri sendiri
 - (d) Taman Siswa membentuk wadah kesatuan di mana setiap cabang diintegrasikan ke dalamnya di bawah bimbingan perguruan pusat
 - (e) Taman Siswa merupakan suatu keluarga, di mana Ki Hajar Dewantoro menjadi bapak dan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai.
 - (f) Tiap-tiap cabang Taman Siswa wajib membantu cabang-cabang lainnya atau berprinsip saling bahu-membahu
 - (g) Taman Siswa wajib diurus sesuai dengan demokrasi. akan tetapi demokrasi tidak boleh mengganggu ketertiban dan perdamaian Taman Siswa sebagai keseluruhan.
- (3) Memilih anggota-anggota Majelis Luhur, yang anggota-anggota adalah sebagai berikut :

Badan Pusat terdiri atas :

Ketua I : Ki Hajar Dewantoro

Ketua II : Ki Pronowidigdo

Ketua III : Ki Cokrodirjo

Anggota-anggota: Sadikin, Puger, Kodirun, Safindin Suryoputro, Sarmidi Mangunsarkoro, Sudiyo-no Joyoprayitno.

Sekretariat

Ketua : Ki Hajar Dewantoro

Komisaris-komisaris : Sudarminto, Sukemi dan Sayogo

Dewan Penasihat

: Seksi Pendidikan:
Ki Harjosusastro

Seksi Administrasi:

Rujito

Seksi Hukum :

Suyudi

Dewan Daerah : Jawa Barat : Ki Sarmidi Mangunsarkoro,
Jawa Tengah : Sukemi, Jawa Timur: Jo-
yoprayitno dan Safrudin Suryoputro.¹⁹⁾

Sesudah Kongres Nasional pertama itu, Taman Siswa menarik garis yang lebih terang lagi menuju ke dasar kebangsaan. Tenaga guru Taman Siswa tidak lagi tergantung pada pihak luar, sebab di Yogyakarta telah didirikan Taman Guru pusat di Malang, Surabaya, Semarang, Jakarta dan Medan juga sudah didirikan sekolah-sekolah guru untuk sekolah-sekolah rendah. Pada waktu itu tidak sedikit lulusan dari perguruan Taman Siswa yang dapat melanjutkan pelajarannya di India dan Philipina.

Mereka belajar di luar negeri bukan karena mereka tidak percaya dengan pendidikan yang diadakan di Indonesia, tetapi karena mereka di sana dibebaskan dari ujian masuk meskipun mereka harus mengikuti masa percobaan.

Sesudah Kongres Nasional pertama tahun 1930 itu, Taman Siswa mendirikan Taman Guru untuk mendidik calon-calon guru Taman Anak dan Taman Muda serta memberi beberapa pelajaran di Taman Dewasa. Adapun yang diterima menjadi murid yaitu mereka yang lulus dari Taman Dewasa atau yang sederajat. Lama pendidikan 2 tahun, kemudian diubah menjadi 3 tahun. Pada tahun kedua Taman Guru membuka *Normaalschool* sejajar dengan MULO, yang lama pendidikannya 3 tahun dan Kursus Guru yang lama pendidikannya tidak ditentukan; ada yang 3 tahun atau 1 tahun. Kursus guru ini hanya diadakan pada waktu itu saja, karena hasilnya tidak memuaskan.

Pada tanggal 13 – 17 Januari 1932 Taman Siswa mengadakan rapat besar yang pertama di Yogyakarta. Pada waktu itu pergerakan nasional mengalami perselisihan paham, sebagai akibat peristiwa 29 Desember 1929. Pada tanggal itu Ir. Soekarno Gatot Mangkuprojo, Maskun Sumadirejo Supriadinoto ditangkap oleh polisi Belanda.

Penangkapan atas pemimpin-pemimpin PNI, terutama Ir. Soekarno yang merupakan penggerak PNI, ternyata merupakan pukulan yang hebat terhadap PNI. Pada Kongres Luar Biasa Kedua di Jakarta, diambil keputusan pada tanggal 25 April 1931 untuk membubarkan PNI karena keadaan memaksa. Pembubaran ini menimbulkan perpecahan di kalangan pendukung-pendukung PNI, yang masing-masing pihak Partai Indonesia (Partindo) oleh Mr. Sartono cs, dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) oleh Moh Hatta dan St. Syahrir cs. Perbedaan antara keduanya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan persoalan pembaharuan sosial. Mereka setuju bahwa kemerdekaan politik adalah tujuan perjuangan antara yang harus dicapai dengan taktik non-kooperasi, tetapi apabila PNI Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, maka Partindo percaya bahwa organisasi massa dengan aksi massa adalah senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan.²⁰⁾

Dengan terjadinya pertentangan pendapat tersebut, maka Taman Siswa juga ikut terseret, karena anggota-anggota Taman Siswa juga ada yang menjadi anggota Partindo maupun PNI Baru. Hal ini terjadi sebab anggota-anggota Taman Siswa itu bebas dalam keyakinan berpolitik dan beragama. Di dalam Taman Siswa mereka dapat bersatu dalam membicarakan masalah pendidikan dan pengajaran, tetapi di luar Taman Siswa dalam mempertahankan keyakinan berpolitik mereka sering bertentangan. Pada waktu itu orang fanatik dengan pakaian *swadesi* yang digerakkan oleh Partindo; karena itu dalam rapat besar tersebut ada sebagian peserta yang memakai pakaian seadanya, misalnya memakai peci dari tikar, baju dan sarung tenun muharan, dan tidak memakai sandal maupun sepatu.

Rapat Besar ini dikunjungi 92 cabang dan 23 kandidat cabang dari 135 daerah yang ada Taman Siswanya. Putusan putusan penting yang diambil adalah sebagai berikut.

(1) Menerima pokok-pokok daftar pelajaran Mangunsarkoro;

pelajaran yang berbau kolonial harus lenyap dari alam Taman Siswa, terutama pada bagian Taman Anak.

- (2) Mensahkan berdirinya Taman Siswa.
- (3) Karena kepentingan yang mendesak untuk keperluan cetak-mencetak, maka Taman Siswa membeli peralatan percetakan, untuk keperluan ini setiap anggota perguruan dipungut bantuan sedikitnya Rp 1,—.
- (4) Mulai dipikirkan "pensiun fonds".
- (5) Sudah dianggap perlu dan bersedia mengadakan Kongres Perguruan Nasional.
- (6) Badan-badan Taman Siswa di Jawa Timur diperkenankan mengadakan aksi yang layak untuk menolak segala rintangan terhadap Taman Siswa.²¹⁾

Susunan Majelis Luhur yang terakhir (pada masa penjajahan Belanda) untuk periode 1939—1942 yaitu :

Pemimpin Umum	:	Ki Hajar Dewantoro
Badan Pemimpin	:	Ketua : Suwandhi
	:	Panitera : Ki Sutopo Wonoboyo
	:	Anggota : Ki Cokrodirjo
Badan Pemangku Azas	:	Ketua : Nyi Hajar Dewantoro
	:	Panitera : Nyi Sukemi
	:	Anggota : Ki Pronowidigdo
Badan Pemangku Benda	:	Ketua : Sudarminto
	:	Panitera : Sayoga
	:	Anggota : Ni Surip

Badan.Pengurus :

- | | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| (1) Organisasi | : | Ketua : Sukemi |
| | : | Panitera : Mohammad Tauchid |
| | : | Anggota : Mr. Suyudi |

(2) Pendidikan dan

Pengajaran

: Ketua : Ki Hajar Dewantoro
 Panitera : Sindusawarno
 Anggota : S. Mangunsarkoro
 dan Puger.²²⁾

Pada akhir masa penjajahan Belanda, Taman Siswa mempunyai 199 cabang dengan 207 perguruan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan $\pm$ 20.000 orang murid dan 650 orang guru.²³⁾

Pada permulaan pemerintahan Bala Tentara Jepang di Indonesia, "orang-orang" Taman Siswa banyak yang menaruh kepercayaan kepada Jepang. Mereka beranggapan bahwa kemerdekaan sudah terwujud, sehingga Taman Siswa tidak perlu ada lagi. Perguruan Taman Siswa diserahkan pada pemerintah, sedangkan "orang-orang" Taman Siswa menjadi pegawai negeri. Ada yang murid-muridnya ditinggalkan guru-gurunya menjadi "orang-orang" pemerintah. Ada yang boleh buka terus dan ada pula yang ditutup oleh pihak pemerintah.

Taman Siswa menaruh kepercayaan kepada pemerintah Bala Tentara Jepang karena Jepang mengatakan bahwa kedatangannya itu untuk membebaskan penderitaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia maka Jepang mengikutsertakan tokoh-tokoh Indonesia yang duduk dalam pemerintahan dan memegang jabatan di berbagai bidang, sehingga tidak ada kecurigaan timbulnya penindasan. Semuanya diterima tanpa kecurigaan, tetapi harapan datangnya kesejahteraan masih sangat jauh, bahkan yang dihadapi sekarang adalah masa penindasan total yang lebih kejam dari pada sebelumnya.

Pusat Taman Siswa di Yogyakarta pada waktu Jepang masuk hanya libur 10 hari dan selanjutnya buka terus. Pada waktu itu Taman Siswa kewalahan untuk menerima murid, sehingga pada tahun ajaran baru jumlah murid lebih-kurang dari 3.500

anak dibagi menjadi 69 klas, yaitu bagian Taman Indriya, Taman Anak dan Taman Muda 13 klas, bagian Taman Dewasa 42 klas, Taman Madya 7 klas dan Taman guru juga 7 klas dengan 76 anggota perguruan. Karena kekurangan ruangan, maka terpaksa mendirikan klas-klas dari bambu beratap kajang, tetapi kebesaran Taman Siswa Yogyakarta tidak dapat berlangsung lama karena adanya peraturan tentang sekolah partikelir.

Pada masa pendudukan Bala Tentara Jepang, susunan Majelis Luhur juga mengalami perubahan yaitu: Ki Hajar Dewantoro sebagai pemimpin umum, Sudarminto sebagai ketua, Moch Tauchid sebagai panitera, Sayoga sebagai bendahara, dan Nyi Hajar Dewantoro, Ki Pronowidigdo, Wardoyo, Subroto dan Surip, sebagai anggota.

Susunan Majelis Ibu Pawiyatan, terdiri atas: Ki Hajar Dewantoro sebagai pemimpin umum, Nyi Hajar Dewantoro sebagai wakil pemimpin umum, Ki Pronowidigdo dan Sudarminto sebagai pimpinan keluarga. Badan Pengajian terdiri atas: Subroto sebagai ketua dan Sangkoyo sebagai panitera. Panitera terdiri atas: Sayogo sebagai ketua merangkap sebagai ketua perbendaharaan, Moch Tauchid sebagai panitera, dan Aujanarko sebagai anggota²⁴).

Pada tanggal 7 September 1944 diumumkan, bahwa bangsa Indonesia akan mendapat kemerdekaan di kelak kemudian hari, maka sejak tanggal 7 September 1944 itu bangsa Indonesia diizinkan mengibarkan bendera kebangsaan "Merah Putih" di samping bendera kebangsaan Jepang "Hinomaru" dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada tanggal 11 September 1944 Majelis Luhur mengirim telegram kepada Ir. Soekarno di Jakarta yang menyatakan bahwa keluarga besar Taman Siswa siap sedia menerima kewajiban menyongsong Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 1 Desember 1944 Ki Hajar Dewantoro diangkat menjadi *Naimubu Bunkyokyuku Sanjo*. Karena pengang-

katan ini, maka Ki Hajar Dewantoro harus menetap di Jakarta; karena itu pada tanggal 24 hingga 26 Desember 1944 diadakan rapat besar yang ke-8 di Yogyakarta untuk mengatur tugas-tugas selanjutnya setelah Ki Hajar Dewantoro menetap di Jakarta. Adapun susunan Majelis Luhur kemudian berubah menjadi: Sudarminto sebagai ketua, Moch Tauchid sebagai panitera, Sayoga sebagai bendahara, dan Ki Pronowidigdo, Wardoyo, Subroto, Darmobroto dan Surip sebagai anggota.

Di samping itu ada "Majelis Pengetua" yang terdiri atas: BRM Subono, Nyi Hajar Dewantoro, Ki Cokridirjo, Ki Pronowidigdo, Ki Sutopo Wonoboyo dan "Majelis Pertimbangan" yang terdiri: S. Mangunsarkori, Suwandhi, Sukemi, Nyi S Sukemi, Osa Maliki, Cokrosukarto, Mr. Suyudi, Sindusawarno, Puger, S. Joyoprayitno dan Bp Suparto.

Pada waktu itu Taman Siswa mempunyai 48 cabang dengan 9.411 murid dan 228 guru di Jawa dan 12 cabang di luar Jawa.²⁵⁾ Keadaan ini terus berlangsung sampai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

7.3 Pengabdian Taman Siswa Bagi Masyarakat

Perkembangan perguruan Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantoro makin hari semakin bertambah pesat, sehingga menimbulkan kemarahan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam waktu sepuluh tahun saja perluasan pengaruh pendidikan nasional Taman Siswa sudah sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Dengan perkembangan yang cepat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir karena akan membahayakan pendidikan kolonial yang diusahakannya. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghalang-halangi perkembangan perguruan Taman Siswa, namun berkat keuletan dan dedikasi yang tinggi dari para pamongnya, semua rintangan dapat diatasinya.

Perguruan Taman Siswa yang bertipe pendidikan "Perguruan dan rumah guru bersama-sama" (*Schoolwoningtype*), dan yang Ki Hajar Dewantoro bertempat tinggal di situ, dikenakan pajak rumah tangga. Ki Hajar Dewantoro menolak membayar pajak tersebut, sebab ia beserta keluarganya hanya menempati dua kamar yang menurut taksiran tidak sampai dikenakan pajak rumah-tangga. Bagian lain dari tempat itu kepunyaan perguruan yang seharusnya bebas dari pajak tersebut.

Pada tanggal 19 Juni 1924, waktu pelajaran masih berlangsung, barang-barang Taman Siswa, di antaranya bangku, meja, papan tulis dan lain-lain dilelang di muka umum. Meskipun barang-barang tersebut dibeli orang, tetapi kemudian mereka mengembalikannya lagi kepada Taman Siswa. Atas tindakan pelelangan tersebut, Ki Hajar Dewantoro mengajukan protes kepada yang berwenang. Dengan keputusan Kepala Pemerintah Kadipaten Pakualaman tanggal 25 September 1924 No.. 2414/4 2415/4, dan 2416/4, maka pajak rumah tangga untuk Ki Hajar Dewantoro untuk tahun 1922 hingga 1924 yang masing-masing berjumlah F 76,80; F 54, dan F 54 dihapuskan.²⁶⁾

Rintangan berikutnya berupa "*Onderwijs Ordonantie Sekolah Partikelir*" atau lebih dikenal juga "*Ordonansi Sekolah Liar*" yang diumumkan pada tanggal 17 September 1932. Isi ordonansi tersebut ialah:

- (1) Pendirian sekolah partikelir termasuk Taman Siswa harus minta izin.
- (2) Bagi guru-guru sekolah partikelir tersebut sebelum mengajar harus memilik izin terlebih dahulu.
- (3) Isi pelajaran harus sesuai dengan sekolah negeri.

Jiwa ordonansi itu jelas bertentangan dengan perkembangan masyarakat yang sangat haus akan pendidikan, karena Pemerintah Hindia Belanda tidak cukup menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat. Justru sekolah-sekolah swastalah hakekatnya

membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan. Semua badan pendidikan swasta merasa dirugikan dan ditahan untuk berkembang, terutama perguruan Taman Siswa. Taman Siswa merasa bahwa ordonansi itu terutama ditujukan untuk menahan perkembangannya.

Yang sangat mengherankan ialah bahwa dengan dikeluarkannya ordonansi tersebut tidak ada seorang pun di antara para anggota *Voksraad* yang memprotes, meskipun mereka mengetahui bahwa ordonansi itu telah ditolak *Volksraad* ketika diajukan sebagai rancangan undang-undang. Suasana dingin di *Volksraad* itu menusuk perasaan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro berkeyakinan, bahwa ia tidak dapat mengharapkan apa-apa dari para wakil rakyat yang duduk di *Volksraad* dalam soal ordonansi itu.

Pada tanggal 29 September 1932 Majelis Luhur mengadakan sidang untuk membicarakan masalah ordonansi yang akan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1932. Sidang memutuskan menentang supaya ordonansi itu dihapuskan, bahkan jika perlu akan melakukan aksi "*lijdelijk Verzet*". *Lijdelijk Verzet* ialah membangkang terhadap ordonansi yang dikeluarkan dan bersedia menanggung segala akibat dari pembangkangan itu. Pada tanggal 1 Oktober 1932, yaitu hari mulai berlakunya ordonansi sekolah liar itu, Ki Hajar Dewantoro mengirim telegram kepada gubernur jendral di Bogor yang isinya menolak secara tegas ordonansi tersebut. Segera sesudah telegram itu dikirimkan, maka Majelis Luhur mengadakan sidang istimewa di Tosari pada tanggal 15–16 Oktober 1932. Sidang Majelis Luhur ini antara lain memutuskan :

- (1) Mendukung sikap Ki Hajar Dewantoro terhadap ordonansi sekolah liar
- (2) Mengeluarkan instruksi umum yang harus dilakukan oleh segenap cabang Taman Siswa

- (3) Tidak keberatan jika perlu para anggota Taman Siswa bekerjasama dengan pihak lain asal tidak bertentangan dengan instruksi

Sidang istimewa Majelis Luhur di Tosari ini dilanjutkan dengan konferensi pemimpin Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 29 – 30 Oktober 1932 yang mengambil keputusan antara lain :

- (1) Tetap menolak ordonansi sekolah liar
- (2) Selama 6 bulan yaitu sampai 31 Maret 1933 dilarang membuka perguruan Taman Siswa baru atau mengangkat guru baru
- (3) Mengadakan instruksi sejelas-jelasnya agar Taman Siswa tetap berdiri dan selamat²⁷⁾

Para guru di berbagai tempat tetap menaati instruksi Majelis Luhur. Mereka memasuki rumah-rumah perguruan masing-masing serta melakukan pekerjaannya seperti biasanya, seolah-olah tidak ada ordonansi sekolah liar. Sebagai akibatnya mereka dijatuhi larangan mengajar. Dengan tegas Ki Hajar Dewantoro memberikan penjelasan kepada para pemimpin rakyat, bahwa Taman Siswa menjalankan pembangkangan demi kepentingan anak didiknya. Selain itu Taman Siswa juga menyerukan agar segala pembangkangan yang bersifat aktif dihindarkan. Manifesto Taman Siswa itu mendapat sambutan baik sekali dari para pemimpin rakyat. Semua partai politik dan perkumpulan sosial bersimpati kepada Taman Siswa. Seruan Ki Hajar Dewantoro untuk memberikan bantuan material kepada para korban pembangkangan disambut baik oleh perkumpulan wanita Isteri Sedar dan Partai Serikat Islam Indonesia. Mereka semuanya mencap ordonansi itu sebagai penghalang usaha rakyat dalam bidang pendidikan yang diabaikan oleh pemerintah sendiri.

Masyarakat Indonesia membenarkan kebijaksanaan Ki Hajar Dewantoro. Dalam menghadapi ordonansi sekolah liar, masyarakat Indonesia seia sekata. Mereka menyokong penuh perjuangan Ki Hajar Dewantoro baik material maupun moral. Semua badan pendidikan nasional siap untuk mengikuti jejak Taman Siswa.

Sikap masyarakat yang demikian itu di luar dugaan Pemerintah Hindia Belanda; oleh karena itu cepat-cepat mereka mengeluarkan surat edaran yang menyatakan, bahwa penolakan izin itu hanya akan dilakukan bila jelas sistem pendidikan pendidikan yang bersangkutan membahayakan ketentraman umum. Surat edaran itu sebenarnya berupa pancingan, kalau-kalau dengan jalan demikian perguruan Taman Siswa dan suara masyarakat agak reda. Tempat surat edaran itu tidak mencapai sasaran. Masyarakat tetap menjalankan aksi. Ki Hajar Dewantoro makin gigih menentang pelaksanaan ordonansi. Para guru swasta siap untuk menerima akibat pembangkangan itu. Dengan jalan demikian maka Pemerintah Hindia Belanda menjadi kewalahan dalam menghadapi aksi rakyat. Badan-badan swasta segan meminta izin untuk menyelenggarakan sekolah, meskipun para pengurusnya tahu dengan pasti bahwa permohonan izin tidak akan ditolak. Sebagian besar dari badan pendidikan swasta bersikap solider terhadap Taman Siswa.

Di dalam konperensi Taman Siswa yang diselenggarakan di Jalan Tanjung Yogyakarta, Ki Hajar Dewantoro, Moh. Syafei dan Moh. Asrar berpidato membakar semangat para pemuda untuk menentang Pemerintah Kolonial Belanda. Akibatnya para pemuda dan organisasi politik bersama badan-badan swasta yang menyelenggarakan pendidikan membulatkan tekad dan semangat untuk melawan ordonansi sekolah liar tersebut. Menghadapi tekad serta semangat yang menyala-nyala bangsa Indonesia ini akhirnya Pemerintah Hindia Belanda kewalahan.

Kekhawatiran Belanda ditambah pula dengan adanya ancaman dari Budi Utomo yang akan menarik wakil-wakilnya dan *Volksraad* kalau ordonansi itu tidak dicabut sebelum tanggal 31 Maret 1933. Justru dalam menghadapi ordonansi sekolah liar ini nampak adanya perkumpulan bumiputra, semuanya berdiri di belakang Ki Hajar Dewantoro. Di mana-mana berdiri panitia dari bermacam-macam perkumpulan baik politik maupun sosial, untuk menentang ordonansi sekolah liar.²⁸⁾

Karena Pemerintah Hindia Belanda merasa kewalahan dalam menghadapi keberanian dan tekad rakyat, akhirnya pada tanggal 13 Februari 1933 keluarlah ordonansi baru, dengan keputusan gubernur jendral 13 Februari 1933 no. 18, untuk membatalkan *Onderwijs Ordonantie* 17 September 1932 no. 494. Ordonansi baru ini mulai berlaku tanggal 21 Februari 1933.²⁹⁾

Keberhasilan Taman Siswa dalam menentang *Onderwijs ordonantie* ini merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah. Di sinilah di antara sifat kepahlawanan Ki Hajar Dewantoro melawan penjajah Belanda.

Sebagai kelanjutan *Onderwijs Ordonantie* itu selama dua tahun sejak tahun 1934 hingga tahun 1936 diberlakukan larangan mengajar ("*Onderwijverbod*"). Guru-guru Taman Siswa yang menjadi korban lebih dari 60 orang; bahkan ada cabang Taman Siswa yang ditutup untuk setahun lamanya. Polisi ikut campur tangan soal pengajaran, murid-murid diinterogasi diadakan pengeledahan di perguruan, di rumah-rumah pamong, dan di rumah-rumah murid yang sama sekali di luar tanggung jawab guru. Jika terdapat sesuatu yang dianggap kurang pada tempatnya ataupun jika tidak terdapat sesuatu, dicari alasan lain, asal maksudnya tercapai untuk melarang guru itu mengajar. Pemasangan gambar Diponegoro sudah menjadi alasan untuk melarang guru mengajar. Tidak meliburkan sekolah pada hari kela-

hiran Ratu Wilhelmina dengan keluarganya juga sudah menjadi alasan untuk menjatuhkan *Onderwijsverbod*.

Bukan hanya guru-guru Taman Siswa saja yang dikenakan larangan mengajar tetapi juga guru-guru dari perguruan lain terutama mereka yang ikut politik. Pada tanggal 2 April 1937 sebagian besar *Onderwijsverbod* atas Taman Siswa ditarik kembali. Waktu itu semangat pergerakan rakyat Indonesia pada umumnya sudah menurun berhubungan dengan tindakan-tindakan pemerintah kolonial yang bersifat tangan besi.³⁰⁾

Dalam bulan Februari 1935 Taman Siswa datang cobaan lagi, yaitu soal *Kindertoelage*. Menurut edaran Pemerintah Hindia Belanda, hak atas *kindertoelage* mulai tahun 1935 hanya diberikan kepada rakyat yang anaknya bersekolah di sekolah negeri, sekolah yang mendapat subsidi, dan sekolah-sekolah lain yang mendapat hak memakai salah satu nama seperti sekolah negeri seperti HIS, *Volkschool*, 2 e *Inl School* dan lain-lain.

Karena Taman Siswa bukan sekolah negeri atau sekolah bersubsidi, maka sekolah itu dimasukkan dalam pasal c tersebut. Beberapa cabang Taman Siswa memang belum memakai nama HIS, 2e *Inl School*, *Volkschool*, bahkan ada pula yang tidak memakai sebutan seperti nama sekolah negeri. Anehnya perguruan Taman Siswa yang dianggap baik, tidak semuanya boleh memakai sebutan seperti nama seperti sekolah negeri sedang perguruan yang guru-gurunya tidak disiplin boleh memakai nama HIS. Cara pihak yang berkuasa menginspeksi Taman Siswa menimbulkan pertentangan di antara guru-guru Taman Siswa dengan pihak inspeksi, lebih lebih jika inspeksi dilakukan oleh orang Belanda.

Bagi Perguruan Taman Siswa yang boleh memakai nama sekolah seperti sekolah negeri, para orang tua murid mendapat hak atas *kindertoelage*. Bagi perguruan Taman Siswa yang tidak

memakai nama sekolah negeri, para orang tua murid tidak mendapat hak atas *kindertoelage*. Demi menjaga persatuan dan kesatuan Taman Siswa, Majelis Luhur kemudian mengirim instruksi kepada cabang-cabangnya, bahwa mulai tahun 1936 cabang-cabang Taman Siswa tidak diperbolehkan memberi surat keterangan kepada orang tua murid untuk urusan *kindertoelage*, meskipun cabangnya diperbolehkan memakai nama seperti sekolah negeri.

Rapat besar tahun 1936 menyerahkan masalah *kindertoelage* ini kepada kebijaksanaan Majelis Luhur. Semua cabang akan tunduk, asal Taman Siswa tetap bersatu, tidak terpecah belah. Sikap Majelis Luhur adalah mengembalikan soal *kindertoelage* kepada pemerintah sebab hak itu adalah hak orang tua murid, bukan hak Taman Siswa. Jika tidak semua perguruan Taman Siswa dapat menerima hak atas *kindertoelage* untuk orang tua murid pegawai negeri, lebih baik tidak menerima sama sekali. Akhirnya mulai tahun 1938 semua pegawai negeri yang menyekolahkan anaknya, baik di sekolah negeri bersubsidi maupun partikelir mempunyai hak atas *kindertoelage*.

Bersamaan dengan *kindertoelage*, muncul pula soal *Vrijkaart* dan *Vrijbiljet*. Mulai tahun 1935 anak pegawai kereta api yang belajar di perguruan Taman Siswa tidak diberi lagi *Vrijkaart* dan *Vrijbiljet* (karcis bebas naik kereta api) untuk menengok orangtuanya sewaktu liburan. Setelah diperjuangkan, dengan keputusan inspektur kepala kereta api tanggal 20 September 1940 peraturan tersebut dicabut.³¹⁾

Pada tahun 1935 itu juga dikeluarkan pajak upah atau *Loonbelasting*, yang juga dikenakan pada orang-orang Taman Siswa. Padahal dalam hal ini Taman Siswa berprinsip menolak dan tidak mau membayar pajak upah atau *loonbelasting*, karena di dalam Taman Siswa tidak ada majikan dan buruh. Sebagai

penduduk mereka bersedia membayar pajak penghasilan, meskipun jumlahnya mungkin lebih banyak dari pajak upah.

Dalam hal ini Taman Siswa dengan gigih memperjuangkan agar pajak upah segera dicabut. Pada tanggal 17 Desember 1937 Ki Hajar Dewantoro menghadap gubernur jenderal di Cipanas untuk menjelaskan secara lisan bentuk organisasi Taman Siswa yang berdasarkan kekeluargaan dan sama sekali tidak mengenai hubungan majikan dan buruh. Selama itu peraturan terus diundur-undur dan sampai pencabutannya, orang-orang Taman Siswa tetap tidak dikenakan pajak upah. Kemudian dengan surat keputusannya tanggal 15 Juli 1940 No: LB1/16/6 direktur keuangan memutuskan orang-orang Taman Siswa dibebaskan dari pajak upah dan seperti biasa dikenakan pajak penghasilan.³²⁾

Demikianlah perjuangan Taman Siswa dalam menghadapi rintangan-rintangan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menghalang-halangi perkembangan Taman Siswa. Segala usaha Pemerintah Hindia Belanda tersebut dapat digagalkan.

Pada permulaan pendudukan Bala Tentara Jepang, perguruan Taman Siswa mengalami perkembangan yang pesat, tetapi perkembangan Taman Siswa ini tidak dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan Jepang mengerti pendidikan Taman Siswa tidak sejalan dengan kepentingan Jepang. Lagi pula sebagian besar murid bagian Taman Dewan bukan anak kecil lagi. Pemerintah Bala Tentara Jepang ingin menguasai Taman Siswa sehingga dapat dipergunakan menurut kehendaknya. Berhubung dengan itu, maka dikeluarkan peraturan bagi sekolah partikelir hanya diperbolehkan membuka sekolah kejuruan dan bukan guru.

Pada waktu itu keadaan politik sudah berubah pula. Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk dengan pimpinan Ir. Soekarno,

Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansyur.

Sejak keluarnya peraturan Pemerintah Bala Tentara Jepang mengenai sekolah partikelir, suasana agak menggelisahkan, karena Ki Hajar Dewantoro berada di Jakarta, maka masalah penting harus dibawa ke Jakarta untuk dimintakan pertimbangan kepada Ki Hajar Dewantoro. Pada tanggal 18 Maret 1944 diputuskan untuk mengubah Taman Dewasa menjadi Taman Tani, sedangkan Taman Madya dan Taman Guru dibubarkan. Murid-murid diperbolehkan pindah ke sekolah negeri. Guru-guru yang mau menjadi pegawai pemerintah, masa kerjanya akan dihargai juga. Taman Tani klas I tidak boleh menerima murid lebih dari 160 anak, dan dibagi menjadi 4 klas.

Para siswa harus mengikuti pelajaran-pelajaran baru seperti bahasa Jepang, olah raga, dan latihan kemiliteran. Untuk upacara-upacara sedapat mungkin dijalankan menurut cara perguruan Taman Siswa. Orang kalau berbaris secara Jepang laki-laki berada di muka dan perempuan di belakang, tetapi ditentukan agar sebaiknya laki-laki dan perempuan dipisahkan sendiri-sendiri. Cara penghormatan tetap dipertahankan seperti biasa. Demikianlah seterusnya semangat Indonesia dan berkesuksesan timur tetap dipelihara.³³⁾

Pada akhir tahun ajaran 1944/1945 dikabarkan, bahwa pihak partikelir akan iizinkan membuka sekolah menengah. Berhubung dengan itu, maka pada tanggal 15 April 1945 Majelis Luhur mengundang wakil-wakilnya untuk membicarakan hal tersebut. Permintaan Cabang Mataram untuk membuka Taman Dewasa dan Taman Madya ditolak oleh *Cokan*. Dianjurkan untuk membuka Taman Dewasa laki-laki saja dan muridnya dibatasi, misalnya kelas satu 4 kelas, kelas dua 2 kelas @ 40 anak. Sebelumnya, diadakan ujian dan bahan ujian dikirim dulu kepa-

da pemerintah. Penerimaan murid dari sekolah lain, baik sekolah negeri maupun partikelir atau dari Taman Tani sendiri tidak diperbolehkan. Oleh Ibu Pawiyatan hal ini tidak dijalankan, hanya diserahkan kepada Ki Hajar Dewantoro supaya diuruskan kepada yang berwajib agar dapat dibuka untuk seluruh bagian perguruan Taman Siswa. Hal ini oleh Ki Hajar Dewantoro dikatakan akan dijadikan aksi nasional.

Pada akhir Juni 1945 atas inisiatif Ki Hajar Dewantoro telah diajukan usul kepada kepala kantor pengajaran untuk membuka sekolah-sekolah menengah partikelir. Usul tersebut ditandatangani oleh 16 orang anggota *Cou Sangiin*. Pada pembicaraan yang diadakan, jumlah tersebut ditambah 5 orang lagi. Mereka mengusulkan supaya badan-badan yang pantas mendirikan dan memelihara sekolah yang ditunjuk saja, dan yang sudah biasa, dalam hal ini Taman Siswa dan Muhammadiyah. Usul mereka ini diperhatikan dan akan dijalankan, tetapi tidak dapat diurus oleh pusat, harus diurus daerah, dan masing-masing daerah akan dikirim peraturan-peraturannya. Seperti biasanya segala urusan yang kurang mendapat perhatian sangat lambat jalannya. Terlalu lama sekolah-sekolah tersebut mendapat izin untuk dibuka, akan tetapi lama sebelum itu dengan diam-diam Taman Siswa telah mengajar anak-anak seperti murid sekolah menengah biasa, hanya jumlahnya saja yang terbatas. Untuk Taman Tani pelajarannya setingkat sekolah menengah sepintas lintas peranan serta perjuangan Taman Siswa dalam menyiapkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan lahir dan batin terlepas dari penjajahan Jepang.

Perjuangan melawan kekuasaan asing dengan segala bentuknya, telah disambut dengan penuh keberanian oleh para pejuang kita. Gerakan Muhammadiyah dan aksi-aksi yang dilakukan oleh Taman Siswa membuka kesadaran pemerintah kolo-

nial, bahwa kekuatan ini tidak boleh diabaikan. Meningkatnya kesadaran bangsa kita telah dibangkitkan oleh organisasi-organisasi yang bermunculan setelah tahun 1900 yaitu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Pada hakekatnya baik perjuangan budi Utomo dengan berdirinya sekolah-sekolah di Yogyakarta, usaha RM. Suryopranoto dengan Sekolah Adhi Dharmanya, maupun usaha Muhammadiyah dan Taman Siswa merupakan suatu arah yang sejalan untuk menuju masyarakat yang bebas dari tekanan penjajahan.

CATATAN

- 1) Pada waktu itu yang boleh memasuki sekolah Barat paling sedikit putera seorang jaksa atau anak-anak yang mendapat asuhan Barat.
- 2) *Karya Ki Hajar Dewantoro Bagian I – Pendidikan*, Cetakan kedua, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta, 1977, hal. 103 – 104.
- 3) Ibid, hal. 105.
- 4) I. Djumhur, Drs. H. Danasaputro, *Sejarah Pendidikan*, Cetakan ke tujuh, CV. Ilmu Bandung, 1976, hal. 174.
- 5) Suratman, Masalah Kelahiran Taman Siswa, *Pusara*, jilid 25, No. 1 – 2, 1964, hal. 249–250.
- 6) *Taman Siswa 30 Tahun 1922–1952*, Panitia Buku Peringatan taman Siswa 30 Tahun, Yogyakarta, hal. 47 – 48.
- 7) MOch. Tauchid, *Ki Hajar Pahlawan Dan Pelopor Pendidikan Nasional*, Jajelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta, 1968, hal. 27028.
- 8) Dra. Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Sejarah Pendidikan Jilid I*, Cetakan II, Yayasan Penerbit, FIP–IKIP, Yogyakarta, 1977, hal. 34–35.
- 9) I. Djumhur, Drs. H. Danasaputro, op. cit., hal. 178 – 179.
- 10) Ibid., hal. 177.
- 11) *Taman Siswa 30 Tahun, 1922 – 1952*, op. cit., hal. 174.
- 12) I. Djumhur, Drs. II. Danasaputro, op. cit., hal. 180.

- 13) Ibid., hal. 181.
- 14) Taman Siswa 30 tahun, 1922–1952, op. cit., hal. 194.
- 15) Ibid., hal. 195.
- 16) Ibid., hal. 200.
- 17) *Kota Yogyakarta 200 Tahun*, Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun, Yogyakarta, 1956, hal. 93.
- 18) Taman Siswa 30 Tahun, 1922 – 1952, op. cit., hal. 201.
- 19) Drs. Tashadi, Drs. Suratmin, *Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, 1977 – 1978, hal. 72 – 73.
- 20) Sartono Kartodirjo dkk., *Sejarah Nasional Indonesia V*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hal. 221.
- 21) Taman Siswa 30 Tahun, 1922 – 1952, op. cit., hal. 216.
- 22) Ibid, hal. 237.
- 23) I Djamhur, Drs. H. Danasaputro, op. cit., hal. 178.
- 24) Taman Siswa 30 Tahun, 1922 – 1952, op. cit., hal. 246 – 257
- 25) Ibid., hal. 250.
- 26) Kota Yogyakarta 200 Tahun, Loc. cit.
- 27) Taman Siswa 30 Tahun, 1922 – 1952, op. cit., hal. 218 – 213.
- 28) Drs. Tashadi, Drs. Suratmin, op. cit., hal. 144 – 145.
- 29) Taman Siswa 30 Tahun, 1922 – 1952, op. cct hal. 225.
- 30) Ibid., hal. 226.
- 31) Ibid., hal. 228 – 229.
- 32) Kota Yogyakarta 200 Tahun, op. cit., hal. 96.
- 33) Taman Siswa 30 Tahun, 1922 – 1952, op. cit., hal. 247.
- 34) Ibid., hal. 251 – 252.

BAB VIII PERTEMPURAN KOTABARU MELAWAN FASIS JEPANG

8.1 *Latar Belakang*

Pertempuran di Kotabaru yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945 merupakan puncak perlawanan yang paling seru terhadap Fasis Jepang dan berakibat jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Pertempuran ini merupakan rangkaian peristiwa sebelumnya. Penderitaan rakyat akibat kekejaman penjajahan Jepang merupakan faktor penting yang membangkitkan keberanian rakyat melawan Pemerintah Jepang. Apa yang menyebabkan masa rakyat dari semua golongan secara serentak berani menggempur serdadu Jepang yang serba lengkap persenjataannya itu, padahal mereka hanya bersenjatakan bambu runting, golok, pedang dan beberapa pucuk senjata api saja. Untuk menjawab pertanyaan ini baiklah kita lacak ke belakang penderitaan rakyat selama dijajah Jepang.

Keberanian rakyat melawan serdadu Jepang itu tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor politis saja melainkan juga didukung oleh keadaan sosial saat itu.¹⁾ Hal tersebut besar sekali pengaruhnya terhadap timbulnya semangat berani mati.²⁾

Setelah Jepang menyatakan perang kepada Sekutu, bangsa kita pun tidak terlepas dari sasarannya. Pada tahun 1942 serdadu Jepang mendarat di Indonesia. Semula kedatangan mereka disambut oleh rakyat di mana-mana dengan penuh rasa simpati dan benar-benar dikultuskan sebagai pahlawan yang menang dalam perang.³⁾ Pada saat itu Jepang tampak menarik di mata rakyat Indonesia, sehingga mereka dielu-elukan dan akhirnya ajaran, sikap, dan tindak tanduknya ditiru.

Kaum pergerakan tersentuh hatinya karena Jepang pada permulaan kekuasaannya telah menghormati Sang Merah Putih, dan telah memberi kesempatan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pemuda-pemuda kita baik yang terpelajar maupun tidak terpelajar secara total diberi latihan perang, hal mana tidak pernah dilakukan oleh penjajah Belanda, kecuali bagi mereka yang terkena wajib militer. Lagu-lagu Jepang dalam waktu singkat saja telah merata dan dapat dilagukan dengan senang hati oleh pemuda-pemuda dan anak-anak sekolah. Aba-aba Jepang yang lantang itu pun merasuk dalam sanubari pemuda-pemuda kita. Berita-berita radio dan surat kabar sehari-hari mengabarkan serba kemenangan Jepang dalam pertempuran-pertempuran melawan Sekutu, yakni Amerika – Inggris dan kawan-kawannya di lautan Pasifik dan Asia Timur Raya pada umumnya.

Jepang selalu mendengarkan slogan Tiga A (Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon pembela Asia). Slogan ini diterima, seolah-olah Jepang merupakan "Saudara Tua" yang dapat melepas belenggu. Latihan penerbangan sejumlah besar kapal terbang Jepang juga telah ikut serta menimbulkan kebanggaan. Pembagian kain tekstil, gula, dan minyak tanah melalui Rukun Kampung merupakan pemandangan baru dan model ekonomi yang dikehendaki Jepang, namun di balik sikap, sepak terjang, dan slogan yang menarik itu pada hakekatnya terselip kekejian yang benar-benar sangat terasakan oleh bangsa kita.

Kehadiran Jepang di Indonesia ternyata merupakan ulangan zaman berlakunya penjajahan terhadap bangsa kita. Meskipun penjajah Jepang berlangsung dalam waktu relatif singkat, namun kekejaman tidak lebih kecil dari penjajahan Belanda. Dalam waktu tiga setengah tahun mereka memeras bangsa kita.

Setelah Jepang berkuasa di Indonesia, perekonomian bangsa kita kian hari kian hancur. Persediaan barang berkurang, dan toko-toko menipis stok dagangannya, sedangkan daya beli rakyat semakin rendah. Sistem antri dan jatah sudah tidak memadai lagi dan akhirnya rakyat dilepas mencari hidup dengan caranya sendiri. Rakyat tidak setiap hari makan nasi, dan belum tentu dapat makan sehari tiga kali. Nasi dari singkong dan ubi-ubian lainnya menggantikan kedudukan beras. Daun ubi jalar (jlegor = Jawa), kangkung dan enceng gondok serta sayur pepaya muda adalah menu yang sehari-hari kita jumpai.⁴⁾ Dalam keadaan semacam itu rakyat diberi propaganda agar makan beki-cot yang merajalela bersamaan dengan kedatangan Jepang di Indonesia. *Honger Oedeem* (HO) atau busung lapar mulai menimpa rakyat. Di pedesaan rakyat menderita dan memilukan hati orang yang menyaksikannya. Akibat merajalelanya serangan HO, di mana-mana rakyat pada umumnya lemah dan kurus badannya. Ajaran hidup "nrimo" menjadi penyangga mental dalam keprihatinan yang tandas serta mendasar itu.⁵⁾

Bukan hanya masalah pangan saja yang memerlukan pemecahan hidup, namun pakaian pun demikian pula. Tekstil yang berada di toko-toko disita oleh Jepang, sehingga untuk mendapatkan kain makao dan blaco pun sulit. Dari pada mereka hidup bertelanjang, akhirnya karung goni yang dipergunakan untuk tempat beras maupun gula dipakai juga untuk menggantikan celana dan kain sarung. Untuk menggendong bayi yang biasanya dengan kain selendang, pada zaman yang penuh kesulitan itu diganti selendang dari rami.

Di samping serangan HO, menjalar pula penyakit kulit. Di sana sini timbul penyakit patek (frambusia), penyakit pes, malaria di pinggiran pantai, sakit perut, dan sering terdengar orang diarehae karena makan biji jarak untuk mengganti minyak kemiri, ditambah lagi sakit mata *belek*). Kesemuanya itu telah dialami oleh rakyat kita di bawah penjajahan Jepang, sedangkan orang-orang Jepang sebagai penguasa telah menunjukkan keserakahannya, dan hidup bermewah-mewah, mabuk-mabukan, memelihara gundhik-gundhik yang terdiri atas orang Jawa, orang Cina ataupun nyonya-nyonya bekas musuhnya yaitu Indo-indo Belanda.⁶⁾

Anak-anak sekolah digiatkan bekerja bakti. Jam pelajaran dikurangi untuk kerja luar, mulai dari menanam jarak di pinggiran jalan, sampai mencari ulat dan memetik buah yang tidak diketahui akan diserahkan kepada siapa dan apa gunanya. Mereka juga diperintahkan mencari biji lamtoro (petai cina) yang pada umumnya tidak mengetahui kegunaannya. Penanaman kapas digiatkan di beberapa daerah untuk mengatasi mahalnnya pakaian. Mereka juga disuruh mencari iles-iles (bunga bangkai), sebagian lagi bekerja keras di Lapangan Terbang Maguwo untuk menggali parit, mencangkuli lapangan pacuan kuda untuk dijadikan kebun tanaman, atau pekerjaan tangan dari bahan mendong, tali rami, atau serat nanas, serta latihan baris-berbaris disertai latihan perang penuh disiplin.

Pada waktu itu juga banyak sekolah swasta ditutup karena dicurigai oleh Pemerintah Jepang. Taman Siswa yang waktu itu telah mempunyai ribuan murid dari berbagai pelosok tanah air dibubarkan dan ditutup untuk bagian pendidikan umumnya. Yang diizinkan hanyalah sekolah-sekolah rakyat (dasar) dan kejuruan tani dan rumah tangga. Perlakuan demikian merupakan sebab tertanamnya rasa dendam yang mencekam dalam menghadapi kekejaman penguasa Jepang.

Karena Jepang terlibat perang melawan Sekutu, maka diperlukan perbekalan-perbekalan yang diambil dari bumi Indonesia. Untuk itu banyak bangunan-bangunan besi dan baja diangkut, rel-rel kereta api yang dianggap tidak penting *dicopot*, besi-besi jembatan dibongkar, pagar besi baik milik kantor maupun penduduk dilepas dan diangkut ke negerinya untuk membuat peralatan perang. Barang-barang tersebut diangkut dengan truk ke pelabuhan pada waktu malam hari. Pada waktu barang-barang itu diangkut terdengarlah bunyi sirine tanda bahaya udara sehingga rakyat menyingkir dari jalan-jalan raya.

Untuk memenuhi kebutuhannya, tak malu-malu penguasa Jepang memikat para hartawan agar mau menyerahkan intan berlian dan perhiasannya guna membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Bahkan orang-orang desa pun mengalami nasib sama, menjadi sasaran pemerasan. Lembu dan kerbaunya diambil untuk kepentingan Jepang. Bangsa kita yang menjadi pegawai Pemerintah Jepang tak dapat berbuat sesuatu, kecuali melaksanakan instruksinya bahkan dari mereka pun ada pula yang sampai hati juga berlagak seperti orang-orang Jepang.

Penderitaan bangsa kita diperberat lagi dengan adanya kerja paksa tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan. Kerja paksa yang bengis itu telah merenggut ribuan nyawa manusia Indonesia. Mereka mati lemas di pinggiran pantai selatan Pulau Jawa, saluran Neyena, Pantai Popoh, Pacitan dan di tempat lain-lain di pegunungan-pegunungan. Inilah gambaran selintas keadaan sosial masyarakat bangsa kita pada umumnya termasuk juga di Yogyakarta pada waktu penindasan Pemerintah Jepang.

Penghormatan kepada maharaja Tenno dengan membungkukkan badan mengarah ke timur laut secara dalam-dalam sambil membuka topi, telah menyinggung dan melanggar batin rakyat kita yang sebagian besar beragama Islam. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dilarang bergerak. Dengan adanya larangan itu, para politisi terpaksa mengadakan

gerakan di bawah tanah. Pada suatu kesempatan secara tersamar mereka mengadakan pertemuan dan pembicaraan guna mempersiapkan hari depan bangsa Indonesia.

Rakyat kian hari kian berpikir kritis. Mereka melihat suatu kenyataan bahwa di berbagai sektor terdapat manipulasi dan korupsi. Di sana-sini terdapat juga wanita menjadi korban hawa nafsu (dijadikan gundhik) mereka. Pengiriman pelajar yang semula bermaksud menambah ilmu yang lebih tinggi lagi ke Tokio ternyata banyak yang terlantar dan kandas di tengah jalan.

Pemberitaan radio dari luar negeri tak dapat ditangkap oleh rakyat karena siaran-siaran luar negeri dianggap membahayakan. Radio-radio disegel. Dengan penyegelan radio itu rakyat tidak dapat mendengar berita dari berbagai pihak kecuali dari satu sumber saja yaitu Jepang.

Karena telah tiga setengah tahun bangsa kita hidup di bawah tekanan Jepang, maka pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 telah membuat lega seluruh rakyat Indonesia. Di balik pernyataan kemerdekaan dan rasa lega itu mereka sadar akan kewajiban untuk mempertahankan negaranya. Sambutan terhadap proklamasi itu dapat dilihat dari sikap dua sri paduka kepala daerah pada tanggal 19 Agustus 1945 secara tegas.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 Sri Sultan Hamengku Buwono mengundang pimpinan kelompok-kelompok pemuda di Bangsal Kepatihan. Kelompok-kelompok pemuda yang terdiri atas kaum agama, kaum nasionalis, kepanduan dan keturunan Tionghoa itu berhadapan langsung dengan Sri Sultan yang waktu itu masih berusia 33 tahun.⁷⁾ Pertemuan yang dihadiri kurang-lebih 100 orang pimpinan itu hanya berlangsung sebentar, tidak lebih dan 30 menit. Sri Sultan yang masih mengenakan *busana kejawen* membuka pertemuan itu.

"Saudara-saudara saya undang kemari karena di tanah air kita terjadi peristiwa penting. Sebelum saya menerangkan apa peristiwa penting itu, barangkali di antara saudara sudah ada yang mengetahui?" Seorang pemuda menjawab perta-

nyaan Sri Sultan dengan singkat : "Indonesia merdeka." Di antara sebagian besar hadirin yang belum mengetahui peristiwa itu menjadi lega setelah Sri Sultan membenarkan itu. Setelah Sri Sultan serba sedikit menguraikan arti kemerdekaan bagi sesuatu bangsa, maka Sri Sultan berpesan.

"Kita sudah beratus tahun dijajah bangsa lain, maka selama itu perasaan tertekan dan sekarang kita merdeka, tentu perasaan yang lepas dari tekanan akan melonjak. "Melonjaknya" ini yang harus kita jaga. Biarlah melonjak setinggi-tingginya, sepuas-puasnya. Akan tetapi jangan nyempet-nyempet yang tidak perlu, yang bisa menimbulkan kerugian. Menurut sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang, pemuda senantiasa memegang peranan. Oleh karena itu saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat. Baik di kampung-kampung, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi sesuatu laporkan pada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya adalah Pangeran Bintoro. Dan Pangeran Bintoro akan berkantor di Kepatihan.⁸⁾

Dalam menyambut kemerdekaan Indonesia Sri Sultan antara lain menyebut :

"Sekarang kemerdekaan sudah di tangan kita. Nasib nusa dan bangsa adalah di tangan kita pula, tergantung padakita sendiri. Kita harus menginsyafi, bahwa Indonesia merdeka lahir dalam masa kegentingan. Maka setiap orang, tiada kecualinya, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama, ialah menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa. Sekarang bukan waktunya mengemukakan dan membesarkan segala pertentangan dan perselisihan paham. Tiap golongan harus sanggup menyampingkan kepentingan, sanggup untuk mencapai persatuan yang baru dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan senjata untuk memperjuangkan kemerdekaannya, buat menyelesaikan tanggung jawab terhadap angkatan-angkatan bangsa Indonesia yang akan datang dan membikin sejarah yang gemilang."⁹⁾

Sesudah pertemuan tanggal 19 Agustus 1945 di bangsal Kepatihan antara Sri Sultan dengan pemimpin pemuda, pada hari-hari berikutnya pos-pos keamanan didirikan oleh pemuda, sebab Jepang yang dalam keadaan bingung juga tidak dapat memberikan arah kepada alat keamanan bawahnya.

Di kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan Pemerintah Balatentara Dai Nippon pegawai-pegawai berusia muda sudah mengambil inisiatif tidak mengibarkan bendera Hinomaru, bahkan di beberapa kantor telah dikibarkan Sang Merah Putih. Hanya di *Tyokan Kantai* (Gedung Agung) yang ditempati *Tyokan* masih berkibar bendera Jepang.

Di pusat pemerintah kesultanan pegawai-pegawainya yang berusia muda mendirikan Pekik. Pekik yang melangsungkan rapatnya di dalam bulan Agustus 1945, dihadiri kurang lebih 400 orang telah memilih pengurus yang terdiri atas: R. Suprodjosamsi (KRT. Probosuprojo) sebagai ketua, R. Handojowinoto sebagai wakil ketua, dan R. Sutjipto (terakhir perwira AU telah meninggal) sebagai penulis.

Untuk mencapai kesatuan gerak dan program, gerakan-gerakan pemuda tersebut mengadakan kerjasama di bawah koordinasi Promotor Pemuda Nasional. Promotor Pemuda Nasional inilah yang amat besar pengaruhnya dalam menggerakkan massa, baik dalam hal pengibaran Sang Merah Putih di Gedung Agung maupun penyerbuan terhadap Dai Nippon di Kotabaru. Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII masing-masing sebagai kepala daerah raja Kasultanan dan raja Pakualaman berkenan mengirim kawat ucapan selamat kepada proklamator dan menyatakan berdiri di belakangnya.

Sebagai jawaban atas pernyataan tersebut, dalam waktu yang sama presiden memberikan piagam kedudukan kepada Sri Paduka yang isinya antara lain, mempercayakan kepada Sri Paduka itu untuk mencurahkan segala pikiran dan tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah-daerah Yogyakarta dan Pakualaman sebagai bagian dari Republik Indonesia. Piagam tersebut disampaikan oleh utusan presiden yakni Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. Maramies pada tanggal 5 September 1945 di Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 6 September kedua sri paduka telah mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada penduduk bahwa daerah raja Kesultanan dan Pakualaman mulai saat itu keadaan seluruhnya berada di tangan sri paduka masing-masing. Perhubungan antara daerah-daerah tersebut dan pemerintah pusat bersifat langsung dan kedua sri paduka bertanggung jawab langsung pula kepada presiden Republik Indonesia.

Keadaan daerah dalam menyambut serta memberikan dukungan kepada pernyataan proklamasi telah siap dengan segala konsekuensinya. Pembentukan Alat Perlengkapan Negara atau Komite Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat serta gerakan pemuda di pusat diikuti juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 1 September 1945 di Yogyakarta dibentuk organisasi pemuda dengan nama Promotor Pemuda Nasional atau PPN. Di samping organisasi tersebut ada pula organisasi pelajar bernama Gasema, yaitu Gabungan Sekolah Menengah Matraman. Pemuda-pemuda ini ikut aktif mengadakan aksi-aksi dalam menghadapi Jepang. Aksi-aksi dari para pemuda kian hari kian berkembang dan mulailah mereka mengadakan gerakan perlawanan kekuasaan.

8.2 *Jalannya Pertempuran*

Sebelum terjadi pertempuran sengit di Kotabaru, pada tanggal 21 September 1945 diadakan penurunan Hinomaru dan pengibaran Sang Merah Putih di depan *Tyokan Kantai Yogyakarta* oleh ribuan masyarakat. Tindakan ini diperkuat oleh satu kompi pasukan polisi bersenjata lengkap. Juru bicara saat itu adalah Jamaludin Nasution, sekretaris Promotor Pemuda Nasional, sedang yang bertindak menurunkan Hinomaru dan mengibarkan Sang Merah Putih di atas gedung *Tyokan Kantai* enam orang pemuda, di antaranya seorang wanita bernama Siti Aisah dengan sebutan lain Widowati.⁹⁾ Pada hari itu juga di Asrama Polisi Patuk diadakan rapat oleh seluruh kesatuan Kepolisian DIY yang dipimpin oleh RP. Sudarsono. Inti dari rapat itu merupakan suatu kebulatan tekad untuk membebaskan diri dari pemerintahan penjajah Jepang dan hanya akan melaksanakan perintah Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono sebagai kepala daerah.

Upacara pengibaran Sang Merah Putih di *Tyokan Kantai*, disusul dengan demonstrasi sepanjang Jalan Malioboro dipimpin satuan polisi istimewa yang bersenjata lengkap. Pada saat

itu pertumpahan darah masih dapat dihindarkan, meskipun polisi istimewa saat itu telah berhadap-hadapan dengan polisi militer Jepang (*Kem Petai*) yang bermarkas di Pingit. Peristiwa ini terjadi di muka Gedung Ratih di mana kedua belah pihak baik polisi istimewa maupun *Kem Petai* telah siap bertempur.

Pada hari berikutnya, tanggal 22 September 1945, sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 September 1945 di *Tyokan Kantai* dan juga di muka Gedung Ratih, maka pemerintah militer Jepang mengancam akan melucuti senjata para pemuda. Meskipun diancam, para pemuda dan segenap lapisan masyarakat yang sudah merasakan kepedihan akibat ditindas Jepang tidak merasa gentar.

Segenap pegawai kantor-kantor, baik kantor negeri maupun partikelir, perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik seluruh Yogyakarta pada tanggal 26-9-1945 mulai pukul 10.00, menjalankan aksi serentak untuk mengambil oper kekuasaan ataupun pimpinan dari tangan pemerintah Jepang.

Aksi serentak itu dijalankan dengan kemauan bulat dari segenap pegawai mulai dari yang serendah-rendahnya hingga yang paling tinggi. Pada pukul 10.00 itu sebagian besar pimpinan perusahaan menyerukan pemogokan pegawai seluruhnya. Aksi pemogokan itu mendapat bantuan sepenuhnya dari barisan rakyat, pemuda-pemuda dan BKR yang teratur rapi mengepung masing-masing tempat yang perlu. Dengan kekuatan yang teratur rapi dan dipimpin KNI yang bijaksana, mereka mendesak keras supaya pimpinan dan kekuasaan diserahkan kepada pegawai Indonesia.

Hingga pukul 20.00 pimpinan di semua kantor telah berada di tangan bangsa Indonesia. Hasilnya memuaskan. Walaupun di beberapa tempat terjadi bentrokan agak keras, tetapi keadaan yang tidak diinginkan dapat dicegah.

Pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang pada saat itu telah dapat dioper kekuasaannya dan yang dilaporkan ke-

pada KNI, ialah: Pusat Nanyo Kotabaru Yogyakarta dan cabang-cabangnya, Jawatan Kehutanan, Daiken Sangyo, dan pabrik-pabrik gula Tanjungtiro, Padokan, Beran, Cebongan, Gondanglipuro, Plered, Gesikan, Rewulu, Medari, Pundong, Sewugalur, dan Pabrik Salakan.

Keesokan harinya, tanggal 27-9-1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan pengumuman kepada segenap penduduk Yogyakarta bahwa aksi serentak yang telah dijalankan tanggal 26-9 mulai pukul 10.00 oleh segenap pegawai kantor-kantor negeri, jawatan-jawatan, pabrik-pabrik, dan perusahaan-perusahaan untuk mengambil oper kekuasaan yang hingga saat itu masih di tangan bangsa asing, telah selesai semuanya dan tidak terjadi sesuatu apa yang tidak kita inginkan. Tidak ada sesuatu kantor lainnya yang ketinggalan tidak menjalankan aksi tersebut dan semua hasilnya memuaskan. Dan mulai tanggal 26-9-1945 itu semua kekuasaan telah ada di tangan kedua sri paduka dan Komite Nasional.

Keberanian masyarakat mengadakan perebutan kekuasaan itu menyebabkan kegelisahan orang-orang asing di Yogyakarta. Untuk itu Komite Nasional Daerah mengeluarkan pengumuman, bahwa Komite Nasional bersama-sama rakyat Indonesia menjamin keselamatan penduduk bangsa-bangsa lain yang berada di Yogyakarta. Jaminan pertanggungjawaban itu apabila dari mereka juga mengindahkan, menghormati dan tunduk pada segenap peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia serta mereka merasa pula bahwa bertempat tinggal di negara bangsa lain yang sudah merdeka. Dengan jalan itu maka keselamatan mereka akan terjamin dan keselamatan umum terjaga.

Suatu hal yang menggembirakan masyarakat Yogyakarta pada waktu itu ialah terbitnya harian *Kedaulatan Rakyat* pada tanggal 27-9-1945. Dengan demikian segala peristiwa dan pengumuman-pengumuman penting segera dapat disam-

paikan kepada rakyat. Maklumat-maklumat, amanat dari pemimpin, berita hasil perjuangan yang menggembirakan, penerangan kepada rakyat dengan pidato, dengan bisik-bisik, dengan poster-poster, dengan slogan-slogan yang tertulis di tembok rumah atau toko, di dinding kereta api atau mobil, itu semua memperhebat semangat perjuangan rakyat.

Semangat pemuda yang masih menyala-nyala ditambah dengan perasaan lega karena telah mencapai sesuatu kemenangan pada tanggal 5 Oktober 1945, yaitu berkibarnya Sang Merah Putih di Gedung Negara, menimbulkan pemikiran untuk mempertahankan kemenangan itu sampai kapan pun. Untuk itu diperlukan senjata yang cukup banyak dan modern. Bambu runcing dan senjata masih sangat sederhana sekali, di rasa kurang memadai. Pada tanggal 6 Oktober KNI dengan para pemuka mencoba mengadakan pembicaraan dengan pimpinan tentara Jepang yang bermarkas di Kotabaru. Maksudnya ialah agar supaya Jepang mau menyerahkan senjatanya dan menyerahkan kewajiban menjaga ketentraman dan keamanan dalam negeri, namun demikian Jepang tetap berkeras tidak mau menyerahkan senjata. Dengan demikian tidak ada jalan lain selain dengan jalan kekerasan ataupun pertempuran.

Pada tanggal 6 dan 7 Oktober pukul 23.00 gelombang api revolusi menyembur lagi. Pekik "siap" dan "merdeka" mengumandang lagi di mana-mana. Di kampung-kampung massa rakyat mengangkat bambu runcing, golok, tombak, pentungan, linggis, sabit dan alat-alat lain yang dapat dijadikan senjata dibawanya. Mereka menggabungkan diri dalam lasykar rakyat yang secara bersama-sama bersiap sedia menyerbu Kotabaru. Di samping massa rakyat yang bersenjatakan alat seadanya, pada saat itu polisi istimewa yang bersenjata lengkap secara serentak mendampingi mereka. Polisi istimewa dijadikan pelindung, sehingga menambah keberanian rakyat. Rakyat mengirimkan ultimatum kepada Jepang; apabila mereka tidak mau

menyerahkan senjata melalui perundingan dan jalan halus, markasnya akan digempur oleh Barisan Rakyat. Ultimatum itu ternyata tidak dihiraukan oleh Jepang. Rakyat semakin tidak sabar lagi. Dalam kesunyian malam tanggal 7 Oktober 1945, terdengarlah letusan senjata yang kemudian disusul dengan serangkaian letusan-letusan senjata api disertai dengan suara gemuruh siap, maju, dan gempur. Gerak rakyat mendapat sambutan metraliur Jepang. Pertempuran berjalan cukup seru, masing-masing memuntahkan pelurunya.

Di Simpang Tiga bagian timur laut Stadion Kridosono berderet penghalang barikade kawat berduri yang sangat kokoh menutup jalan menuju benteng kubu serdadu-serdadu Jepang. Di sini pun pemuda-pemuda berdatangan dari kampung-kampung Gedongkuning, Sosrowijayan, Jetis, Kauman dan lain-lain dengan bersenjatakan bambu runcing, klewang dan sebagainya.

Barikade tidak menjadi rintangan penghalang bagi putra-putra Yogyakarta. Kawat berduri diputus untuk menerobos. Melihat keadaan itu serdadu Jepang melepaskan tembakan gencar dengan miltraliur diarahkan kepada pemuda-pemuda. Rombongan pemuda laskar datang dari barat, timur, dan selatan mengepung kubu Jepang. Karena dihujani peluru, maka pemuda-pemuda bertiarap menyelinap berpencar di sisi pohon-pohon dan parit-parit, pagar beluntas dan pagar tembok. Mereka yang bersenjata api dengan berani memanjat benteng sebelah barat dengan berdiri di atas tumpukan kayu sambil membalas tembakan. Pemuda yang mengepung benteng serdadu Jepang semakin mendekat. Mereka terus-menerus melepaskan tembakan terarah. Tiga menit kemudian mereka telah mendekati kubu Jepang.

Dalam penyerbuan ini banyak pemuda kita yang luka-luka dan gugur terkena sasaran peluru Jepang. Pada saat terkena tembakan Supadi masih sempat mengangkat senjatanya dengan

membidikkan pelurunya ke arah Jepang, namun tak lama kemudian ia roboh dengan darah bercucuran. Teman-teman yang berdekatan masih sempat menolong dan membawanya ke tempat lain untuk diberi pertolongan.

Pada pagi itu pula datang bantuan PMI dari Rumah Sakit Bethesda sehingga korban dapat dirawat. Supadi dibawa ke gedung yang sekarang menjadi SMP IV untuk mendapat pertolongan. lebih lanjut. Melihat korban itu pemuda-pemuda semakin panas. Gerakan pemuda itu diikuti dengan pemecahan jendela dan pengeluaran senjata dari gudang.

Pada tanggal 23 September 1945 semua senjata polisi istimewa dikumpulkan dan dimasukkan dalam gudang serta dikunci oleh seorang tentara Jepang. Komandan kompi polisi istimewa, Oni Sastroatmojo, meminta kedatangan Sudarsono untuk meminta kembali senjata-senjata yang telah dimasukkan ke dalam gudang oleh Jepang pada hari itu.

Selanjutnya pada tanggal 25-26 September 1945 terjadi gerakan perebutan kekuasaan di kantor-kantor untuk mengambil kekuasaan dari tangan orang-orang Jepang. Berbagai peristiwa ini merupakan prolog dimulainya pertempuran Kota-baru yang membawa banyak korban.

Pada tanggal 27 September 1945 gerakan kembali ke sasaran *Tyokan Kantai*, yaitu gerakan menangkap dan menawan *Tyokan Kaka* (gubernur Jepang) yang bertempat tinggal di *Tyokan Kantai* dan mengosongkan gedung itu dari penghuni Jepang. Pada hari itu juga gedung tersebut ditetapkan menjadi Gedung Nasional, begitu juga KNI pindah dari Jalan Ahmad Dahlan ke Gedung Nasional.

Keterangan dari berbagai informan memperlihatkan kesamaan kata, bahwa tanggal terjadinya pertempuran sengit di Kotabaru adalah tanggal 7 Oktober 1945. Dengan demikian situasi di Yogyakarta menjadi kritis. Masyarakat menjadi panik karena ada informasi bahwa tentara Jepang di Lapangan Ter-

bang Maguwo bergerak masuk kota. Suasana semacam itu mengherankan karena waktunya bersamaan dengan pertempuran lima hari di Semarang, di mana pemuda-pemuda kita dijagal oleh *Kido Butai* Jatingaleh. Situasi semacam itu telah membakar semangat pemuda, kesiapsiagaan sangat ketat, pekik "siaap" tidak pernah terputus sepanjang malam. Pesawat telepon polisi istimewa terus berdering menerima laporan dari Taman Siswa dan lain-lain, bahkan juga dari seorang ibu yang mengaku Nyonya Bramono, istri seorang wartawan yang bertempat tinggal di Notoprajan.

Pertempuran dan perlucutan senjata *Kido Butai* Kotabaru didahului perundingan antara Moh. Saleh, RP. Sudarsono, Bardosono dan Sunjoto; kesemuanya dari pimpinan BKR dan di pihak Jepang Mayor Otsuka, Ken Petai Taico Sasake. Kapten Ito dan Cianbuco, bertempat di rumah *Butaico* Kotabaru.

Dalam perundingan tersebut RP. Sudarsono minta agar *Butaico* Mayor Otsuka menyerahkan senjatanya kepada Indonesia. Karena perundingan mengalami jalan buntu, maka diambil keputusan bahwa BKR akan melakukan perlucutan senjata dan bila perlu dengan kekerasan. Berhentinya perundingan ditandai dengan suatu penghinaan penyerahan senjata kepada Jepang dari pihak polisi istimewa. Regu polisi istimewa saat itu dipimpin oleh Harjono.

Pada saat perundingan tersebut *Buatico* Mayor Otsuka tidak mau memenuhi tuntutan BKR, akan tetapi dengan cara licik memberi kesanggupan akan menyerahkan senjata keesokan harinya pada pukul 10.00 setelah mendapat izin dari Jendral Nahamura di Magelang.

Setelah perundingan gagal, Moh. Saleh, RP. Sudarsono, Bardosono dan Sunjoto keluar dari tempat perundingan. Dengan keluarnya orang-orang tersebut, maka orang-orang yang telah bersiap-siap menunggu di luar gedung perundingan

semakin tidak sabar lagi. Pada tanggal 6 Oktober 1945 pukul 23.00, di kampung-kampung diadakan persiapan untuk menyerahkan pemuda dengan seruan "siaap" bersambung-sambung. Dalam waktu relatif singkat telah berkumpul beratus-ratus pemuda dari kampung-kampung berbondong-bondong membentuk barisan menuju Kotabaru, pusat tentara Jepang. Mereka bersama-sama dengan pasukan BKR, polisi istimewa BPU dan lain-lain mengadakan pengepungan markas tentara Jepang.

Dalam penyerbuan ini telah dibentuk pasukan inti bersenjata yang terdiri atas unsur-unsur:

- (1) Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Oni Sastroatmojo, bersenjatakan 90 pucuk karabyn, sepucuk mitraliur, 5 pucuk Leuwois machine Guen, dan 2 pucuk kaki kanju.
- (2) BKR dipimpin oleh pak Harto, bersenjatakan 14 pucuk karabyn Jepang, sepucuk kaki kanju, 7 pucuk pistol revolver, granat, dan pedang.
- (3) Laskar dan pemuda bersenjatakan tombak, golok, keris, bambu runcing, pentungan dan lain-lain.

Suatu hal yang menjadi perintang dalam penyerbuan itu adalah pagar kawat berduri yang melingkari markas Jepang itu dialiri listrik, sehingga sukar untuk diterobos. Penyerbuan dilakukan oleh para laskar kita pada waktu dini hari. Sekitar pukul 04.00 telah terdengar letusan granat sebagai suatu tanda dimulainya penyerbuan.

Karena merasa dikepung dan dengan letusan senjata yang mengarah ke markas, maka pasukan militer Jepang pun mulai memuntahkan peluru mitraliurnya. Pasukan ada yang di atas atap rumah, di atas pohon dan di kubu-kubu yang sebelumnya telah mereka persiapkan.

Setelah mendengar bahwa telah terjadi pertempuran di Kotabaru, maka *butaico* yang bermarkas di Pingit datang ke Kotabaru. Dengan senang hati ia menyerahkan senjatanya

dengan permintaan agar anak buahnya tidak disiksa. Sebaliknya pihak Indonesia minta kepada *butaico* yang bermarkas di Pingit agar menasihati Mayor Atsuka untuk mengikuti jejaknya. Atsuka pada saat itu belum mau menyerahkan dirinya, sehingga pertempuran terus berjalan dan masing-masing mempertaruhkan jiwanya.

Dalam keadaan yang terjepit itu Moh. Saleh dan Sudarsono mendesak *butaico* agar segera menyerah. Akhirnya *butaico* menyatakan menyerah kepada *Yogya Ko*: (SPHB IX Kepala Daerah). Tembakan dari pihak Jepang makin lama makin berkurang dan akhirnya pada pukul + 10.30 tanggal 7 Oktober 1945, di tengah-tengah pertahanan Jepang nampak bendera putih berkibar tanda tentara Jepang menyerah. Senjata tentara Jepang dikumpulkan dan lebih dari 360 orang tentara ditawan.

Urusan tawanan Jepang diserahkan kepada Pasukan Polisi Istimewa dan mereka dibawa ke Penjara Wirogunan dengan berjalan kaki melalui Jalan Jendral Sudirman, Tugu, Jalan P. Mangkubumi, Jalan Malioboro dan berhenti sebentar di muka benteng, dan selanjutnya melalui Jalan Senopati menuju Penjara Wirogunan.

Pertempuran Kotabaru merenggut jiwa para pejuang kita. Dari pertempuran itu dapat dicatat bahwa pihak kita gugur 21 orang dan 32 orang luka-luka. Pihak Jepang 9 orang tewas dan 20 orang luka-luka. Mereka yang gugur adalah: I Dewa Nyoman Oka, Amat Jajuli, Faudan M. Noto, Bagong Ngadikan, Suroto, Syuhada, Sunaryo, Sajiono, Supadi, Sabirin, Juwadi, Hadidarsono, Sukartono, Johar Nuarhadi, Sareh, Wardhani, Trimu, Akhmad Zakir, Umum Kalipen, Abubakar Ali, dan Atmosukarto

Sebagai penghormatan terhadap para pahlawan ini rakyat Yogyakarta mulai pagi hari mengibarkan bendera setengah tiang tanda berkabung. Pemakaman jenazah para pahlawan korban pertempuran tersebut dilakukan pada sore hari pukul

16.00, berangkat dari Gedung Agung menuju Taman Bahagia di Semaki. Dari sejumlah korban tersebut 18 orang dimakamkan di Semaki, sedang lainnya dimakamkan di Kauman dan Karang-kajen. Beribu-ribu penduduk dari segala lapisan dan golongan membentuk barisan berkumpul di muka Gedung Nasional untuk memberi penghormatan terakhir kepada mereka. Hadir pula dalam upacara penghormatan terakhir tersebut para utusan pemerintah daerah, pengurus KNI lengkap dengan cabang-cabang dan anak-anak cabang serta orang-orang terkemuka lainnya.

Di muka Gedung Nasional telah siap barisan-barisan polisi istimewa, polisi, BKR, BPU, para pemuda dari sekolah menengah di Yogyakarta dan barisan-barisan kampung. Turut serta mengantar jenazah para pahlawan kita jururawat-jururawat dari rumah sakit Yogyakarta yang telah besar jasanya dalam pemberian pertolongan kepada para korban.

Pertempuran Kotabaru dilakukan secara serentak dari berbagai pihak. Peranan wanita pada saat berlangsungnya pertempuran itu besar sekali. Para wanita yang tergabung dalam organisasi *Fujing kai* di kampung-kampung dengan tidak mengenal payah menyelenggarakan jaminan makan dan minum untuk para pemuda pejuang. Ibu-ibu dengan tulus ikhlas melayani mereka. Bantuan tidak hanya dari dalam kota, tetapi berdatangan juga dari luar Kota Yogyakarta.

Meskipun telah banyak korban berjatuhan, namun kemenangan dapat diraih oleh pejuang-pejuang kita. Pertempuran yang penuh heroik dan patriotisme itu menunjukkan kesadaran para pejuang kita untuk menegakkan negaranya dari penjajahan bangsa asing.

Kemenangan pertempuran di Kotabaru tidaklah membuat mereka berhenti dan puas. Mereka yang masih hidup ingin melanjutkan perjuangan para pahlawan yang mendahului mereka. Sasaran selanjutnya setelah pertempuran di Kotabaru adalah

penyerbuan terhadap Jepang yang masih menduduki Maguwo. Setelah mendengar berita pertempuran tersebut mereka ngeri juga. Ketika komandan *Koigun* (Angkatan Laut) dihubungi, ia menyatakan hanya akan menyerahkan diri pada *Yogya Ko* yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Setelah diadakan perundingan antara Pak Harto (kemudian menjadi presiden RI) di Benteng Vredeburg, penyerbuan ke Maguwo segera dimulai. Sebelum penyerbuan itu, pada tanggal 7 Oktober 1945, yakni setelah pertempuran Kotabaru, datanglah seorang wakil RAF Kopral Francis untuk mengawasi tanah lapang Maguwo. Berhubung dengan itu Sudarsono mengadakan perundingan dengan Kepala Hajino Sosja (mayor) yang akhirnya pada tanggal 17-10-1945 menyerahkan pula semua senjata dari penerbangan sejumlah 15 truk kurang-lebih 25 ton berat enteng dan beratus peti handgranaten.

Pada tanggal tersebut di Alun-alun Lor diadakan rapat Samodra sebagai peringatan tanggal proklamasi kemerdekaan. Pada kesempatan yang baik itu Sudarsono selain memberi anjuran dan pengobaran semangat bertempur pemuda-pemuda khususnya dan rakyat pada umumnya berhubung dengan kemenangan dari pertempuran Kotabaru, juga mengumumkan hasil perlucutan senjata di Maguwo. Laporan itu membuat semua pihak gempar dan Moch Saleh sebagai ketua KNI menyampaikan terima kasih atas nama seluruh rakyat.

Pertempuran di Kotabaru melawan Jepang berlangsung ketika pertempuran-pertempuran serupa terjadi di berbagai kota, antara lain di Magelang, Ambarawa, Solo dan Semarang. Pada saat pertempuran Jatingaleh (Semarang) yang penuh heroik itu pasukan dari Yogyakarta pun mengirimkan bantuannya.

8.3 *Akhir Pertempuran*

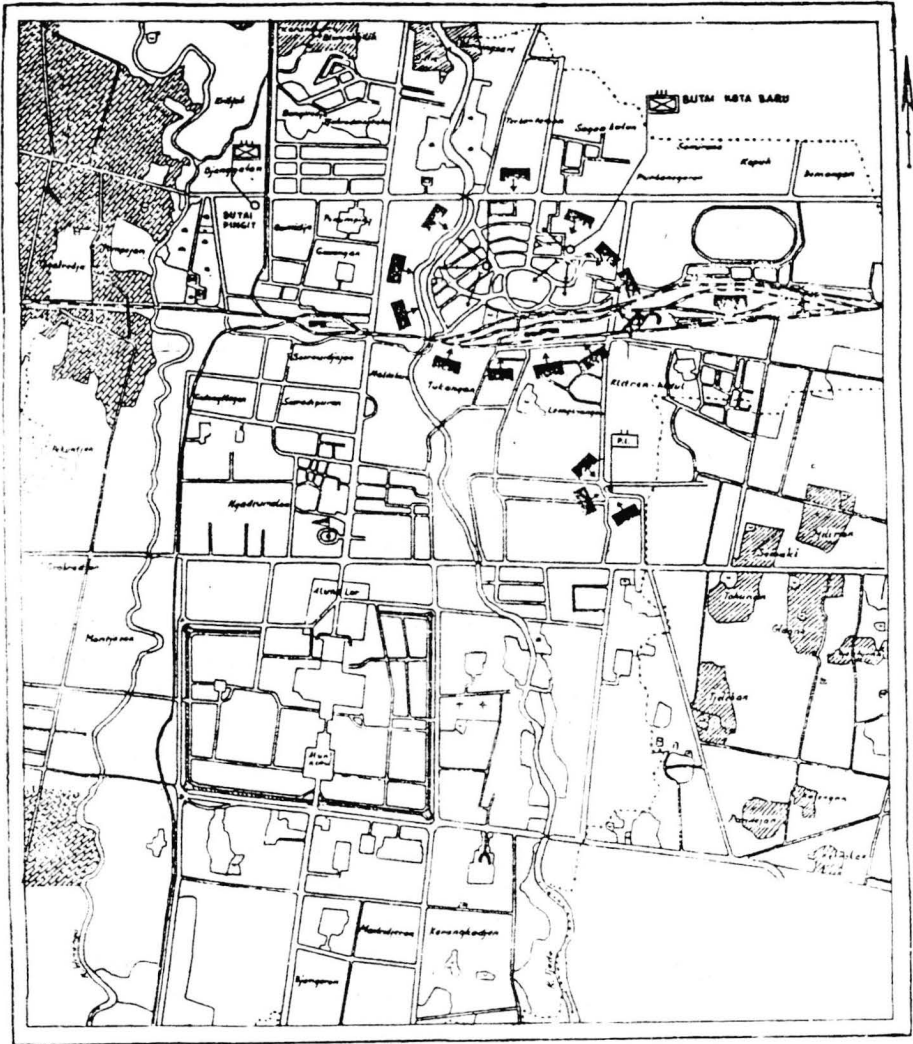
Berakhirnya pertempuran di Kotabaru berarti berakhirnya kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pemerintah Jepang menjadi lumpuh. Sebaliknya massa rakyat Yogyakarta semakin menyadari akan kewajibannya mempertahankan tanah air dari rongrongan musuh. Mereka mengkonsolidasikan diri dan mempergiat penjagaan masing-masing.

Untuk menuju ke arah kesempurnaan organisasi, maka pada tanggal 12-10-1945 BKR mengeluarkan pengumuman tentang pendaftaran senjata api dan senjata tajam (bayonet dan pedang tentara). Pendaftaran dimaksudkan khusus untuk mengetahui banyaknya senjata yang ada di tangan bangsa kita.

Berhubung dengan gentingnya suasana dan memuncaknya semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk menuntut tetap tegaknya Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 12-10-1945 pemerintah daerah mengeluarkan maklumat no. 2 yang isinya sebagai berikut : ¹²⁾

- (1) Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku-Buwono IX dan Seri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman, memerintahkan kepada segenap penduduk dari segala lapisan, supaya turut menjaga ketentaraman dan keamanan umum.
- (2) Mereka berdua tidak menjamin keselamatan orang-orang :
 - (a) yang secara langsung atau tidak langsung, maupun dengan sembunyi atau terang-terangan mengadakan atau mempunyai hubungan dengan pihak Nica.
 - (b) yang memuja, mendoakan, berbuat atau bekerja, dengan cara bagaimana pun untuk kepentingan Nica.
- (3) Selaras dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2-10-1945, yang berlaku di daerah Yogyakarta hanyalah uang yang dianggap sah, sedangkan uang Nica dinyatakan tidak berlaku.

JOGJAKARTA 1 : 20.000



Perlempuran Kota Baru

Keterangan:

-  Kedudukan Djepang
-  Pasukan Rakjat.
-  Ken Pci Tai
-  Polisi Istimewa Gajah
-  Sendjata Otomatis (Mitraliur).
-  Gedung Agung tempat perabutan kekuasaan
-  dan penebaran Sang Merah Putih

- (4) Penduduk Yogyakarta diperintahkan juga supaya memberi bantuan sepenuhnya pada usaha Tentara Keamanan Rakyat, polisi, pangreh praja dan Barisan Penjagaan Umum untuk menegakkan ketentraman serta keamanan umum dan untuk membrantas hal-hal yang dapat mengganggu atau mengacaukannya.
- (5) Maklumat ini berlaku sejak diumumkan yaitu tanggal 6 Dalkaidah Whe 1876 atau 12-10-1945.

Secara lengkap bunyi maklumat no. 2 tersebut sebagai tertera pada Lampiran 5.

Tidak lama kemudian menyusul maklumat tentang Pembentukan Lasykar Rakyat sebagai Pembantu Tentara Keamanan Rakyat yang pokok-pokoknya sebagai berikut :¹³⁾

- (1) Mengingat tingkatan bangsa Indonesia untuk menuntut tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dari dunia internasional, sebagai usaha untuk mencapai perdamaian dunia, maka Sri Paduka Inggang Sinuwun Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam VIII, dan Seri Sultan Hamengku Buwono IX semufakat dengan Komite Nasional Daerah Yogyakarta, memerintahkan kepada segenap penduduk di Wilayah Yogyakarta, dan di setiap kampung/desa membentuk Laskar Rakyat sebagai pembantu Tentara Keamanan Rakyat.
- (2) Tujuan Pembentukan Lasykar Rakyat ini :
 - (a) membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada umumnya, Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.
 - (b) mempertahankan daerah kampung/desa terhadap musuh.
 - (c) menjaga keamanan kampung/desa.
 - (d) membantu segala kepentingan rakyat yang membutuhkan tenaga banyak yang teratur.
- (3) (a) Yang harus masuk menjadi anggota Laskar Rakyat ialah semua penduduk bangsa Indonesia laki-laki yang masih

kuat badanya dan belum menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat.

- (b) Dalam pembentukan laskar ini penduduk laki-laki yang berumur kurang dari 15 tahun dipisahkan dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
 - (c) Segenap kepala barisan di tiap kapanewon, kemantren pangreh praja merupakan Dewan Pimpinan Laskar Rakyat untuk merundingkan dan mengatur segala kepentingan bersama. Penewu atau mantri pangreh praja, wakil KNI dan wakil TKR turut duduk dalam dewan pimpinan itu. Pimpinan barisan dipilih oleh dan dari anggota-anggota Laskar Rakyat. Pemilihan Pimpinan Barisan harus merdeka, pangreh praja, KNI, lurah desa dan pengawai-pegawai lainnya tidak boleh turut campur dan mempengaruhi pemilihan itu.
- (4) Biaya Lasykar Rakyat dicukupkan dari kas Rukun Kampung. Rukun Desa diperbolehkan mencari jalan istimewa untuk mengumpulkan uang dan bahan-bahan, tetapi harus diingat kekuatan ekonomi rakyat.
- (5) (a) Laskar Rakyat hendaklah bersenjata dengan segala macam senjata yang dapat diadakan sendiri (termasuk juga senjata api).
- (b) Semua latihan militer diserahkan kepada anggota TKR di masing-masing daerah.
 - (c) Jikalau ada tanda mobilisasi semua anggota Lasykar Rakyat harus tunduk kepada perintah pimpinan TKR di daerahnya masing-masing.
- (6) (a) Dalam menjalankan pimpinan maka kepala barisan harus senantiasa berhubungan dengan kepala Rukun Kampung/Rukun Desa dan Pamong Praja.
- (b) Semua pegawai Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta harus aktif dalam Laskar Rakyat di kampung/desanya masing-masing.

- (c) Usaha-usaha Laskar Rakyat supaya selalu diatur hingga tidak mengganggu mata pencaharian masing-masing anggota.
- (7) Kepala Daerah Pengreh Praja dan ketua Rukun Kampung/ Rukun Desa menjadi pelindung.

Kecuali maklumat bersama antara Kesultanan, Pakualaman dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta, maka mengingat pada waktu itu sangat genting, memaksa Markas tertinggi TKR mengadakan tindakan yang cepat serta tepat, sesuai dengan kehendak zaman. Ada pun hal yang mendorong mengapa perlu dikeluarkan maklumat tersebut ialah :¹⁴⁾

- (a) Tentara Keamanan Rakyat pada waktu itu belum dapat dikatakan sempurna, terutama dalam hal persenjataan.
- (b) Jikalau kita harus melawan musuh yang serba modern dalam hal persenjataan, Laskar Rakyat pun harus ikut bertempur.
- (c) Sebagian dari kekuatan TKR yang masih terbatas itu ternyata masih diambil untuk keperluan lainnya (misalnya untuk pengangkutan, penjagaan gudang, penjagaan kantor-kantor yang penting dan lain-lain). Dengan pengurangan ini pembentukan Laskar Rakyat perlu diperluas di daerah-daerah diseluruh Jawa dan Madura.
- (d) Kemungkinan dipindahkannya anggota TKR dari suatu tempat ke tempat lain sehingga keadaan menjadi tenang dan turut bertanggung jawab atas segala perihal yang berhubungan dengan Laskar Rakyat.

Kecuali maklumat itu, oleh Markas Besar Umum TKR pada tanggal 30-10-1945 pula dikeluarkan pengumuman tentang pengangkatan anggota agung Markas Tertinggi bagian Markas Besar Umum Tentara Keamanan Rakyat yaitu : SP. Susunan Surakarta, SP. Sultan Yogyakarta SP. Mangkunegoro. dan SP. Paku Alam. ¹⁵⁾

Selain itu diangkat pula menjadi opsir penghubung yaitu GPH, Suryohamijoyo dan BPH. Bintoro masing-masing untuk Divisi Istimewa di Sala dan Yogyakarta.

Langkah-langkah TKR lambat-laun menuju ke arah kesempurnaan dan tambah hari tambah nyata dan bertambah kuat. Kekuatan TKR masih diuji dengan berbagai percobaan baik yang datang dari dalam maupun musuh yang berasal dari luar.

Dengan demikian semangat pertempuran melawan Jepang di Kotabaru dan beberapa tempat lain membuat para pemuda pejuang kita bersama rakyat memupuk rasa kesatuan dan persatuan.

CATATAN

- 1) Informasi Ki Nayono, *Himpunan Informasi Sejarah Penyerbuan Kotabaru Yogyakarta dan Peristiwa Penting di Yogyakarta Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI Th 1945*, Badan Musyawarah MUSEA Daerah Istimewa Yogyakarta (BARA-MUS – DIY), 1979, hal. 4.
- 2) Ibid.
- 3) Ibid.
- 4) Ibid., hal. 6
- 5) Ibid.,
- 6) Ibid., hal. 7
- 7) Informasi dari KRT Brotosuprodjo Wirobrajan Ng 6/60 A Yogyakarta tanggal 11 Oktober 1979.
- 8) Ibid., Pangeran Bintaro adalah adinda Sri Sultan, tokoh Barisan Bantheng/Barisan Pelopor yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Muangthay dan Ketua PWI Pusat.
- 9) Informasi KRT Brotosupardjo.
- 10) Informasi Sunarjo, *Himpunan Informasi Sejarah Penyerbuan Kotabaru*, hal. 27.
- 11) Ibid., hal 102.
- 12) Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, hal. 345.
- 13) Ibid., hal. 346.
- 14) Ibid., ha. 347
- 15) Ibid., hal. 349.

BAB IX PENUTUP

9.1 *Kesimpulan*

Setelah mengikuti uraian di muka secara keseluruhan, kiranya dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Daerah Istimewa Yogyakarta sejak zaman pra sejarah memiliki potensi penting sebagai sumber sejarah. Di daerah ini terkandung mutiara-mutara bersejarah yang perlu digali untuk mendapatkan aspirasi kehidupan dan kebesaran bangsa kita sejak dahulu kala; yang selanjutnya kita jadikan bahan pemikiran dalam rangka Pembangunan Nasional Indonesia. Telah terbukti bahwa; baik pada zaman pra sejarah, zaman tersebarnya agama Hindu, zaman kedatangan Islam dan masa-masa mengusir penjajahan, Yogyakarta selalu tampil dalam arena pecaturan sejarah bangsa kita.
- (2) Semua pihak baik kawan maupun lawan mengakui tentang eksistensi dan kebesaran Kerajaan Mataram, lebih-lebih pada waktu kerajaan ini diperintah oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia adalah raja besar Mataram yang memilih pusat pemerintahannya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti kita ketahui, penyerangan Sultan Agung ke Batavia pada 1628 dan 1629 tidak lain adalah usaha untuk membuktikan patriotisme putra Indonesia yang secara lang-

sung menolak campur tangan kekuasaan asing di Indonesia, benih-benih nasionalisme yang ada pada diri Sultan Agung direalisasikan dalam bentuk kekuatan fisik dengan menunjukkan kekuatan militernya untuk mengusir Kompeni Belanda dari bumi Indonesia. Pengertian nasionalisme makin berkembang, walaupun masih terbatas di beberapa tempat yang belum terkordinasi dengan baik, namun usaha ini ternyata mendapat dukungan oleh penguasa-penguasa di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Abad ke-18 adalah abad awal kegiatan melawan Kompeni Belanda dan abad ke-19 serta ke-20 membuktikan adanya kejadian-kejadian menentang kekuasaan Belanda. Suatu bukti bahwa usaha Sultan Agung itu adalah usaha awal tercapainya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Suatu proses yang memakan waktu cukup lama, namun perjalanan waktu itu tidak sia-sia. Tindakan Sultan Agung menunjukkan sikap preventif dalam menghadapi merajalelanya kekuasaan asing. Seandainya Sultan Agung tidak berusaha membendung arus kekuasaan Kompeni, mungkin sejarah akan menjadi lain. Seandainya arus dominasi kolonial tidak ditahan sejak semula, maka *Pax Neerlandica* akan lebih cepat terbentuk. Usaha Kompeni untuk membentuk *Pax Neerlandica* baru tercapai pada awal abad ke-20, sudah sangat dekat dengan kemerdekaan Indonesia. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyerangan terhadap Batavia itu perlu aliansi kekuatan-kekuatan fisik yang mampu memukul basis pertahanan Kompeni. Kekutan ini bukan saja berasal dari Mataram, tetapi juga berasal dari kerajaan-kerajaan sekutu yang mempunyai cita-cita sama yakni menginginkan terusirnya Kompeni dari Batavia. Aliansi ini akan membentuk kekuatan yang terkordinasi sehingga menciptakan kekuatan yang terkordinasi sehingga menciptakan kekuatan tunggal yang mampu menghadapi kekuatan Kompeni. Persatuan memang perlu, bukan saja berasal dari kekuatan Mataram, tetapi juga kekuatan kerajaan-kerajaan di luar Jawa. Perpecahan pada hakekatnya akan melemahkan persatuan suku atau bangsa.

- (3) Sikap anti penjajah dan campur tangan bangsa asing di wilayah Kerajaan Mataram yang setelah pecah sebagian menjadi Kerajaan Yogyakarta dapat dibuktikan dari sikap Sultan Hamengku Buwono II. Campur tangan asing seperti kekuasaan Kompeni Belanda maupun Inggris terhadap Sultan Sepuh sebenarnya tidak perlu terjadi karena dalam diri sultan ini sudah terdapat konsepsi bagaimana menghadapi kekuasaan asing, apa yang akan dicapainya dan bagaimana kelanjutannya. Itu semua sudah dipahami oleh Sultan sehingga seandainya Sultan secara fisik mampu menghadapi kekuatan Kompeni, maka Kompeni tidak akan menanamkan kekuasaannya dengan cepat. Dalam hal ini sultan sudah melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinannya yakni sensitif, responsif dan reaktif. Sensitif berarti bahwa sultan sudah mempunyai perasaan bahwa dominasi asing akan merajalela; oleh karena itu kekuasaan ini harus ditolak. Sejalan dengan hal ini maka Sultan harus jelas memberikan respon terhadap desakan dominasi itu. Realitas dari sikap responsif ini dinyatakan dalam reaksi-reaksinya berupa konflik, perlawanan bahkan sampai peperangan dan pembuangan atas dirinya. Perasaan anti asing dan menolak setiap campur tangan ke dalam pemerintahan kerajaan adalah bukti sikap seorang nasionalis. Kolonialisme adalah manifestasi dari kekuatan-kekuatan "perampok" politik dan ekonomi; dan oleh karena itu bagi yang tidak sadar pasti akan menjadi mangsa. Dalam menghadapi kekuatan ini, sultan mengkombinasikan kekuatan fisik dan diplomasi. Melalui cara-cara ini sultan mampu bertakhta sampai tiga kali. Kiranya ini bukan suatu hal yang biasa tetapi memang ada kekuatan kharismatis pada diri sultan. Kolonialisme menanamkan *conflict of interest* yang berbeda antara kepentingan Kompeni dan kepentingan penguasa-penguasa Jawa. Tidak disadari oleh Kompeni bahwa tindakannya itu akan menciptakan kekuatan-kekuatan penentang yang melumpuhkan kekuasaannya. Perang Diponegoro adalah bukti ketimpangan sistem kolonial yang menyeret sendi-sendi kehidupan baik penguasa maupun para pendukungnya, oleh karena itu tidak musta-

hil apabila dukungan para petani terhadap peperangan cukup positif sehingga memungkinkan peperangan meluas ke seluruh Jawa.

- (4) Kepahlawanan Sultan Agung tetap diwarisi secara turun-temurun. Hal ini dibuktikan dengan pecahnya Perang Diponegoro pada tahun 1825–1830. Perang itu pada hakekatnya merupakan perlawanan terhadap kodrat hidup manusia; bahwa setiap manusia di bawah kolong langit mempunyai hak kedudukan sama untuk menikmati kehidupan yang menekan dan merampas hak serta wewenang bangsa lain pasti akan menimbulkan suatu perlawanan baik lahir maupun batin.
- (5) Bangsa mana pun yang tidak mengingkari kodratnya yang sejalan dengan hati nuraninya, pasti ingin hidup merdeka dan menghendaki kebersamaan untuk hidup, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain di dunia ini. Apabila sifat-sifat tersebut dilanggar ataupun dirampas, maka terjadilah pembontakan. Sebagaimana telah terbukti dalam uraian di muka, yakni timbulnya pemogokan-pemogokan kaum buruh. Dengan pikiran dan perasaannya, kaum buruh pun memiliki potensi dan telah teken prestasi terhadap apa yang mereka terima; oleh karena itu mereka akan berontak apabila hal-hal yang menjadi haknya dirampas dan dilanggarnya.
- (6) Untuk melawan segala bentuk kemungkaran setiap manusia Indonesia perlu disadarkan agar memiliki pendirian teguh, iman kuat dan sikap tegas dalam menghadapi musuh. Untuk itu maka usaha yang dipelopori Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya tidak lain adalah untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang telah dibekali dengan pengetahuan yang luas dan didasari dengan ajaran agama yang kuat, tidak akan mudah tergoyahkan oleh gon-

cangan-goncangan. Muhammadiyah dengan segala usahanya telah melahirkan patriot-patriot bangsa yang tangguh untuk berjuang.

- (7) Disadari pula oleh tokoh kita Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan yang bercorak nasional merupakan alat yang ampuh untuk menghadapi dan melawan musuh; oleh karena itu, percaya pada kekuatan diri sendiri merupakan syarat mutlak untuk menuju tercapainya kemerdekaan kita. Berkat landasan yang kuat dari Ki Hajar Dewantoro dan para pendukungnya, pemerintah penjajah merasa kewalahan.
- (8) Atas rintisan pemuka Muhammadiyah dan Taman Siswa serta semua kekuatan nasional yang ada di Yogyakarta baik dari golongan politik, gerakan pemuda maupun organisasi lainnya, maka benih-benih patriotisme tumbuh bagai cendawan di musim hujan.
- (9) Pertempuran di Kotabaru melawan Fasis Jepang menyebabkan lumpuhnya kekuasaan Pemerintah Jepang dan terusir pula setiap bentuk penjajahan yang akan kembali menguasai Indonesia.

9.2 *Saran-saran*

- (1) Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material dan spiritual atau dengan kata lain, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka penyebaran hasil penulisan ini mutlak diperlukan supaya dapat dihayati oleh masyarakat.
- (2) Penggalian sumber-sumber sejarah primer perlu digalakkan guna mengungkap sikap-sikap nasionalisme, patriotisme, heroisme, dan lain-lain. Melalui cara ini akan dapat disaji-

kan bentuk-bentuk cerita sejarah yang sangat berguna bagi proses pembentukan persatuan dan pembangunan bangsa.

- (3) Pentingnya penggalian sumber primer guna melihat sumber daridalam, yakni yang berasal dari penguasa-penguasa Jawa dan para bangsawan. Hal ini perlu dilakukan karena banyak surat dan tulisan tangan dengan huruf Jawa yang ditulis sendiri oleh para pelakunya, masih tersimpan di arsip-arsip; oleh karen aitu visi seperti ini perlu digarap lebih sempurna guna mendapatkan gambaran Sejarah Indonesia yang lengkap.

DAFTAR SUMBER

A. BUKU

1. Ali R. Moh. *Perjuangan Feodal Indonesia*, Bandung/Jakarta, NV Canaco, 1963.
2. Badan Musyawarah Musea Darah Istimewa Yogyakarta (Barahmus—DIY), *Himpunan Informasi Sejarah Penyerbuan Kotabaru Yogyakarta dan Peristiwa-peristiwa Penting di Yogyakarta Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945*, Yogyakarta, 1979.
3. Barnadib, Imam, Sutari Dra, *Pengantar Sejarah Pendidikan jilid I*, cetakan II, Yayasan Penerbit FIP—IKIP, Yogyakarta, 1977.
4. Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Pelita II (1974/1975 s/d 1978/1979)* Yogyakarta, 1979.
5. Burger, D.H. *Sejarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia*, Terj. Prajudi Atmosudirdjo, Djakarta, Pradnyaparamitra, 1962.
6. Colenbrander, H. *Koloniale Geschiedenis*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1926.

7. Daendels, H.W. *Staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen*, onder he bestuur van den Gouverneur Herman Willem Daendels, Luitenant-Generaal, 1801-1811, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1814.
8. Djajadiningrat, H. *Crirische Besouwing van de Sejarah Banten*, Leiden: Jah, Enschede en Zonen, 1913.
9. Djarnawi Hadikusumo, H. *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al Afghani sampai KHA Dahlan, Persatuan*, Yogyakarta.
10. ———, *Derita Seorang Pemimpin*, Persatuan, Yogyakarta, 1979.
11. ———, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, jilid II Persatuan, Yogyakarta.
12. Delier Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* LP3ES- Jakarta, 1980.
13. Deventer, M.L., *Het Nederlandsche Gezag over Java en onderhourigheden sedert 1811*, i, The Hugue: Martinus Nijhoff, 1891.
14. Dewantoro, Hajar, Ki, *Pendidikan*, jilid I, Cetakan kedua, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
15. Djindar Tamimy, H.M. Djarnawi Hadikusumo, *Penjelasan Muhammadiyah*, Persatuan, Yogyakarta, 1972.
16. Djoko Utomo, *Pemogokan Buruh Tani di Yogyakarta Tahun 1882*, Naskah Seminar Sejarah Nasional III, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1981.
17. Djumhur, I, Donosuparto, Drs. H, *Sejarah Pendidikan*, CV. Ilmu Bandung, 1976.

18. Fruin Meen, W., *Geschiedenis van Java*, II, Weltevrededen: Volklectuur, 1920.
19. —————, "Warom Batavia en Mataram van 1629-1646 geen vrede gesluten", T.B.C., 1949.
20. Graaf, H.J., *de Geschiedenis van Indonsie*, 'is Gravenhage; W. van Hoeve, 1949.
21. Haan, F.de., Priangan, *De Preanger Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*, zBatavia, G. Kolft & Co., 1911.
22. ————— Oud Batavia, Bandung A.C., N & Co., 1935.
23. Heeres, J.E., *Dagh Register*, 1624/ 629, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896.
24. Junus Anis, *Riwayat Hidup Nyai A Dahlan*, Jajasan Mertju Suar, Jakarta, 1977.
25. Jonge, J.K.J., *de Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost Indie*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1862-1875.
26. Kartodirdjo, *Sartono dkk., Sejarah Nasional Indonesia, V, Balai Pustaka*, Jakarta, 1977.
27. —————, Lembaran Sejarah Beberapa fatsal dari Hs-toriografi Indonesia, No.2, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1968.
28. —————, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
29. Mustafa Kamal Pasha, Drs., dkk., *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Persatuan, Yogyakarta, 1976.
30. Norman, H.D. Levysohn, *De Britische Heerschappij over Java en Onderhoorigheden 1811-1816*, The Hugue: Gebroeders Balivante, 1857.

31. Olthaf, W.L., *Poenika Serat Babad Tanah Djawi, wiwi Saking Nabi Adam doemoegi ing taown 1647*, 's Gravenhage Bandung, Martinus Nijhoff, 1941.
32. "Overzicht van de voornamste gebeurtenissen in het Djocjakartasche Rijk, Sedert deszelfs stichting 1755 ton aan het einde van het engelsche tussen bestuur in 1815," TNI, 3, 1844, hal. 122-157, 262-288; 4, 1844, hal. 25-49.
33. Pluvier, J.M., *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia*, 1930-1942.
34. Poensen, C., "Amangkubuwana, II, Ngajogjakarta's tweende Sultan", BKR, VIII, 1901, hal. 223.
35. ———, Mangkubumi, Ngajogjakarta's eerste Sultan", *Verhandelingen*, LVIII, 1901 hal. 73-346.
36. Pringgodigdo, AK, SH, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
37. Raffles, TH.S., *History of Java*, I, London, Block Porbuy and Allen, 1817.
38. Rouffer G.P., "Vorstenlanden", *Adeatrechtbundel*, XXXIV, Ierie D, 81, 1936, hal. 233378.
39. Ricklefs, M.C., *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi*, Lonen Oxford University Press, 1972.
40. Sagimun, M.D., *Pahlawan Diponegoro Berjuang, Bara Api Kemerdekaan Nan Tak Kunjung Padam*, Jogjakarta, Departemen PP & K. 1960.
41. Schrieke, B, Indonesian Sociological Studies, I, Selected Writings, Bandung, Sumur Bandung, 1960, II, *Ruler an and Realm in eaely Java*, The Hague and Bandung, NV. Mij. Vorkink-van Hoeve, 1957.

42. Soekanto, R.M., *Dari Djakarta ke Djajakarta*, Djakarta Soeroengan, 1954.
53. ———, *Sekitar Jogjakarta 1755-1825*, Djakarta, Mahabarata, 1952.
44. Soemarsaid Moertono, *State and state Graff in Old Java*, Ithaca Cornell University Press, 1963.
45. Suratman, *Masalah Kelahiran Taman Siswa*, Pusara, Jilid 25, no. 1-2, 1964.
46. Suratmin, Drs., *Nyai Ahmad Dahlan*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Jakarta, 1977,
47. ———, Dr. Sutomo (Pahlawan Nasional), Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1976.
48. ———, Raden Mas Suryopranoto, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1978.
49. ———, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1980/1981.
50. Sularto, B., *Monografi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
51. Sutarya Mangunwilaga, R. M., *Babad Pangeran Diponegoro*, Jogjakarta, 1903.
52. Sutrisno Kutoyo, *Kiai Haji Ahmad Dahlan*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Jakarta, 1978.
53. ———, Mardanus Sofwan, Drs., *K.H. Ahmad Dahlan Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Angkasa, Bandung, AA.

54. Suwarno, P.J., dkk., *Sejarah Indonesia dalam Monografi*, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1980.
55. *Taman Siswa 30 Tahun 1922-1952*, Panitia Buku Peringatan Taman Siswa 30 tahun, Jogjakarta.
56. Tashadi, Drs., dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Jakarta 1979/1980.
57. Tashadi, Drs., Suratmin, Drs., *Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 1977/1978.
58. Tauchid, Mohammad, *Ki Hajar Dewantoro, Pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional*, Majelis Hukum Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta, 1978.
59. Tri, Murti, Ek. Sk, Dra., *Hubungan Pergerakan Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.
60. Valentij, F, *Oud en Nieuw Oost Indien III*, Amsterdam Kestieen Zoon, 1862.
61. Veth, P.J., *Java Geographisch, Ethnologisch Historisch*, Batavia Haarlem, De Erven F. Bohn. G. Kolff & Co., 1967.
62. Vlekke, B.H.M., *Nusantara A History of Indonesia*; Buseelles, A. Manteau S.A., 1961.
63. *Revolusi Djogja dan Sekitarnya*, Petikan Sedjarah 1 Maret 1961, No. 2., Tahun II.
64. K.R. *Koran Pejoang Pertama Sejak Proklamasi*, Rabu, 26 September 1979.
65. *Perjuangan Rakyat*, KR 21 September 1979 hal. 1.
66. R.V. Soedarsono, *Revolusi Djogjakarta dan sekitarnya*, Penelitian Sejarah Djuni 1961., No. 3 (No. 2 Tahun ke-I).

B. INFORMAN

No.	N a m a	A l a m a t
1.	KPH Mr. S. Purwokusumo	Jl. Cik Di Tiro 17-A Yogyakarta.
2.	Letkol Sudirdjo	Suryoputran No. I/17 Yogyakarta
3.	R. Sutiwo Prawirowihardjo	Jl. Soka No. 9 Yogyakarta.
4.	Kolonel (Purn.) marsudi	Jl. Cikini Raya No.6 Jakarta.
5.	Sudomo, BA	Jl. Patuk No. 29 Yogyakarta.
6.	Sontani	Godear Yogyakarta
7.	Ki Nayono	Nyutran Mg. II/229 Yogyakarta.
8.	Moh. Asrun	Jl. Simanjuntak No.40 Yogyakarta.
9.	Sunarjo	Yogyakarta
10.	KRT. Brotosuprodjo	Wirobrajan Ng. 6/80-A Yogyakarta.

Lampiran 1

Piagam Kedudukan S.P. Sultan

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

INGKANG SINUWUN KANGJENG SULTAN HAMENGKU BUWONO, SENOPATI ING NGALOGO, ABDURACHMAN SAJIDIN PANOTOGOMO, KALIFATULLAH INKGANG KAPING IX ING NGAYOGYAKARTA HADININGRAT PADA KEDUDUKANNYA. DENGAN KEPERCAYAAN, BAHWA SERI PADUKA KANGJENG SULTAN AKAN MENCURAHKAN SEGALA FIKIRAN, TENAGA, JIWA DAN RAGA UNTUK KESELAMATAN DAERAH YOGYAKARTA SEBAGAI BAGIAN DARI PADA REPUBLIK INDONESIA.

Jakarta, 19 Agustus 1945.

Presiden Republik Indonesia

ttd.

(Ir. SOEKARNO)

Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII.

Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENETAPKAN :

KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM INKGANG KAPING VIII PADA KEDUDUKANNYA, DENGAN KEPERCAYAAN, BAHWA SERI PADUKA KANGJENG GUSTI AKAN MENCURAHKAN SEGALA PIKIRAN, TENAGA, JIWA DAN RAGA UNTUK KESELAMATAN DAERAH PAKU ALAMAN SEBAGAI BAGIAN DARI PADA REPUBLIK INDONESIA.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

ttd.

Ir. SOEKARNO

Lampiran 2

A M A N A T
SRI PADUKA INGGANG SINUWUN KANGJENG
SULTAN

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan :

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuatan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini beradada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat,
 28 Puasa Ehe 1876
 atau 5 - 9 - 1945

HAMENGKU BUWONO IX

Lampiran 4

A M A N A T
SRI PADUKA KANGJENG GUSTI PANGERAN
ADIPATI ARIO PAKU ALAM

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan :

1. Bahwa Negeri Paku Alaman, yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan Pemerintah dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe
 1876 atau 5 - 9 - 1945

PAKU ALAM VIII

Lampiran 5

MAKLUMAT No. 2

KASULTANAN YOGYAKARTA DAN PAKU ALAMAN DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA- TENTANG KETENTERAMAN DAN KEAMANAN UMUM

1. Berhubung dengan tengingnya suasana dan memuncaknya semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk menuntut tetap tegaknya Negara Republik Indonesia, maka Kami berdua Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangjeng Gusti Adipati Arya Paku Alam VIII, sebagai Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, memerintahkan kepada segenap penduduk dari segala bangsa, golongan dan lapisan, supaya turut menjaga ketenteraman dan keamanan umum.
2. Kami berdua tidak menjamin keselamatan rang-orang:
 - a. yang baikpun dengan langsung atau tidak langsung, maupun dengan sembunyi atau terang-terangan, mengadakan atau mempunyai hubungan dengan pihak Nica.
 - b. yang memuja, mendo'akan, berbuat atau bekerja, dengan cara bagaimanapun juga, untuk kepentingan Nica.
3. Selaras dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2-10-1945 yang berlaku dalam daerah Kami berdua, hanya macam uang yang hingga sekarang dianggap sah: uang Nica tidak berlaku.
4. Segenap penduduk supaya memberi bantuan sepenuhnya pada usaha Tentara Keamanan Rakyat, Polisi, Pangreh Praja dan Barisan Penjagaan Umum untuk menegakkan ketenteraman serta keamanan umum dan untuk memberantas hal-hal yang dapat mengganggu atau mengacaukannya.

5. Maklumat ini berlaku semenjak diumumkan.

Yogyakarta, 6 Dulkaidah Ehe 1876
atau 12-10-1945

HAMENGKU BUWONO IX
PAKU ALAM VIII

Lampiran 6

MAKLUMAT NO. 5
NEGERI KASULTANAN YOGYAKARTA DAN
PRAJA PAKU ALAMAN DAERAH ISTIMEWA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN
LASYKAR RAKYAT SEBAGAI PEMBANTU
TENTARA KEAMANAN RAKYAT

1. Mengingat tingkatan bangsa Indonesia untuk menuntut tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dari dunia internasional, sebagai usaha untuk mencapai perdamaian dunia, maka Kami berdia, Sero ¼adila Omglamg Somiwim Lamgd--keng Gisto Pangeran Adipati Arja Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Komite Nasional Daerah Yogyakarta, memerintahkan kepada segenap penduduk bangsa Indonesia dalam daerah kami berdua supaya dengan segera ditiap kampung/desa membentuk Lasjkar Rakyat sebagai Pembantu Tentara Keamanan Rakyat.
2. Maksud pembentukan Laskar Rakyat ini :
 - a. membantu mempertahankan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada umumnya, Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.
 - b. mempertahankan daerah kampung/desa terhadap musuh.
 - c. menjaga keamanan daerah kampung/desa.
 - d. membantu kepada segala kepentingan rakyat yang membutuhkan tenaga banyak yang teratur.
3. a. Yang harus masuk menjadi Laskar Rakyat ialah semua penduduk bangsa Indonesia laki-laki yang masih kuat

badannya dan belum menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat.

- b. Dalam pembentukan Laskar Rakyat ialah semua penduduk lakilaki yang berumur kurang dari 15 tahun dipisahkan dari penduduk yang berumur 15 tahun keatas.
 - c. Segenap Kepala Barisan Laskar Rakyat ditiap Kepanewon, Kemerdekaan Panreh Praja merupakan Dewan Pimpinan Laskar Rakyat untuk merundingkan dan mengatur segala kepentingan bersama. Penewu atau Menteri Pengreh Praja, Wakil K.N.I. dan wakil T.K.R. turut duduk dalam Dewan Pimpinan itu. Pemimpin Barisan dipilih oleh dan dari antara anggota-anggota Laskar Rakyat, Pemimpin-Pemimpin Barisan harus merekeka : Pangreh Praja, KNI. Lurah Desa dan pegawai-pegarai lainnya tidak boleh turut campur dan mempengaruhi pemilihan itu.
4. Biaya Laskar Rakyat dicukupkan dari Kas Rukun Kampung/ Rukun Desa. Untuk keperluan Rukun Kampung/ Rukun Desa diperbolehkan mencari jalan istimewa untuk mengumpulkan uang dan bahan-bahan, akan tetapi senantiasa dengan mengingat kekuatan ekonomi rakyat.
 5.
 - a. Laskar Rakyat hendaklah bersenjata dengan segala macam senjata yang dapat diadakan sendiri (termasuk juga senjata api).
 - b. Semua latihan militer diserahkan kepada anggota TKR dimasing-masing daerah.
 - c. Jikalau ada tanda mobilisasi semua anggota Laskar Rakyat harus tunduk kepada perintah pimpinan T.K.R. didaerahnya masing-masing.
 6.
 - a. Dalam menjalankan pimpinan maka Kepala Barisan harus senantiasa berhubungan dengan Kepala Rukun Kampung/Rukum Desa dan Pangreh Praja.

- b. Semua pegawai Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta harus aktif dalam Laskar Rakyat di Kampung/Desanya masing-masing.
 - c. Usaha-usaha Laskar Rakyat supaya selalu diatur hingga tidak mengganggu mata pencaharian masing-masing anggota.
- 7. Kepala Daerah Pareh Praja dan Kedua Rukun Kampung/Rukun Desa menjadi Pelindung dan turut bertanggung jawab atas segala perhal berhubungan dengan Laskar Rakyat.
 - 8. Instruksi-instruksi lain-lainnya tentang pembentukan Laskar Rakyat ini akan segera menyusul.
 - 9. Maklumat ini berlaku semenjak diumumkan,

Yogyakarta, 20 Dulkaidah EHe 1876
atau 26 - 10 - 1945

HAMENGKUBUWONO IX
PAKU ALAM VIII
MOH. SALEH

Lampiran 7**DAFTAR NAMA DAN TEMPAT PEMAKAMAN PARA
PAHLAWAN PENYERBUAN KOTA BARU YOGYAKARTA**

No. Urut	Nama	Tempat pemakaman	No. Makam
1.	Sdra. Trimo	TP. Kasumanegara,	
		Yogya	A 80
2.	Sdr. Djoewadi	"	A 82
3.	Sdr. Soeparmo	"	A83.
4.	Sdr. Soenarjo	"	A84
5.	Sdr. Soeroto	"	A 90
6.	Sdr. Moch. Sareh	"	A 110
7.	Sdr. Djasman	"	A 111
8.	A. Djohar Noehadi	"	A 112
9.	Sdr. Bagong	"	A 113
10.	Sdr. Sabirin	"	A 114
11.	Sdr. Amat Djazoem	"	A 115
12.	Sdr. Oemoem	"	A 116
13.	Sdr. Atmosoekarto	"	A 117
14.	Sdr. Soedjijono	"	A 118
15.	Sdr. I Dewa Nyoman Oka	"	A 119
16.	Sdr. Sarwoko	"	A 85
17.	Sdr. Soemarjo	"	A 84
18.	Sdr. Faridan M. Noto	Makam Keluarga Glogah Yogyakarta.	
19.	Sdr. Abubakar Alica	Makam seb. Barat Majis Agung Yoyakarta	
20.	Sdr. Djirhas	"	
21.	Sdr. Muh. Amrdani	"	

Keterangan :**Bahan diperoleh dari :**

**HIMPUNAN INFORMASI SEJARAH PENYERBUAN KOTA—
BARU YOGYAKARTA DAN PERISTIWA PENTING DI YOG—
YAKARTA SEKITAR PROKLAMASI RI TH. 1945**

64
53

Perpustakaan
Jenderal